



RANCANGAN AWAL RPJMD KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-2
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026	I-2
1.1.2 Dampak Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> (Covid-19) Terhadap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Batam 2021-202.....	I-6
1.2 Landasan Hukum.....	I-15
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-18
1.4 Maksud dan Tujuan Rancangan Awal RPJMD.....	I-23
1.5 Sistematika Penulisan	I-23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-14
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-19
2.1.4 Demografi.....	II-26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial	II-33
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-48
2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga	II-65
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-66
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Layanan Wajib	II-66
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-226
2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang	II-245

2.4	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-258
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-258
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-260
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-264
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-264
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-5
3.1.2	Neraca Daerah	III-23
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-31
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-31
3.2.2	Analisis Pembiayaan.....	III-32
3.3	Kerangka Pendanaan.....	III-36
3.3.1	Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	III-36
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-46
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	IV-7
4.3	Isu Strategis.....	IV-41
4.3.1	Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19.....	IV-43
4.3.2	Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.....	IV-47
4.3.3	Reformasi Birokrasi	IV-48
4.3.4	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional.....	IV-50
4.3.5	Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	IV-51
4.3.6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	IV-52
4.3.7	Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.....	IV-54

4.3.8	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.....	IV-55
4.3.9	Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia).....	IV-56
4.3.10	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-59
4.4	Abstraksi Isu-Isu Strategis	IV-60
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-2
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-5
5.4	Hubungan Antara Isu Strategis dengan Isu.....	V-20
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-18
6.3	Program Pembangunan Daerah	VI-19
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-5
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-2
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026..I-4
Gambar 1.2	Jumlah Kasus Pandemi Covid-19 Tingkat Global, Nasional, Provinsi dan Kota Batam.....I-7
Gambar 1.3	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Resesi Ekonomi GlobalI-8
Gambar 1.4	Kebijakan Stimulus Ekonomi Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19.....I-10
Gambar 1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam 2018-2020I-11
Gambar 1.6	Penurunan Wisatawan Mancanegara Kota Batam Januari-April 2020.....I-12
Gambar 1.7	Besaran Refocusing Realokasi APBD Kota Batam Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19I-14
Gambar 1.8	Hubungan Antar Dokumen PerencanaanI-20
Gambar 1.9	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial.....I-22
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kota Batam.....II-2
Gambar 2.2	Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam (%).....II-6
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Batam.....II-7
Gambar 2.4	Peta Morfologi Kota BatamII-8
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kota Batam.....II-11
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kota Batam 2020-2040.....II-12
Gambar 2.7	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah.....II-15
Gambar 2.8	Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Batam.....II-17
Gambar 2.9	Peta Pola Ruang Wilayah Kota Batam.....II-19
Gambar 2.10	Potensi Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim Sektor Prioritas (Rp Trilyun)II-24
Gambar 2.11	Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2019II-28
Gambar 2.12	Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasiona Tahun 2016-2020.....II-38
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-2020.....II-43

Gambar 2.14	Perbandingan IPM Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-50
Gambar 2.15	Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	II-51
Gambar 2.16	Angka Melek Huruf Kota Batam 2015-2019	II-55
Gambar 2.17	Angka Harapan Hidup Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-56
Gambar 2.18	Angka Kematian Ibu Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-57
Gambar 2.19	Angka Kematian Bayi Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-58
Gambar 2.20	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-59
Gambar 2.21	Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-60
Gambar 2.22	Prevalensi TBC Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-61
Gambar 2.23	Angkatan Kerja Kota Batam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019.....	II-63
Gambar 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019	II-64
Gambar 2.25	Indikator Makro Kinerja Seni dan Budaya Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-65
Gambar 2.26	Kelebihan dan Kekurangan Guru Jenjang SD/MI dan SMP/MTs.....	II-73
Gambar 2.27	Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang Versi Publikasi Kemendikbud Tahun 2017-2019.....	II-75
Gambar 2.28	Kondisi Ruang Kelas Jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs Tahun 2017-2019.....	II-78
Gambar 2.29	Akreditasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019	II-80
Gambar 2.30	Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Terakreditasi Tahun 2017-2019.....	II-82
Gambar 2.31	Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan Tahun 2018.....	II-84

Gambar 2.32	Distribusi Sepuluh Penyakit Terbesar Kunjungan Pasien Puskesmas Kota Batam Tahun 2018.....	II-92
Gambar 2.33	Kasus Pneumonia pada Balita Per Kecamatan Tahun 2019.....	II-93
Gambar 2.34	Distribusi Proporsi Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Umur	II-94
Gambar 2.35	Distribusi Jumlah Kematian AIDS dan CFR AIDS 2010-2018.....	II-95
Gambar 2.36	<i>Incident Rate</i> DBD Kota Batam Tahun 2014-2019.....	II-96
Gambar 2.37	<i>Case Fatality Rate</i> DBD Kota Batam.....	II-96
Gambar 2.38	Kejadian DBD Per Bulan.....	II-97
Gambar 2.39	Kasus dan Penanganan Diare Tahun 2019.....	II-98
Gambar 2.40	Penderita Hipertensi Kota Batam Tahun 2019.....	II-99
Gambar 2.41	Kejadian Obesitas Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-100
Gambar 2.42	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019.....	II-101
Gambar 2.43	Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4.....	II-102
Gambar 2.44	Persalinan Oleh Nakes Berkompetensi Kebidanan Tahun 2018.....	II-103
Gambar 2.45	Cakupan Pelayanan Nifas Per Puskesmas Tahun 2019.....	II-105
Gambar 2.46	Pemberian Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Tahun 2019.....	II-106
Gambar 2.47	Persentase Komplikasi Obstetri yang Ditangani.....	II-107
Gambar 2.48	Komplikasi Obstetri yang Tertangani Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018.....	II-108
Gambar 2.49	Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup dan Proporsi.....	II-109
Gambar 2.50	Proporsi Berat Badan Lahir Rendah Tahun 2019.....	II-110
Gambar 2.51	Cakupan ASI Eksklusif Per Kecamatan Tahun 2019.....	II-111
Gambar 2.52	Pelayanan Kesehatan Bayi Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018.....	II-112
Gambar 2.53	Distribusi Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Tahun 2018.....	II-113

Gambar 2.54	Proporsi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2018...II-114
Gambar 2.55	Jenis Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahun 2018.....II-115
Gambar 2.56	Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Tahun 2018.....II-116
Gambar 2.57	Cakupan Rawat Jalan Rumah Sakit Tahun 2018.....II-116
Gambar 2.58	Cakupan Rawat Inap Puskesmas Tahun 2018.....II-117
Gambar 2.59	Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit Tahun 2018.....II-118
Gambar 2.60	Cakupan Rumah Tangga PHBS Tahun 2018.....II-119
Gambar 2.61	Proporsi Pembinaan Rumah Sehat dan Distribusi Rumah Sehat Tahun 2018.....II-121
Gambar 2.62	Proporsi Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak.....II-122
Gambar 2.63	Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Tahun 2018.....II-123
Gambar 2.64	Proporsi Desa STBM Tahun 2018.....II-124
Gambar 2.65	Pembinaan Tempat Pengelola Makanan Tahun 2018.....II-125
Gambar 2.66	Distribusi TPM yang Dibina Tahun 2018.....II-126
Gambar 2.67	Distribusi Sarana Pendidikan Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018.....II-127
Gambar 2.68	Distribusi Sarana Kesehatan Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018.....II-128
Gambar 2.69	Distribusi Sarana Hotel Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018.....II-129
Gambar 2.70	Infografis Kondisi Air Bersih Kota Batam.....II-145
Gambar 2.71	Peta Koridor Bus Trans Batam, Rute Bus Sekolah Batam, Trayek Angkutan Laut Perintis dan Rencana Trayek Angkutan Feeder Bus Trans BatamII-194
Gambar 2.72	Piramida Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....II-204
Gambar 2.73	<i>The House Model Small Enterprise</i>II-206
Gambar 2.74	Model Bangunan Olahraga Nasional.....II-216
Gambar 2.75	Peta Wisata Kota Batam.....II-232

Gambar 2.76 Rasio Pengeluaran Non Makanan Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-260
Gambar 3.1 Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-7
Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Kota Batam.....	IV-41
Gambar 4.2 Pembobotan Isu Strategis Kota Batam Tahun 2020-2024	IV-42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD.....	I-4
Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam.....	II-5
Tabel 2.2	Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng.....	II-7
Tabel 2.3	Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam.....	II-10
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam.....	II-13
Tabel 2.5	Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam.....	II-14
Tabel 2.6	Jenis, Resiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus	II-20
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam.....	II-26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2015-2019.....	II-29
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Kota Batam Menurut Agama Tahun 2015-2019.....	II-30
Tabel 2.10	Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015-2019.....	II-30
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019.....	II-31
Tabel 2.12	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (1).....	II-31
Tabel 2.13	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (2).....	II-32
Tabel 2.14	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (3).....	II-32
Tabel 2.15	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha.....	II-34
Tabel 2.16	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha	II-35
Tabel 2.17	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha.....	II-39

Tabel 2.18	Laju Inflasi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-41
Tabel 2.19	PDRB Per Kapita Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-42
Tabel 2.20	Garis Kemiskinan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	II-44
Tabel 2.21	Rasio Gini Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-46
Tabel 2.22	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-47
Tabel 2.23	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II-48
Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.25	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	II-53
Tabel 2.26	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	II-54
Tabel 2.27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-64
Tabel 2.28	Indikator Makro di Bidang Olah Raga Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-66
Tabel 2.29	Kinerja Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Dan SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-67
Tabel 2.30	Kinerja Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan PAUD Tahun 2015-2019.....	II-69
Tabel 2.31	Kinerja Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, dan PAUD Tahun 2015-2019.....	II-70
Tabel 2.32	Kinerja Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-71

Tabel 2.33	Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-72
Tabel 2.34	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019.....	II-72
Tabel 2.35	Rasio Rombel Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019.....	II-74
Tabel 2.36	Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-74
Tabel 2.37	Kinerja Indikator Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-76
Tabel 2.38	Kinerja Indikator Bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Baik Tahun 2015-2019.....	II-77
Tabel 2.39	Kinerja Indikator Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Memiliki Kondisi Sarpras Baik Tahun 2015-2019.....	II-79
Tabel 2.40	Kinerja Indikator Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2015-2019.....	II-81
Tabel 2.41	Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2019.....	II-86
Tabel 2.42	Realisasi Indikator Kinerja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019.....	II-87
Tabel 2.43	Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019 Dan 2024.....	II-88
Tabel 2.44	Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2019.....	II-89
Tabel 2.45	Target Rasio Tenaga Kesehatan dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan Tahun 2019.....	II-91
Tabel 2.46	Realisasi Indikator Kinerja Bina Marga Tahun 2015-2019.....	II-133
Tabel 2.47	Lokasi Genangan di Kota Batam.....	II-135

Tabel 2.48	Realisasi Indikator Kinerja Sumber Daya Air Tahun 2015-2019	II-137
Tabel 2.49	Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Mainland dan Hinterland Kota Batam Tahun 2019.....	II-139
Tabel 2.50	Sambungan Rumah Air Bersih Kota Batam Tahun 2019.....	II-143
Tabel 2.51	Indikator Cipta Karya Tahun 2016-2019.....	II-144
Tabel 2.52	Indikator Kinerja Tata Ruang Tahun 2017-2019.....	II-148
Tabel 2.53	Rekapitulasi Pengawasan Bangunan dan Menara Tahun 2019.....	II-149
Tabel 2.54	Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019.....	II-152
Tabel 2.55	Jumlah Rusun di Kota Batam s/d Tahun 2019.....	II-153
Tabel 2.56	Data Hunian Kota Batam.....	II-155
Tabel 2.57	Kebutuhan Hunian di Kota Batam.....	II-155
Tabel 2.58	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam.....	II-157
Tabel 2.59	Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam Hingga Tahun 2019.....	II-158
Tabel 2.60	Taman Aktif Kota Batam.....	II-159
Tabel 2.61	Ruang Terbuka Hijau Kota Batam.....	II-161
Tabel 2.62	Realisasi Kinerja Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2019.....	II-166
Tabel 2.63	Realisasi Kinerja Indikator Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015-2019	II-168
Tabel 2.64	Realisasi Kinerja Indikator Pemadan kebakaran Tahun 2015-2019	II-170
Tabel 2.65	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019	II-172
Tabel 2.66	Realisasi Kinerja Indikator Urusan Sosial Tahun 2015-2019.....	II-173
Tabel 2.67	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam.....	II-174

Tabel 2.68	Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.....	II-180
Tabel 2.69	Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019.....	II-182
Tabel 2.70	Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019.....	II-184
Tabel 2.71	Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019..	II-186
Tabel 2.72	Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	II-189
Tabel 2.73	Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2015-2019	II-191
Tabel 2.74	Jumlah Penumpang Trans Batam Tahun 2012-2019.....	II-192
Tabel 2.75	Rencana Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (Feeder)....	II-193
Tabel 2.76	Rasio Ijin Trayek di Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-195
Tabel 2.77	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-196
Tabel 2.78	Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019.....	II-198
Tabel 2.79	Realisasi Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019	II-199
Tabel 2.80	Kondisi Koperasi di Kota Batam Hingga Tahun 2019.....	II-201
Tabel 2.81	Realisasi Kinerja Indikator Urusan Koperasi Dan UKM Tahun 2015-2019.....	II-203
Tabel 2.82	Realisasi Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2019.....	II-209
Tabel 2.83	Realisasi Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2019	II-214
Tabel 2.84	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019...	II-219

Tabel 2.85	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2019.....	II-222
Tabel 2.86	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019.....	II-223
Tabel 2.87	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019.....	II-224
Tabel 2.88	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2015-2019	II-226
Tabel 2.89	Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-227
Tabel 2.90	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam.....	II-228
Tabel 2.91	Indikator Urusan Pariwisata.....	II-230
Tabel 2.92	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2019	II-235
Tabel 2.93	Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Batam Tahun 2019	II-236
Tabel 2.94	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2015-2019	II-237
Tabel 2.95	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019.....	II-239
Tabel 2.96	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019.....	II-240
Tabel 2.97	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Tahun 2015-2019.....	II-242
Tabel 2.98	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019.....	II-242
Tabel 2.99	Jumlah IKM di Kota Batam Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019.....	II-243
Tabel 2.100	Jumlah IKM di Kota Batam Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019.....	II-244

Tabel 2.101	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2019.....	II-247
Tabel 2.102	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Litbang Tahun 2015-2019....	II-249
Tabel 2.103	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2019.....	II-249
Tabel 2.104	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019.....	II-253
Tabel 2.105	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019.....	II-254
Tabel 2.106	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015-2019.....	II-256
Tabel 2.107	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2015-2019	II-257
Tabel 2.108	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Batam Tahun 2015-2019	II-259
Tabel 2.109	Bank Umum Pemerintah	II-261
Tabel 2.110	BPR	II-261
Tabel 2.111	Jumlah Restoran di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019	II-262
Tabel 2.112	Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	II-263
Tabel 2.113	Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi Kota Batam Tahun 2015-2019	II-264
Tabel 2.114	Kualitas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-265
Tabel 2.115	Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2015-2019.....	II-266
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-6
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-6

Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-12
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-14
Tabel 3.5	Kinerja Belanja Daerah Kota Batam Selama Tahun 2017-2019...	III-16
Tabel 3.6	Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2017-2019.....	III-17
Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2017 - 2019.....	III-18
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran 2017 - 2019.....	III-20
Tabel 3.9	Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2015-2019 dan Rata-rata Pertumbuhannya.....	III-24
Tabel 3.10	Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Batam Tahun 2015-2019.....	III-28
Tabel 3.11	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2019.....	III-32
Tabel 3.12	Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Batam Tahun 2017-2019	III-33
Tabel 3.13	Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Batam Tahun 2017-2019.....	III-34
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.....	III-38
Tabel 3.15	Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2017-2019.....	III-41
Tabel 3.16	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2026.....	III-44

Tabel 3.17	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026	III-47
Tabel 3.18	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.....	III-49
Tabel 4.1	Permasalahan Makro Daerah.....	IV-6
Tabel 4.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah....	IV-9
Tabel 4.3	Abstraksi Isu-isu Strategis.....	IV-61
Tabel 5.1	Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Kota Batam Tahun 2021-2026	V-13
Tabel 5.2	Hubungan Isu Strategis Terkait Permasalahan Daerah Maupun Isu Regional/Nasional/Internasional dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026.....	V-20
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026	VI-6
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	VI-10
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-18
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah.....	VI-20
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026	VII-3
Tabel 7.2	Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batam Tahun 2021-2026.....	VII-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2021-2026	VIII-6
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.....	VIII-6

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa atas selesainya penulisan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026. Dokumen ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan jangka menengah yang bertumpu pada pendekatan saintifik untuk menghasilkan isu-isu strategis, yang kemudian menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026.

Penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Batam yang dimulai awal tahun 2020 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode–periode sebelumnya, dimana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Saat ini resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008–2009, pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada angka minus 3,0 persen, 195 juta orang kehilangan pekerjaan dan 420-580 juta orang menjadi miskin.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan berada pada minus 0,4–2,3 persen, tingkat kemiskinan naik 9,7–10,2 persen dan pengangguran terbuka naik 7,8–8,5 persen serta kunjungan wisatawan mancanegara berada pada minus 3 juta orang (3,6-4 juta US\$). Perlambatan ekonomi global dan nasional tersebut tentu berdampak sistemik terhadap kondisi pembangunan di Kota Batam, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 5,92 persen, yang merupakan nilai tertinggi dari capaian selama tiga tahun terakhir, dengan adanya pandemi Covid-19 dipastikan akan mengoreksi secara signifikan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan tahun 2021 yang sebesar 5,07 persen menjadi -1,35 persen di tahun 2020 dan 3,71 persen di tahun 2021.

Hingga bulan April tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam mencapai 1.133 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 97,40 persen dibandingkan kunjungan bulan sebelumnya. Sementara itu pada bulan yang sama juga terjadi penurunan ekspor. Nilai ekspor Kota Batam April 2020 mencapai US\$687,13 juta atau turun sebesar 14,12 persen dibanding ekspor Maret 2020. Kemudian dari sektor ketenagakerjaan, per April 2020 terdapat sedikitnya 1.939 orang pekerja dirumahkan sementara waktu dan 3.411 orang pekerja lainnya cuti tidak dibayar atau tanpa digaji. Untuk pekerja yang mengalami PHK atau diberhentikan karena tidak lagi beroperasi akibat dampak Covid-19 ini sejumlah 118 orang.

Dari sisi penerimaan pemerintah Kota Batam, pada tahun 2020 penurunan pendapatan daerah diperkirakan minus 7,29 persen, sedangkan penurunan PAD sebesar 10,84 persen, kemudian penurunan pajak daerah 10,65 persen dan penurunan retribusi daerah diperkirakan 6,74 persen. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2024.

Namun demikian, meskipun sedang dihadapkan pada keadaan yang sulit diprediksi dan penuh dengan ketidakpastian, segenap masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan Kota Batam perlu tetap optimis dalam menatap pembangunan periode 2021-2024. Pandemi Covid-19 perlu dipandang sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Business as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Dukungan dan peran serta masyarakat serta seluruh *stakeholder* di Kota Batam sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari pandemi Covid-19 dan mewujudkan tujuan pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026.

Akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga selesainya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini.

**Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam**

Wan Darussalam

DAFTAR SINGKATAN

APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
API	= Adaptasi Perubahan Iklim
BAPPEDA	= Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BP Batam	= Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Covid-19	= Corona Virus Disease 2019
DBD	= Demam Berdarah <i>Dengue</i>
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IKU	= Indikator Kinerja Utama
IKK	= Indikator Kinerja Kunci
KD	= Kepala Daerah
KLB	= Kejadian Luar Biasa
KLHS RPJMD	= Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PDB	= Produk Domestik Bruto
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Permendagri	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	= Peraturan Presiden
Pilkada	= Pemilihan Kepala Daerah
PUPR	= Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAPBD	= Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RAPBN	= Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
RDTR	= Rencana Detil Tata Ruang
Renja PD	= Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renja K/L	= Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Renstra PD	= Rencana Strategis Perangkat Daerah
Restra K/L	= Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKP	= Rencana Kerja Pemerintah
RPJMD	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW	= Rencana Tata Ruang dan Wilayah
SDA	= Sumber Daya Air
SDG'S	= <i>Sustainable Development Goals</i>
SIPD	= Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SPM	= Standar Pelayanan Minimum
THIS	= Tematik Holistik Integratif Spasial
UU 1945	= Undang - Undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2021-2026

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Dwiputri et al, 2019). Dalam perspektif pembangunan daerah, Kota Batam yang berbentuk kepulauan berada di jalur pelayaran internasional dan terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis sebagai daerah otonomi sekaligus sebagai kawasan berikat, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Batam memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Batam, dengan memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kota Batam, yang pada akhirnya Kota Batam dapat berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2020 yang mana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2024. Sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2021-2026.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23/2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 86/2017, berdasarkan prosesnya RPJMD Kota Batam disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Lebih lanjut, sesuai amanah RPJMN 2020-2024, berdasarkan substansinya RPJMD Kota Batam perlu disusun dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis *money follow* program dan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

Sumber: Permendagri No 86/2017; PP No 17/2017; Perpres No 18/2020 (diolah)

Adapun rangkaian tahapan penyusunan meliputi: (1) Tahap perumusan Rancangan Teknokratik, (2) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, (3) perumusan rancangan awal RPJMD, (4) penyusunan rancangan RPJMD; (5) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (6) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (7) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 4.
Kajian Lingkungan Hidup	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

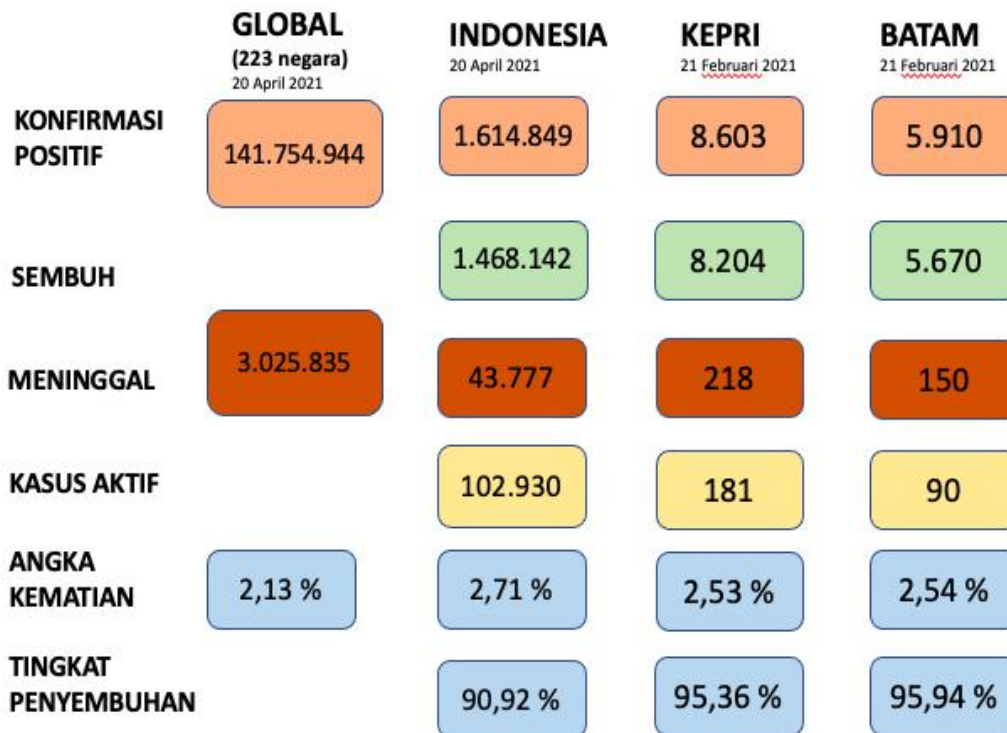
Strategis RPJMD	<i>(Sustainable Development Goals)</i> . Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi BAB 1 hingga Bab 9. Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 50 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan paralel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan musrenbang, atau paling lambat musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Akhir RPJMD	Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD

Sumber: Permendagri No 86/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Berdasarkan rangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada tabel di atas, penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Batam 2021-2026 ini merupakan tahap ketiga, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun dokumen Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan RPJMD.

1.1.2 Dampak Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Terhadap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Batam 2021-2026

Tahap awal perumusan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2021-2026 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode-periode sebelumnya, yang mana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia meningkat drastis pada tahun awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, yakni sebesar 336,88 persen dalam waktu 15 hari, sedangkan di Indonesia peningkatan kasus Covid-19 sebesar 405,11 persen dalam waktu 15 hari, sementara itu di Kota Batam peningkatan kasus sebesar 331,25 persen dalam waktu 44 hari. Penjabaran kondisi pandemi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam lebih lanjut disampaikan pada gambar di bawah ini.

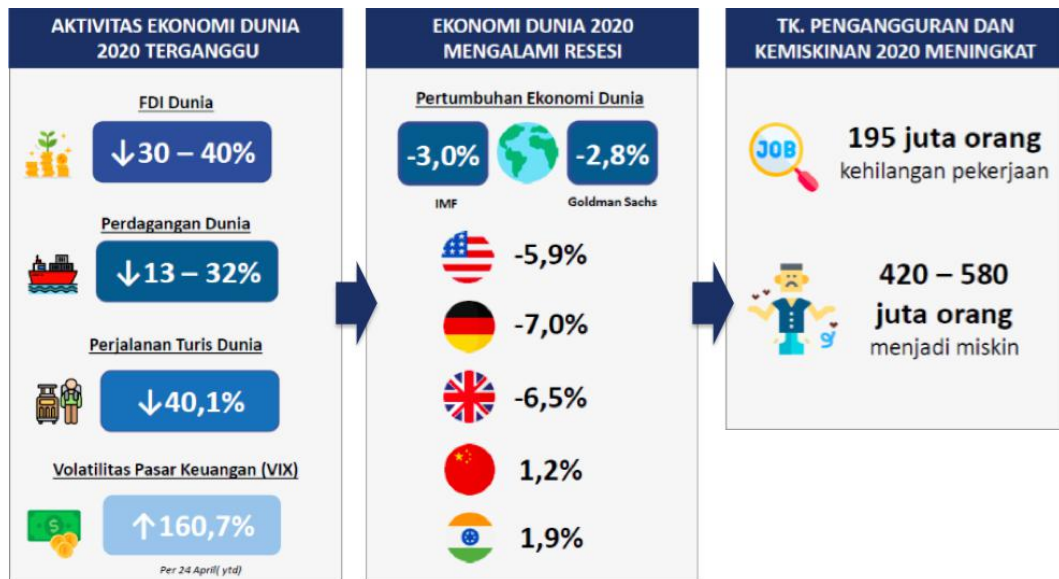


Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Pandemi Covid-19 Tingkat Global, Nasional, Provinsi dan Kota Batam

Sumber: covid19.go.id, corona.kepriprov.go.id, lawancorona.batam.go.id Batam, diakses 21 April 2021

Dengan telah ditemukannya vaksin, kebijakan menjaga jarak aman dengan orang lain melalui *physical distancing/social distancing* atau pembatasan sosial serta pola hidup bersih dan sehat tetap harus dilakukan di seluruh negara terdampak Covid-19 untuk menurunkan kurva penyebaran Covid-19. Namun demikian kebijakan *physical distancing/social distancing* berimplikasi pada pengurangan aktifitas perekonomian secara *massive*. Para ahli telah melakukan analisis bahwa resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008–2009. Dengan adanya kebijakan *physical distancing/social distancing* penerimaan masyarakat mengalami penurunan, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan mengakibatkan sisi permintaan menurun. Kebijakan *physical distancing/social distancing* juga telah menyebabkan kegiatan produksi terganggu sehingga sisi penawaran juga mengalami penurunan. Turunnya sisi penawaran dan permintaan sekaligus

menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif pada wilayah terdampak pandemi Covid-19.



Gambar 1. 3 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Resesi Ekonomi Global

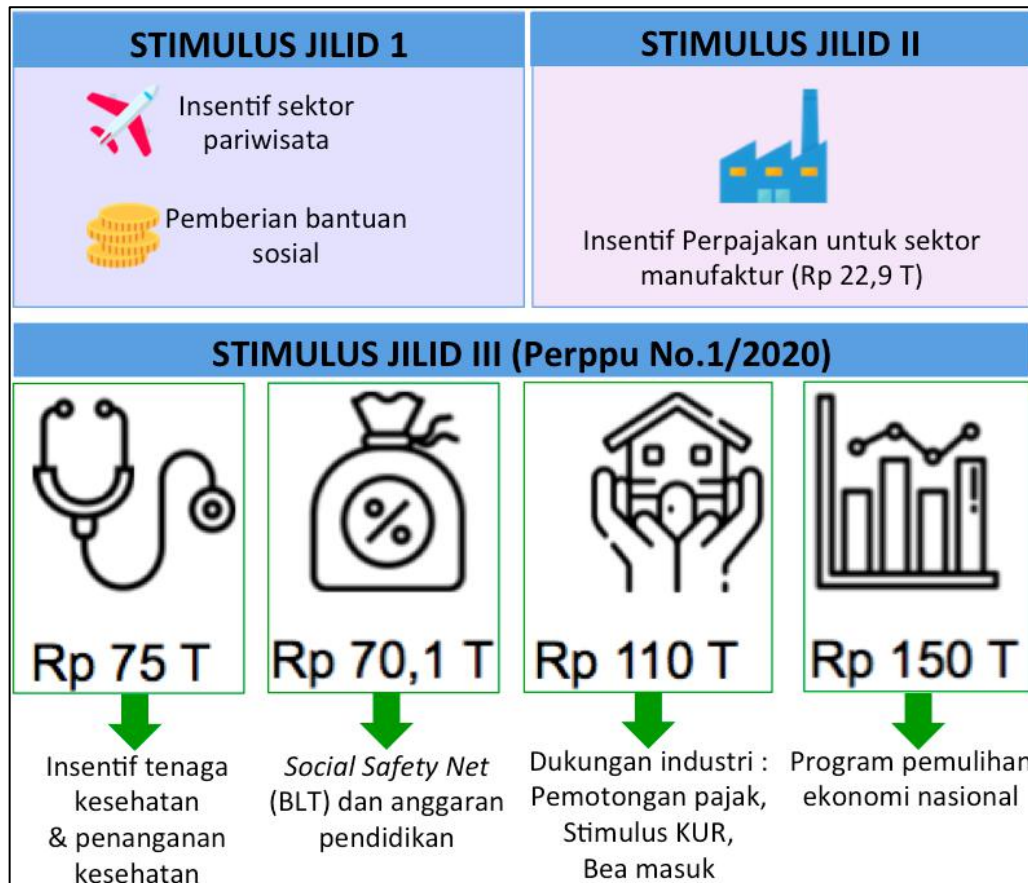
Sumber: WEO IMF April 2020 Oxford Economics, Bloomberg, WTO, UNCTAD, ILO, Sumner et al (2020)

Sementara itu akibat pandemi, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 adalah negatif yaitu berada pada minus -2,07 persen, yang mana pada tahun 2020 triwulan satu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 2,97 persen, triwulan dua (-5,32 persen), triwulan tiga (-3,49 persen), dan triwulan empat (-2,19 persen). Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan tahun 2019. Indeks gini tahun 2019 Indonesia adalah 0,38. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini meningkat menjadi 0,381 di semester 1 tahun 2020 dan menjadi 0,385 pada semester 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Batam tidak berbeda signifikan antara dua tahun terakhir, hanya meningkat 0,005 poin.

Krisis akibat pandemi juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat yang mana tingkat kemiskinan tahun 2019 adalah 9,32% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 9,99% dengan jumlah penduduk miskin

sebanyak 27.550 jiwa. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 7,07% di tahun 2020 dari yang sebelumnya 5,23% di tahun 2019.

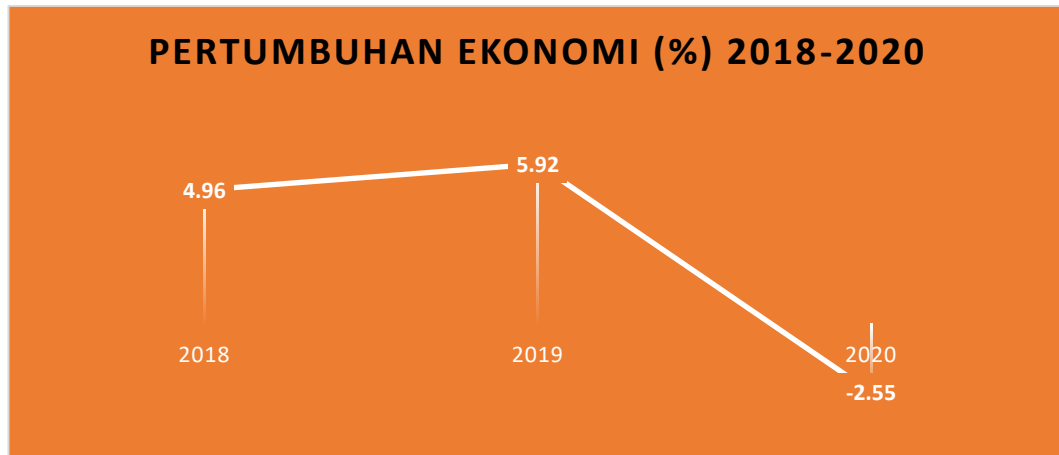
Untuk meminimalkan dampak kesehatan dan ekonomi terhadap masyarakat, pemerintah pusat telah membuat paket penanggulangan pandemi melalui stimulus jilid I yang berfokus pada insentif sektor pariwisata dan pemberian *sosial safety net*, kemudian stimulus jilid II berfokus pada insentif perpajakan sektor manufaktur, dan stimulus jilid III melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pandemi Covid-19 telah mengubah pola kehidupan dan mengubah kebijakan pembangunan nasional di tahun 2020 - 2021. Pada tahun 2020 fokus kebijakan diarahkan pada penanggulangan pandemi, penguatan jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, sementara pada tahun 2021 fokus kebijakan diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial (Bappenas).



Gambar 1. 4 Kebijakan Stimulus Ekonomi Pemerintah Pusat dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19

Sumber: Kementerian Keuangan (per 31 mei 2020)

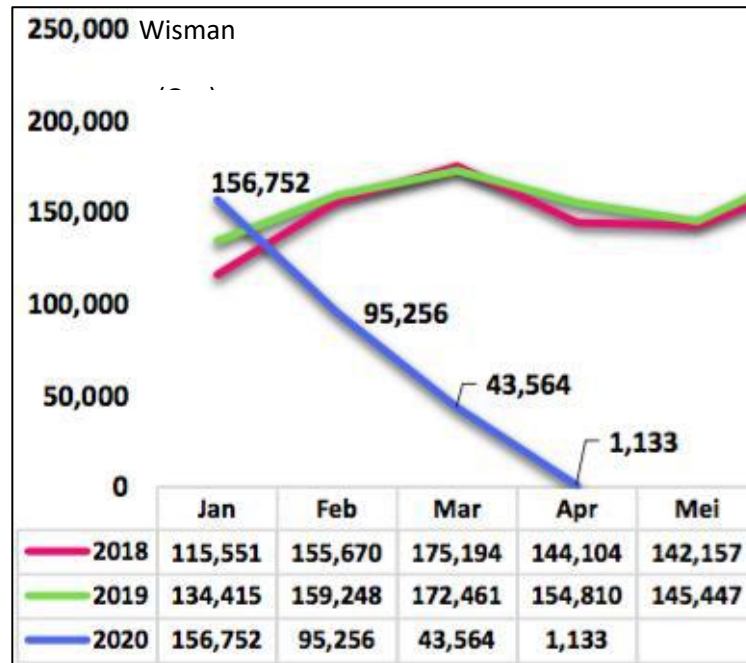
Situasi perlambatan ekonomi global dan nasional tentu menciptakan *bubble effect* terhadap pembangunan di daerah. Dalam konteks ini Kota Batam sebagai kawasan industri dan kota destinasi wisata penyumbang wisatawan mancanegara peringkat kedua nasional, setelah Bali turut mengalami guncangan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 5,92 persen, yang merupakan nilai tertinggi dari capaian selama tiga tahun terakhir, dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan kinerja perekonomian memburuk menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam adalah negatif yaitu minus 2,55 persen. Situasi ini dipastikan akan mengoreksi secara signifikan target pertumbuhan ekonomi periode tahun 2021 hingga tahun 2026.



Gambar 1. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam 2018 - 2020

Sumber: BPS Kota Batam

Hingga bulan april tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kota Batam telah merilis angka penurunan di sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan April 2020 mencapai 1.133 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 97,40 persen jika dibandingkan jumlah wisman pada bulan sebelumnya, dimana jumlah wisman pada Maret 2020 sebanyak 43.564 kunjungan. Jika dibandingkan dengan April 2019, kunjungan wisman April 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 99,27 persen.



**Gambar 1. 6 Penurunan Wisatawan Mancanegara Kota Batam
Januari-April 2020**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam

Sementara itu pada bulan yang sama juga terjadi penurunan ekspor. Nilai ekspor Kota Batam April 2020 mencapai US\$687,13 juta atau turun sebesar 14,12 persen dibanding ekspor Maret 2020. Ekspor migas April 2020 mencapai US\$48,32 juta atau turun 41,96 persen dibanding bulan sebelumnya. Ekspor nonmigas April 2020 mencapai US\$638,81 juta atau turun 10.89 persen dibanding Maret 2020.

Kemudian dari sektor ketenagakerjaan, per April 2020 terdapat sedikitnya 1.939 orang pekerja dirumahkan sementara waktu dan 3.411 orang pekerja lainnya cuti tidak dibayar atau tanpa digaji. Sebagian besar perusahaan yang merumahkan pekerjanya mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, tour and travel atau bidang pariwisata lainnya. Untuk karyawan yang dirumahkan dan tidak dibayar, didominasi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, seperti Spa, *Tour and travel*, restoran hingga perhotelan. Namun ada juga sebagian hotel yang tetap memberikan gaji pokok selama karyawannya dirumahkan. Untuk pekerja yang mengalami PHK atau diberhentikan karena

tidak lagi beroperasi akibat dampak Covid-19 ini sejumlah 118 orang, angka ini berdasarkan laporan perusahaan, sehingga angka sebenarnya diprediksi dapat lebih tinggi, karena mungkin tidak seluruh perusahaan akan melaporkan jumlah PHK kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Batam. Berdasarkan Data BPS Kota Batam, jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2019 mencapai 66.210 penduduk. Namun, akibat adanya pandemi jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2020 meningkat menjadi 67.060 orang. Berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan terdapat 300.000 kepala keluarga yang perlu mendapatkan *social safety net*, meskipun tidak masuk kategori miskin dalam Data Terpadu Kementerian Sosial RI, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini.

Lebih lanjut, dalam mengurangi dampak negatif dari penyebaran Covid-19, Pemerintah Kota Batam telah melakukan beberapa *strategic action*, antara lain penerapan protokol kesehatan *physical distancing/social distancing* atau pembatasan sosial serta pola hidup bersih dan sehat di seluruh aktifitas masyarakat baik di ruang privat maupun publik, serta melakukan *refocussing* realokasi APBD untuk memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan pekerja harian/PKL/usaha mikro, dan lain-lain diberikan bantuan sosial sebesar Rp. 300.000,- per orang/KK/bulan selama 1 bulan, ditambah 1 bulan dari anggaran BP Batam dan 1 bulan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 1. 7 Besaran Refocussing Realokasi APBD Kota Batam Tahun 2020 Untuk Penanganan Covid-19

Sumber: BPKAD Kota Batam (diolah) (per 31 mei 2020)

Kecepatan penularan virus Covid 19 yang tinggi dan pelaksanaan vaksinasi yang kurang masif di Indonesia menyebabkan pandemi belum juga berakhir. Keterbatasan penyediaan vaksin akibat kurangnya pasokan vaksin menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksinasi. Hal ini dapat mengakibatkan para perumus dan pengambil kebijakan, pelaku ekonomi serta masyarakat secara umum menghadapi situasi yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Namun demikian Pemerintah Kota Batam beserta seluruh *stakeholder* pembangunan harus tetap optimis dan berkolaborasi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sehingga dapat bergerak bersama untuk menciptakan pembangunan Kota Batam yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Batam memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Business as Usual* yang tidak responsif dalam

menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (*green jobs*), menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Dengan demikian Kota Batam dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

1.3 Hubungan Antara Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lebih lanjut, uraian secara umum disampaikan di bawah ini.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Batam.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun -. RPJMD Tahun - merupakan tahap Ketiga dari perencanaan pembangunan Tahun -. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor..... Tahun tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2040 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota.

D. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

F. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis alur hubungan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 1.8 dan Gambar 1.9.



UU No. 5 Tahun 2004

UU No. 17 Tahun 2003

Catatan:

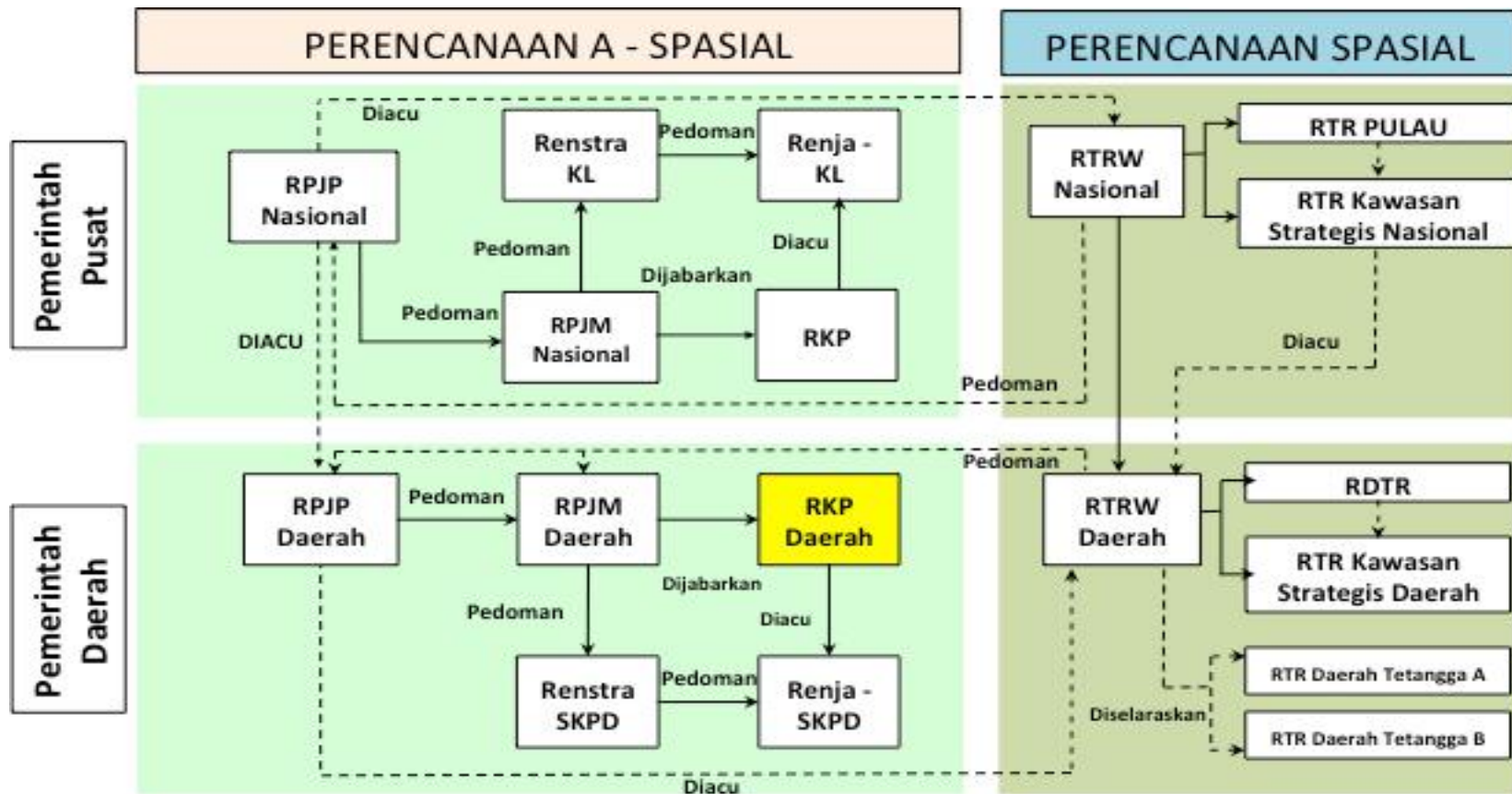
Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor

Gambar 1. 8 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, maka kebijakan terkait spasial yang termuat dalam RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah. Selanjutnya dokumen Renstra PD yang merupakan penjabaran teknis dari RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah dalam menentukan lokasi penyelenggaraan program kegiatan. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.9.



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Gambar 1. 9 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial

1.4 Maksud dan Tujuan Rancangan Awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Kajian Teknokratik RPJMD Kota Batam yang sudah tersusun sebelumnya dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini telah disusun dan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

Tujuan disusunnya rancangan awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Memenuhi ketentuan tahapan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan menyempurnakan hasil kajian teknokratik RPJMD yang berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Merumuskan perencanaan daerah melalui tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian dokumen rancangan awal RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rancangan Awal RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 1.1 Latar Belakang;

- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen;
- 1.4 Maksud dan Tujuan;
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2021-2026. Bab ini diperjelas dan diperinci ke dalam sub bab sebagai berikut:

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi;
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum;
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 3.2 Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu;
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 4.1 Permasalahan Pembangunan;
- 4.2 Isu Strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun struktur sub bab dalam bab ini adalah:

- 5.1 Visi;
- 5.2 Misi;
- 5.3 Tujuan;
- 5.4 Sasaran Daerah;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan

dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2026 dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

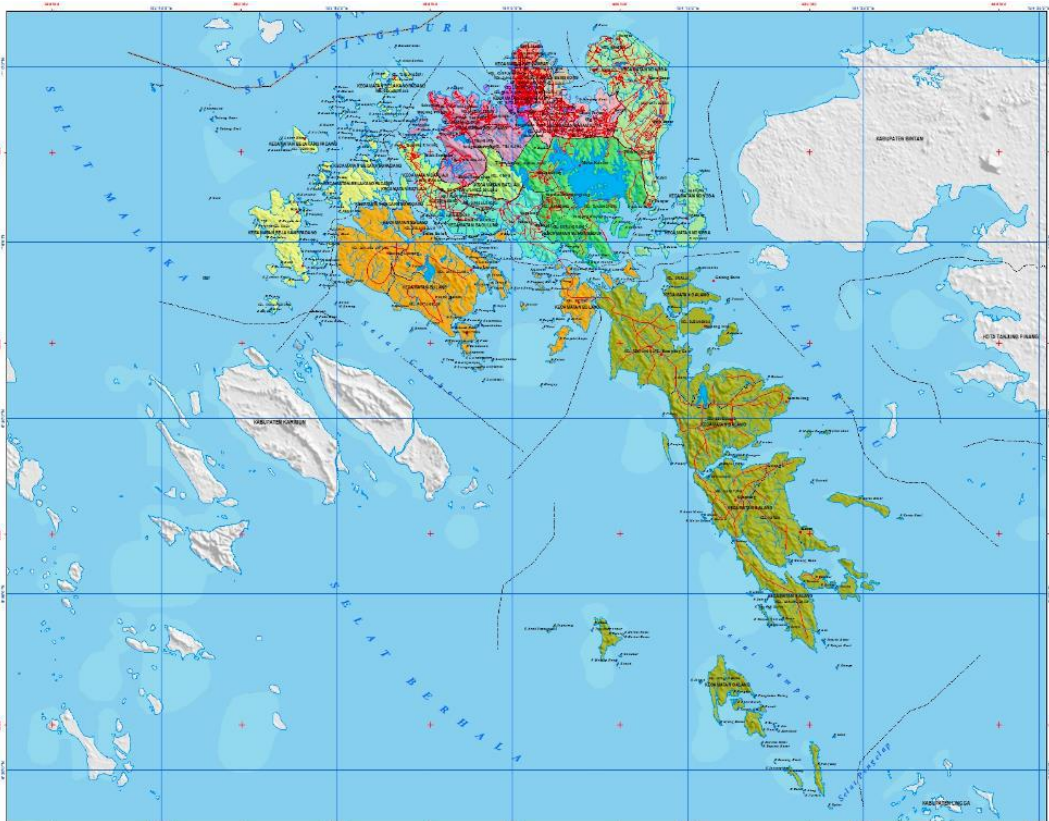
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

A. Posisi Astronomis

Secara *astronomis*, Kota Batam terletak pada garis lintang dan bujur antara $0^{\circ} 25' 29''$ - $1^{\circ} 15' 00''$ Lintang Utara dan $103^{\circ} 34'35''$ - $104^{\circ} 26' 04''$ Bujur Timur.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Batam

Sumber: Bakorsurtanal

Lebih lanjut, mengacu pada peta di atas, dapat diketahui bahwa secara *geografis* mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, di sebelah Utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan selat Singapura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan

sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan jarak sekitar 25 Km. Sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km. Kondisi tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh Kota Batam.

B. Posisi Geostrategik

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa letak Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan.

Lebih jauh lagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kota Batam ditetapkan untuk pengembangan prioritas nasional sektor industri dan pariwisata, yakni pengembangan Integrasi Kawasan Industri Batam-Bintan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) TWA Muka Kuning, Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya. Adapun diversikasi jenis pariwisata yang akan ditingkatkan mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (*heritage tourism*, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada *Cultural Heritage Regeneration*, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition/MICE*, *yacht and cruise*, wisata kebugaran/*wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olah raga).

Dalam perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Kota Batam sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara terbesar setelah Jakarta dan Bali

memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan nyaman.

C. Kondisi Kawasan

Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, dengan wilayah pesisir seluas 1.120 Km² dan laut seluas 3.176 Km² dari luas total 4.264 Km², (sumber: Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2020-2040). Terdapat 370 buah pulau besar dan kecil (sumber: hasil verifikasi BIG tahun 2012). Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulang terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Karas, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang.

Sementara itu di Kecamatan Belakang Padang terdapat pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah kecamatan Belakang Padang: 1) Pulau Belakang Padang; 2) Pulau Sambu; 3) Pulau Dendang; 4) Pulau Lengkana; 5) Pulau Meriam; 6) Pulau Tolop; 7) Pulau Suwe; 8) Pulau Air Manis; 9) Pulau Jagung; 10) Pulau Sekilak; 11) Pulau Leroi; 12) Pulau Layang Besar; 13) Pulau Tapung; 14) Pulau Suba; 15) Pulau Nirup; 16) Pulau Mercan Besar; 17) Pulau Sarang; 18) Pulau Semakau; 19) Pulau Serapat; 20) Pulau Negeri; 21) Pulau Penyalang; 22) Pulau Bertam; 23) Pulau Lingke; 24) Pulau Padi; 25) Pulau Bakau; 26) Pulau Pemping; 27) Pulau Labum Besar; 28) Pulau Labum Kecil; 29) Pulau Kasu; 30) Pulau Batu Ampar; 31) Pulau Lumba; 32) Pulau Sei Cudung; 33) Pulau Pelangi; 34) Pulau Ketapah; 35) Pulau Katung; 36) Pulau Buntung; 37) Pulau Tandut; 38) Pulau Panjang; 39) Pulau Sali; 40) Pulau Kepala Jeri 41) Pulau Ladang; 42) Pulau Pecung; 43) Pulau Dandan; 44) Pulau Cumin; 45) Pulau Semukir; 46) Pulau Santo; 47) Pulau Bayan; 48) Pulau Paloi

Kecil; 49) Pulau Paloi Besar; 50) Pulau Terong; 51) Pulau Teluk Bakau; 52) Pulau Telan; 53) Pulau Ketumbar; 54) Pulau Kepala Gading; dan 55) Pulau Geranting dan pulau-pulau kecil lainnya.

Karakteristik kepulauan di Kota Batam memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumberdaya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah perairan laut.

2.1.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah pesisir. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

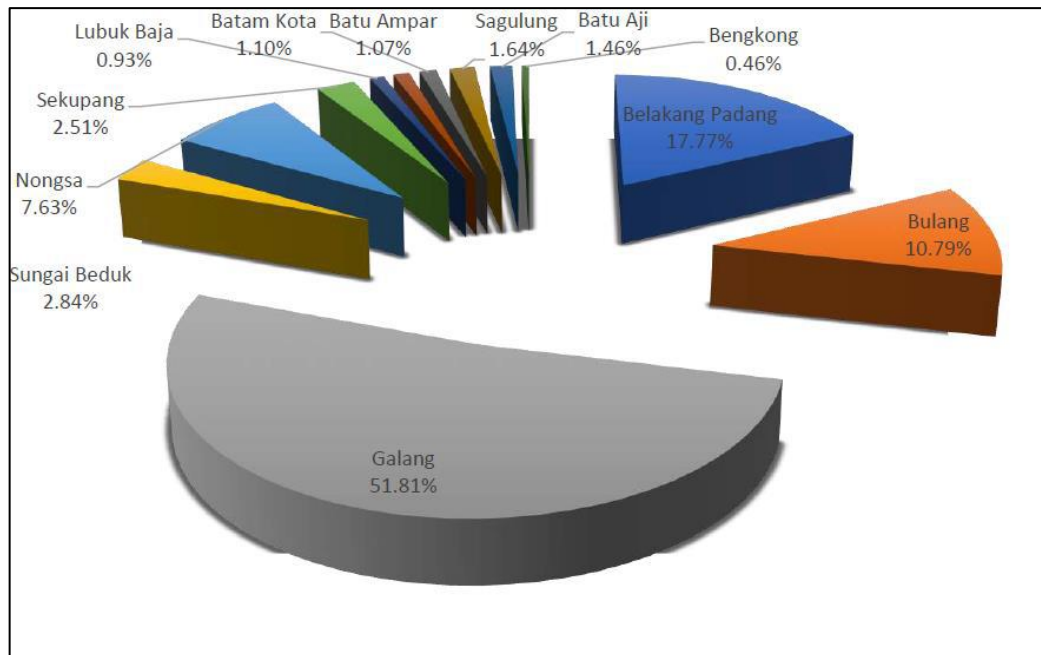
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administratif Kota Batam

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)		
			Darat	Laut	Total
1.	Belakang Padang	6	70,05	687,9	757,95
2.	Bulang	6	159,12	301,01	460,13
3.	Galang	8	357,84	1.851,49	2.209,33
4.	Sungai Beduk	4	106,12	14,96	121,08
5.	Nongsa	4	118,07	207,18	325,25
6.	Sekupang	7	75,84	31,38	107,22
7.	Lubuk Baja	5	17,14	22,45	39,59
8.	Batu Ampar	4	14,25	31,19	45,44
9.	Batam Kota	6	44,56	2,29	46,85
10.	Segulung	6	63,42	6,43	69,85
11.	Batu Aji	4	45,68	16,69	62,37
12.	Bengkong	4	15,70	3,72	19,42
Jumlah		64	1.087,78	3.176,69	4.264,47

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

Dari data tersebut di atas, maka diketahui bahwa Kecamatan Galang memiliki luasan wilayah yang paling luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, yaitu mencapai 51,81%. Sedangkan Kecamatan Bengkong merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan daerah lainnya, yaitu hanya

sebesar 0,46%. Lebih lanjut, luas wilayah administratif kecamatan berdasarkan persentase disampaikan pada diagram di bawah ini.

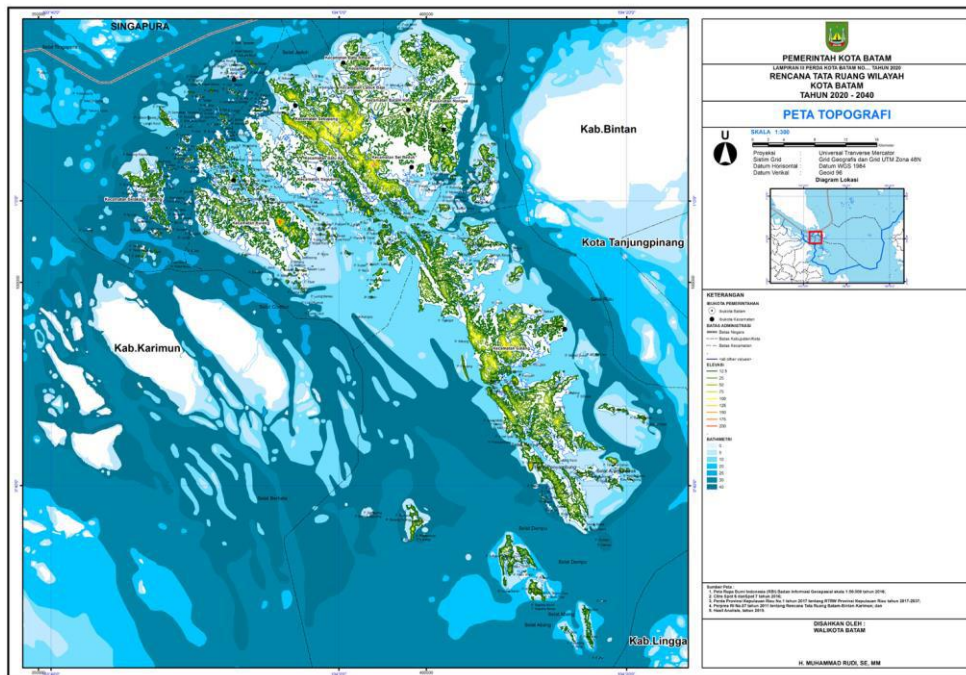


Gambar 2. 2 Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kota Batam (%)

Sumber: BPS Kota Batam

2.1.1.3 Kondisi Topologi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 mdpl hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.



Gambar 2. 3 Peta Topografi Kota Batam

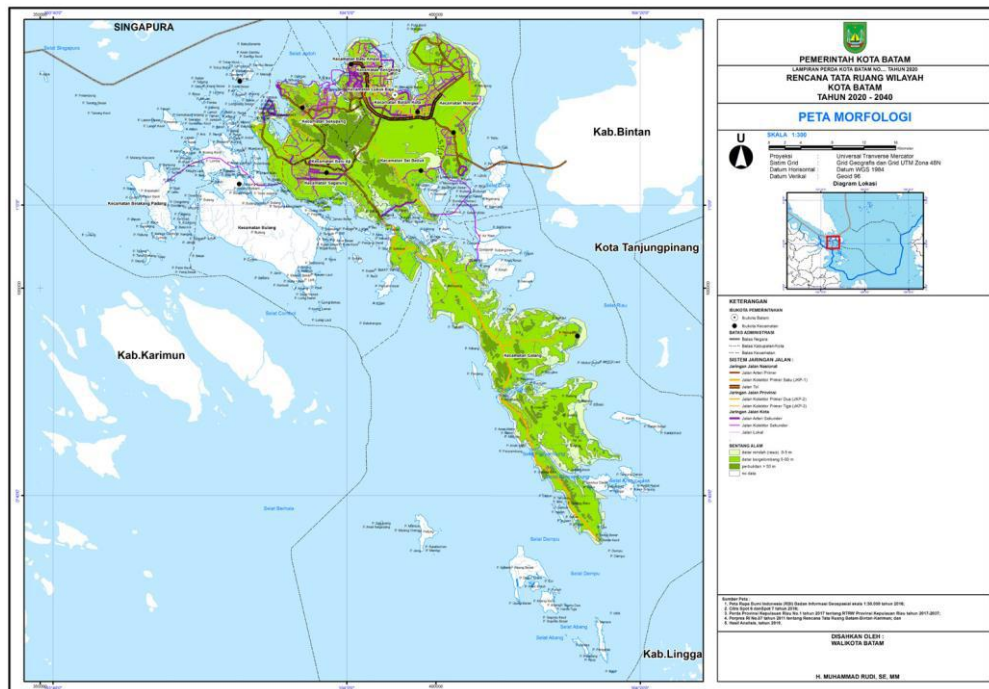
Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000, informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng

No	% Kemiringan	Luas Kemiringan Lereng (km ²)
1	0 – 2 %	554,81
2	2 – 5 %	136,31
3	5 – 15 %	180,62
4	15 – 40 %	64,14
5	>40 %	9,81

Sumber: Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2011



Gambar 2. 4 Peta Morfologi Kota Batam

Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

1. Kemiringan Lereng 0-2%, merupakan kelas kemiringan yang mendominasi sebagian besar kawasan sebesar 60,60% dari luas total wilayah. Kemiringan lereng ini ditandai dengan morfologi wilayah yang datar sehingga cocok dikembangkan untuk semua jenis kegiatan. Adapun sebenarnya terutama di kawasan pesisir.
2. Kemiringan Lereng 2-5%, merupakan kelas kemiringan dari landau sampai dengan berombak yang tersebar di seluruh kawasan secara terpencar-terpencar dalam bentuk kawasan-kawasan kecil. Kawasan dengan kelas kemiringan lereng ini relatif dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan.
3. Kemiringan Lereng 2-5%, merupakan kelas kemiringan dari landau sampai dengan berombak yang tersebar di seluruh kawasan secara terpencar-terpencar dalam bentuk kawasan-kawasan kecil. Kawasan dengan kelas kemiringan lereng ini relatif dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan.

4. Kemiringan Lereng 5-15%, merupakan kelas kemiringan yang ditunjukkan dengan morfologi agak miring atau bergelombang. Kawasan dengan kelas kemiringan ini masih dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan, namun masih harus dilakukan dengan rekayasa konstruksi. Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di Pulau Batam dan Pulau Rempang.
5. Kemiringan Lereng 15-40%, merupakan kelas kemiringan dengan morfologi berbukit sampai dengan agak curam. Kawasan dengan kelas kemiringan ini dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi terbatas dengan berbagai persyaratan teknis, antara lain seperti KDB yang rendah dan KDH yang tinggi, itupun hanya pada morfologi berbukit. Kawasan dengan kelas kemiringan ini tersebar di daerah perbukitan Sekupang dan Pulau Rempang.
6. Kemiringan Lereng > 40%, merupakan kelas kemiringan dengan morfologi sangat curam yang hanya dapat digunakan untuk kawasan konservasi (hutan lindung). Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di tengah pulau Batam.

2.1.1.4 Kondisi Geologi

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman seismic, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (*coral reef*) dan berbagai jenis ikan karang (*demersal*) maupun ikan hias (*ornamental fish*).

Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili (1977) dimasukkan ke dalam Laut Karimata yang

berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No	Jenis Geologi	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Aluvium	874,06	0,09
2.	Andesit	0	0
3.	Endapan Permukaan	0	0
4.	Endapan Permukaan Tua	0	0
5.	Formasi Duriangkang	5,36	0,55
6.	Formasi Goungon	3,88	39,48
7.	Formasi Pulau Panjang	5,55	0,57
8.	Formasi Tanjung Kerontong	1,62	16,49
9.	Granit	9,45	9,62
10.	Lainnya	3,26	33,22

Sumber: *Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam 2011*

Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam bawah laut di wilayah Batam.

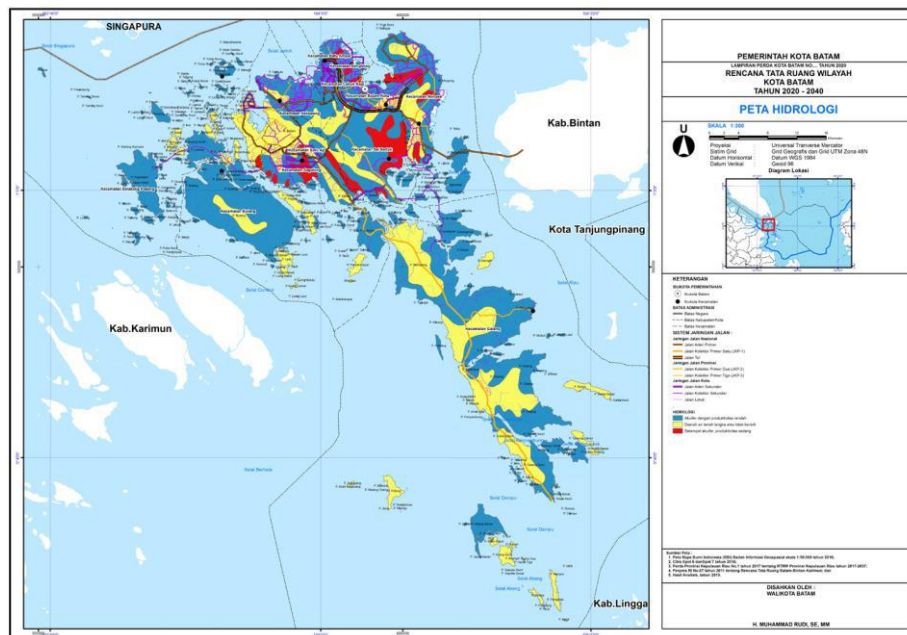
2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Batam dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air bawah tanah/air tanah dan air permukaan. Untuk jenis air tanah tersebar di 2 wilayah, yaitu:

1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau sech, serta pada material

rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku. Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.



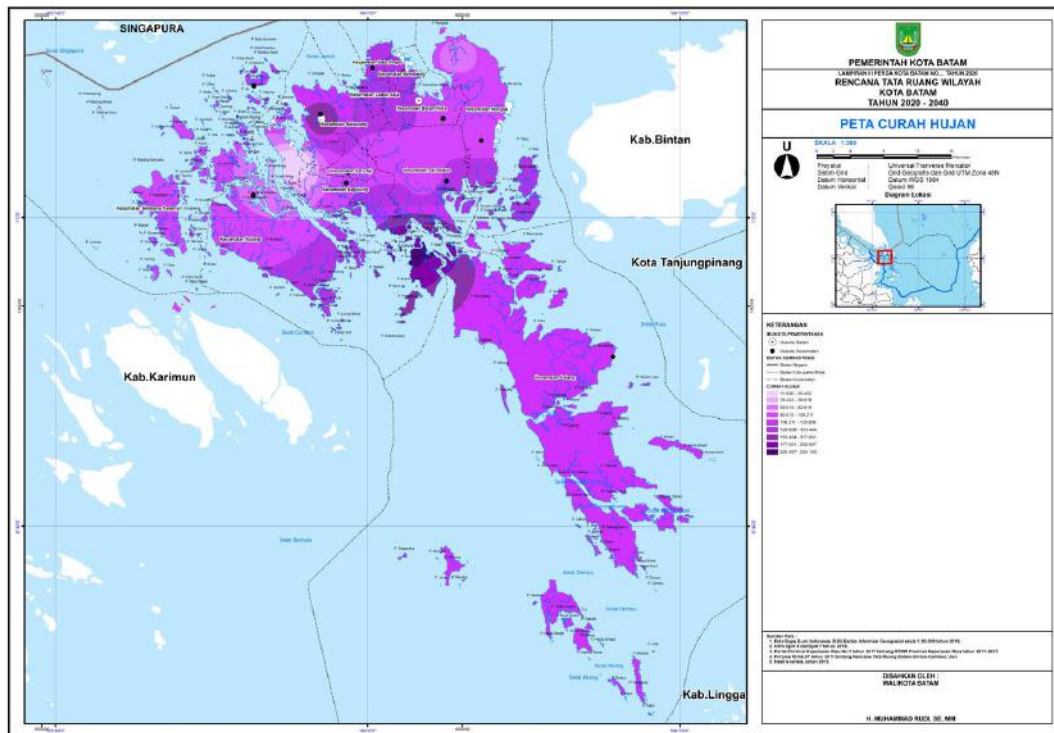
Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kota Batam

Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber dari Sungai Sagulung dan Sungai Nongsa. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam.

2.1.1.6 Klimatologi

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu udara minimum tahun 2020 berkisar antara 20,7°C – 23,9°C dan suhu maksimum berkisar antara 32,2°C – 35,3°C, sedangkan suhu rata-rata suhu sepanjang tahun adalah 26,85°C – 29,01°C, jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka telah terjadi peningkatan suhu, pada tahun 2019 suhu rata-rata sepanjang tahun 2019 adalah 26,9°C – 28,7°C.



Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Batam 2020-2040

Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

Lebih lanjut tekanan udara rata-rata untuk tahun 2020 berkisar antara 1.010,65 mb – 1.013,57mb, sementara kelembaban udara rata-rata berkisar antara 75,65% - 86,8%. Sementara itu, tekanan udara pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.011,4mb – 1.013,7mb dan kelembaban udara tercatat antara 74% - 85%. Untuk kecepatan angin, tahun 2018 tercatat kecepatan angin minimum sebesar 4 knot sedangkan maksimum tercatat sebesar 21 knot, terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 1 knot untuk kecepatan angin minimum dan 19 knot untuk kecepatan angin maksimum.

Pada tahun 2020 jumlah hari hujan di Kota Batam sebanyak 233 hari dengan curah hujan sebesar 2.286,8 mm, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah hari hujan sebanyak 155 hari dan curah hujan sebesar 1.227,5 mm. Jumlah hari hujan di tahun 2020 bertambah 78 hari, dan curah hujan bertambah 1.059.3mm. Adanya kondisi peningkatan curah hujan dan penambahan jumlah hari hujan ditengarai oleh adanya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahaya yang memunculkan fenomena kekeringan. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Batam bersama seluruh stakeholder untuk meminimalkan dampak perubahan iklim dari bencana hidrometeorologi terhadap pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;	
a	Kawasan Hutan Lindung	17,693
2	Kawasan Perlindungan Setempat;	
a	Sempadan Pantai	155
b	Sempadan Sungai	9
c	Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk	75
3	Kawasan Konservasi	
a	Taman Wisata Alam	900
b	Kawasan Taman Buru	2,642
4	Kawasan Cagar Budaya;	
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	404
6	RTH Kota	7,292
7	kawasan hutan produksi;	
a	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9,101
b	Kawasan Hutan Produksi Tetap	2,361
c	Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	3,942
TOTAL		26,881

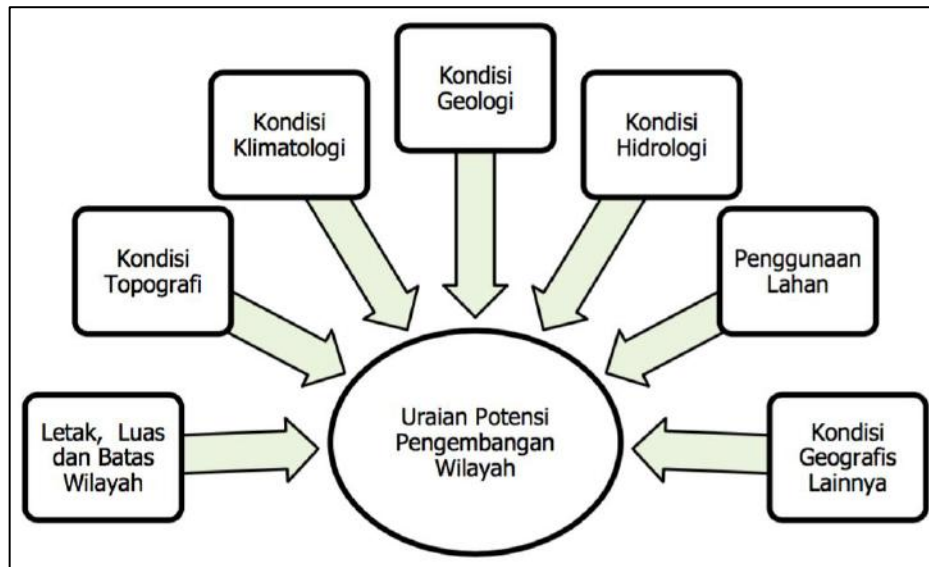
Tabel 2. 5 Pola Ruang Kawasan Budidaya Kota Batam

No	Pola Ruang Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	kawasan pertanian;	
a	Kawasan Perkebunan	1,701
b	Kawasan Peternakan	6,009
2	Kawasan Peruntukan Industri	15,084
3	Kawasan Pariwisata	9,896
4	kawasan permukiman;	
a	Kawasan Perumahan	17,599
b	Kawasan Perdagangan dan Jasa	3,457
c	Kawasan Perkantoran	116
d	Kawasan Kesehatan	50
e	Kawasan Pendidikan	289
f	Kawasan Peribadatan	29
g	Kawasan Olahraga	52
h	Kawasan Transportasi	3,115
i	Kawasan Sumber Daya Air	6,606
5	kawasan pertahanan dan keamanan; dan	475
6	kawasan pertambangan dan energi.	
a	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	101
b	Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	15
TOTAL		64,594

Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa uraian potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan uraian pada sub bab terdahulu serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga penyajian potensi pengembangan wilayah diklasifikasikan ke dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah. Secara skematik kerangka pemikiran hubungan antara uraian kondisi geografi daerah dengan uraian potensi pengembangan wilayah disampaikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 7 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah

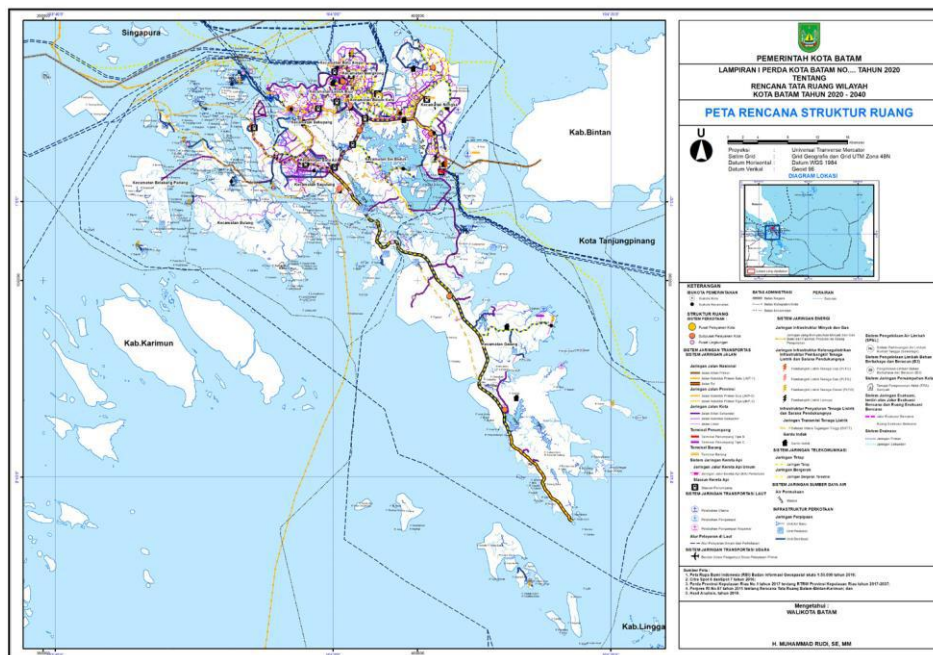
Sumber: Lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017

2.1.2.1 Struktur Ruang wilayah

1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional. Sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang ekonomi dan tujuan investasi sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBB) yang direncanakan akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
 - Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional, dan internasional;
 - Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan

- Pusat Lingkungan (*Neighbourhood Services Center*), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (*neighbourhood unit*).
3. Dalam jangka waktu tahun 2020-2040, Kecamatan Batam Kota merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota di Pulau Batam termasuk pengembangannya di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata.
 4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu yang dibutuhkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.
 5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (outlet) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
 6. Arahannya RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistis setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga outlet di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi “pelabuhan internasional hub” (*hub international port*).

7. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis.
8. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (*outlet*) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari kawasan-kawasan sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (*flyover*), simpang susun (*interchange*), jalan lintas bawah (*underpass*), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT/BRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.
9. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu: jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, infrastruktur perkotaan dan penyehatan lingkungan permukiman.



Gambar 2. 8 Peta Struktur Ruang Wilayah Kota Batam

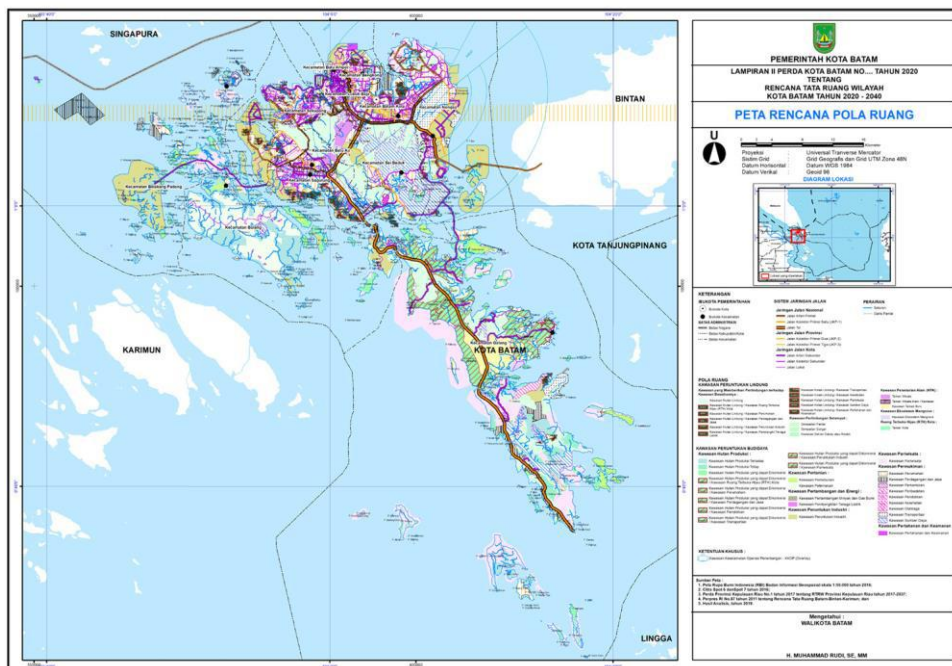
Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

2.1.2.2 Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan

perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut;

8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindari dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.



Gambar 2. 9 Peta Pola Ruang Wilayah Kota Batam

Sumber: Ranperda RTRW Kota Batam 2020 – 2040

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lebih lanjut klasifikasi bencana meliputi:

1. Bencana Alam, terdiri dari (A) Bencana Geologi; (B) Bencana Vulkanologi; (C) Bencana Hidrometeorologi; (D) Karhutla;
2. Bencana Non Alam, terdiri dari (A) Gagal Teknologi; (B) Epidemii; (C) Wabah Penyakit; (D) Gagal Modernisasi;
3. Bencana Sosial, terdiri dari (A) Konflik Sosial; (B) Teror.

Adapun potensi bencana di Kota Batam disampaikan pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2. 6 Jenis, Resiko dan Potensi Bencana di Kota Batam Berdasarkan Kasus

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
Bencana Alam Hidrometeorologi			
Kenaikan tinggi muka air laut	Abrasi (erosi pantai)- Akresi	√	Pulau Nongsa mengalami kemunduran akibat erosi (SDA Kementerian PUPR, 2017); Pulau Pelampong berpotensi hilang (Kementerian KKP, Tirta.id, 2016); Kawasan bukit dan perbukitan yang mempunyai kemiringan lereng > 15 % dan rentan terhadap erosi/longsor, serta struktur batuan wilayah Kota Batam yang berupa jenis batuan dengan tingkat kestabilan yang cukup rendah (labil) dan mudah tererosi oleh air (<i>Business Case and Project Readiness Monorail Batam</i> , Bappenas 2015);
	Mempengaruhi Kemiringan Lereng Ling Pantai karena Banjir;	–	–
	Perubahan Suplai Sedimen	–	–
Peningkatan Gelombang Ekstrim	Membahayakan Keselamatan Pelayaran;	√	Dalam 5 tahun terakhir, setiap tahun BMKG merilis peringatan gelombang ekstrim periode bulan Nov-Jan di perairan Batam (BMKG); Perlu dilengkapi data jumlah kecelakaan kapal;
	Mengurangi Daya Jelajah Nelayan kecil <20GT	√	

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
Perubahan Curah Hujan	Bahaya Banjir;	√	Terdapat > 10 titik banjir di Kota Batam (Tribun Batam.id, 2019)
	Bahaya Ketersediaan Air;	√	Air minum Kota Batam diperoleh dari sumber air permukaan yang ditampung pada beberapa waduk/reservoir dengan kapasitas yang terbatas. Berdasarkan penelitian diperkirakan daya dukung alam (termasuk kemampuan suplai air minum) Pulau Batam hanya dapat memenuhi kebutuhan 700 ribu penduduk. Kondisi berdampak pada terbatasnya sumber air yang potensial untuk memenuhi kebutuhan khususnya bagi pengembangan industri. (Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia)
	Produksi komoditas sektor pertanian menurun;	–	–
Peningkatan Suhu	Bahaya Kekeringan Air;	√	Balai Wilayah Sungai (BWS) memprediksikan, jika tidak turun hujan dalam bulan Feb-Mar-Apr 2020, maka ketersediaan air bersih hanya bisa dirasakan hingga 5 Juni 2020 mendatang. (Kompas.com, 21/02/2020)
	Produksi komoditas sektor pertanian menurun;	–	–
	Peningkatan perkembangan vektor penyakit (DBD) dan <i>heat-stress</i> di wilayah perkotaan	√	Tahun 2018 sebanyak 647 warga terkena DBD (Dinkes Kota Batam, Batamnews.co.id, 28/12/2018); Tahun 2019 sebanyak 728 warga terkena DBD (Kadis Dinkes, Tribun.id Batam 8/1/2020);
Bencana Non Alam			
Gagal Teknologi	Pencemaran tumpahan minyak kotor	√	Laut Belakang Padang tercemar tumpahan minyak

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
			(Media Center Pemko Batam, 12/11/2019); <i>Floating storage unit</i> di perairan Batam berpotensi terjadi <i>oil spill</i> (portonews.com, 23/5/2018);
Epidemic	Wabah penyakit yang disebabkan Virus	√	Pasien positif Covid 19 tercatat 7.399 orang per 3 Mei 2021 (Gugus Tugas Penanganan Covid Kota Batam);
Bencana Sosial			
Konflik	Konflik sosial;	√	Penutupan Radio Era Baru (2010) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018); Demonstrasi sopir taxi akibat konflik adanya penyedia jasa Taxi Baru (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018) Konflik Taxi Online dan Konvensional (2019)
	Konflik Pertanahan	√	Adanya SK Menteri Kehutanan No.463 Tahun 2013 Tanggal 27 Juli, yang menetapkan lahan hunian yang telah ditempati warga sebagai hutan lindung (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018); Adanya sengketa lahan 4300 M ² yang mengakibatkan bentrok dan menelan 1 korban nyawa (2012) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018);
	Konflik Industrial	√	Demonstrasi Buruh menuntut UMK 50% dari tahun sebelumnya (2014) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018); Setiap tahun terjadi demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah minimum (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018);

Jenis Bencana	Risiko	Potensi	Keterangan
	Konflik Lingkungan	√	Demonstrasi nelayan di Pulau Nipah terhadap kapal tanker yang mengganggu aktifitas nelayan (2013) (Jurnal Masyarakat Maritim vol 2 no.1 2018);
Teror	Gangguan Keamanan	–	–

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Kota Batam memiliki potensi bencana dominan berupa bencana *hidrometeorologi*. Bencana tersebut dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim yang terjadi secara global dan hampir seluruh wilayah Indonesia berpotensi terdampak negatif. Dalam hasil Kaji Ulang Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim yang dilakukan Bappenas di tahun 2019 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang rawan terdampak negatif perubahan iklim.

Lebih lanjut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijabarkan bahwa perubahan iklim menjadi salah satu ancaman bagi terhambatnya pencapaian agenda pembangunan nasional dan daerah. Dokumen RPJMN telah menetapkan indikator dan target nasional Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) dampak perubahan iklim pada empat sektor prioritas (sektor air, pertanian, kelautan dan pesisir serta sektor kesehatan) dengan menggunakan ukuran *Persentase Penurunan Potensi Kehilangan PDB Akibat Bahaya Iklim* di sektor air, pertanian, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sektor kesehatan. Berdasarkan proyeksi yang telah dibuat, potensi kerugian ekonomi dampak perubahan iklim secara nasional pada tahun 2020 sebesar 102,36 Trilyun, tahun 2021 sebesar 105,72 Trilyun, tahun 2022 sebesar 109,03 Trilyun, 2023 sebesar 112,19 Trilyun dan tahun 2024 sebesar 115,53 Trilyun (Gambar 2.10).

SEKTOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
 Kelautan & Pesisir	81,30	81,43	81,57	81,69	81,82
 Air	3,83	4,74	5,61	6,45	7,29
 Pertanian	11,20	13,40	15,59	17,77	19,94
 Kesehatan	6,03	6,15	6,26	6,37	6,48
JUMLAH	102,36	105,72	109,03	112,29	115,53

Gambar 2. 10 Potensi Kerugian Ekonomi Dampak Perubahan Iklim Sektor Prioritas (Rp Trilyun)

Sumber: Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim 2019

Keberhasilan pengurangan dampak negatif perubahan iklim tentu perlu kerjasama dan dukungan dari seluruh *stakeholder* pembangunan, terutama pemerintah daerah. Dalam perspektif ini, Pemerintah Kota Batam perlu menindaklanjuti kebijakan nasional untuk mengurangi Potensi Kerugian Ekonomi (*Potential Economic Losses*) pada sektor sektor prioritas dengan melakukan penguatan data dan informasi terkait perubahan iklim, sebagai dasar bagi perumusan strategi, program dan kegiatan serta indikator yang mendukung upaya pengurangan dampak negatif dari perubahan iklim sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Kota Batam (melalui penyusunan RAD API atau mengintegrasikan program, kegiatan berbasis ketahanan iklim dalam dokumen perencanaan). Dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang berketahanan iklim.

Sementara itu kawasan rawan bencana Kota Batam yang telah terpetakan dalam Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2020-2040 hanya meliputi kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan gerakan tanah, sementara itu kawasan rawan kekeringan, kawasan rawan

perkembangan vektor penyakit, dan kawasan rawan bencana lainnya yang terkait dengan bencana hidrometeorologi belum terakomodir sepenuhnya. Dalam konteks pengurangan potensi dan risiko bencana idealnya perlu *updating* data dan informasi tentang kawasan rawan bencana di Kota Batam yang lebih komprehensif.

Adapun kawasan rawan bencana yang termuat dalam Ranperda RTRW 2020-2040 disampaikan sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
2. Kawasan Rawan Longsor, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;
3. Kawasan Rawan Abrasi, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan
4. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu diPulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.

2.1.4 Demografi

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi, dan perkembangan demografi berperan sangat penting. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demogra memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk kota Batam dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam

Kecamatan	Luas Daratan (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Distribusi Penduduk 2020 (%)	Kepadatan Penduduk 2020 (Jiwa/Km2)
		2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BELAKANG PADANG	69,12	21.836	21.024	19.387	20.469	22.439	1,88	325
BATU AMPAR	11,19	76.212	64.410	66.894	62.093	60.450	5,05	5.402
SEKUPANG	68,30	127.288	128.613	131.001	141.314	156.283	13,06	2.288
NONGSA	114,55	59.884	63.710	67.002	71.847	81.451	6,81	711
BULANG	158,75	11.625	11.233	10.012	11.310	10.707	0,89	67
LUBUK BAJA	11,43	93.868	92.068	87.249	90.560	84.533	7,07	7.396
SEI BEDUK	106,45	89.648	83.514	88.018	86.220	96.193	8,04	904
GALANG	350,76	16.585	16.364	15.843	17.183	16.989	1,42	48
BENGGONG	13,21	105.301	105.666	109.866	111.923	119.836	10,02	9.072
BATAM KOTA	38,96	155.077	162.974	271.454	176.287	198.617	16,60	5.098
SAGULUNG	54,78	163.750	177.896	275.259	188.333	209.386	17,50	3.822
BATU AJI	41,34	116.153	127.568	187.778	130.012	139.512	11,66	3.375
KOTA BATAM	1.038,84	1.037.227	1.055.040	1.329.763	1.107.551	1.196.396	100	1.152

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Pada tahun 2016 jumlah penduduk kota Batam tercatat sebesar 1.037.227 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penduduk kota Batam mengalami kenaikan yaitu tercatat sebesar 1.055.040 jiwa yang mana mengalami peningkatan sebesar 1,72% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 penambahan penduduk di Kota Batam meningkat signifikan yaitu menjadi 1.329.763 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 26,04% dibanding tahun sebelumnya. Penambahan jumlah

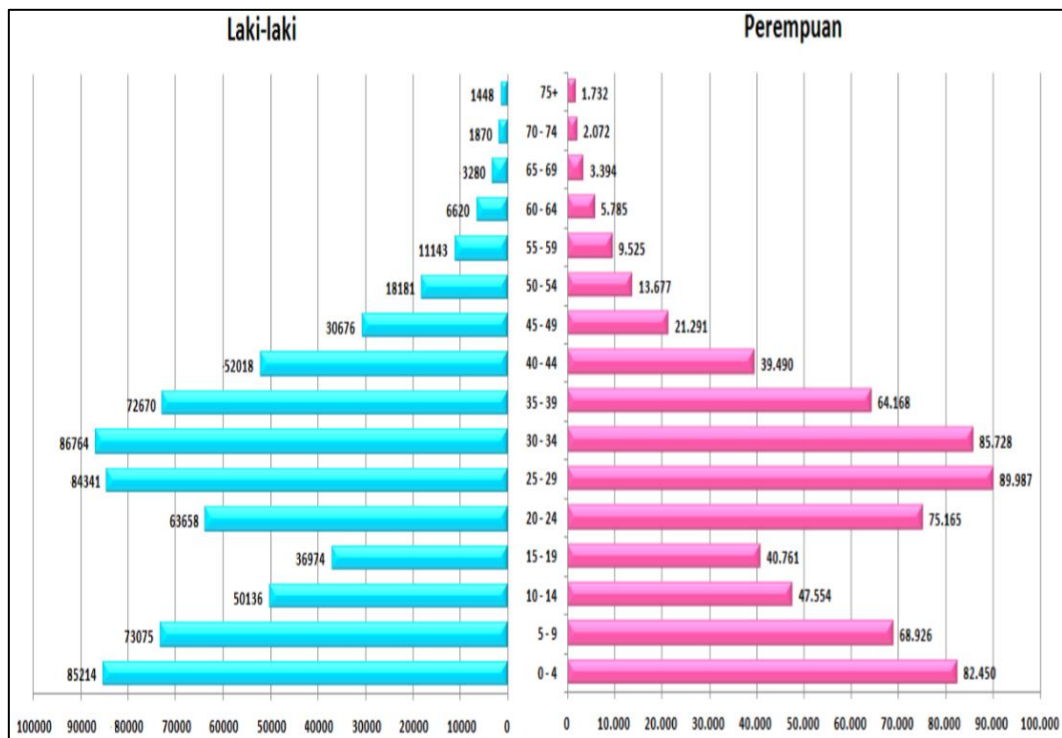
penduduk paling tinggi adalah di Batam Kota dibanding kecamatan-kecamatan lainnya. Namun, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Batam justru mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 16,71% dibanding tahun 2018. Selanjutnya selama masa pandemi yaitu tahun 2020 penduduk Kota Batam justru mengalami kenaikan meskipun kenaikan ini tidak sebesar tahun sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan penduduk Kota Batam tahun 2020 yaitu sebesar 8,02% sehingga jumlah penduduk Kota Batam tahun 2020 mencapai 1.196.396 jiwa. Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk Kota Batam mengalami tren kenaikan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Tren yang cenderung meningkat ini perlu menjadi perhatian karena penambahan jumlah penduduk perlu diikuti dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2020, maka jumlah penduduk Kota Batam masih lebih dominan berada di wilayah Kecamatan mainland yaitu Kecamatan Sagulung (17,50%) dan Batam Kota (16,60%), sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan hinterland yaitu Kecamatan Bulang (0,89%) dan Galang (1,42%). Secara rinci penjelasan mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta distribusinya sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2.7, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang relatif kecil dengan kepadatan penduduk tinggi, yakni Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong. Sedangkan terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang besar dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang. Proporsi luas wilayah daratan dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah seyogyanya memiliki proporsi yang seimbang. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga langkah perluasan wilayah kecamatan dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Penduduk Kota Batam pada tahun 2020 berjumlah 1,196,396 jiwa, jika dilihat menurut wilayah kecamatan, yang terbanyak jumlah penduduknya adalah di Kecamatan Sagulung dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 209.386 jiwa. Di tempat kedua sampai dengan kelima terbanyak diikuti kecamatan Batam Kota, Sekupang, Batu Aji dan Bengkong masing-masing yaitu 198.617 jiwa, 156.283 jiwa, 139.512 jiwa dan 119.836 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Kecamatan Bulang dan Galang masing-masing sebanyak 10.707 jiwa dan 16.989 jiwa.

Selanjutnya penduduk di Kota Batam dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, berdasarkan gambar piramida penduduk selama tahun 2015-2019 Kota Batam didominasi penduduk usia 25-29 tahun dan usia 30-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Kota Batam dapat dikatakan masih cukup baik.



Gambar 2. 11 Piramida Penduduk Kota Batam Tahun 2019

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Dengan masih baiknya angka ketergantungan penduduk, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kota Batam relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Selain itu, hal ini berarti Kota Batam mendapatkan bonus demografi yang sangat besar, sehingga perlu upaya keras agar tidak muncul fenomena *middle income trap* pada kelompok penduduk usia muda. Kemudian jumlah balita dalam tahun yang sama cenderung mengalami fluktuasi, sama halnya dengan penduduk yang akan mengenyam pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Umur Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
0-4	81.190	92.564	93.263	85827	96.567
5-9	111.027	116.069	118.651	112.214	120.019
10-14	96.123	96.134	99.574	101.753	101.044
15-19	66.674	63.996	62.978	74.287	71.468
20-24	82.549	90.469	90.335	88.073	88.193
25-29	115.286	109.010	107.717	102.543	101.949
30-34	134.506	129.005	125.605	118.741	116.903
35-39	124.220	122.036	123.597	125.651	126.368
40-44	90.181	94.487	95.938	103.188	106.561
45-49	58.023	61.127	64.084	73.296	76.432
50-54	32.711	34.746	35.476	42.319	45.158
55-59	20.087	20.301	20.759	23.998	25.507
60-64	11.680	12.315	12.134	14.463	15.178
65-69	6.408	6.499	6.486	8.017	8.577
70-74	3.430	3.365	3.115	3.768	4.048
≥75	3.092	2.917	2.538	3.328	3.579

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dianalisis menurut agama sebagian besar atau rata-rata sebesar 71 persen beragama Islam, 18 persen beragama Kristen Protestan, sebanyak 7 persen beragama Budha dan 3 persen beragama Kristen Khatolik, sisanya beragama Hindu, Khonghucu dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persentase penduduk menurut agama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Persentase Penduduk Kota Batam Menurut Agama Tahun 2015-2019

Tahun		Penduduk Menurut Agama						
		Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Khonghucu	AK
2015	Jmlh	737.902	191.941	34.476	854	70.700	1.123	191
	%	71.14	18.51	3.32	0.08	6.82	0.11	0.02
2016	Jmlh	752.268	193.952	35.248	755	71.525	1.104	188
	%	71.30	18.38	3.34	0.07	6.78	0.10	0.02
2017	Jmlh	758.805	195.489	34.938	735	72.653	1.100	221
	%	71.32	18.37	3.28	0.07	6.83	0.10	0.02
2018	Jmlh	951,586	240,822	43,484	931	19,681	1.128	1,596
	%	71.56	18.11	3.27	0.07	1.48	0.10	0.12
2019	Jmlh	792,010	200,245	36,438	775	75,978	1.142	1,329
	%	71.51	18.08	3.29	0.07	6.86	0.10	0.12

Ket: AK : Alirah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dilihat menurut jenis kelamin rata-rata sejak tahun 2015-2019 sebesar 51 persen adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 49 persen berjenis kelamin perempuan. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Secara rinci penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan	Tahun									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belakang Padang	11,111	10,725	9,673	9,556	9,708	9,603	9,740	9,647	10,346	10,123
Batu Ampar	40,522	35,690	33,983	31,352	34,358	31,783	34,703	32,191	32,028	30,065
Sekupang	65,881	61,407	63,757	60,408	65,456	62,181	67,091	63,910	71,697	69,617
Nongsa	31,686	28,158	33,362	29,771	34,356	30,738	35,317	31,685	37,388	34,459
Bulang	6,045	5,246	5,246	4,678	5,267	4,702	5,286	4,726	5,819	5,491
Lubuk Baja	47,695	46,173	43,048	43,145	43,270	43,481	43,459	43,790	45,223	45,337
Sungai Beduk	45,102	44,546	37,185	49,506	37,427	49,959	37,638	50,380	43,727	42,493
Galang	8,857	7,728	8,742	7,622	8,436	7,352	8,454	4,726	9,166	8,017
Bengkong	54,196	53,023	53,023	53,197	53,886	54,205	54,695	55,171	57,085	54,838
Batam Kota	78,753	76,324	121,954	121,998	128,645	129,029	135,339	136,115	88,073	88,214
Sagulung	85,580	78,170	131,131	111,224	139,791	118,883	148,565	126,694	97,295	91,038
Batu Aji	59,719	56,434	90,564	82,915	94,204	86,476	97,781	90,007	66,402	63,610
Sub Total	607,400	581,585	631,338	605,061	654,804	628,392	678,068	651,705	564,249	543,302
Grand Total	1,141,816		1,236,339		1,283,196		1,329,773		1,107,551	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Selanjutnya struktur penduduk juga dapat dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan 12 tahun, selama periode 2015-2019 tingkat pendidikan di Kota Batam sebenarnya cenderung mengalami tren penurunan, hal ini lebih disebabkan karena berkaitan dengan

adanya pembersihan data ganda nasional oleh tim pengolah data administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019

No	Keterangan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tdk/Blm Sekolah	324,439	33,403	335,720	338.619	356.323
2	Blm Tamat SD/Sederajat	94,213	93,145	101,667	105.817	107.600
3	Tamat SD/Sederajat	76,800	78,183	78,830	81.212	82.286
4	SLTP/Sederajat	86,312	88,291	89,505	92.036	94.094
5	SLTA/Sederajat	398,142	395,508	394,753	397.142	399.039
6	DI/II	4,422	4,217	4,108	4.098	4.079
7	Akademi/DIII/Sarjana Muda	18,191	18,935	19,386	19.909	20.164
8	D IV/S1	33,277	35,890	38,401	40.915	42.176
9	S2	1,288	1,366	1,479	1.620	1.688
10	S3	103	102	92	98	102
	Jumlah	1.037,187	1,055,040	1,063,941	1.081.466	1.107.551

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Sedangkan berdasarkan data yang bersumber dari Ranperda RTRW 2020 – 2040 proyeksi jumlah penduduk di Kota Batam tahun 2018-2037, proyeksi rata-rata peningkatan jumlah penduduk tertinggi ada pada Kecamatan Sei Beduk, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,48% per tahun. Kemudian peningkatan penduduk kedua tertinggi berada pada Kecamatan Lubuk Baja. Lebih lanjut penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2. 12 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (1)

Kecamatan	Tahun						
	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
Belakang Padang	19,567	19,165	18,783	18,361	17,958	17,556	17,154
Batu Ampar	11,061	10,991	10,920	10,850	10,779	10,709	10,638
Sekupang	14,883	14,642	14,402	14,161	13,921	13,681	13,440
Nongsa	73,671	70,271	66,871	63,471	60,071	56,672	53,272
Bulang	204,727	209,438	214,149	218,861	223,572	228,283	232,995
Lubuk Baja	72,831	74,490	76,149	77,808	79,467	81,126	82,786
Sungai Beduk	194,481	199,756	205,032	210,308	215,583	220,859	226,135
Galang	137,999	139,025	140,051	141,077	142,103	143,129	144,155

Kecamatan	Tahun						
	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
Bengkong	144,058	147,254	150,451	141,077	142,103	143,129	144,155
Batam Kota	93,239	92,567	91,914	91,251	90,599	89,925	89,263
Sagulung	57,715	54,787	51,858	48,929	46,001	43,072	40,144
Batu Aji	114,828	115,592	116,356	117,119	117,883	118,647	119,411
Total	1.139.060	1,147,988	1,156,916	1,165,843	1,174,771	1,183,698	1,192,626

Tabel 2. 13 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (2)

Kecamatan	Tahun						
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Belakang Padang	16,751	16,349	15,947	15,544	15,142	14,740	14,337
Batu Ampar	10,568	10,497	10,426	10,356	10,920	10,215	10,144
Sekupang	13,200	12,959	12,719	12,478	12,238	11,997	11,757
Nongsa	49,872	46,472	43,072	39,673	36,273	66,871	29,473
Bulang	237,706	242,417	247,129	251,840	256,551	261,263	265,974
Lubuk Baja	84,445	76,149	87,763	89,422	91,081	92,740	94,339
Sungai Beduk	231,410	205,032	241,961	247,237	252,513	257,788	263,064
Galang	145,181	140,051	147,233	148,259	149,285	150,311	151,337
Bengkong	166,432	150,451	172,825	176,021	179,217	182,414	185,610
Batam Kota	88,600	91,914	87,724	86,612	85,949	85,286	84,624
Sagulung	37,215	51,858	31,358	28,429	25,501	22,572	19,643
Batu Aji	120,174	118,647	121,702	122,466	123,229	123,993	124,757
Total	1,201,554	1,162,796	1,219,409	1,228,337	1,237,899	1,280,190	1,255,120

Tabel 2. 14 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan Tahun 2021-2037 (3)

Kecamatan	Tahun		
	2035	2036	2037
Belakang Padang	13,935	13,533	13,131
Batu Ampar	10,074	10,003	9,933
Sekupang	11,516	11,276	11,036
Nongsa	26,073	22,674	19,274
Bulang	270,686	275,397	280,108
Lubuk Baja	96,058	97,717	99,376
Sungai Beduk	268,340	273,615	278,891
Galang	152,363	153,389	154,415
Bengkong	188,806	192,002	195,199
Batam Kota	83,961	83,298	82,635
Sagulung	16,715	13,786	10,857
Batu Aji	125,521	126,284	127,048
Total	1,264,047	1,272,975	1,281,903

Sumber: BPS Kota Batam

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing dari fokus kesejahteraan masyarakat tersebut diuraikan pada bagian berikut ini.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial

Kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah melalui pembangunan. Namun, peningkatan kesejahteraan tanpa adanya pemerataan ekonomi dapat memicu permasalahan ketimpangan ekonomi yang dapat timbul menjadi permasalahan daerah. Oleh karena itu, fokus kesejahteraan ekonomi harus didampingi oleh fokus pemerataan untuk dapat menciptakan daerah sejahtera. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, PDRB per kapita, serta kemiskinan dan ketimpangan.

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhannya

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke

tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Batam tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 15 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Batam Tahun 2015-2020
Menurut Lapangan Usaha**

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Berlaku				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.288.942	1.378.947	1.470.332	1.623.073	1.646.099
Pertambangan dan Penggalian	91.106	92.963	87.661	90.038	88.644
Industri Pengolahan	72.303.679	75.340.147	81.309.771	89.033.272	93.734.812
Pengadaan Listrik dan Gas	2.246.811	2.447.146	2.412.892	2.546.179	2.488.482
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	236.455	240.704	253.735	265.305	259.336
Konstruksi	25.459.591	26.863.953	30.978.207	34.277.773	32.129.210
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.137.123	8.929.540	10.125.672	11.034.233	9.669.266
Transportasi dan Pergudangan	4.674.682	4.915.765	5.053.549	4.486.068	2.373.240
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934.735	3.223.837	3.598.329	4.029.884	2.070.411
Informasi dan Komunikasi	2.596.827	2.994.680	3.481.299	3.951.889	4.562.519
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.647.970	4.932.470	5.446.173	5.820.534	5.698.733
Real Estate	1.867.631	2.014.594	1.991.820	2.055.830	1.670.682
Jasa Perusahaan	5.872	6.300	7.071	6.459	3.356
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.470.584	1.565.853	1.784.198	1.852.523	2.087.618
Jasa Pendidikan	1.196.851	1.411.697	1.538.120	1.614.489	1.553.450
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	890.987	1.012.782	1.075.301	1.115.638	1.096.472
Jasa Lainnya	503.361	553.956	671.014	686.927	231.853
PDRB KOTA BATAM	130.553.208	137.925.335	151.285.143	164.490.116	161.364.182

Sumber: BPS Kota Batam

Berdasarkan tabel di atas nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 164,48 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 13,19 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 151,28 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Selanjutnya pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB mengalami penurunan yang dapat disebabkan adanya pandemi Covid-19, yang mana pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB adalah 161,36 triliun rupiah.

Sementara itu berdasarkan harga konstan angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 102,71 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 108,80 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Batam mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,72 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ADHK ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Namun sayangnya, akibat pandemi nilai PDRB ADHK Kota Batam mengalami penurunan karena banyaknya sektor ekonomi yang tidak dapat beroperasi secara normal seperti tahun sebelumnya. Uraian lebih rinci terkait nilai PDRB ADHK ditampilkan pada Tabel 2.16.

Tabel 2. 16 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	989.932	1.024.382	1.052.290	1.119.082	1.110.806
Pertambangan dan Penggalian	70.379	70.667	69.412	70.403	67.843
Industri Pengolahan	52.548.433	53.433.484	55.303.168	59.176.665	61.411.918
Pengadaan Listrik dan Gas	1.367.186	1.450.646	1.435.884	1.496.666	1.456.717
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	190.727	189.992	195.956	210.127	204.174
Konstruksi	18.483.679	19.051.510	20.618.936	22.046.334	20.507.500

Kategori Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.141.980	6.374.988	6.816.434	7.123.699	6.073.380
Transportasi dan Pergudangan	2.936.143	3.053.305	3.097.091	2.570.098	1.425.894
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.182.536	2.310.789	2.545.996	2.790.962	1.521.452
Informasi dan Komunikasi	2.462.979	2.647.703	2.987.911	3.345.657	3.950.887
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.456.319	3.498.887	3.711.970	3.895.276	3.849.266
Real Estate	1.472.911	1.529.946	1.451.476	1.481.957	1.233.882
Jasa Perusahaan	4.870	5.070	5.434	4.960	2.811
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1.048.871	1.048.678	1.135.773	1.148.087	1.288.465
Jasa Pendidikan	918.843	985.480	1.007.812	1.014.976	954.483
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	719.025	789.705	818.901	836.098	818.624
Jasa Lainnya	374.890	397.324	464.153	473.307	151.553
PDRB KOTA BATAM	95.369.705	97.862.556	102.718.599	108.800.353	106.029.655

Sumber: BPS Kota Batam

Sektor-sektor yang ada dalam PDRB juga dapat diukur kontribusinya terhadap keseluruhan perekonomian di Kota Batam. Selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2019, perekonomian Kota Batam didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Secara serentak ketiga sektor tersebut menyumbang lebih dari 80 persen terhadap keseluruhan perekonomian Kota Batam dari tahun 2016 hingga 2020. Adanya pandemi Covid-19 tidak mengubah kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian Kota Batam.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Batam selama 5 tahun terakhir dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, pada tahun 2020 mencapai 57,29 persen. Selama lima tahun terakhir, sektor Konstruksi menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa kedua terbesar di Kota Batam. Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

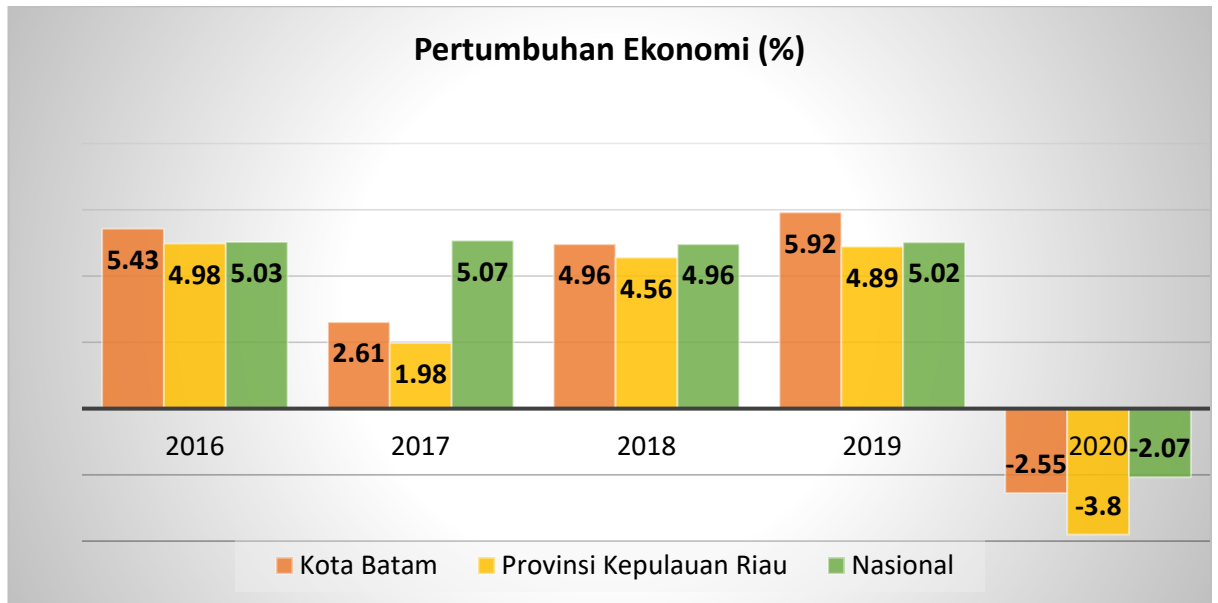
Sepeda Motor menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah Kontruksi. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor cenderung mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 peranannya mencapai 5,73 persen. Selanjutnya, di urutan keempat, ditempati oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi.

Untuk dapat melihat struktur perekonomian suatu daerah, selain menggunakan persentase kontribusi sektoral, dapat juga dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan perekonomian daerah (PDRB).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi di Kota Batam menunjukkan kinerja yang fluktuatif. Meskipun selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi, pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Batam turun di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Batam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi perdagangan internasional di Kota Batam cukup tinggi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, fluktuasi perekonomian yang cukup besar ini juga terjadi karena perekonomian Kota Batam sangat terfokus pada industri pengolahan yang menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan perekonomian sehingga guncangan pada sektor ini akan mempengaruhi keseluruhan perekonomian daerah.

Dari Gambar 2.13 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam berada pada posisi tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2016-2018). Pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan

Riau. Namun, akibat pandemi Covid-19, tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2020 menjadi negatif, hal yang sama terjadi pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 Kota Batam lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak lebih baik dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 2. 12 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 11,97 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,62 persen. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan kunjungan wisman yang menyebabkan membaiknya tingkat hunian kamar. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-17,02 persen), serta jasa perusahaan (-8,74 persen) yang mengalami pertumbuhan negatif. Lebih lanjut, enam lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan antara lain: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan pertumbuhan sebesar 6,35 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,43 persen; Industri Pengolahan

Sebesar 7,00 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,23 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,23 persen; Real Estate sebesar 2,10 persen. Sedangkan sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang melambat antara lain: Konstruksi sebesar 6,92 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,51 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,62 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 11,97 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,94 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,08 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,71 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial sebesar 2,10 persen; dan Jasa Lainnya sebesar 1,97 persen. Namun, akibat adanya pandemi Covid-19, pertumbuhan sub sektor kategori lapangan usaha mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019, yang dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 17 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Batam Tahun 2015-2020 Menurut Lapangan Usaha

Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,35%	3,51%	3,48%	2,72%	6,35%	-0,47%
Pertambangan dan Penggalian	0,45%	0,56%	0,41%	-1,78%	1,43%	-3,64%
Industri Pengolahan	6,92%	4,64%	1,68%	3,50%	7,00%	3,78%
Pengadaan Listrik dan Gas	3,29%	7,51%	6,10%	-1,02%	4,23%	-2,67%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46%	5,32%	-0,39%	3,14%	7,23%	-2,83%
Konstruksi	8,46%	6,70%	3,07%	8,23%	6,92%	-6,98%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,60%	6,63%	3,79%	6,92%	4,51%	-14,73%
Transportasi dan Pergudangan	6,26%	6,11%	3,99%	1,43%	-17,02%	-44,52%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,44%	6,11%	5,88%	10,18%	9,62%	-45,49%
Informasi dan Komunikasi	5,81%	6,70%	7,50%	12,85%	11,97%	18,09%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03%	6,75%	1,23%	6,09%	4,94%	-1,18%
Real Estate	5,29%	4,67%	3,87%	-5,13%	2,10%	-16,74%
Jasa Perusahaan	4,21%	5,18%	4,10%	7,19%	-8,74%	-43,33%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,32%	8,10%	-0,02%	8,31%	1,08%	12,23%

Kategori Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Pendidikan	4,65%	5,15%	7,25%	2,27%	0,71%	-5,96%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,51%	4,71%	9,83%	3,70%	2,10%	-2,09%
Jasa Lainnya	3,78%	3,50%	5,98%	16,82%	1,97%	-67,98%
PDRB KOTA BATAM	6,87%	5,43%	2,61%	4,96%	5,92%	-2,55%

Sumber: BPS Kota Batam

Untuk meningkatkan kestabilan perekonomian daerah, Kota Batam harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan yang ada saat ini perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan *multiplier effect* dari sektor tersebut terhadap sektor-sektor lain. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan rantai pasok industri lokal dengan meningkatkan daya saing industri-industri kecil dan menengah yang ada sehingga kebutuhan pasokan industri besar dapat sebagian dialihkan dari bahan baku impor ke bahan baku lokal serta meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Informasi ini dapat digunakan di antaranya untuk Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai, indeksasi APBD, sebagai proksi perubahan biaya hidup. Tingkat inflasi yang rendah menunjukkan kestabilan nilai uang terhadap barang yang tersedia di suatu wilayah.

Berdasarkan data dari tahun 2015 hingga 2019, laju inflasi di Kota Batam menunjukkan penurunan dari 4,73 persen di tahun 2015 menjadi 1,97 persen di tahun 2019. Inflasi Kota Batam yang sebelumnya lebih tinggi dibandingkan laju

inflasi provinsi dan nasional dari tahun 2015 hingga 2018 menjadi yang paling rendah di tahun 2019.

**Tabel 2. 18 Laju Inflasi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
Tahun 2015-2019**

Indikator	Inflasi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Batam	4,73	3,61	4,13	3,65	1,97
Tanjungpinang	2,46	3,06	3,37	2,36	2,40
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber: BPS Kota Batam

Secara umum, meskipun laju inflasi di Kota Batam lebih tinggi dibandingkan laju inflasi provinsi dan nasional, inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%. Meski demikian, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Pada Tahun 2019 PDRB per kapita Kota Batam sebesar 119,5 juta rupiah yang artinya pendapatan tiap penduduk Kota Batam secara rata-rata mencapai 119,5 juta rupiah per orang per tahun. Nilai PDRB per kapita ini terus tumbuh dari 101,7 juta rupiah di tahun 2015. Berdasarkan informasi PDRB per Kapita, kesejahteraan masyarakat Kota Batam lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional meskipun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2. 19 PDRB per Kapita Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	Pendapatan Perkapita (ribu rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Batam	101.722	105.591	107.486	113.768	119.537
Kepulauan Riau	109.769	112.300	109.333	116.580	122.430
Nasional	45.141	47.957	51.360	55.429	59.060

Sumber: BPS Kota Batam

2.2.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan

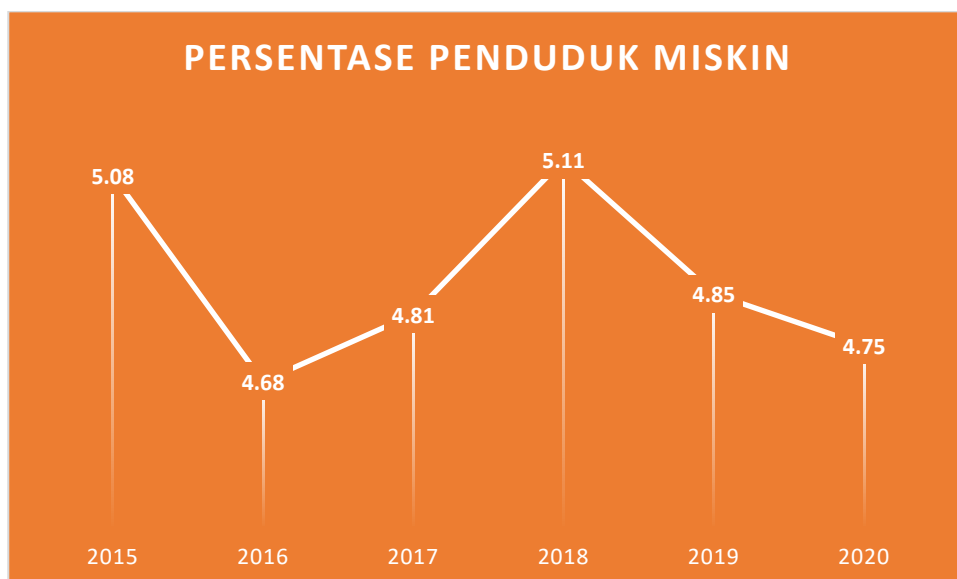
Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Tingkat

kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin.

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kota Batam dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan dari 59,9 ribu jiwa pada tahun 2015 menjadi 66,21 ribu jiwa pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 tersebut mengalami penurunan dari sebesar 67,41 ribu jiwa di tahun 2018. Meskipun secara jumlah mengalami peningkatan, secara umum, persentase penduduk miskin mengalami penurunan karena terjadinya peningkatan jumlah populasi penduduk di Kota Batam. Tren persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 5,08 persen di tahun 2015 menjadi 4,85 persen di tahun 2019. Meski demikian, pada tahun 2018 persentase penduduk miskin memiliki nilai yang paling besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020 tidak berpengaruh signifikan dalam upaya penurunan persentase kemiskinan Kota Batam. Meskipun demikian, penurunan persentase kemiskinan tidak setinggi tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan tahun 2020 adalah sebesar 4,75% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 67.060 jiwa.



Gambar 2. 13 Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-2020

Sumber: BPS Kota Batam

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Indikator ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Secara umum, garis kemiskinan di Kota Batam lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau. Garis kemiskinan tersebut terus meningkat dari 525.452 rupiah per bulan per orang pada tahun 2015 menjadi 659.170 rupiah per bulan per orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan pada tahun 2019 di Kota Batam adalah sebesar 686.956 rupiah. Keluarga yang mempunyai pengeluaran di bawah nilai tersebut akan dihitung sebagai keluarga miskin dalam perhitungan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Tabel 2. 20 Garis Kemiskinan Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Wilayah Kepulauan Riau- Batam	Garis Kemiskinan (Rupiah/ kapita sebulan)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Batam	525.452	565.380	591.589	650.406	686.956
Provinsi Kepulauan Riau	448.652	490.157	513.237	559.291	594.059

Sumber: BPS Kota Batam

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan

untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai Indeks Gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

1. $GR < 0,4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
2. $0,4 < GR < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
3. $GR > 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

Rasio Gini di Kota Batam lebih rendah daripada rasio gini provinsi dan nasional. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Batam termasuk tinggi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019 angka gini ratio mengalami penurunan dari 0,34 di tahun 2015 menjadi 0,31 di tahun 2017. Angka gini ratio Kota Batam menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong 'rendah'. Situasi ini membutuhkan upaya agar ketimpangan tidak menjadi lebih tinggi seiring meningkatnya perekonomian. Berikut ini adalah perkembangan gini ratio di Kota Batam dari tahun 2015-2019.

Tabel 2. 21 Rasio Gini Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	Rasio Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Batam	0,33	0,31	0,31	0,33	0,32
Provinsi Kepri	0,35	0,33	0,33	0,34	0,33
Nasional	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38

Sumber: BPS Kota Batam

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index = P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2015 – 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batam berfluktuasi. Akan tetapi, Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2015 – 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batam secara umum mengalami penurunan meskipun sempat mencapai puncak pada tahun 2018. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Selain memiliki tren yang menurun, indeks kedalaman kemiskinan Kota Batam juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kota Batam lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.

Tabel 2. 22 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Batam	0,70	0,49	0,79	0,81	0,53
Provinsi Kepri	0,97	0,89	0,97	1	0,69
Nasional	1,97	1,94	1,83	1,71	1,55

Sumber: BPS Kota Batam

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indikator ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2015 – 2019, indeks keparahan kemiskinan di Kota Batam berfluktuasi. Akan tetapi, Bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2015 – 2019, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Batam secara umum mengalami penurunan dari 0,14 di tahun 2015 menjadi 0,09 di tahun 2019 meskipun sempat mencapai puncak pada tahun 2017 menjadi 0,22. Selain memiliki tren yang menurun, indeks keparahan kemiskinan Kota Batam juga lebih rendah dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Batam lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.

Tabel 2. 23 Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Batam	0,14	0,10	0,22	0,19	0,09
Provinsi Kepri	0,25	0,20	0,23	0,24	0,12
Nasional	0,53	0,53	0,48	0,44	0,37

Sumber: BPS Kota Batam

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial terbagi menjadi lima bagian, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender, pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka partisipasi murni. Sedangkan analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup. Analisis kinerja kesejahteraan sosial di bidang ketenagakerjaan dilakukan terhadap indikator persentase penduduk yang memiliki lahan dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut adalah 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Manusia Kota Batam Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,94	12,95	13,15	13,16
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14
Kesehatan						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,09	73,19	73,24	73,29	NA
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran per Kapita	Ribu Rupiah	16.889	17.131	17.560	18.146	18.095
Indeks Pembangunan Manusia		79,79	80,26	80,54	81,09	81,11

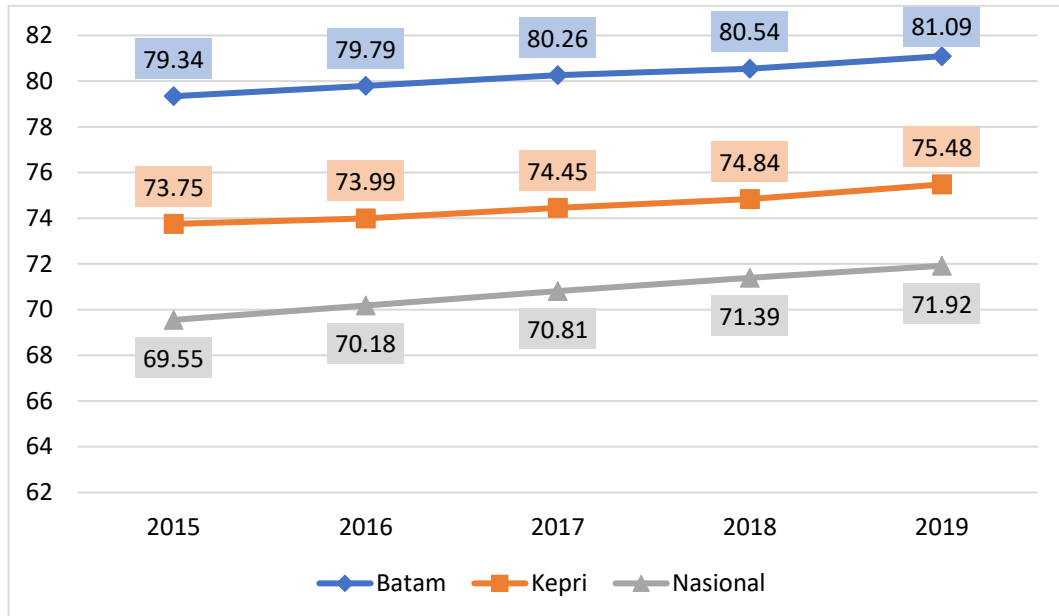
Sumber: BPS Kota Batam

IPM Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 28 hingga 55 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 0.55, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,2 tahun) dan pengeluaran per kapita (+586 ribu rupiah).

Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Batam agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara seketika karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang.

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas

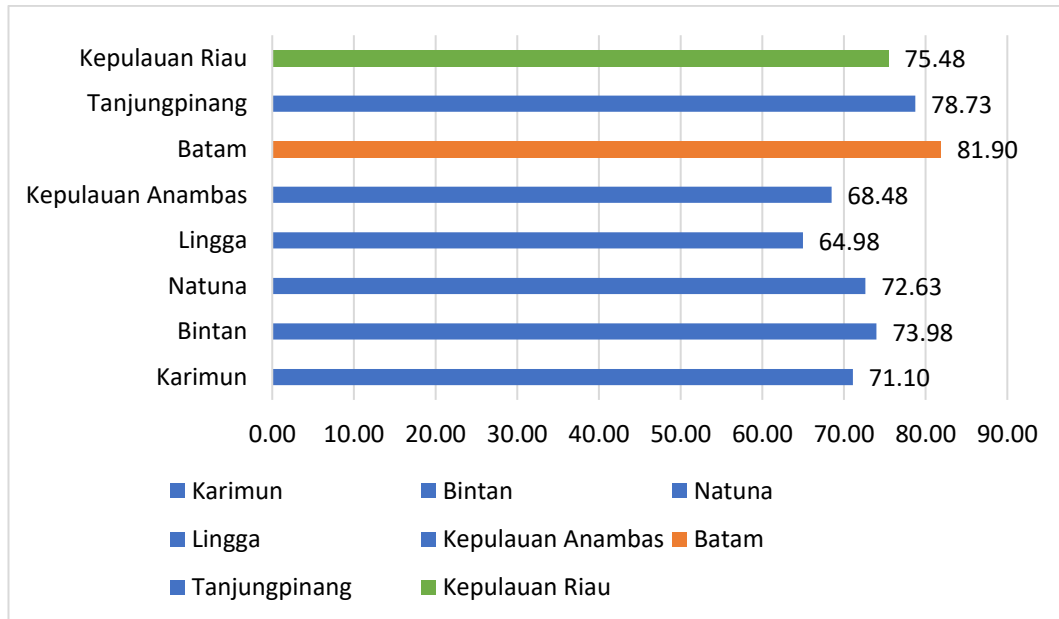
disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional.



Gambar 2. 14 Perbandingan IPM Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Batam berada pada kondisi yang lebih baik. Pada tingkat provinsi, IPM Kepulauan Riau memiliki tren meningkat sejalan dengan peningkatan IPM di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut IPM Kota Batam mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batam relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan dan Nasional. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dan juga di tingkat nasional, maka sudah selayaknya IPM Kota Batam berada di atas level provinsi dan nasional.



Gambar 2. 15 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2020 yaitu 81,11. tingkat kedua diduduki oleh Kota Tanjungpinang dengan nilai IPM sebesar 78,91 dan kemudian disusul oleh Kabupaten Bintan sebesar 74,13. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus terus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing (*competitiveness*) yang semakin dinamis di era global saat ini.

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran/indikator yang mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan, partisipasi dan kontrol atas pembangunan serta

memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Dalam tiga tahun terakhir, skor IDG di Kota Batam mengalami tren kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 55,28 kemudian tahun 2018 menurun menjadi 53,29, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 58,40 (BPS Kota Batam, 2020). Skor IDG tersebut lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Kepulauan Riau sebesar 61,58 (BPS Prov Kepri, 2020) dan IDG Nasional sebesar 72,10. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih berada pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.

Untuk skor IPG di Kota Batam dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar 94,21, kemudian tahun 2018 menjadi 94,22, dan pada tahun 2019 menjadi 94,42 dan tahun 2020 menjadi 94,43 (BPS Kota Batam, 2021). Skor IPG tersebut lebih tinggi dibandingkan IPG Provinsi Kepulauan Riau sebesar 93,31 (2021). Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan di Kota Batam dalam aspek (i) *a long and healthy life*; (ii) *knowledge*; (iii) *decent standard of living* lebih baik daripada pencapaian kesetaraan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2.3 Indeks Makro Urusan Pendidikan

Indikator makro di bidang pendidikan dilakukan terhadap harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

HLS Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 13,15 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,15 tahun atau setara dengan Diploma I.

Selain menunjukkan tren yang meningkat pada HLS dari tahun 2015 hingga 2019, analisis perbandingan HLS Kota Batam dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki HLS di atas rata-rata Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,60 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 12,65 sedangkan di tahun 2019 HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 12,83 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 13,15 di tahun 2019. Meskipun masih di atas rata-rata provinsi, HLS Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Natuna.

**Tabel 2. 25 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019**

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kepulauan Riau	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83
Karimun	11,87	12,14	12,15	12,16	12,30
Bintan	11,98	12,27	12,60	12,75	12,95
Natuna	13,85	13,86	13,87	13,88	13,89
Lingga	11,78	12,06	12,42	12,42	12,44
Kepulauan Anambas	11,63	11,87	12,14	12,32	12,75
Batam	12,65	12,67	12,94	12,95	13,15
Tanjungpinang	14,05	14,06	14,07	14,08	14,09

Sumber: BPS Kota Batam

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama

sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 11,13 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Batam yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,13 tahun atau telah menamatkan kelas XI.

Selain menunjukkan tren yang meningkat pada RLS dari tahun 2015 hingga 2019, analisis perbandingan RLS Kota Batam dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Kota Batam memiliki RLS di atas rata-rata Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015, RLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,65 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 10,81 sedangkan di tahun 2019 HLS Provinsi Kepulauan Riau sebesar 9,99 dibandingkan dengan HLS Kota Batam sebesar 11,13 di tahun 2019. Angka RLS Kota Batam merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

**Tabel 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau
Tahun 2015-2019**

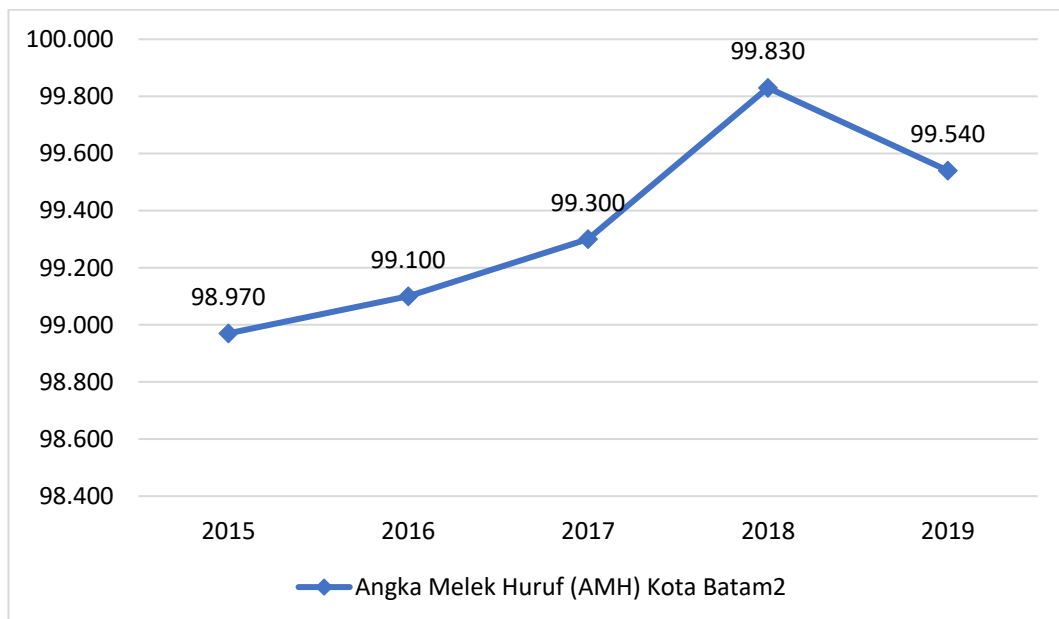
Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kepulauan Riau	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99
Karimun	7,74	7,75	7,80	7,81	7,92
Bintan	8,32	8,33	8,34	8,35	8,36
Natuna	8,45	8,46	8,47	8,71	8,72
Lingga	5,54	5,85	5,97	6,27	6,51
Kepulauan Anambas	6,62	6,63	6,69	6,70	6,91
Batam	10,81	11,10	11,11	11,12	11,13
Tanjungpinang	9,95	9,96	9,97	9,98	9,99

Sumber: BPS Kota Batam

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15

tahun ke atas. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Secara umum, AMH Kota Batam mengalami peningkatan dari 98,97 di tahun 2015 menjadi 99,54 di tahun 2019. Meski demikian, terjadi penurunan pada tahun 2019 dari sebelumnya sebesar 99,83 di tahun 2018.



Gambar 2. 16 Angka Melek Huruf Kota Batam 2015-2019

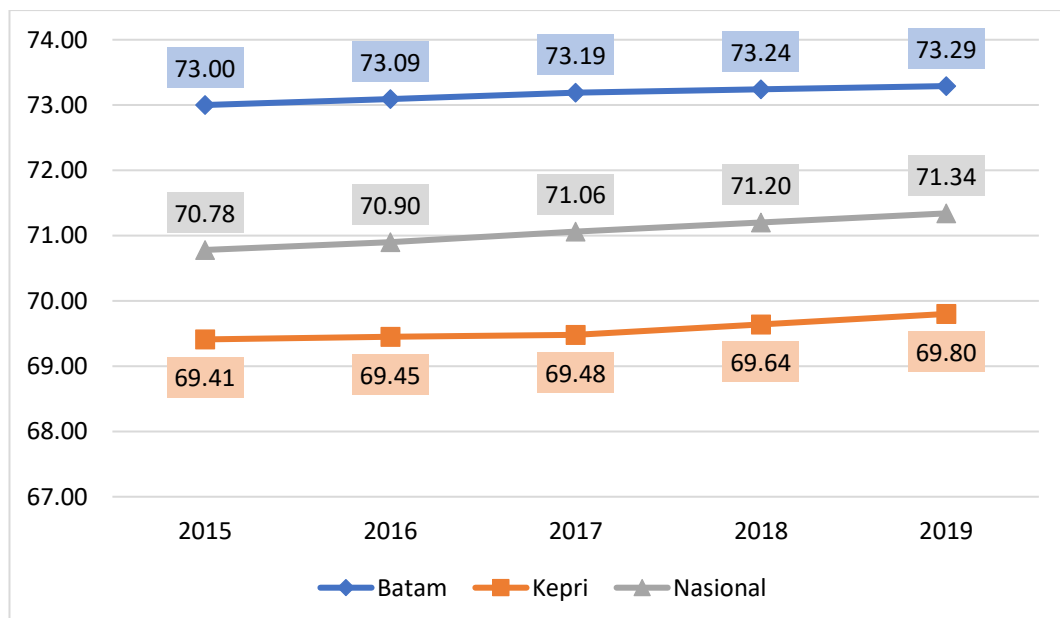
Sumber: BPS Kota Batam

2.2.2.4 Indeks Makro Urusan Kesehatan

Indikator makro bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator angka usia harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi balita gizi buruk.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Kota Batam pada tahun 2019 adalah 73,29 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2019 akan dapat hidup sampai 73 atau 74 tahun. Angka ini lebih baik dibandingkan dengan AHH Provinsi Kepulauan Riau dan nasional masing-masing sebesar 71,34 dan 69,80 di tahun 2019. Peningkatan AHH dari 73,00 di tahun 2015 menjadi 73,29 di tahun 2019 ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

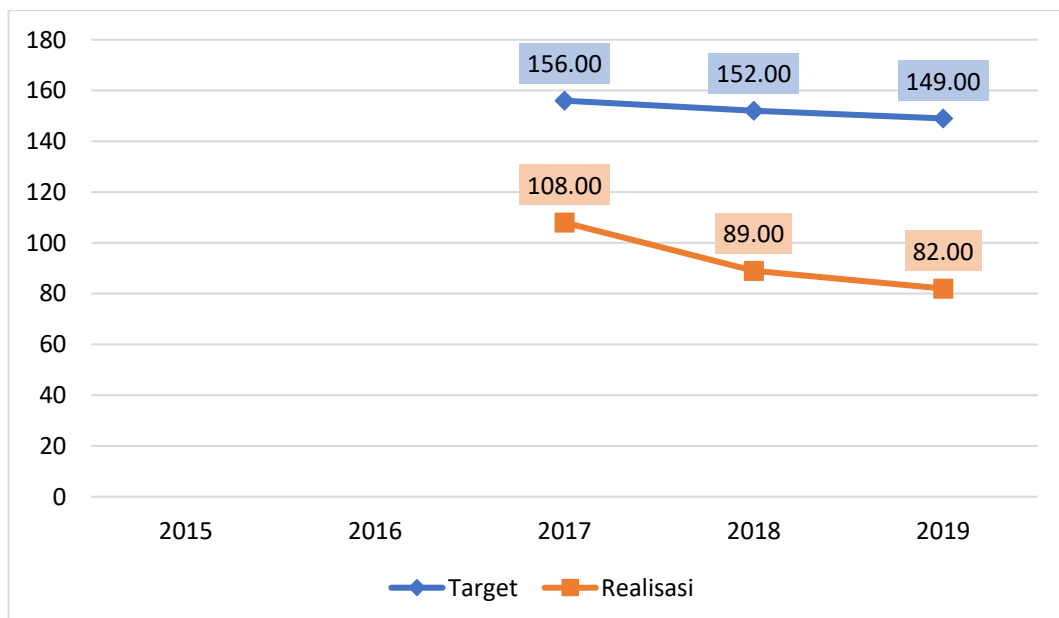


Gambar 2. 17 Angka Harapan Hidup Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi, program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data tahun 2015 hingga 2019, AKI menunjukkan tren yang menurun. Angka Kematian Ibu di Kota Batam pada tahun 2019, adalah sebesar 82. Artinya terdapat 82 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Nilai ini lebih baik dibandingkan target yang sebesar 149.

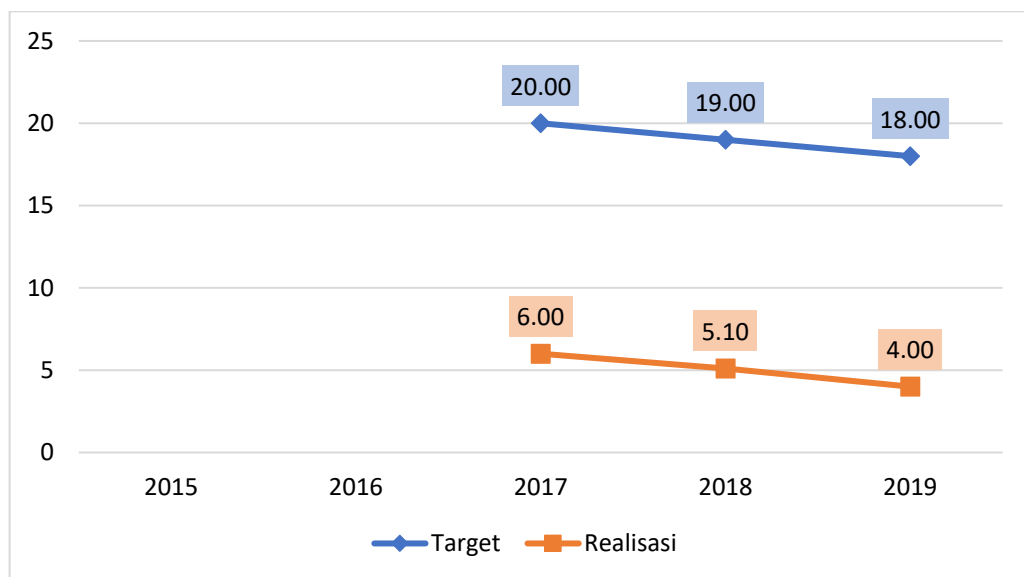


Gambar 2. 18 Angka Kematian Ibu Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan data BPS Kota Batam, dari tahun 2015 hingga 2019, AKB Kota Batam terus membaik atau menunjukkan penurunan dari 6 di tahun 2017 menjadi 4 di tahun 2019. Hal ini dapat diinterpretasikan dengan adanya 4 kematian bayi sebelum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran di tahun 2019. Realisasi AKB di Kota Batam lebih baik dibandingkan targetnya sebesar 20 di tahun 2017 dan 18 di tahun 2019.

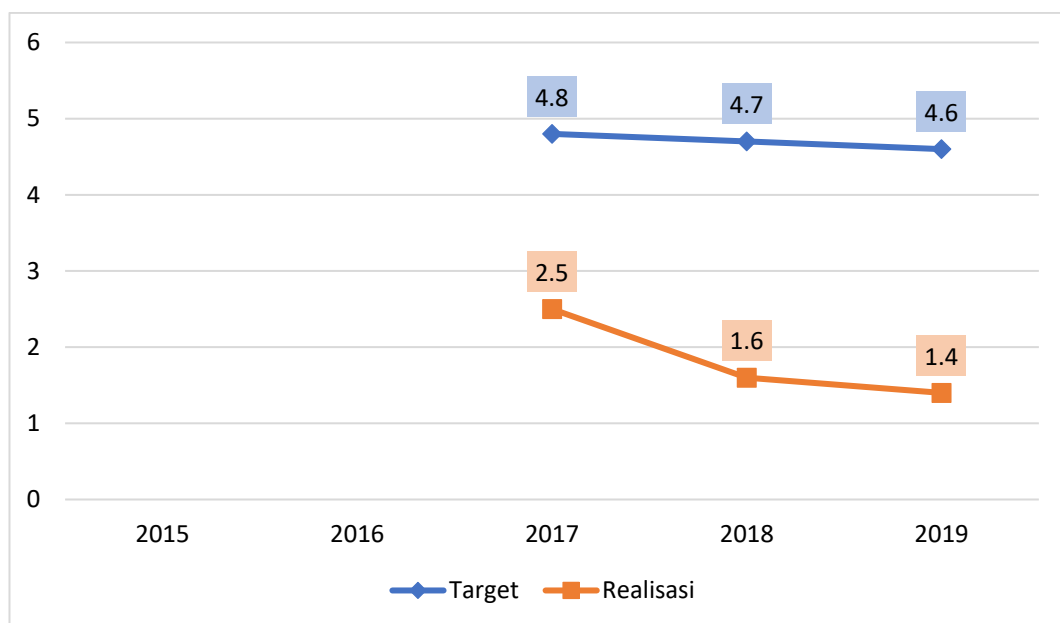


Gambar 2. 19 Angka Kematian Bayi Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Prevalensi balita kekurangan gizi adalah persentase balita yang mengalami kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Prevalensi balita kekurangan gizi di Kota Batam terus membaik atau menunjukkan tren yang menurun dari sebesar 2,5 persen di tahun 2017 menjadi 1,4 persen di tahun 2019. Nilai ini lebih baik (lebih rendah) dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 4,8 di tahun 2017 dan 4,6 di tahun 2019.

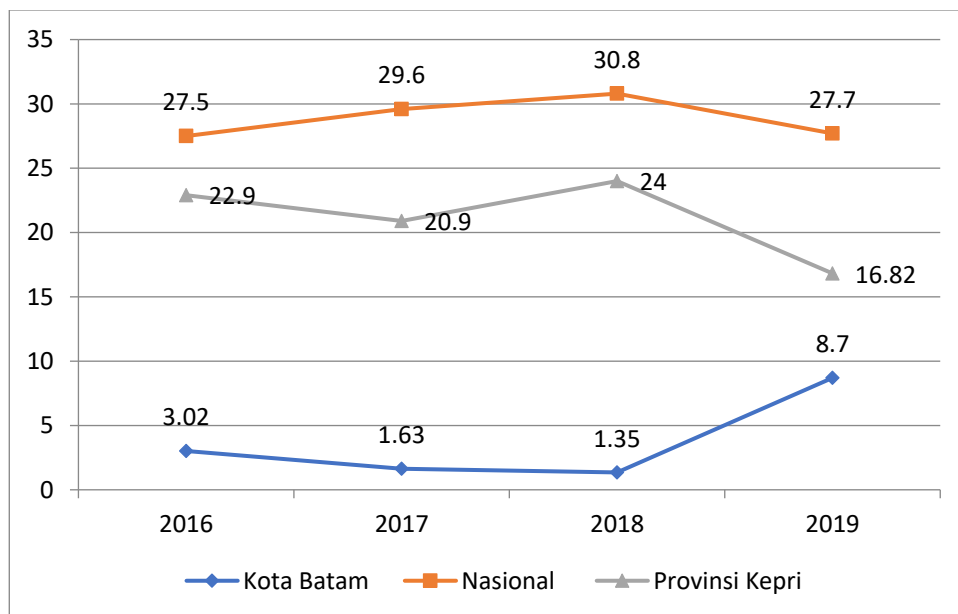


Gambar 2. 20 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan

menggunakan standar WHO tahun 2005. Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

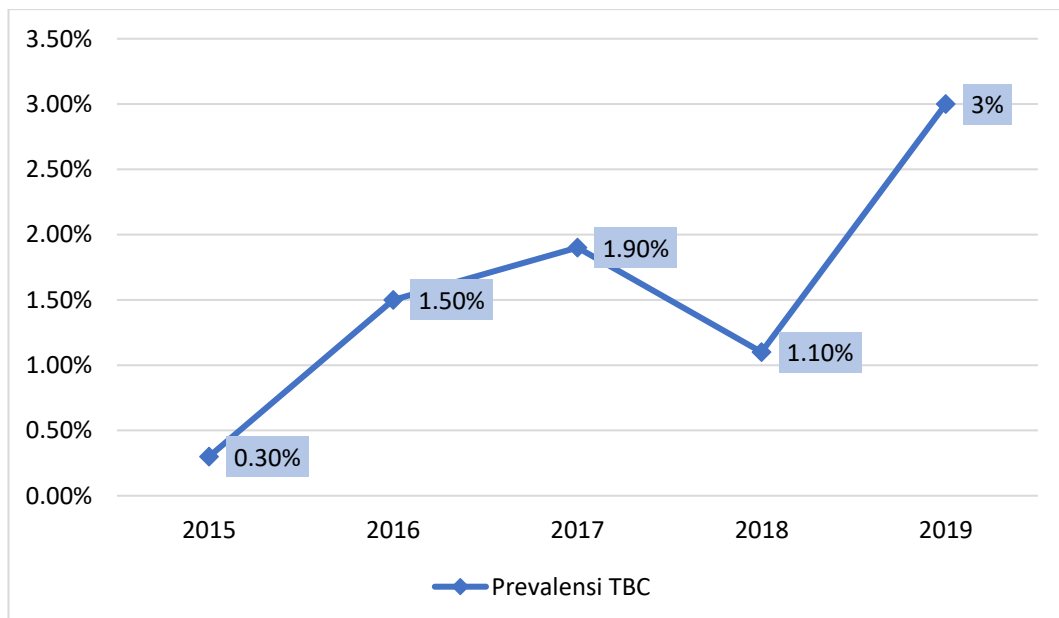


Gambar 2. 21 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Berdasarkan data yang ada, stunting di Kota Batam lebih rendah dari stunting di tingkat provinsi maupun nasional.

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Terdapat beberapa spesies *Mycobacterium*, antara lain: *M. tuberculosis*, *M. africanum*, *M. bovis*, *M. Leprae* dsb. Yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Untuk menentukan berhasil tidaknya suatu program maka dibutuhkan indikator-indikator sebagai bahan evaluasi dan monitoring. Sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs menetapkan target prevalensi TBC pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk.



Gambar 2. 22 Prevalensi TBC Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Prevalensi TBC di Kota Batam menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan angka prevalensi TBC yang meningkat. Angka prevalensi TBC sebesar 3 persen pada tahun 2019 juga menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan target nasional sebesar 0,245%.

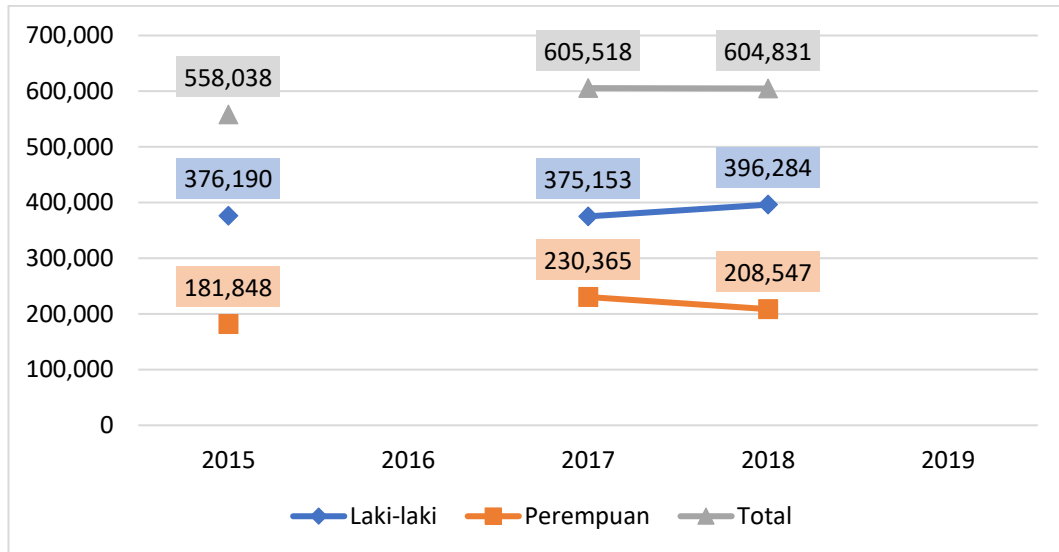
Secara umum, kinerja indikator makro kesehatan di Kota Batam menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kinerja provinsi maupun nasional. Meski demikian, pada indikator prevalensi stunting dan prevalensi TBC,

meningkatnya tren pada kedua indikator tersebut perlu menjadi perhatian karena kinerja yang baik akan menunjukkan angka prevalensi yang semakin rendah. Selain itu, perlu dicermati pada prevalensi balita gizi buruk hasilnya kurang konsisten dengan prevalensi stunting dimana prevalensi balita gizi buruk menunjukkan penurunan namun prevalensi stunting justru meningkat secara signifikan di tahun 2019.

2.2.2.5 Indikator Makro Ketenagakerjaan

Angkatan Kerja Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Secara umum, jumlah angkatan kerja di Kota Batam mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019 meskipun terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dari 605.518 jiwa di tahun 2018 menjadi 604.831 di tahun 2019. Penurunan jumlah angkatan kerja ini terjadi karena terjadi penurunan yang cukup besar pada jumlah angkatan kerja berjenis kelamin perempuan dari 230.365 jiwa di tahun 2018 menjadi 208.547 di tahun 2019.



Gambar 2. 23 Angkatan Kerja Kota Batam menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Batam yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat.

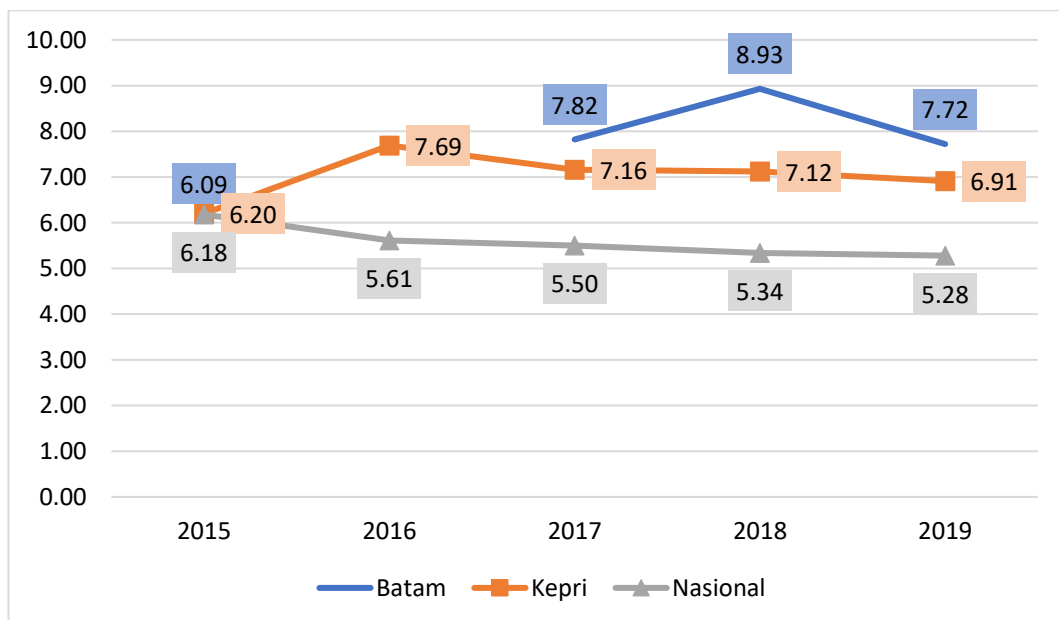
Tabel 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam Tahun 2015-2019

Tahun	TPAK	TPT
2015	67,46	6,09
2016	n/a	n/a
2017	67,65	7,82
2018	65,52	8,93
2019	66,35	7,72

Sumber: BPS Kota Batam

Nilai TPAK Kota Batam dari tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan angka yang fluktuatif meskipun secara umum memiliki tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menjadi angkatan kerja mengalami penurunan baik karena bersekolah maupun mengurus rumah tangga.

Hal berbeda ditunjukkan oleh TPT yang memiliki nilai yang juga fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2019 namun dengan kecenderungan meningkat. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja di Kota Batam.



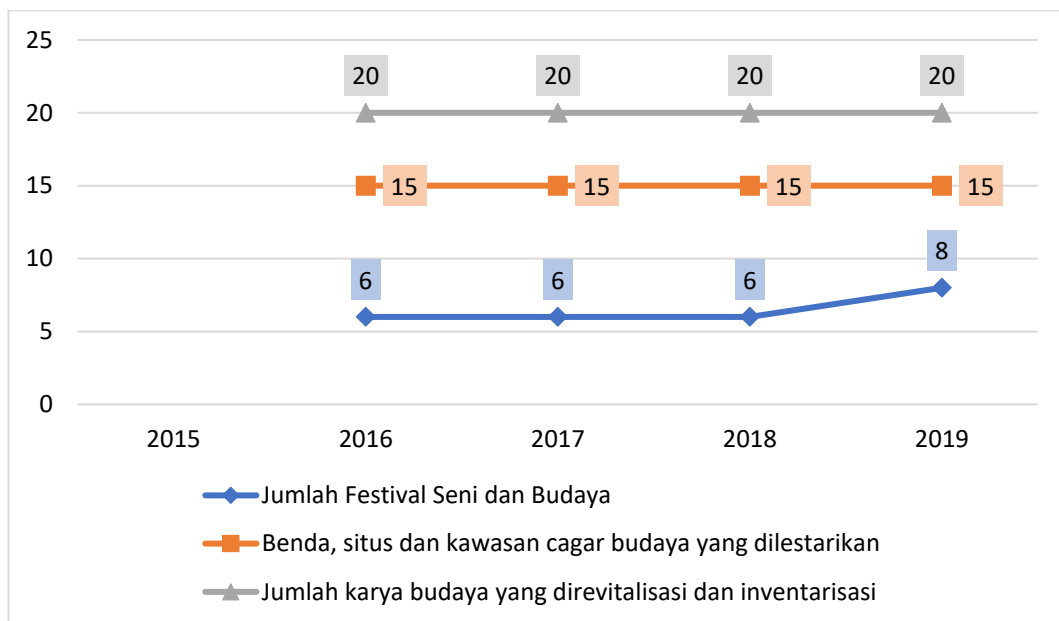
Gambar 2. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Analisis perbandingan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional menunjukkan bahwa TPT Kota Batam memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja penyerapan maupun penyediaan lapangan pekerjaan di Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Dari tahun 2015 hingga 2019, Kota Batam menyelenggarakan 6 festival seni dan budaya setiap tahunnya hingga tahun 2018 dan meningkat menjadi 8 pada tahun 2019 serta melestarikan 15 benda, situs dan kawasan cagar budaya setiap tahunnya. Selain itu, Kota Batam juga melakukan revitalisasi dan inventarisasi 20 karya budaya setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2019. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya sebagai berikut:



Gambar 2. 25 Indikator Makro Kinerja Seni dan Budaya Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

Terkait bidang olahraga, Pemerintah Kota Batam telah membangun gedung olahraga yang dibangun pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebanyak 1 unit. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat peningkatan pada persentase

angka partisipasi masyarakat yang berolahraga dari 60 persen pada tahun 2016 menjadi 70 persen pada tahun 2019. Selain itu, juga terdapat peningkatan pada persentase organisasi pemuda yang aktif dari 29 persen di tahun 2016 menjadi 36 persen di tahun 2017 dan menjadi 45 persen di tahun 2019.

Tabel 2. 28 Indikator Makro di Bidang Olah Raga Kota Batam Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Sarana dan Prasarana Olah Raga Terbangun	Unit			1	1	0
Persentase Angka Partisipasi Masyarakat yang berolahraga	Persen		60	65	70	
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	persen		29	36	45	

Sumber: BPS Kota Batam

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan seluruh indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan berdasarkan (1) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (2) urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar dan (3) urusan pilihan. Pembahasan indikator dilakukan terhadap indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan setiap urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Layanan Wajib

Pada bagian ini pembahasan terdiri dari 6 urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam UU23/2014, yakni urusan (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan (6) urusan sosial sosial. Pembahasan lebih lanjut secara berurutan disampaikan pada sub bab selanjutnya.

2.3.1.1 Urusan Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Kinerja indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kota Batam selama periode 2015-2019 menunjukkan capaian yang positif, hal ini diketahui karena realisasi indikator setiap tahunnya telah mencapai/melampaui target yang ditentukan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada paragraf berikutnya.

Untuk jenjang SD/MI, APS di tahun 2019 telah mencapai 99 persen, hal ini bermakna sekitar 99 persen penduduk usia 7-12 tahun di Kota Batam sedang bersekolah di jenjang SD/MI, hanya sekitar 1 (satu) persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sedang bersekolah di jenjang SD/MI. Sementara untuk jenjang SMP/MTs APS di tahun 2019 telah mencapai 99,97 persen, hal ini bermakna sekitar 99,97 persen penduduk usia 13-15 tahun di Kota Batam sedang bersekolah di jenjang SD/MI, dan sekitar 0,3 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sedang bersekolah di jenjang SD/MI.

Tabel 2. 29 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Target	80,00	90,00	92,00	98,00	99,00
		Realisasi	80,03	92,00	92,74	99,34	99,97
ii	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Target	85,03	90,52	92,91	99,00	99,50
		Realisasi	79,03	91,52	92,91	99,34	99,97

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs dan PAUD

Kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan PAUD Kota Batam selama periode 2015-2019 secara umum menunjukkan capaian yang positif, hal ini diketahui karena realisasi indikator untuk jenjang SD dan SMP setiap tahunnya telah mencapai/melampaui target yang ditentukan, sementara itu untuk

jenjang PAUD mulai tahun 2018 hingga 2019 telah melampaui target. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada paragraf berikutnya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan secara gradual. Pada tahun 2017 tercatat APK sebesar 104, kemudian di tahun 2019 menjadi 104,9. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang bersekolah di tingkat SD/MI sebesar 104,9%. Angka realisasi di atas 100 persen dapat bermakna adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau adanya pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kota Batam mampu menampung penduduk usia sekolah SD/MI lebih dari target yang sesungguhnya. Jika dibandingkan dengan capaian APK Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 96,10 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan secara gradual. Pada tahun 2017 tercatat APK sebesar 106, kemudian di tahun 2019 menjadi 105,9. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang bersekolah di tingkat SMP/MTs sebesar 105,9%. Angka realisasi di atas 100 persen dapat bermakna adanya pendaftaran siswa usia dini (usia dibawah 13 tahun), pendaftaran siswa yang telat bersekolah (usia diatas 15 tahun), atau adanya pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kota Batam mampu menampung penduduk usia sekolah SMP/MTs lebih dari target yang sesungguhnya. Jika dibandingkan dengan capaian APK SMP/MTs Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 96,92 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2016 tercatat APK sebesar 65,70 kemudian di

tahun 2019 menjadi 95,6. Angka tersebut bermakna bahwa persentase penduduk di Kota Batam yang berumur 3-6 tahun mengikuti jenjang PAUD sebesar 95,6%. Jika dibandingkan dengan capaian APK PAUD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 21,17 persen, maka capaian APK Kota Batam telah melebihi capaian provinsi.

Tabel 2. 30 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTS dan PAUD Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Target	119,00	103,47	93	104	104
		Realisasi	107,96	103,47	104	104,6	104,9
ii	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Target	100,00	93,5	93,51	94,32	95,13
		Realisasi	100,72	102,45	104,22	104,62	105,91
iii	APK PAUD	Target	77,2	77,6	79,26	80,91	82,57
		Realisasi	63,72	65,70	77,13	95,5	95,6

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

C. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan PAUD

Kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI, SMP/MTs dan PAUD Kota Batam selama periode 2015-2019 secara umum menunjukkan capaian yang positif, hal ini diketahui karena realisasi APM untuk jenjang SD sejak tahun 2017 hingga 2019 telah mencapai/melampaui target, APM jenjang sejak tahun 2016 hingga 2019 setiap tahunnya telah mencapai/melampaui target, untuk APM PAUD sejak 2016 hingga 2019 telah mencapai/melampaui target yang ditentukan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada paragraf berikutnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat APM sebesar 92,81 persen, mengalami kenaikan menjadi 96 persen di tahun 2019. Angka tersebut bermakna, sekitar 96 persen dari 136.401 penduduk di Kota Batam yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/Sederajat. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi

Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 86,04 persen, maka capaian APM Kota Batam telah melebihi capaian provinsi.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 tercatat APM sebesar 82,91 persen, mengalami kenaikan menjadi 92,20 persen di tahun 2019. Angka tersebut bermakna, sekitar 92,20 persen dari 56.199 penduduk di Kota Batam yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 yang tercatat 75,54 persen, maka capaian APM Kota Batam telah melebihi capaian provinsi.

Sedangkan untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang PAUD selama lima tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 72,35 persen, mengalami peningkatan menjadi 79,56 persen di tahun 2019. Angka tersebut bermakna sekitar 79,56 persen dari 56.199 penduduk di Kota Batam yang berusia 3-6 tahun memasuki PAUD.

Tabel 2. 31 Kinerja Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTS dan PAUD Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	
i	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Target	91,00	91,9	92,25	92,92	93,91	
		Realisasi	93,38	92,06	92,81	93,5	96	
ii	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Target	88,00	90	90,75	91,5	92,25	
		Realisasi	81,01	91,25	91,76	91,80	92,22	
iii	AMP PAUD		Target	72,00	74,35	75,95	77,54	79,14
			Realisasi	72,35	74,90	76,00	77,80	79,56

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

D. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Kinerja indikator ini untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kota Batam selama periode 2015-2019 secara umum menunjukkan penurunan. Untuk jenjang SD pada tahun 2016 tersedia 37 gedung untuk 10.000

penduduk usia 7-12 tahun, menurun menjadi 30 gedung di tahun 2019. Sementara untuk jenjang SMP tahun 2016 tersedia 36 gedung untuk 10.000 penduduk usia 13-15 tahun, menurun menjadi 33 gedung di tahun 2019. Penurunan ini dikarenakan penambahan penduduk usia SD dan SMP lebih cepat dari penambahan gedung SD dan SMP. Hal ini menunjukkan ketersediaan layanan pendidikan SD dan SMP mengalami *overcapacity* yang berpotensi menurunkan angka lama sekolah dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 2. 32 Kinerja Indikator Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI, SMP/MTS Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	Target	24,00	25,00	26,00	27,00	30,00
		Realisasi	24,45	37,74	28,71	29,29	30,47
ii	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	Target	34,36	36,11	34,16	35,67	33,73
		Realisasi	34,36	36,11	34,16	35,67	33,73

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

E. Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs

Standar rasio guru terhadap murid SD dan sederajat berdasarkan PP No.74 Tahun 2008 adalah 20:1, dengan kata lain satu guru mengajar 20 murid. Berdasarkan standard tersebut, pada tahun 2019 kondisi rasio guru terhadap murid jenjang SD/MI sebesar 22:1 atau satu guru mengajar 22 murid. Sementara itu untuk jenjang SMP/MTs, pada tahun 2019 tercatat 21:1 atau satu guru mengajar 21 murid. Dengan demikian Kota Batam masih membutuhkan tambahan guru pada jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs.

Tabel 2. 33 Kinerja Indikator Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI, SMP/MTS Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI	Target	28:1	28:1	28:1	28:1	28:1
		Realisasi	23:1	21:1	20:1	22:1	22:1
ii	Rasio Guru Terhadap Murid SMP/MTs	Target	32:1	32:1	32:1	32:1	32:1
		Realisasi	23:1	17:1	17:1	20:1	21:1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

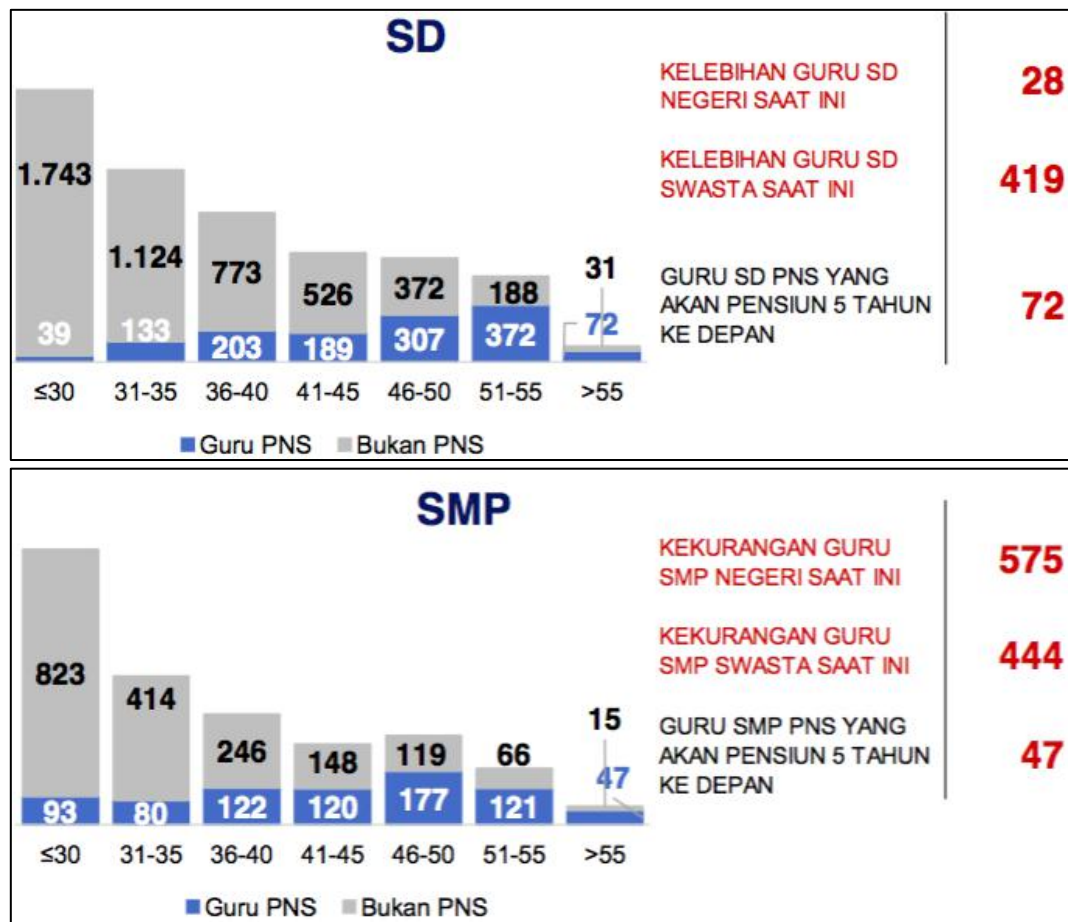
Namun demikian terdapat perbedaan data antara Dinas Pendidikan dan Kemendikbud. Data versi Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Tabel 2.34) mencatat bahwa rasio guru terhadap murid SD tahun 2017 sebesar 1:23, tahun 2018 sebesar 1:26 dan tahun 2019 sama dengan versi Dinas Pendidikan yakni sebesar 1:22. Berdasarkan data tersebut, tiga tahun terakhir rasio guru terhadap murid SD masih belum memenuhi standar. Untuk jenjang SMP/MTs tahun 2017 tercatat sebesar 1:21, tahun 2018 menurun menjadi sebesar 1:24 dan tahun 2019 sama dengan versi Dinas Pendidikan yakni 1:21. Berdasarkan data tersebut tiga tahun terakhir rasio guru terhadap murid SMP/MTs masih belum memenuhi standar.

Tabel 2. 34 Rasio Guru Terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019

Rasio Guru Terhadap Murid					
TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1:23	1:21	1 : 26	1 : 24	1:22	1:21

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (PDSPK)

Selanjutnya, berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah Kota Batam publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 mencatat bahwa Kota Batam pada jenjang SD memiliki kelebihan 28 guru SD Negeri dan 419 guru SD swasta. Untuk jenjang SMP memiliki kekurangan 575 guru SMP Negeri dan kekurangan 444 guru SMP Swasta.



Gambar 2. 26 Kelebihan dan Kekurangan Guru jenjang SD/MI dan SMP/MTs

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud
(Data Verifikasi PDSPK dan Ditjen. GTK, November 2019)

F. Rasio Rombongan Kelas (Rombel) Terhadap Murid

Berdasarkan Pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 jumlah peserta didik tingkat SD dalam satu rombongan minimal 20 dan maksimal 28, sedangkan jumlah peserta didik tingkat SMP dalam satu rombongan minimal 20 dan maksimal 32. Kondisi di Kota Batam menurut data publikasi Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, rasio rombongan jenjang SD tahun 2019 sebesar 1:29 artinya lebih satu poin dari standar ideal. Sementara rasio rombongan jenjang SMP tahun 2019 sebesar 1:33 artinya lebih satu poin dari standar ideal. Kedua kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kota Batam masih perlu penambahan Ruang Kelas Baru atau penambahan jumlah sekolah SD dan SMP.

**Tabel 2. 35 Rasio Rombel terhadap Murid SD/MI dan SMP/MTs
Tahun 2017-2019**

Rasio Rombel Terhadap Murid					
TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1:29	1:33	1 : 30	1 : 35	1:29	1 : 33

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (PDSPK)

G. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, angka putus sekolah SD atau SMP menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD atau sebelum tamat SMP. Perkembangan angka putus sekolah di Kota Batam tahun 2015-2019 secara umum mengalami penurunan. Untuk jenjang SD angka putus sekolah tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu 72 (0,05 persen) anak mengalami putus sekolah sebelum lulus SD, sementara tahun 2019 menurun menjadi 37 (0,03 persen) anak. Untuk jenjang SMP angka putus sekolah tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 54 (0,09 persen) anak putus sekolah sebelum menamatkan SMP, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 17 (0,03 persen) anak.

**Tabel 2. 36 Kinerja Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI, SMP/MTS
Tahun 2015-2019**

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Angka Putus Sekolah SD/MI	Target	0,08	0,021	0,019	0,015	0
		Realisasi	0,03	0,03	0,01	0,05	0,03
	Jmlh peserta didik SD/MI (Dapodik Kemendikbud)		125.231	128.851	136.695	138.576	139.173
	Jumlah Putus Sekolah SD (orang)		37	38	18	72	37
ii	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Target	0,08	1,51	1,2	1	0,85
		Realisasi	0,05	0,05	0,01	0,09	0,03

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Jmlh peserta didik SMP/MTs (Dapodik Kemendikbud)	42.067	45.154	51.278	54.006	57.813
	Jumlah Putus Sekolah SMP (angka putus sekolah x jumlah peserta didik)	21	22	4	54	17

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Namun demikian, terjadi perbedaan data antara Dinas Pendidikan Kota Batam dengan data Neraca Pendidikan Daerah publikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan selisih yang cukup besar. Angka putus sekolah versi data Kemendikbud pada tahun 2019 terdapat 33 anak yang tidak menamatkan jenjang SMP, sementara terdapat 65 anak yang tidak menamatkan jenjang SD.

TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	SD	SMP		SD	SMP
PUTUS SEKOLAH	185	49	PUTUS SEKOLAH	115	111
MENGULANG	511	140	MENGULANG	875	183

TAHUN 2019		
	SD	SMP
PUTUS SEKOLAH	65	33
MENGULANG	885	171

Gambar 2. 27 Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang Versi Publikasi Kemendikbud Tahun 2017-2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Data Verifikasi PDSPK)

Lebih lanjut, merujuk pada angka mengulang (tidak naik kelas) dari data Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, jenjang SD selama tiga tahun mengalami peningkatan, di tahun 2017 terdapat 551 anak SD yang mengulang kelas, meningkat menjadi 885 di tahun 2019. Untuk jenjang SMP angka mengulang tahun 2017 sebesar 140 anak, meningkat menjadi 183 anak di tahun 2018, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 menjadi 183 anak SMP yang mengulang kelas.

Dalam perspektif kedepan, angka putus sekolah perlu ditekan hingga 0 persen, sehingga seluruh anak pada jenjang SD dan SMP harus benar-benar tidak terputus dalam mengenyam pendidikannya. Sementara angka mengulang (tidak naik kelas) pun perlu ditekan, karena angka ini merepresentasikan kualitas pendidikan di Kota Batam.

H. Persentase Tingkat Kelulusan

Indikator Tingkat Kelulusan di Kota Batam untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selama lima tahun memiliki capaian sebesar 100 persen, angka ini telah mencapai target setiap tahunnya. Kondisi demikian bermakna selama tahun 2015 hingga tahun 2019 siswa SD dan SMP seluruhnya dapat lulus.

Tabel 2. 37 Kinerja Indikator Persentase Tingkat Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	% Tingkat Kelulusan SD/MI	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100
ii	% Tingkat Kelulusan SMP/MTs	Target	100	100	100	100	100
		Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

I. Bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Baik

Kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Kondisi bangunan sekolah kondisi baik pada jenjang SD/MI di Kota Batam mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir, di tahun 2018 tercatat 91,22 persen, kemudian meningkat menjadi 96,25 persen di tahun 2019. Sementara kondisi bangunan sekolah baik pada jenjang SMP/MTs sejak tahun 2015 konsisten mengalami tren peningkatan, semula 92,45 persen kemudian menjadi 96,66 persen di tahun 2019.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat persoalan yang mengarah pada terbatasnya anggaran dalam meningkatkan bangunan sekolah kondisi baik di Kota Batam, namun hal tersebut seyogyanya tidak menjadi masalah utama. Hal yang perlu difokuskan kedepan selain mencari sumber pembiayaan non APBD dalam membantu meningkatkan bangunan sekolah dalam kondisi baik, pemerintah Kota Batam juga perlu memperkuat pengawasan

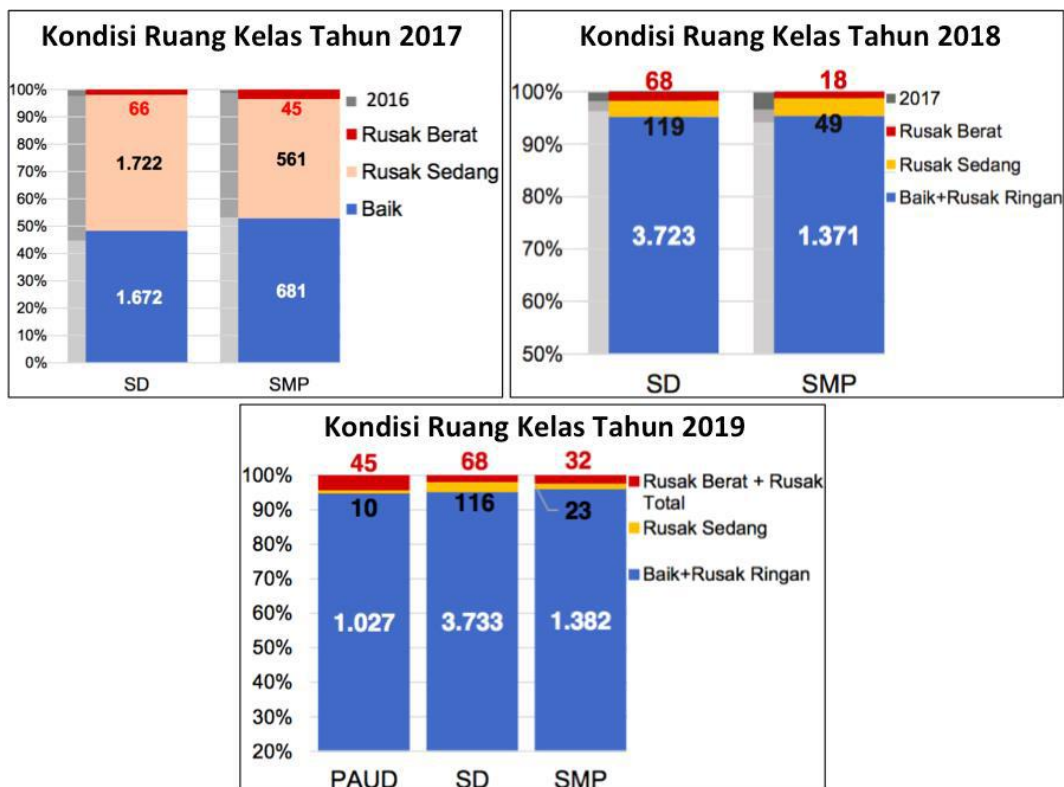
dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi bangunan sekolah, sehingga umur pakai dapat sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 2. 38 Kinerja Indikator Bangunan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Baik Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Sekolah Pendidikan SD bangunan kondisi Baik	Target	92,90	93,14	93,82	93,79	95,22
		Realisasi	92,92	93,82	93,17	91,22	96,25
ii	Sekolah Pendidikan SMP bangunan kondisi Baik	Target	92,28	92,49	92,22	93,79	94,72
		Realisasi	92,45	92,22	93,00	91,45	96,66

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Sementara itu data yang bersumber dari Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud menunjukkan indikator Kondisi Ruang Kelas (RK) jenjang SD dan SMP tahun 2017 hingga 2018 serta jenjang PAUD tahun 2019. Indikator tersebut mengklasifikasikan kondisi ruang kelas kedalam tiga kriteria yakni rusak berat, rusak sedang dan baik+rusak ringan. Secara umum kondisi RK di Kota Batam menunjukkan perkembangan yang positif. Pada jenjang SD/MI di tahun 2017 tercatat 66 RK rusak berat, 1.722 RK rusak sedang dan 1.672 RK baik, di tahun 2018 angka RK rusak berat meningkat menjadi 68, rusak sedang menurun menjadi 119 dan RK kondisi baik menjadi 3.723. Sementara itu di tahun 2019 RK rusak berat menurun menjadi 45, RK rusak sedang menurun menjadi 116 dan RK kondisi baik meningkat menjadi 3.733. Kondisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batam fokus kepada penurunan RK rusak sedang, sebanyak 1.603 RK meningkat dari kondisi rusak sedang ke kondisi baik, untuk tahun 2019 tidak banyak perubahan status RK, hanya terdapat peningkatan 3 RK kondisi rusak sedang ke kondisi baik.



Gambar 2. 28 Kondisi Ruang Kelas Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Data Verifikasi PDSPK)

Pada jenjang SMP/MTs di tahun 2017 tercatat 45 RK rusak berat, 561 RK rusak sedang dan 681 RK kondisi baik, memasuki tahun 2018 tercatat RK rusak berat menurun menjadi 18, RK rusak sedang menurun signifikan menjadi 49 dan RK kondisi baik meningkat menjadi 1.371, sedangkan di tahun 2019 RK rusak berat meningkat menjadi 32, RK rusak sedang berkurang menjadi 23, dan RK kondisi baik meningkat menjadi 1.382. Kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Batam di tahun 2018 berfokus pada memperbaiki 27 RK rusak berat, 512 rusak sedang, sementara di tahun 2019 berfokus pada memperbaiki 26 RK rusak sedang. Untuk jenjang PAUD di tahun 2019 tercatat terdapat 45 RK rusak berat, 10 RK rusak sedang dan 1.027 RK kondisi baik.

J. Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan PAUD Memiliki Kondisi Sarpras Baik

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib

memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kondisi sekolah memiliki sarana dan prasarana baik di Kota Batam untuk jenjang SD mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2017 yang hanya 53,63 persen menjadi 73 persen di tahun 2019. Kemudian untuk jenjang SMP terjadi peningkatan sejak tahun 2017 yang hanya 44,8 persen, kemudian secara bertahap naik menjadi 68,23 persen di tahun 2018 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 73 persen di tahun 2019. Pada jenjang PAUD data dari Dinas Pendidikan Kota Batam menunjukkan bahwa tahun 2019 sudah 80 persen PAUD yang memiliki sarana dan prasarana baik.

Kondisi demikian berimplikasi menghambat akreditasi khususnya pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kota Batam. Berdasarkan data yang telah disampaikan dapat juga dimaknai bahwa tahun 2019 masih terdapat 27 persen satuan pendidikan SD dan SMP yang belum mendapat akreditasi A.

Tabel 2. 39 Kinerja Indikator Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Memiliki Kondisi Sarpras Baik Tahun 2015-2019

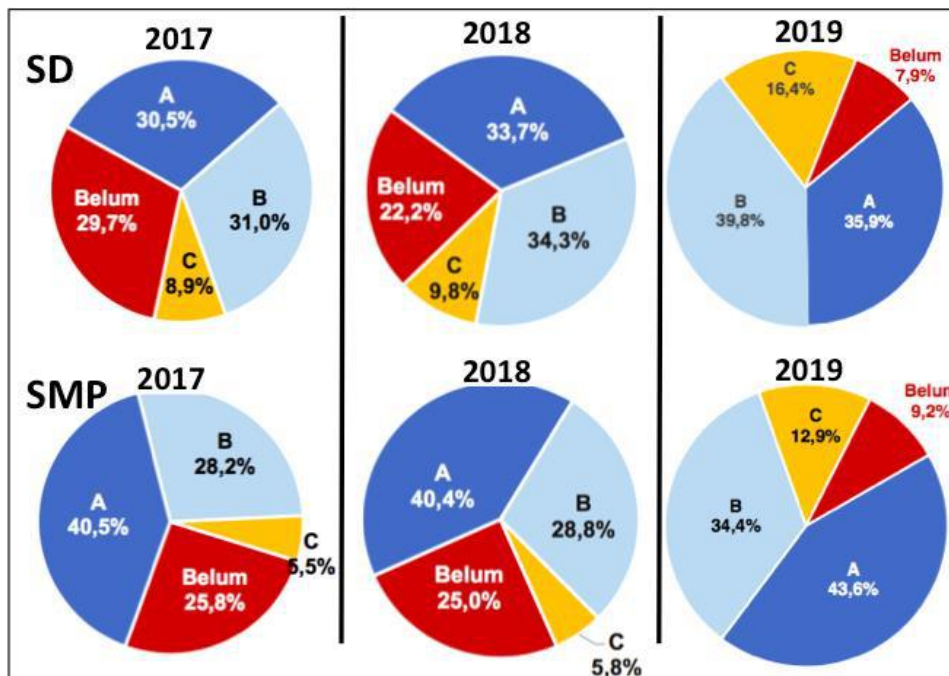
No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Sekolah Dasar memiliki kondisi sarana dan prasarana baik	Target	60	60,20	64	70	72
		Realisasi	53,10	53,12	53,63	72,00	73,00
ii	Sekolah Menengah memiliki kondisi sarana dan prasarana baik	Target	60,00	60,20	60,60	70	71,30
		Realisasi	44,00	44,10	44,8	68,23	73,00
iii	Sekolah PAUD yang memiliki sarana dan prasarana baik (%)	Target	71,26	71,26	74,60	77,00	80,00
		Realisasi	71,89	72,89	74,87	78,00	80,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

K. Akreditasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Perkembangan akreditasi sekolah jenjang SD dan SMP di Kota Batam selama tahun 2017 hingga 2019 secara umum menunjukkan kondisi yang positif. Di tahun 2017 terdapat 29,7 persen sekolah SD yang belum terakreditasi, selama dua tahun meningkat menjadi hanya 7,9 persen sekolah yang belum terakreditasi di tahun 2019. Sementara pada tahun 2019 akreditasi sekolah SD didominasi nilai B sebesar 39,8 persen. Untuk jenjang SMP, sekolah yang belum terakreditasi di tahun 2017 sebesar 25,8 persen, meningkat sedikit menjadi 25 persen di tahun 2018, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 9,2 persen. Adapun pada tahun 2019 akreditasi didominasi nilai A sebesar 43,6 persen.

Kondisi demikian dapat bermakna adanya komitmen Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan standar pelayanan sekolah jenjang SD dan SMP melalui upaya akreditasi. Namun dalam perspektif kedepan perlu adanya target yang konsisten dan upaya yang lebih optimal untuk menciptakan sekolah SD dan SMP yang seluruhnya terakreditasi minimal B.



Gambar 2. 29 Akreditasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2017-2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (BAN S/M)

L. Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional Jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs

Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) nasional PAUD sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat 9,12 persen, meningkat menjadi 24,55 persen di tahun 2019. Untuk jenjang SD persentase guru yang mencapai SKM Nasional SD juga mengalami peningkatan pada periode yang sama, tahun 2016 tercatat 17 persen kemudian meningkat menjadi 25,81 persen di tahun 2019. Sementara itu kondisi serupa terjadi di jenjang SMP, pada tahun 2016 sebesar guru yang mampu mencapai SKP Nasional SMP sebesar 17 persen, meningkat menjadi 28,90 persen di tahun 2019. Nilai kompetensi minimal yang ditargetkan pemerintah adalah 55, dengan demikian, kondisi di Kota Batam pada tahun 2019 terdapat 75,45 persen guru PAUD, 74,19 persen guru SD, dan 71,1 persen guru SMP yang tidak mencapai nilai 55. Kondisi demikian menuntut upaya keras pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kompetensi guru di berbagai jenjang pendidikan.

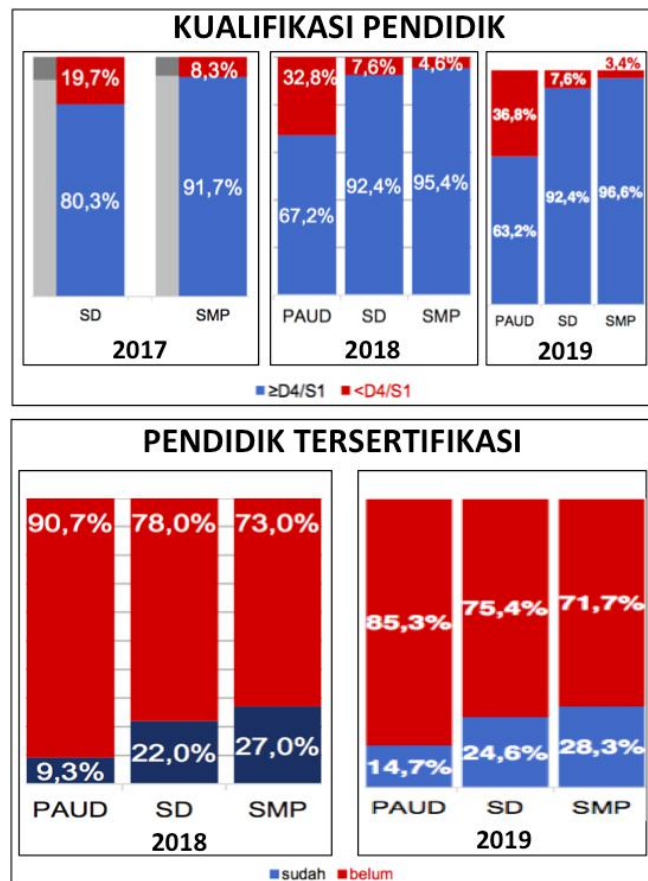
Tabel 2. 40 Kinerja Indikator Persentase Guru yang Mampu Mencapai Standar Kompetensi Minimum (SKM) Nasional jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	% guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional PAUD	Target	9,80	10,12	11,18	11,85	12,86
		Realisasi	9,03	9,12	9,61	9,75	24,55
ii	% guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional SD	Target	18,00	19,48	21,24	22,28	23,86
		Realisasi	15,67	17	18,49	18,54	25,81
iii	% guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional SMP	Target	20,80	21,51	23,65	24,92	26,82
		Realisasi	16,80	17	18,63	18,79	28,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

M. Kualifikasi Pendidikan dan Pendidik Terakreditasi

Kualitas pelayanan pendidikan salah satunya ditentukan apabila para guru memiliki kompetensi. Dalam hal ini kompetensi diukur dari kualifikasi pendidik (terkait dengan jenjang pendidikan minimal D4/S1) dan sertifikasi pendidik (terkait dengan penilaian standar nasional tenaga kependidikan).



Gambar 2. 30 Kualifikasi Pendidik dan Pendidik Terakreditasi Tahun 2017-2019

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Ditjen GTK)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pada jenjang SD guru dengan pendidikan <D4/S1 tahun 2017 sebesar 19,7 persen, kemudian menurun menjadi 7,6 persen di tahun 2018 dan di tahun 2019 tetap sebesar 7,6 persen (tidak mengalami perubahan). Hal ini dapat dimaknai bahwa di tahun 2019 tidak ada upaya untuk meningkatkan kualifikasi guru SD. Untuk jenjang SMP sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 konsisten dapat dilihat adanya peningkatan kualifikasi guru. Di tahun 2017 semula tercatat 8,3% guru dengan pendidikan <D4/S1,

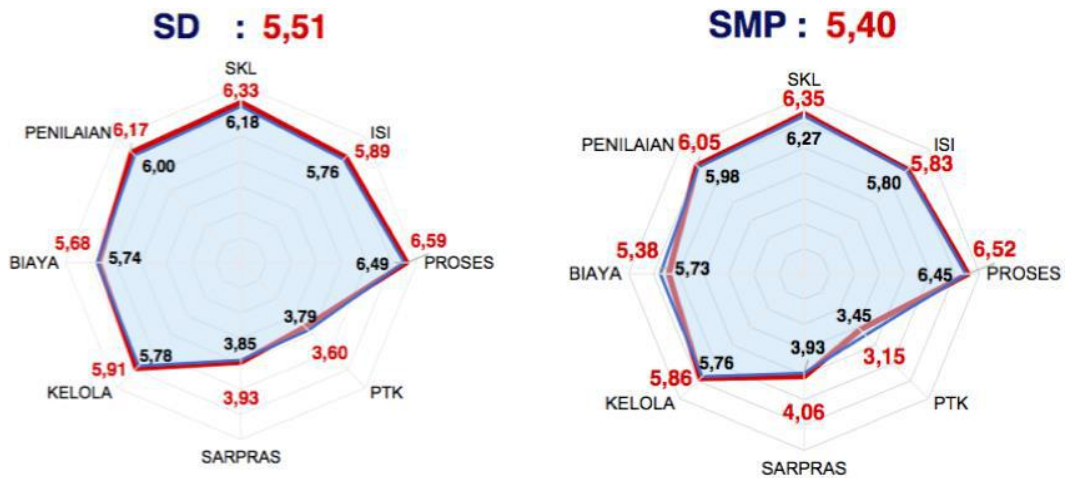
kemudian menurun menjadi 4,6 persen di tahun 2018, dan kembali menurun menjadi 3,4 persen di tahun 2019. Salah satu kendala dalam meningkatkan kualifikasi guru adalah karena didominasi adanya keterbatasan finansial dari individu guru, biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam hanya untuk biaya studi sementara biaya hidup harian (*living cost*) dibebankan pada individu guru. Dalam perspektif kedepan perlu diupayakan memfasilitasi guru untuk mendapatkan beasiswa penuh non APBD, dengan membantu peningkatan kemampuan guru untuk dapat lolos beasiswa.

Untuk guru yang tersertifikasi pada jenjang SD di tahun 2018 sebesar 22 persen guru sudah tersertifikasi, kemudian meningkat menjadi 24,6 persen di tahun 2019. Untuk jenjang SMP di tahun 2018 sebesar 27 persen guru sudah tersertifikasi, kemudian meningkat menjadi 28,3 persen di tahun 2019. Realisasi tersebut masih sangat rendah, sehingga perlu upaya keras pada periode selanjutnya untuk terus mendorong guru mengikuti sertifikasi. Apabila standar mutu pendidik tidak tercapai, maka akan berdampak antara lain substansi kedalaman materi ajar yang tak tercapai, fasilitasi pembelajaran kurang, pembelajaran juga tak tepat sasaran, serta pendidik tak memahami karakteristik peserta didiknya.

N. Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan

Sebagai pembahasan terakhir indikator urusan pendidikan, disampaikan Skor Parameter Mutu Pendidikan yang dipublikasikan oleh Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud untuk Tahun 2018, indikator ini dapat merangkum pembahasan kinerja indikator-indikator sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat beberapa item yang menjadi standar sistem penyelenggaraan pendidikan nasional. Beberapa standar itu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK). Kemudian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian pendidikan.



Gambar 2. 31 Skor Indeks Parameter Mutu Pendidikan Tahun 2018

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (Ditjen GTK)

Jika melihat capaian Skor PMP di atas dapat diketahui bahwa pada jenjang SD permasalahan ada pada item yang memiliki nilai kecil yakni standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 3,60 dan item sarana dan prasarana dengan skor 3,93. Sementara itu pada jenjang SMP menunjukkan pola serupa, yakni item yang rendah meliputi standar pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) dengan skor 3,15 dan item sarana dan prasarana dengan skor 4,06. Hal ini relevan dengan kondisi indikator kinerja pada pembahasan sebelumnya yang benar ditemukan bahwa kualitas sarana dan prasarana masih belum sesuai, nilai akreditasi yang masih rendah, kualifikasi dan kompetensi guru yang masih kategori minim, dan seterusnya.

KESIMPULAN

Persoalan utama pelayanan pendidikan di Kota Batam terletak pada kualitasnya. Memang angka APK dan APM jenjang SD dan SMP menunjukkan capaian tinggi melebihi capaian Provinsi dan Kab/Kota di sekitar Batam, namun demikian seyogyanya kita tidak merapa puas dengan kondisi tersebut, karena APK dan APM cenderung hanya terkait kesesuaian *supply and demand*. Pemerintah Kota Batam mampu menyediakan pelayanan pendidikan untuk penduduk usia 7-12 tahun dan usia 12-15 tahun ke dalam pelayanan pendidikan SD dan SMP di Kota Batam. Sementara itu kemampuan menyediakan belum tentu disertai dengan pemberian pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan pendidikan antara lain tergambarkan dari kondisi:

1. Rasio Guru terhadap Murid yang belum mencapai standar, khususnya SMP. Saat ini SMP Negeri kekurangan 575 guru, SMP Swasta kekurangan 444 guru, sementara guru PNS yang akan pensiun 5 tahun kedepan (2024) sebanyak 47 guru. Untuk jenjang SD mengalami kelebihan guru SD negeri 28 guru, kelebihan SD swasta 419 guru, sementara guru SD PNS yang pensiun 5 tahun kedepan (2024) sebanyak 72 guru;
2. Rasio Rombel terhadap murid jenjang SD dan SMP masih belum sesuai standar, artinya perlu penambahan ruang kelas baru atau sekolah baru;
3. Angka mengulang kelas SD sebesar 885 murid, angka mengulang SMP 171 murid, ini bermakna mengulang tidak naik kelas;
4. Sekolah dengan Akreditasi A jenjang SMP hanya 43,6 persen, sementara jenjang SD hanya 35,9 persen;
5. Persentase guru yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) sangat rendah, 75,45 persen guru PAUD, 74,19 persen guru SD, dan 71,1 persen guru SMP yang tidak mencapai nilai 55 (nilai standar);
6. 71,7 persen guru SMP belum tersertifikasi, 75,4 persen guru SD belum tersertifikasi, 85,3 guru PAUD belum tersertifikasi;
7. 36,8 persen guru PAUD belum berpendidikan D4/S1, 7,6 persen guru SD belum berpendidikan D4/S1, 3,4 persen guru SMP belum berpendidikan D4/S1;

Lebih lanjut perlu ada penyempurnaan dalam kualitas perencanaan urusan pendidikan, seyogyanya Dinas Pendidikan menggunakan nomenklatur indikator yang sama dengan yang dikeluarkan oleh publikasi-publikasi Kemendikbud, agar definisi operasional dan ketersediaan serta kualitas validitas data dapat terjamin, sehingga penetapan target indikator tahunan pun dapat diarahkan pada angka yang lebih realistis dan menjawab permasalahan yang ada. Kemudian peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap program kegiatan merupakan keniscayaan, karena keterbatasan anggaran maka ketepatan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan sangat diperlukan, mana yang didahulukan sebagai prioritas, mana yang tidak semua penentuan itu harus bertitik tolak pada hasil monitoring dan evaluasi yang berkualitas.

2.3.1.2 Urusan Kesehatan

A. Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Secara makro pelayanan urusan kesehatan di Kota Batam dapat ditinjau dari ketersediaan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medis dan tenaga penunjang medis lainnya. Untuk sarana pelayanan kesehatan, pada tahun 2019 ketersediaan rumah sakit (swasta+pemerintah) mencapai rasio 1,6:100.000 penduduk atau dengan kata lain satu rumah sakit melayani 61.530 penduduk, capaian ini sudah melampaui standar nasional yakni 1:100.000 (satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk). Sementara itu untuk puskesmas pada tahun 2019 memiliki rasio 0,56:30.000 penduduk, atau dengan kata lain satu puskesmas melayani 52.740 penduduk, kondisi ini belum memenuhi standar nasional sebesar 1:30.000 (satu puskesmas melayani 30.000 penduduk). Untuk ketersediaan puskesmas pembantu (pustu) standar nasional menetapkan satu puskesmas memiliki 3 sampai 5 pustu, kondisi di Kota Batam tahun 2019 adalah 1 puskesmas hanya dibantu oleh 2 pustu, sehingga belum memenuhi standar nasional. Sedangkan ketersediaan puskesmas keliling (pusling) tahun 2017 tercatat 1:2,3 artinya satu puskesmas dibantu oleh 2 pusling, kondisi ini sudah melampaui standar nasional pusling yakni 1:1 (satu puskesmas dibantu satu pusling). Dalam hal ketersediaan posyandu, pada tahun 2018 rasio posyandu per satuan balita tercatat 1:200 artinya satu posyandu melayani 200 balita, hal ini telah mencapai standar nasional yakni 1:100-200 (satu posyandu melayani 100 hingga 200 balita). Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 41 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Penduduk (jiwa)	1.062.250	1.329.773	1.107.551
2	RS Pemerintah	2	n.a	n.a
	RS Swasta	15	n.a	n.a
	Jumlah	17	18	18
2.1	Rasio RS per satuan penduduk	1:62.584	1:73.876	1:61.530
	Rasio RS per 100.000 penduduk	1,5:100.000	1,3:100.000	1,6:100.000
3	Puskesmas	20	19	21

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
3.1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:53.197	1:69.988	1:52.740
	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,56:30.000	0,42:30.000	0,56:30.000
4	Puskesmas Pembantu	59	58	58
4.1	Rasio Pustu	1:2,95	1:3	1:2,76
5.	Puskesmas Keliling	47	n.a	n.a
5.1	Rasio Puskesmas Keliling	1:2,35	n.a	n.a
6	Posyandu	n.a	514	n.a
	Jumlah Balita (0-4 tahun)		96.567	
	Rasio Posyandu per satuan balita	n.a	1:200	n.a
7	Polindes	n.a	31	31
7.1	Rasio Polindes	n.a	1:42.895	1:35.727
8	Poskesdes	n.a	n.a	n.a
8.1	Rasio Poskesdes	n.a	n.a	n.a
9	Poliklinik Pemerintah	289	n.a	n.a
	Poliklinik Swasta		n.a	n.a
9.1	Rasio Poliklinik	1:3.681	n.a	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam (diolah)

Lebih lanjut data kinerja pembinaan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 19 puskesmas terintegrasi, kemudian 70 persen puskesmas sudah memiliki pelayanan rawat inap, bangunan puskesmas dengan standar Permenkes sebanyak 4 unit, sementara puskesmas yang terakreditasi sebesar 75 persen. Saat ini belum ada puskesmas dengan status pengelolaan BLUD, dalam perspektif kedepan dalam rangka meningkatkan profesionalitas tata kelola manajemen puskesmas, perlu adanya puskesmas yang ditransformasikan statusnya menjadi BLUD. Uraian lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 42 Realisasi Indikator Kinerja Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas yang teregistrasi		17	17	17	19
2	Persen Puskesmas rawat inap		35.5	35.3	47	70
3	Persentase puskesmas dengan status PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)		0	0	0	0
5	Peningkatan puskesmas menjadi RS Type D		0	0	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Jumlah Bangunan Puskesmas yang sesuai standar Permenkes		2	3	4	4
8	Persentase Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi		0	25	50	75
9	Jumlah Kebijakan PHBS yang dikeluarkan pemerintah		2	3	7	8
10	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar dan persyaratan		n.a	n.a	n.a	26.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Untuk ketersediaan tenaga medis dan tenaga penunjang medis lainnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kemenko Kesra pada tahun 2013 telah menyusun Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan 2024 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2013. Adapun uraian kebutuhan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk tersebut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 43 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Target Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan 2024

No	Jenis Tenaga	Tahun 2014 (per 100.000 penduduk)	Tahun 2019 (per 100.000 penduduk)	Tahun 2024 (per 100.000 penduduk)
1	Dokter Spesialis	10	11	12
2	Dokter Umum	40	45	50
3	Dokter Gigi	12	13	14
4	Perawat	158	180	200
5	Bidan	100	120	130
6	Perawat Gigi	15	18	21
7	Apoteker	9	12	15
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	18	24	30
9	SKM	13	15	18
10	Sanitarian	15	18	20
11	Gizi	10	14	18
12	Keterampilan Fisik	4	5	6
13	Keteknisian Medis	14	16	18

Sumber: Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 (Kempen Kemenko Kesra No.54/2013)

Pada tahun 2019 di Kota Batam rasio dokter spesialis mencapai 20:100.000 artinya 20 dokter melayani 100.000 penduduk, kondisi ini sudah melampaui target nasional sebesar 11:100.000. Untuk dokter umum pada tahun 2019 sebesar 25,82:100.000, kondisi ini belum mencapai target nasional sebesar 45:100.000. Untuk dokter gigi saat ini tercatat 6,5:100.000, kondisi ini juga masih belum mencapai target nasional yang sebesar 12:100.000. Selanjutnya rasio perawat di Kota Batam tahun 2019 sebesar 132:100.000, angka ini masih kurang dari target nasional sebesar 180:100.000, sedangkan rasio bidan saat ini juga belum mencapai target nasional yang sebesar 120:100.000, tahun 2019 rasio bidan Kota Batam hanya 56:100.000. Untuk Rasio Kefarmasian Kota Batam tahun 2019 sebesar 25:100.000, angka ini sudah mencapai target nasional sebesar 24:100.000, lebih lanjut rasio SKM 5,41:100.000 masih kurang dari target nasional sebesar 15:100.000, untuk rasio sanitarian sebesar 5:100.000 masih kurang dari target nasional sebesar 18:100.000, untuk rasio tenaga gizi sebesar 7:100.000 masih kurang dari target nasional sebesar 14:100.000, untuk rasio keterampilan fisik sebesar 2:100.000, masih kurang dari target nasional sebesar 5:100.000, untuk rasio keteknisian medis saat ini sebesar 10:100.000, masih kurang dari target nasional sebesar 16:100.000. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 44 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per 100.000 Penduduk Tahun 2017-2019

No	Jenis Tenaga	Rasio Per 100.000 Penduduk			Status Terhadap Target Nasional 2019
		2017	2018	2019	
	JUMLAH PENDUDUK	1.062.250	1.329.773	1.107.551	
1	Dokter Spesialis	289	n.a	226	
	Rasio Dokter Spesialis	27	n.a	20	Melebihi
2	Dokter Umum	396	n.a	286	
	Rasio Dokter Umum	37,28	n.a	25,82	Kurang
3	Dokter Gigi	86	n.a	72	
	Rasio Dokter Gigi	8	n.a	6,50	Kurang
4	Perawat	1.495	n.a	1.466	
	Rasio Perawat	140	n.a	132	Kurang

No	Jenis Tenaga	Rasio Per 100.000 Penduduk			Status Terhadap Target Nasional 2019
		2017	2018	2019	
5	Bidan	n.a	n.a	622	
	Rasio Bidan	n.a	n.a	56	Kurang
6	Perawat Gigi	n.a	n.a	n.a	
	Rasio Perawat Gigi	n.a	n.a	n.a	
7	Apoteker	n.a	n.a	n.a	
	Rasio Apoteker	n.a	n.a	n.a	
8	Tenaga Teknis Kefarmasian	546	n.a	278	
	Rasio Kefarmasian	n.a	n.a	25	Melebihi
9	SKM	n.a	n.a	60	
	Rasio SKM	n.a	n.a	5,41	Kurang
10	Sanitarian (Kesling)	n.a	n.a	56	
	Rasio Sanitarian	n.a	n.a	5	Kurang
11	Gizi	n.a	n.a	73	
	Rasio Tenaga Gizi	n.a	n.a	7	Kurang
12	Keterampilan Fisik	n.a	n.a	29	
	Rasio Keterampilan Fisik	n.a	n.a	2	Kurang
13	Keteknisian Medis	n.a	n.a	117	
	Rasio Keteknisian Medis	n.a	n.a	10	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam untuk Tahun 2015-2018 dan BPPSDM Kemenkes untuk Tahun 2019 (diolah).

Dalam perspektif pemenuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada aspek kesehatan, telah ditetapkan target rasio tenaga medis dan perawat dalam melayani masyarakat di tingkat Kab/Kota yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Dari empat indikator, hanya rasio dokter spesialis dan rasio perawat yang pada tahun 2019 capaiannya melebihi target yang terdapat pada Permenkumham tersebut, sementara rasio dokter umum dan rasio bidan belum mencapai target pemenuhan HAM aspek kesehatan. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 45 Target Rasio Tenaga Kesehatan dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan Tahun 2019

No	Indikator Rasio Tenaga Kesehatan (per satuan penduduk)	Target Dalam Pemenuhan HAM Aspek Kesehatan	Capaian Kota Batam Tahun 2019	Status Terhadap Target HAM
1	Rasio Tenaga Dokter	1:2.500	1:3.872	Tidak Mencapai
2	Rasio Tenaga Dokter Spesialis	1:16.000	1:4.900	Melebihi
3	Rasio Bidan	1:1.000	1:1.780	Tidak Mencapai
4	Rasio Perawat	1:855	1:755	Melebihi

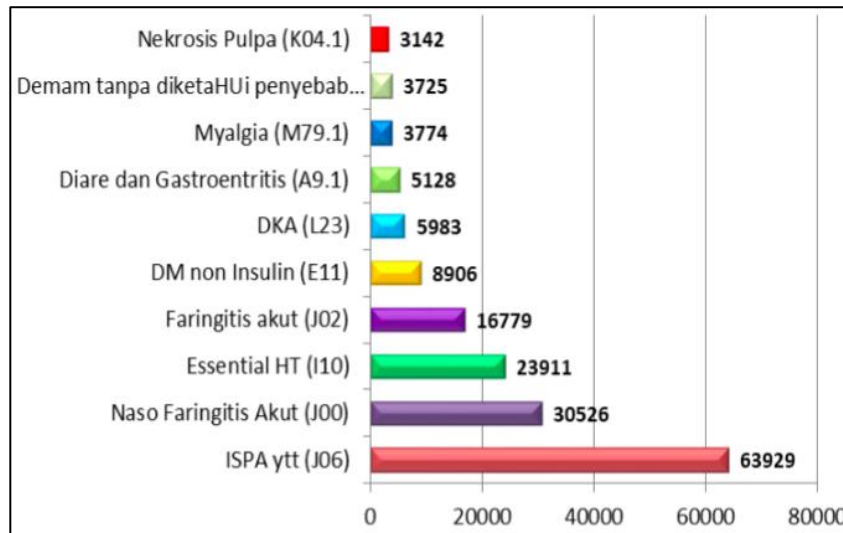
Sumber: Permenkumham No.34/2016

B. Situasi Derajat Kesehatan

1. Angka Kesakitan (Morbiditas)

Angka kesakitan merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat, yang menggambarkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit. Angka kesakitan dapat digambarkan dengan jumlah kunjungan masyarakat yang berobat ke sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta, pada tingkat pelayanan dasar maupun lanjutan.

Secara umum angka kesakitan dapat dilihat pada sepuluh penyakit terbesar dari kunjungan pasien yang mendapat pengobatan/perawatan dapat dilihat pola penyakit yang ada disuatu wilayah. Dengan mengetahui pola penyakit dapat menjadi acuan dalam perencanaan kesehatan, seperti penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan obat-obatan, tenaga kesehatan dan strategi program kesehatan dan lainnya. Berdasarkan laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) se-Kota Batam sepanjang tahun 2018, dari 10 penyakit terbesar tercermin pola penyakit masyarakat Kota Batam seperti pada gambar berikut ini.



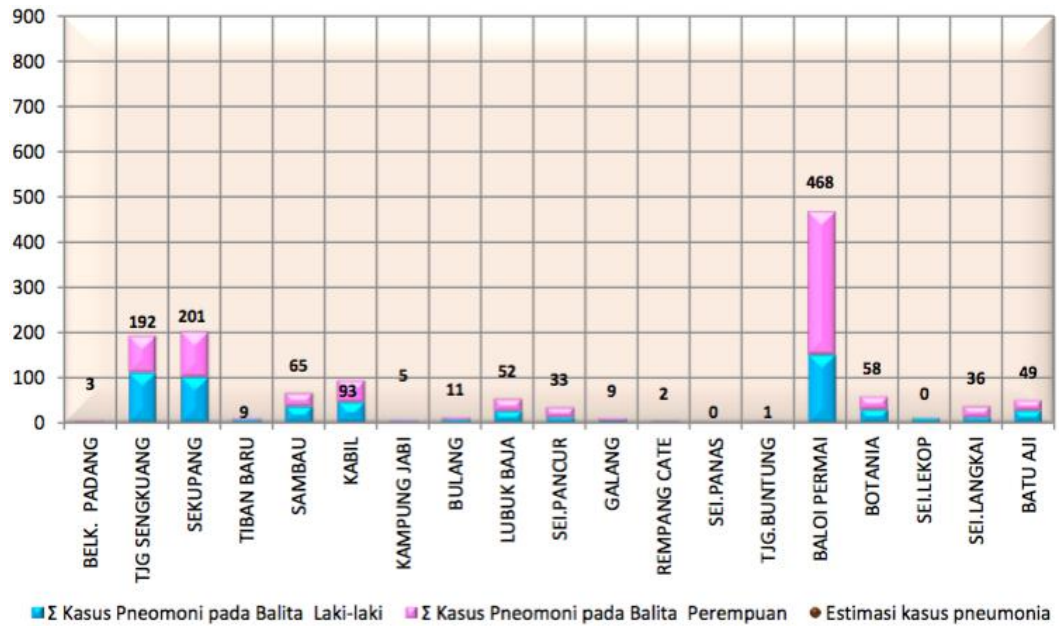
Gambar 2. 32 Distribusi Sepuluh Penyakit Terbesar Kunjungan Pasien Puskesmas Kota Batam Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Gambaran diatas, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) menjadi penyakit yang paling banyak menyerang penduduk Kota Batam sebanyak 63.929 sama seperti tahun 2017.

2. **Pneumonia Pada Balita**

Pneumonia pada balita masih menjadi salah satu pusat perhatian pengendalian penyakit menular, karena penyakit ini jika tidak ditangani dengan baik, akan menambah angka kematian pada balita. Kegiatan pengendalian penyakit ini mulai dari deteksi dini hingga pengobatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat pneumonia pada balita dan diperkirakan 3.5% balita terserang pneumonia.



Gambar 2. 33 Kasus Pneumonia Pada Balita Per Kecamatan Tahun 2019

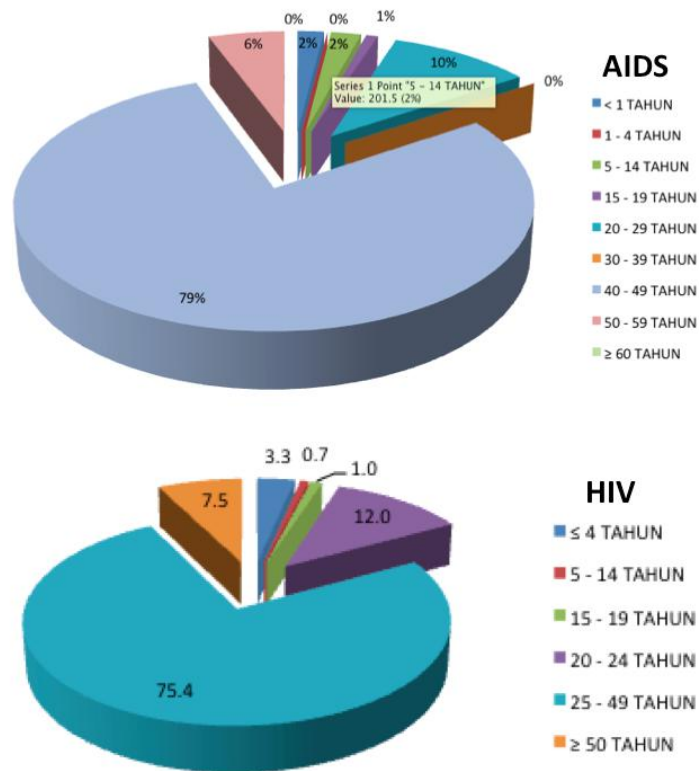
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada tahun 2018 di Kota Batam jumlah kasus pneumonia yang ditangani berjumlah 1.308 kasus. Angka ini menunjukkan penyebaran pneumonia pada balita berkisar 0.86%, angka ini masih jauh dari proporsi yang diperkirakan.

3. HIV/AIDS

Penyakit HIV/AIDS menduduki prioritas utama dalam enam penyakit menular berbahaya yang menjadi prioritas utama dalam pengendalian penyakit dalam program kerja Pemerintah pada periode 2015-2020. Penyakit HIV/AIDS disebabkan oleh virus *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penularan virus HIV/AIDS tidak semudah virus lainnya, karena penularan hanya melalui hubungan seksual tanpa pelindung dan penggunaan jarum suntik yang tidak aman atau terkontaminasi cairan/darah dari penderita HIV/AIDS. Pada umumnya penyakit ini menyerang kelompok berisiko yang disebut populasi kunci, yakni wanita tuna susila (WTS), pengguna narkotika suntik, lelaki suka lelaki (LSL), remaja, pria berisiko (pelanggan/klien), pasangan pelanggan, waria, warga binaan permasyarakatan dan ibu hamil berisiko. HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, yang terlihat hanyalah puncak

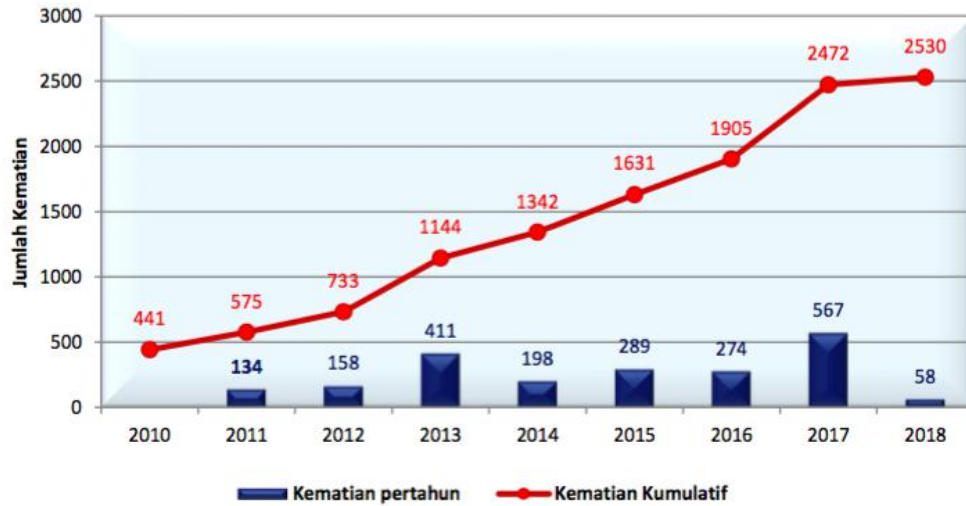
yang muncul di permukaan tanpa diketahui seberapa besar kasus yang sebenarnya terjadi.



Gambar 2. 34 Distribusi Proporsi Kasus HIV/AIDS Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Perkembangan penyakit HIV/AIDS saat ini telah menyerang semua kelompok umur, jika dilihat gambar diatas kasus HIV banyak terjadi pada usia reproduktif dan bahkan telah menyerang anak dibawah usia lima tahun. AIDS adalah penyakit yang disebabkan virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh sebagai kelanjutan dari HIV yang ditandai dengan jumlah CD 4 < 500 dan atau penderita HIV yang disertai penyakit infeksi sekunder. Pada kondisi seseorang dinyatakan menderita AIDS, mudah diserang penyakit infeksi lainnya yang berujung pada kematian dengan *Case Fatality Rate* HIV/AIDS adalah 37.34%



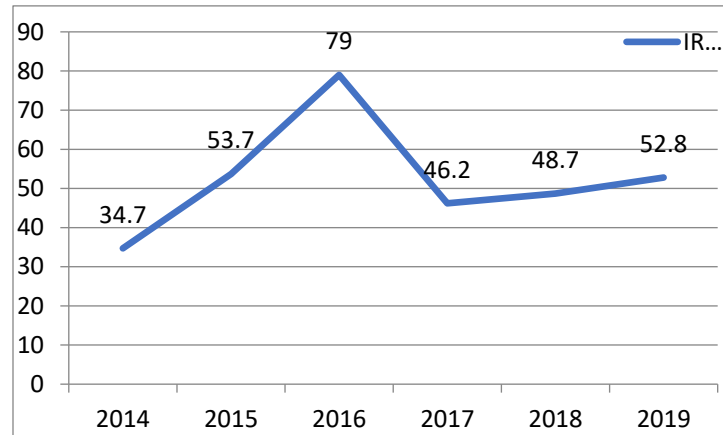
Gambar 2. 35 Distribusi Jumlah Kematian AIDS dan CFR AIDS 2010-2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Gambaran diatas memberikan isyarat kepada kita semua untuk meningkatkan kepedulian dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit HIV/AIDS yang membutuhkan perhatian dan kerjasama semua pihak, terutama di Kota Batam menduduki 5 Kota terbesar kasus HIV/AIDS di Indonesia.

4. Demam Berdarah Dengue (DBD)

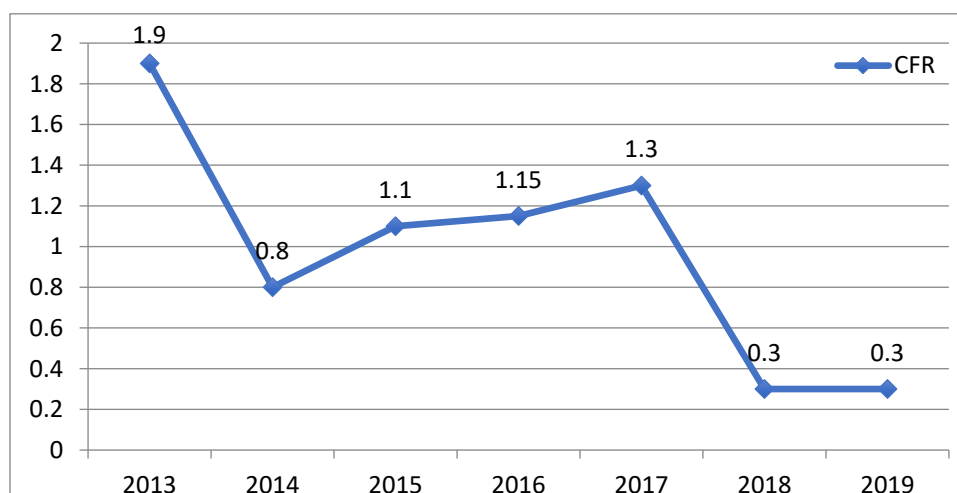
Demam Berdarah *Dengeu* yang dikenal dengan DBD merupakan penyakit yang sudah endemis hampir diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Batam. Angka kesakitan Demam Berdarah *Dengeu* atau *Incident Rate* DBD adalah jumlah penderita DBD dengan level kasus konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium per 100.000 penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Pada lima tahun terakhir di Kota Batam, kejadian penyakit DBD setiap tahunnya berfluktuasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 36 Incident Rate DBD Kota Batam Tahun 2014-2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Dilihat dari *Incident Rate* (IR) DBD pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat bermakna, namun pada tahun tahun 2019 IR DBD sedikit meningkat menjadi adalah 52.8 per 100.000 penduduk, angka ini masih berada dibawah target Kementerian Kesehatan telah menetapkan target *Incident Rate* DBD ditekan hingga 54/ 100.000 penduduk dengan *Case Fatality Rate* (CFR) < 1%. Kematian akibat penyakit DBD *Case Fatallity Rate* (CFR) penyakit DBD tahun 2018 hingga 2019 menurun cukup tajam. Berdasarkan laporan surveilens jumlah kematian akibat DBD berjumlah 1 (satu) orang dari 647 kasus, dengan demikian CFR penyakit DBD adalah 0.3%.

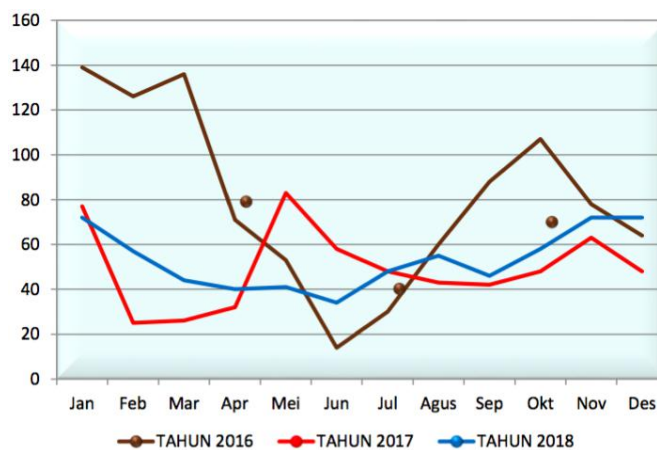


Gambar 2. 37 Case Fatality Rate DBD Kota Batam

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Sebagaimana kita ketahui Penyakit DBD adalah salah satu penyakit berbasis lingkungan dan dipengaruhi oleh musim. Nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus* merupakan vektor penularan virus *dengue* yang dapat hidup dan berkembang biak dengan ketinggian <1000 meter diatas permukaan laut serta dipengaruhi oleh musim dan hidup pada air bersih seperti pada genangan air pada wadah yang bukan tanah.

Hasil surveilans kasus DBD, peningkatan kasus terjadi berdasarkan waktu perlu dipedomani dalam pencegahan dan pengendalian DBD dengan meningkatkan kewaspadaan dengan terutama masalah lingkungan dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) seperti menguras, mengubur, menutup dan ditambah dengan memantau perindukan nyamuk *aedes* plus mencegah gigitan nyamuk. Berikut gambaran surveilans penyakit DBD pada tiga tahun terakhir.



Gambar 2. 38 Kejadian DBD Per Bulan

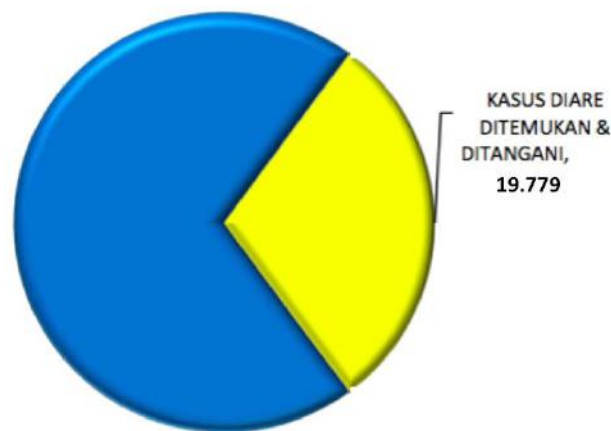
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Melihat kejadian kasus DBD setiap bulannya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat perbedaan pola musim penularan. Di era pemanasan global, faktor musim sulit untuk dipedomani, akan tetapi dengan komitmen berbagai pihak untuk menjaga lingkungan yang bebas dari perindukan nyamuk serta umpan balik kegiatan surveilans penyakit DBD melalui rangkaian kegiatan penyelidikan epidemiologi dapat menurunkan kejadian penyakit DBD.

Kejadian DBD banyak terjadi di di wilayah kerja Puskesmas Baloi Permai dan Batu Aji yang merupakan daerah yang cukup padat penduduknya dan secara fisik, pembangunan di wilayah ini sangat pesat. Kemungkinan hal ini mempengaruhi tingginya kejadian kasus DBD pada wilayah tersebut.

5. Diare

Penyakit diare merupakan penyakit menular yang hingga saat ini masih menjadi salah satu pusat perhatian program pengendalian penyakit menular di Indonesia.



Gambar 2. 39 Kasus dan Penanganan Diare Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pada tahun 2019 angka kesakitan diare di Kota Batam untuk semua umur mencapai 270 per 1.000, sedangkan untuk balita mencapai 843 per 1.000 penduduk.

6. Filariasis

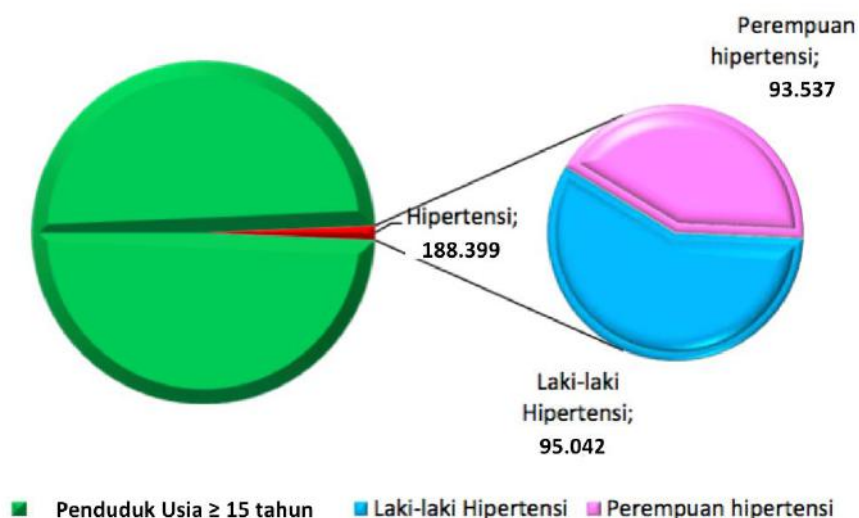
Penyakit filariasis disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk sebagai vektor yang menyerang saluran kelenjar getah bening dengan manifestasi pembengkakan pada tangan, kaki, glandulla mammae, serta scrotum sehingga menimbulkan kecacatan seumur hidup/permanen bagi penderitanya.

Sejarah penyakit filariasis di Kota Batam ditemui awalnya pada tahun 2002 di Kecamatan Galang dan tahun 2008 ditemukan 1 kasus baru di Kecamatan Bulang.

Sejak tahun 2012 telah dilakukan pemberian obat pencegahan secara massal di Kota Batam. Tahun 2019 tidak ditemukan kasus baru, hingga saat ini jumlah kasus yang ada merupakan kasus lama yang berjumlah 9 orang dengan angka kesakitan filariasis 0.75 per 100.000 penduduk. Kegiatan surveilens terhadap penyakit filariasis tetap dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian.

7. Tekanan Darah Tinggi/Hipertensi

Tekanan Darah Tinggi adalah peningkatan tekanan darah arterial secara menetap > 140/90 mmhg. Faktor risiko terjadinya darah tinggi menjadi dua yaitu faktor risiko yang tidak dapat dirubah antara lain umur, jenis kelamin dan faktor genetik, faktor risiko yang dapat dirubah seperti merokok, diet rendah serat, konsumsi alkohol dan stress. Penyakit tekanan darah tinggi dapat dicegah dengan Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) yaitu dengan prilaku CERDIK (C=Cek kesehatan secara berkala, E=Enyahkan asap rokok, R=Rajin aktifitas fisik, D=Diet sehat dengan kalori seimbang, kelola stress. Perilaku CERDIK ini dapat diterapkan melalui kegiatan Posbindu PTM. Kota Batam tahun 2019 pelayanan kesehatan penderita darah tinggi mencapai 87.261 (46%) dari jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun sebanyak 188.399, dimana hasil capaian masih rendah dikarenakan hasil pelaporan pengukuran tekanan darah dari fasilitas pelayanan kesehatan kurang optimal.

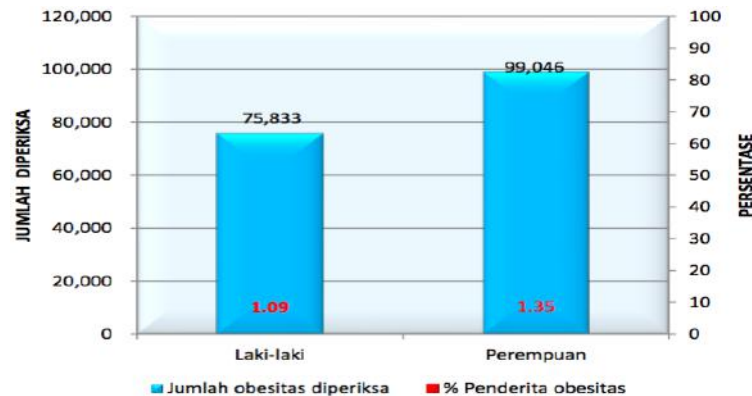


Gambar 2. 40 Penderita Hipertensi Kota Batam 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

8. **Obesitas**

Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidak seimbangan asupan energy (*energy intake*) dengan energi yang digunakan (*energy expenditure*). Kota Batam tahun 2018 kejadian obesitas dengan penderita obesitas 1.333 (0.76%) dari jumlah obesitas diperiksa 174.879 (42.87%). Hasil penemuan kasus obesitas berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 2. 41 Kejadian Obesitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

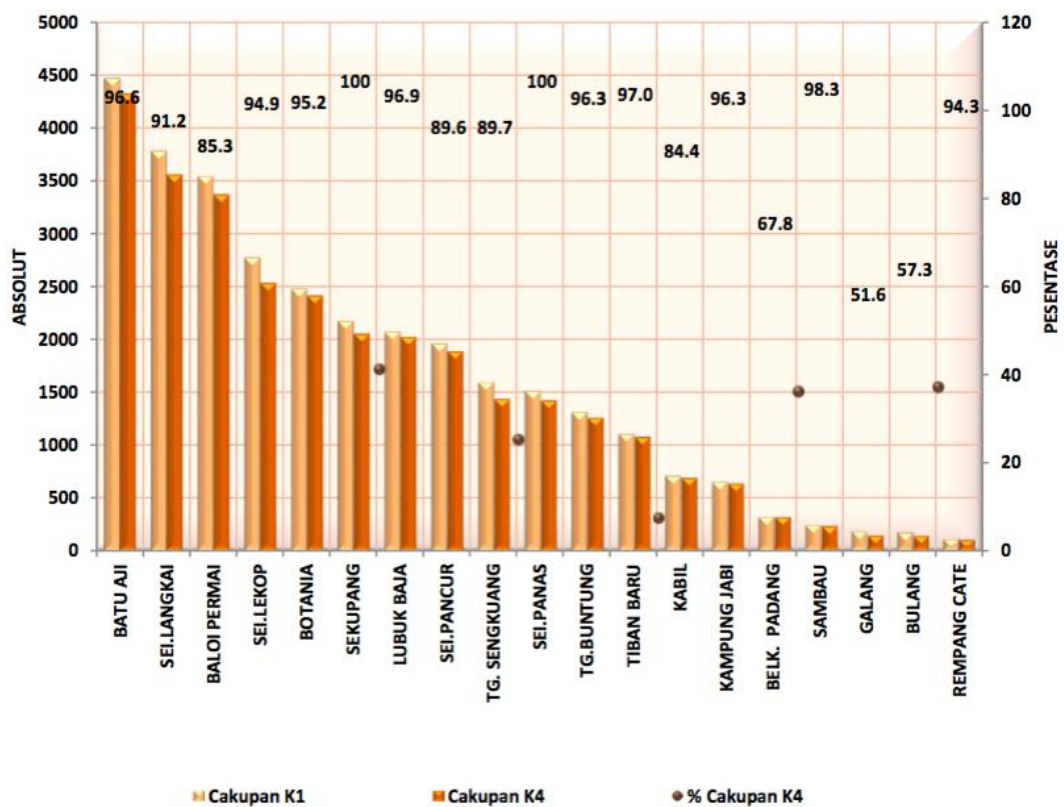
C. **Situasi Upaya Kesehatan**

1. **Cakupan Kunjungan Ibu Hamil**

Pada sebagian ibu hamil, karena beberapa faktor seperti umur, paritas, jarak kehamilan yang terlalu dekat, faktor gizi, faktor penyakit dan lainnya, sehingga kehamilannya menjadi berisiko tinggi bagi ibu dan janin dalam kandungannya, jika tidak ditangani dengan baik dan tepat akan berakibat fatal baik bagi ibu dan janinnya.

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil yang merupakan langkah awal untuk menurunkan angka kematian ibu melalui penjarangan ibu hamil dengan risiko tinggi. Dengan harapan jika ditemui ibu hamil risiko tinggi dapat ditangani secara dini sehingga ibu dapat menjalani proses kehamilan, persalinan dan nifas dengan aman dan membawa keselamatan ibu dan pada bayinya dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

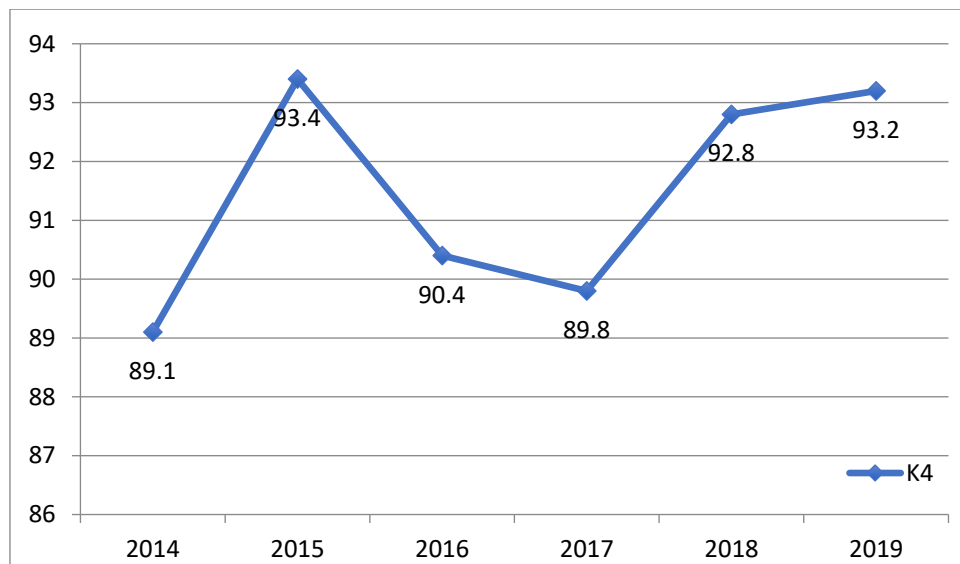
Kunjungan ibu hamil adalah kunjungan ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan *Ante Natal Care* (ANC) sesuai standar mencakup 10 T, yakni 1). Timbang berat badan & ukur tinggi badan, 2). Tekanan darah, 3). Nilai status gizi (ukur Lila), 4. Ukur tinggi fundus uteri, 5). Tentukan presentasi janin dan DJJ, 6). Skrining status imunisasi Tetanus toxoid dan berikan imunisasi TT bila diperlukan, Tinggi fundus, 7). Pemberian tablet FE minimal 90 tablet selama kehamilan, 8). Tes laboratorium (rutin dan khusus), 9). Tata laksana kasus dan 10). Temu wicara (konseling) termasuk P4K serta KB pasca salin. Tahun 2019 cakupan K1 di Kota Batam adalah 98,7% dan cakupan K4 adalah 93.2%. Adapun cakupan K1 dan K4 berdasarkan dengan wilayah kerja Puskesmas, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 42 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Indikator ketersediaan sarana dan prasarana serta keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu hamil atau Ante Natal Care (ANC) dilihat dari cakupan K1 yaitu kunjungan ibu pertama kali pada kehamilan trisemester I dan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Untuk indikator keberhasilan program dilihat dari cakupan kunjungan K4, yakni kunjungan ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC sesuai standar, minimal 4 kali dengan ketentuan minimal pada trisemester pertama 1 kali, trisemester kedua 1 kali dan trisemester ketiga 2 kali. Cakupan K4 di Kota Batam tahun 2019 telah mencapai 93.2%, berikut gambaran cakupan K4 di Kota Batam pada enam tahun terakhir.



Gambar 2. 43 Persentase Kunjungan Ibu Hamil K4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

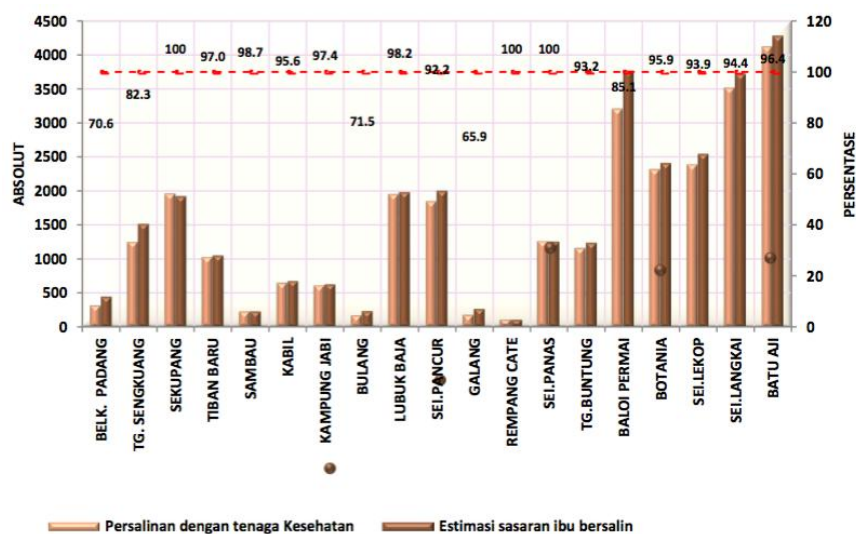
Melihat gambar diatas, dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari tahun ke tahun belum stabil, hal ini selain dari cakupan yang belum tercapai secara optimal, dipengaruhi juga oleh sistem pencatatan dan pelaporan terutama dari mitra kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu seperti rumah sakit, rumah bersalin, bidan praktek swasta dengan mengadakan pertemuan secara berkala dalam wilayah kerja Puskesmas di Kota Batam.

2. **Cakupan Pertolongan Persalinan dengan Nakes Berkompetensi Kebidanan**

Persalinan merupakan proses alami yang membutuhkan tenaga kesehatan kompeten yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar yang merupakan indikator SPM bidang kesehatan sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dengan target 100% ibu melahirkan dengan tenaga kesehatan.

Salah satu indikator proses yang penting dalam program *safe motherhood* (perlindungan terhadap ibu) adalah memperhatikan seberapa banyak persalinan yang dapat ditangani oleh tenaga kesehatan. Persalinan oleh tenaga kesehatan di Kota Batam walaupun menunjukkan kenaikan yang signifikan, namun jangkauannya masih rendah dan akibat dari masih adanya persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan menjadi pemicu terjadinya kematian ibu.

Sehubungan dengan hal diatas, target pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan 100%, dengan realisasi sebanyak 93.2% (28.242). Pada tahun ini masih ada persalinan ditolong pada non fasilitas kesehatan sebanyak 138 (0.5%) dikarenakan keterlambatan membawa ke fasilitas kesehatan sehingga melahirkan dirumah, dan persalinan di tolong dukun sebanyak 25 (0.1%), hal ini kemungkinan masih kurangnya tingkat pengetahuan ibu dan masih tingginya kepercayaan terhadap dukun beranak terutama di daerah *hinterland*.



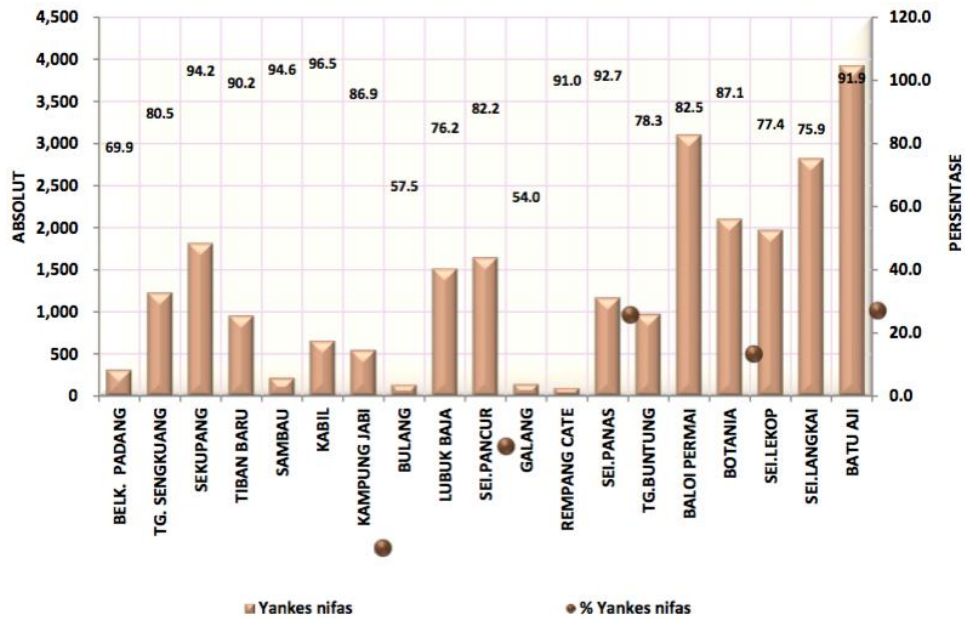
Gambar 2. 44 Persalinan Oleh Nakes Berkompetensi Kebidanan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Jika dilihat pada gambar diatas, beberapa Puskesmas sudah mencapai target dan sebagian besar mendekati target, namun Puskesmas *hinterland* capaian pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh non tenaga kesehatan dan dalam penentuan angka kelahiran kasar untuk menentukan perkiraan sasaran ibu hamil yang terlalu tinggi (*overestimate*) sehingga capaian tidak optimal.

3. **Cakupan Pelayanan Nifas**

Pelayanan nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalihan oleh tenaga kesehatan, asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa krisis baik ibu maupun bayinya. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu terjadi akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian ibu pada masa nifas terjadi pada 24 jam pertama. Pelayanan nifas bertujuan untuk mendeteksi dini komplikasi yang mungkin saja terjadi dan menangani masalah masa nifas serta meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dalam masa menyusui dan konseling program keluarga berencana termasuk pemberian vitamin A dosis tinggi. Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2019 adalah 88.5% dengan capaian yang bervariasi dari Puskesmas yang ada di Kota Batam.

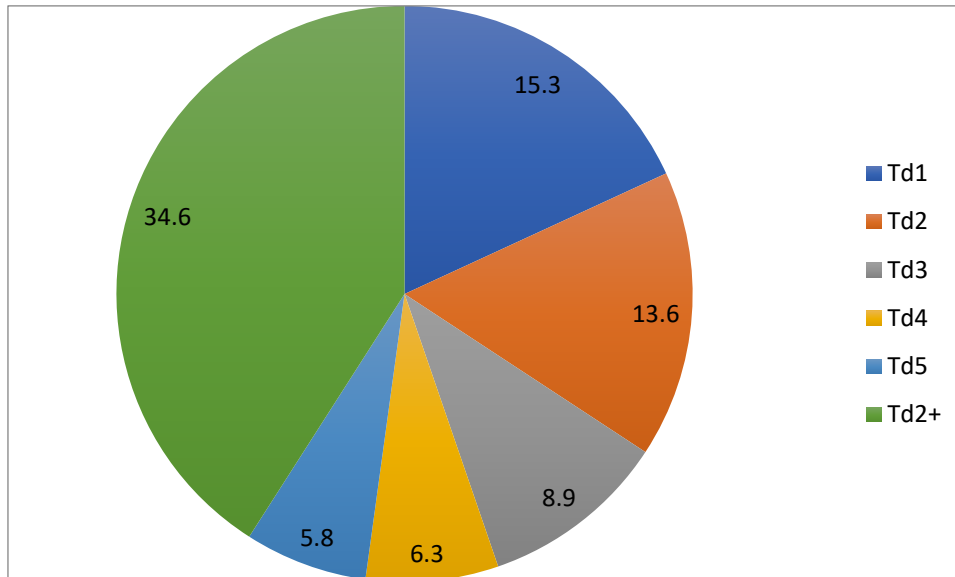


Gambar 2. 45 Cakupan Pelayanan Nifas Per Puskesmas Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

4. Imunisasi Ibu Hamil

Vaksin DTP jenis Tdap, direkomendasikan untuk diberikan pada ibu hamil di usia kehamilan 27-36 minggu atau segera setelah bayi lahir. Vaksin ini dapat diberikan, tanpa mempertimbangkan kapan terakhir kali ibu hamil mendapatkan vaksin Tdap atau Td (tetanus-diphtheria). Pemberian vaksin Tdap juga perlu diberikan pada tiap kehamilan. Tahun 2019 persentase ibu hamil yang telah mendapatkan imunisasi Td lengkap (Td2+) sebanyak 10.846 (34,6%) sementara itu yang mendapatkan imunisasi Td1 sebanyak 4.802 (15%), Td2 sebanyak 4.270 (13,6%), T3 sebanyak 2.779 (8,9%), T4 sebanyak 1.971 (6,3%) dan T5 sebanyak 1.826 (5,8%).

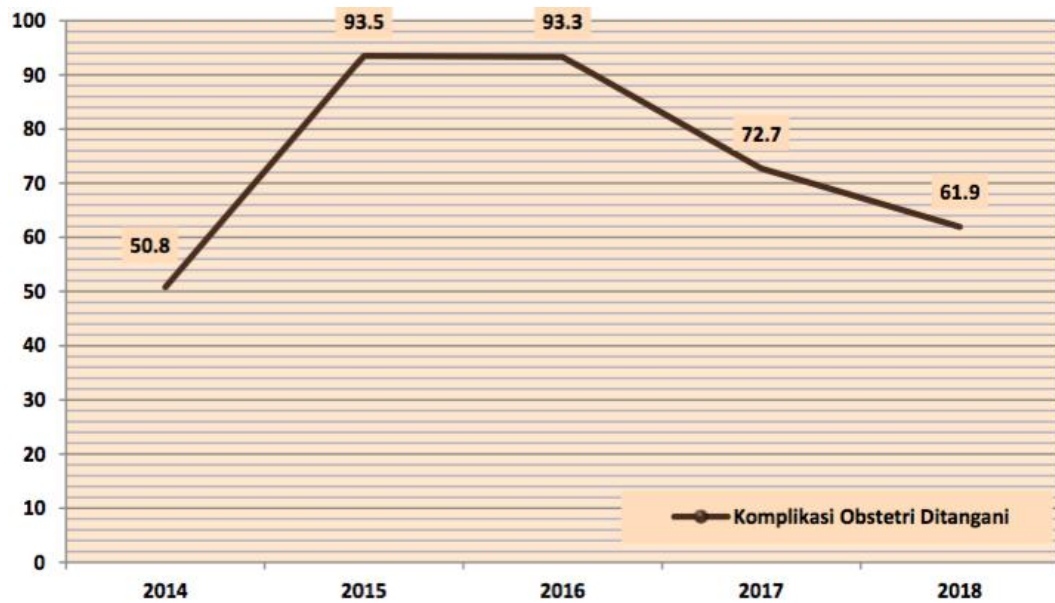


Gambar 2. 46 Pemberian Imunisasi Td Pada Ibu Hamil Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

5. Cakupan Komplikasi Obstetri yang Ditangani

Komplikasi obstetri adalah masalah/gangguan yang terjadi pada ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas, hal ini bisa saja terjadi pada setiap ibu hamil terutama pada ibu hamil dengan risiko tinggi. Diperkirakan 20% komplikasi obstetri terjadi pada ibu hamil. Apabila komplikasi obstetri tidak ditangani tepat dapat berakibat pada kematian ibu dan janinnya, yang tentunya akan menambah AKI dan AKB. Mengingat penanganan komplikasi pada obstetri menjadi salah satu strategi untuk mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu dalam masa hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi sebagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

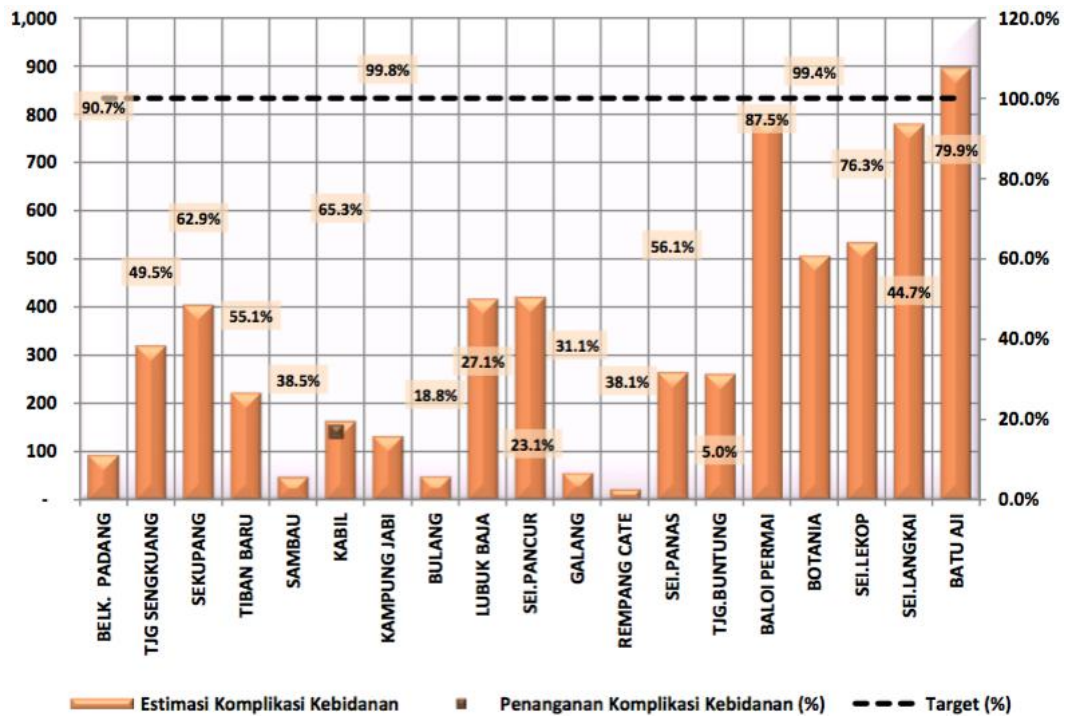


Gambar 2. 47 Persentase Komplikasi Obstetri yang Ditangani

Sumber: Dinas Kesehatan

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu menjadi indikator proses dengan target 80% komplikasi obstetrik ditangani sesuai standar, Dinas Kesehatan Kota Batam senantiasa berupaya mencapai target secara bertahap dan pada tahun 2018 telah ditetapkan 54.98%, dengan cakupan tahun 2018 sebanyak 61.9%, jika dilihat cakupan penanganan komplikasi tahun 2018, terjadi penurunan dari tahun 2017 sebanyak 72.7%. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pemahaman petugas tentang definisi operasional yang belum maksimal dan keadaan ini diperburuk oleh seringnya terjadi mutasi petugas kesehatan sebagai penanggung jawab yang berdampak pada sistem pencatatan dan pelaporan. Dari beberapa kasus yang ditemui pada pembinaan di lapangan, ternyata tindakan komplikasi obstetrik sudah dilakukan, akan tetapi tidak didokumentasikan dengan baik sehingga tidak dilaporkan. Selain itu kerjasama lintas sektor dengan mitra kesehatan sangat diharapkan sehingga dapat terwujud sistem manajemen dan informasi kesehatan yang valid dan terpercaya.

Ibu hamil yang mengalami komplikasi diperkirakan sebanyak 3944 orang yang tersebar dalam wilayah kerja Puskesmas, berikut gambaran cakupan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas se-Kota Batam pada tahun 2018.

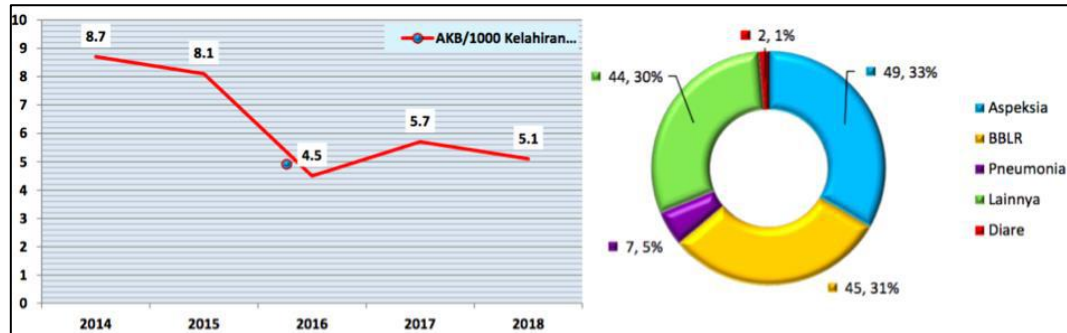


Gambar 2. 48 Komplikasi Obstetri yang Tertangani Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

6. Angka Kematian Balita (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi sebelum anak mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan dalam program kerja untuk menurunkan angka kematian bayi pada tahun 2018 hingga 19/1000 kelahiran hidup, angka ini menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian bayi. Dinas Kesehatan Kota Batam dan jajaran serta mitranya terus berupaya untuk menurunkan angka kematian bayi, hasil yang didapatkan cukup menggembirakan, yang mana tahun 2018 angka kematian bayi mampu direduksi hingga mencapai 5,1 per 1.000 kelahiran hidup. Terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 (5,7 per 1.000 kelahiran hidup).



Gambar 2. 49 Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup dan Proporsi

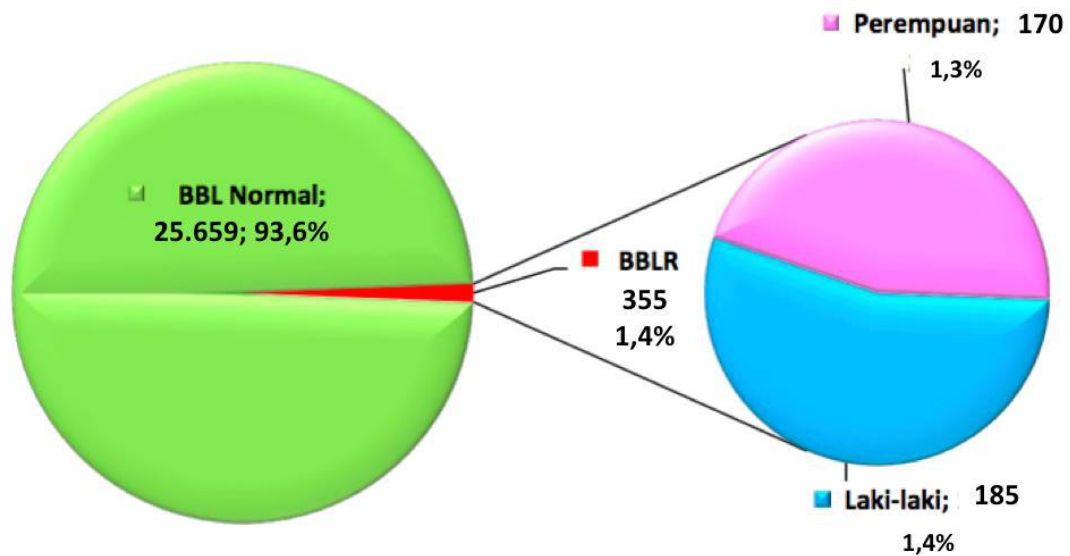
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Penyebab kematian bayi banyak disebabkan oleh Apeksia, BBLR dan lainnya, terdapat kematian bayi karena diare dan pneumonia dengan porsi kecil. Kasus Berat Badan Lahir Rendah menggambarkan kurangnya perawatan masa prenatal terutama masalah gizi ibu hamil, penyakit yang menyertai ibu selama kehamilan sehingga janin tidak dapat tumbuh dengan baik.

Pada prinsipnya angka kematian ini dapat ditekan dengan mempersiapkan ibu untuk hamil dengan kondisi kesehatan yang prima untuk menjalani kehamilan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu baik upaya promotif, preventif dan kuratif.

7. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) adalah kondisi dimana bayi memiliki berat badan lahir kurang dari 2500 gram saat dilahirkan, disebabkan oleh ibu yang memiliki masalah kesehatan selama hamil antara lain preeklamsi, tekanan darah tinggi dan kekurangan gizi, infeksi selama kehamilan, kelainan genetik, terlahir dari ibu dengan berat badan kurang selama kehamilan, usia ibu saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun dan kehamilan kembar. Kota Batam tahun 2018 dari bayi baru lahir ditimbang sebanyak 28.180 (100%) hanya ada angka kejadian BBLR sebanyak 352 (1.24%) dan bayi dengan berat badan lahir normal sebanyak 27.828 (98.76%). Sementara itu terjadi kenaikan angka BBLR di tahun 2019 menjadi 355 (1,4%) dengan komposisi laki-laki 185 (1,4%) dan perempuan 170 (1,3%). Proporsi BBLR tahun 2019 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

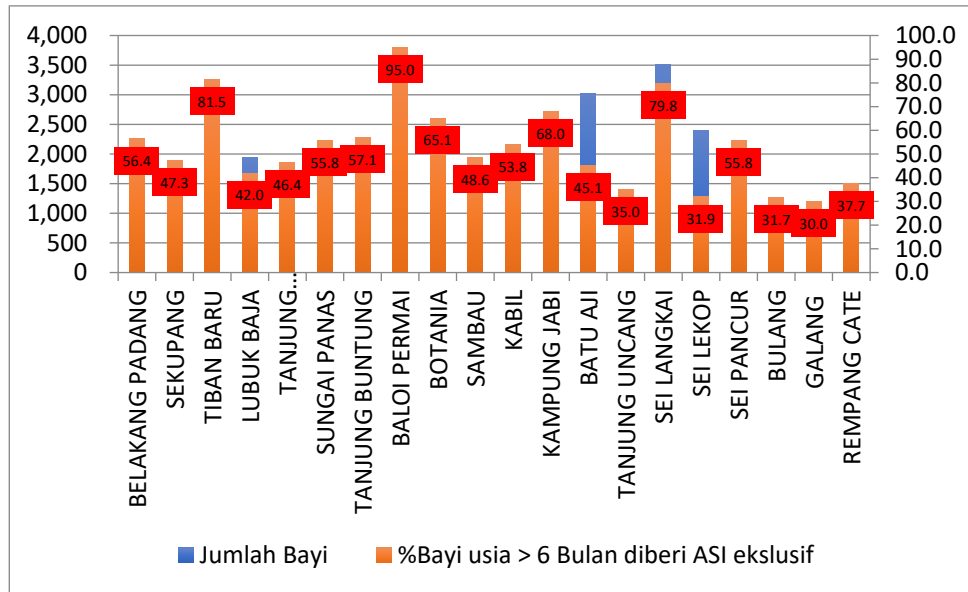


Gambar 2. 50 Proporsi Berat Badan Lahir Rendah Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

8. **Bayi dengan Asi Eksklusif**

ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi usia 0-6 bulan tanpa ada makanan pendamping lainnya. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan ASI secara optimal disamping keuntungan ASI lainnya seperti komposisi ASI yang sangat sesuai untuk bayi, mudah dan murah. Cakupan ASI Eksklusif di Kota Batam masih cukup rendah (46.2%) dibanding dengan target nasional (80%). Rendahnya cakupan ASI eksklusif, dimungkinkan karena masih rendahnya pengetahuan ibu-ibu balita akan pentingnya ASI disamping jumlah tenaga kerja wanita di Kota Batam yang cukup besar, sehingga mempunyai potensi pemberian ASI eksklusif tidak mencapai usia bayi sampai 6 bulan. Angka ini menghimbau kita semua baik petugas kesehatan, kader posyandu, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh komponen masyarakat lainnya mendorong peningkatan penggunaan ASI bagi bayi secara optimal dan mengupayakan agar sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Bersalin dan Bidan Praktek Swasta memberikan pelayanan sayang bayi dengan meningkatkan program Inisiasi Menyusu Dini.



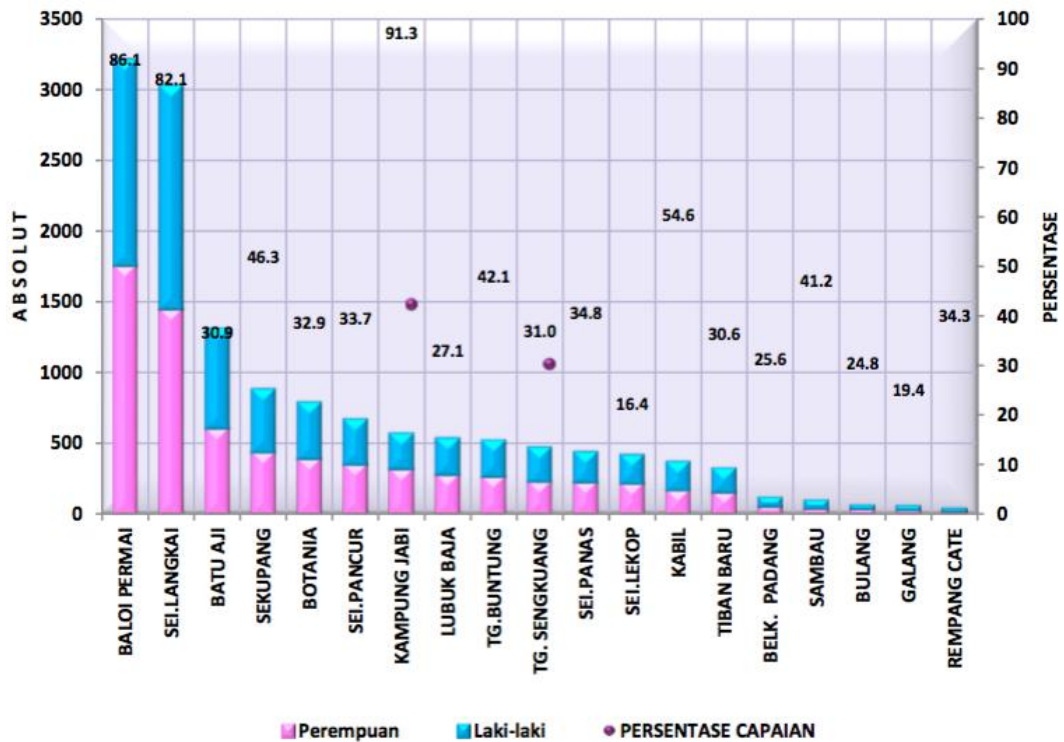
Gambar 2. 51 Cakupan ASI Eksklusif Per Kecamatan Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Dari gambar diatas terlihat bahwa hanya Puskesmas Baloi Permai dan Tiban Baru yang telah mencapai target (80%), sementara Puskesmas lainnya belum mencapai target.

9. Pelayanan Kesehatan Bayi

Kunjungan bayi adalah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi imunisasi dasar, Stimulasi Deteksi Intervensi Tumbuh Kembang (SDIDTK) oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis dan penyuluhan kesehatan.



Gambar 2. 52 Pelayanan Kesehatan Bayi Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2018

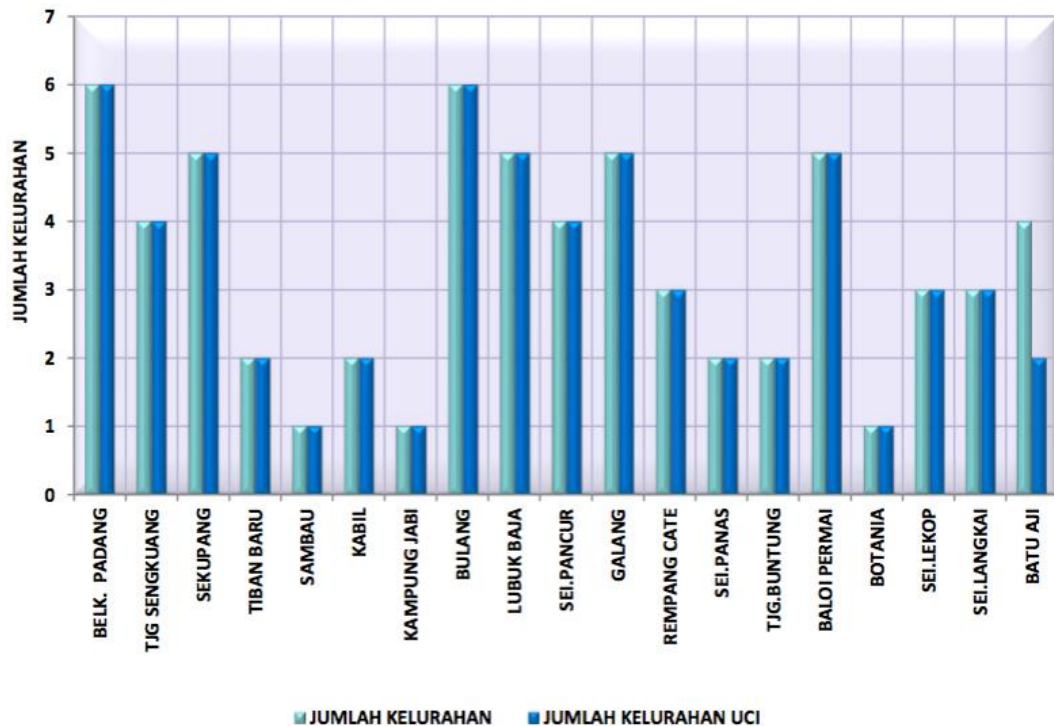
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pelayanan kesehatan bayi harus memenuhi kriteria yakni mendapatkan pelayanan minimal 4 kali pada usia 29 hari sampai <1 tahun minimal satu kali setiap 3 bulan dengan ketentuan jumlah kunjungan minimal 8 kali dalam setahun. Secara umum cakupan pelayanan kesehatan bayi tahun 2018 di Kota Batam mencapai 88%, dari 19 Puskesmas. Indikator ini masih belum mencapai target yang diharapkan, hal ini karena belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan terutama dari sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di Kota Batam.

10. Desa UCI (*Universal Child Immunization*)

Salah satu indikator keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dengan presentase cakupan imunisasi dasar minimal 88% dari jumlah bayi yang ada di desa/Kelurahan. Target cakupan desa/kelurahan UCI tahun 2018 adalah 100%, hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diharapkan tahun 2018 semua desa/Kelurahan memiliki predikat desa/Kelurahan UCI. Tahun 2018

Kota Batam seluruh kelurahan sudah UCI sebesar 96.6% hanya satu wilayah kerja Puskesmas Batu Aji belum UCI dengan cakupan kelurahan UCI 50%.



Gambar 2. 53 Distribusi Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

11. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada tahun 2018 ditemui sebanyak 356 balita atau 0.46% balita mengalami gizi buruk (kurus sekali) dan semua kasus 100% telah ditangani sesuai standar dari jumlah balita 146.196. Hasil penyelidikan epidemiologi diketahui bahwa balita yang mengalami gizi Buruk/kurus sekali tidak sepenuhnya karena kurang ketersediaan makanan, tetapi lebih merupakan akibat dari penyakit kronis yang diderita sehingga mempengaruhi asupan makanan yang berakibat balita kehilangan berat badan normal. Balita gizi buruk dengan gangguan klinis telah dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit dan Balita yang tidak mengalami gangguan klinis dilakukan rawat jalan atau pemantauan oleh petugas Puskesmas. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari proporsi balita gizi buruk mendapat perawatan dibawah ini.



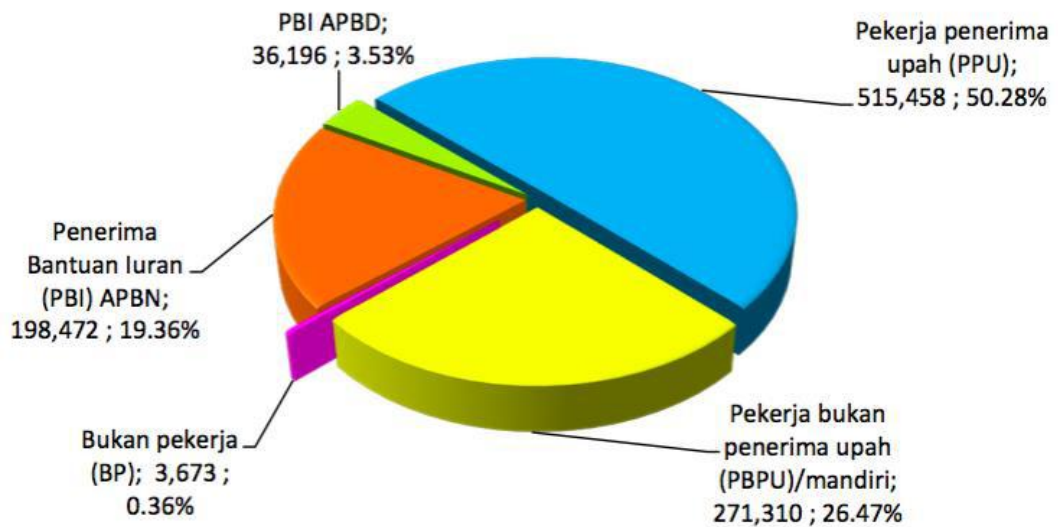
Gambar 2. 54 Proporsi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

D. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1. Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hak paling dasar bagi seorang manusia dan oleh karena itu negara mengatur pemenuhan hak azasi ini melalui UUD 1945, khususnya pasal 34 ayat 2 tentang jaminan sosial. Jaminan kesehatan memungkinkan setiap orang memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan, terutama masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah kesehatan dan pembiayaannya. Pemerintah Kota Batam telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan melalui 2 skema jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yaitu jaminan kesehatan nasional (JKN) dan subsidi pelayanan kesehatan. Kota Batam tahun 2018 proporsi kepesertaan jaminan kesehatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. 55 Jenis Jaminan Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

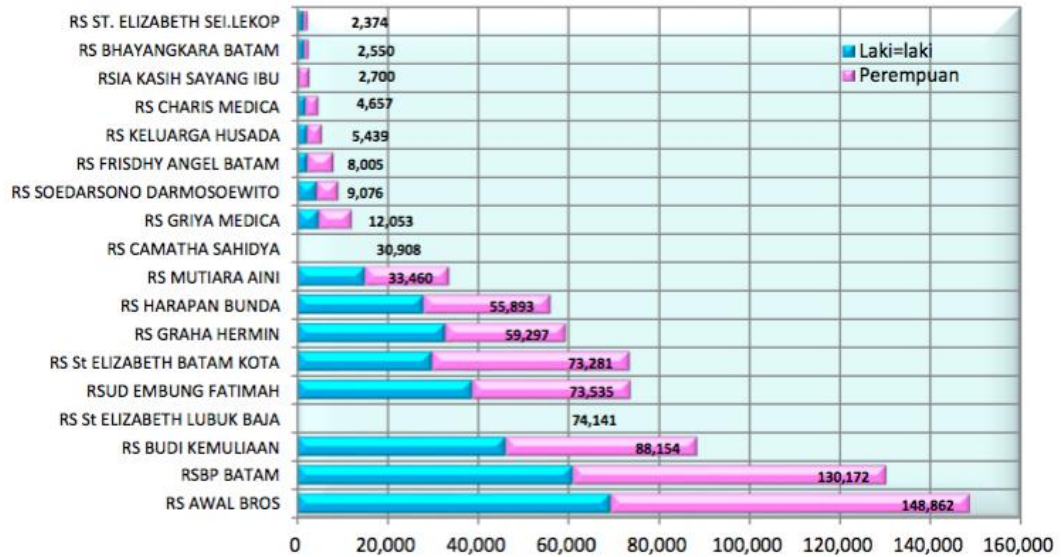
2. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Pelayanan kesehatan rawat jalan menunjukkan tingkat pemanfaatan sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan primer seperti Puskesmas, klinik swasta dan pelayanan kesehatan rujukan (rumah sakit). Kunjungan rawat jalan erat kaitannya dengan angka kesakitan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, yang juga menggambarkan berbagai indikator, seperti tingkat upaya kesehatan masyarakat, tingkat keluarga ber PHBS dalam wilayah kerja Puskesmas. Pelayanan Kesehatan rawat jalan di rumah sakit menunjukkan masalah kesehatan yang membutuhkan tenaga medis spesialis atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih spesifik. Berikut gambaran pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.



Gambar 2. 56 Cakupan Rawat Jalan Puskesmas Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

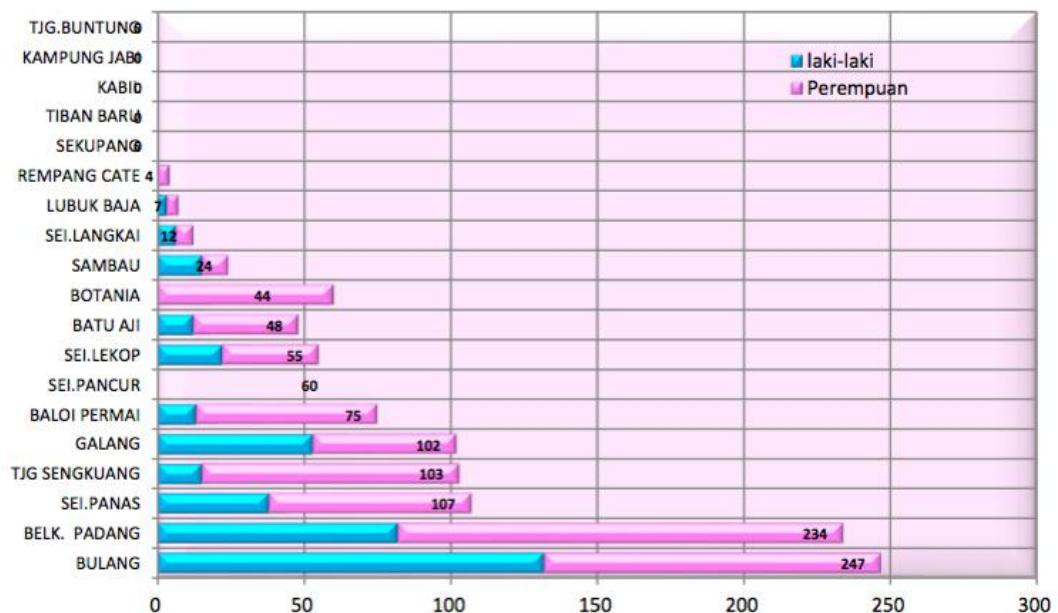


Gambar 2. 57 Cakupan Rawat Jalan Rumah Sakit Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

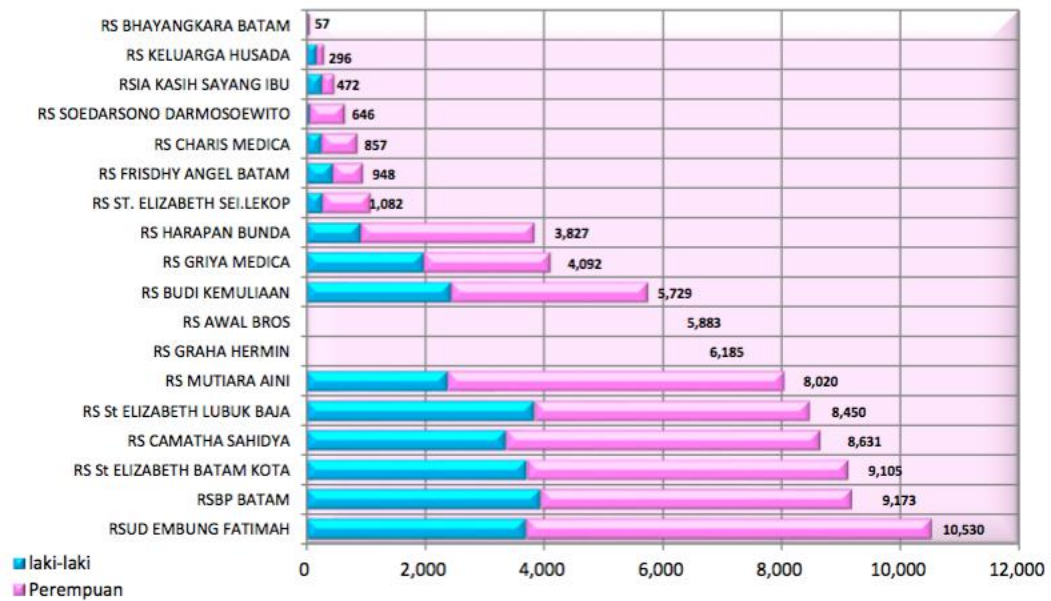
3. Cakupan Rawat Inap

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Rawat inap merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.



Gambar 2. 58 Cakupan Rawat Inap Puskesmas Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam



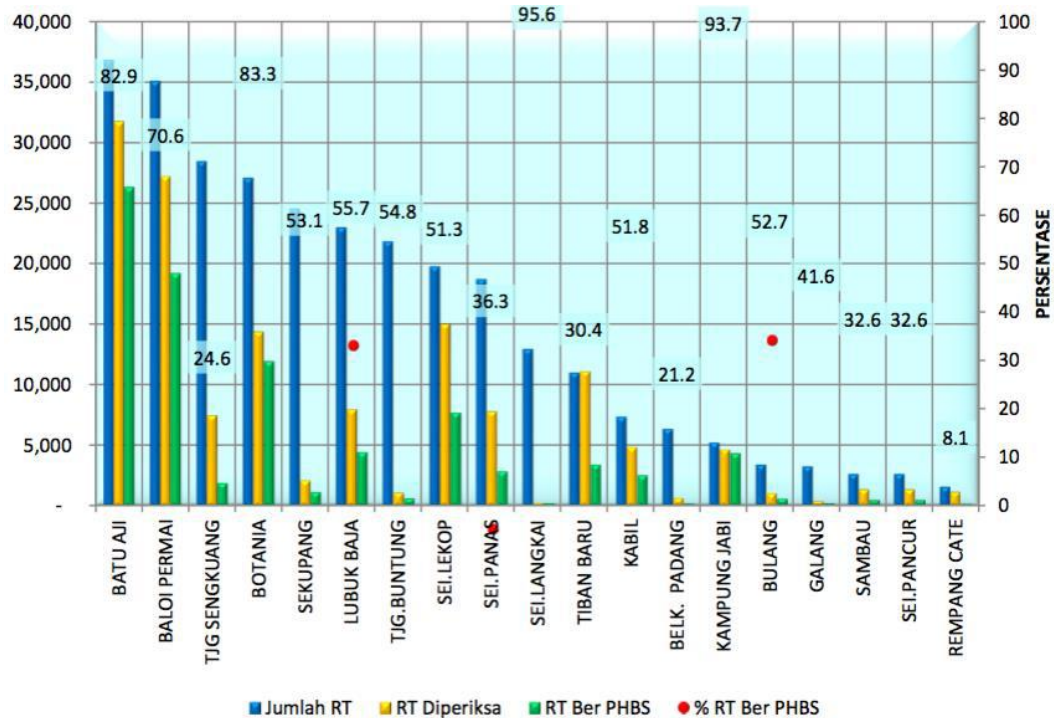
Gambar 2. 59 Cakupan Rawat Inap Rumah Sakit Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

4. Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih Sehat yang disebut dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan- kegiatan kesehatan di masyarakat. Indikator PHBS yaitu tentang Gizi adalah makan beraneka ragam makanan, minum Tablet Tambah Darah, mengkonsumsi garam beryodium, memberi bayi dan balita Kapsul Vitamin A. Tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan.

PHBS Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Hasil cakupan rumah tangga ber PHBS berdasarkan wilayah kerja dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. 60 Cakupan Rumah Tangga PHBS Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di Rumah Tangga yaitu 1). Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2). Memberi bayi ASI eksklusif, 3). Menimbang bayi dan balita, 4). Menggunakan air bersih, 5). Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6). Menggunakan jamban sehat, 7). Memberantas jentik di rumah, 8). Makan buah dan sayur setiap hari, 9). Melakukan aktivitas fisik setiap hari, 10). Tidak merokok di dalam rumah. Kota Batam tahun 2018 cakupan rumah tangga ber PHBS sebanyak 87.776 (62.51%) dari jumlah rumah tangga yang dipantau sebanyak 140.425 (48.13%) , dengan jumlah rumah tangga sebanyak 291.753.

5. Keadaan Lingkungan

Kesehatan lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan mengenai penyelenggaraan

kesehatan lingkungan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang pengaturannya ditujukan dalam rangka terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat tersebut melalui upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum.

Menurut teori HL. Blum, terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Salah satunya faktor lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap status kesehatan masyarakat. Faktor kesehatan dipengaruhi beberapa aspek yang kompleks dan melibatkan banyak sektor. Untuk itu dalam penataan lingkungan yang sehat, dalam penyelenggaraan pembangunan perlu memperhatikan lingkungan yang melalui pembangunan berwawasan kesehatan. Pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, untuk itu perlu ditata dan diciptakan lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.

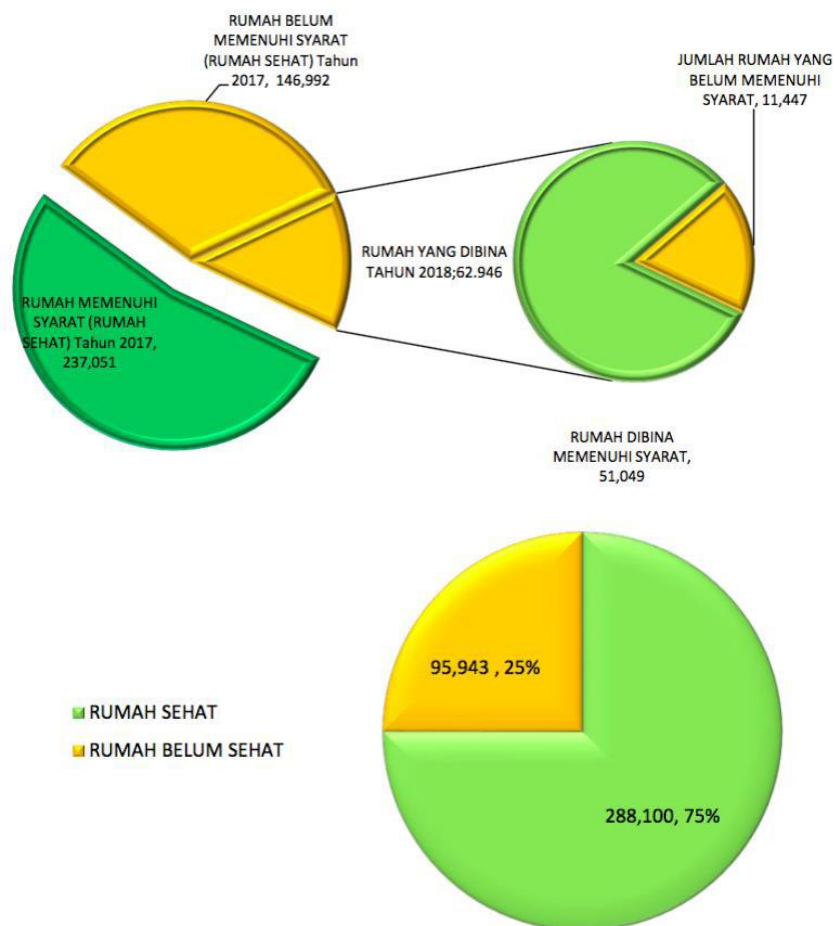
Pembangunan infrastruktur Kota Batam yang berkembang pesat, tingginya mobilisasi regional penduduk yang memiliki persoalan dengan adanya rumah liar dan banyaknya perusahaan industri yang tentunya tak lepas dari limbah yang jika tidak dikelola sehingga perlu penataan yang tepat dan berkesinambungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan Kota Batam sebagai dengan baik tentunya akan menimbulkan masalah kesehatan.

Lingkungan Kota Batam dapat juga dilihat dari beberapa indikator, seperti persentase rumah sehat, rumah tangga dengan akses air bersih, sanitasi dasar (saluran pembuangan air limbah, pembuangan sampah) dan rumah bebas jentik dengan beberapa kriteria, seperti penilaian rumah sehat dilihat dari beberapa komponen, yakni komponen rumah secara fisik termasuk ventilasi, luas bangunan,

komponen sanitasi yang meliputi sanitasi dasar, serta komponen perilaku sebesar 44%.

6. Persentase Rumah Sehat

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 237.051 rumah sudah memenuhi syarat kesehatan dengan proporsi 61.735. Dalam upaya pembinaan yang berkelanjutan, pada tahun 2018 dilakukan pembinaan sebanyak 62.992 rumah dan rumah sehat yang berhasil dibina menjadi rumah sehat sebanyak 51049 rumah, sehingga pada tahun 2018 tercatat sejumlah rumah sehat 288.100 rumah, dengan proporsi 75% dari seluruh rumah yang ada.

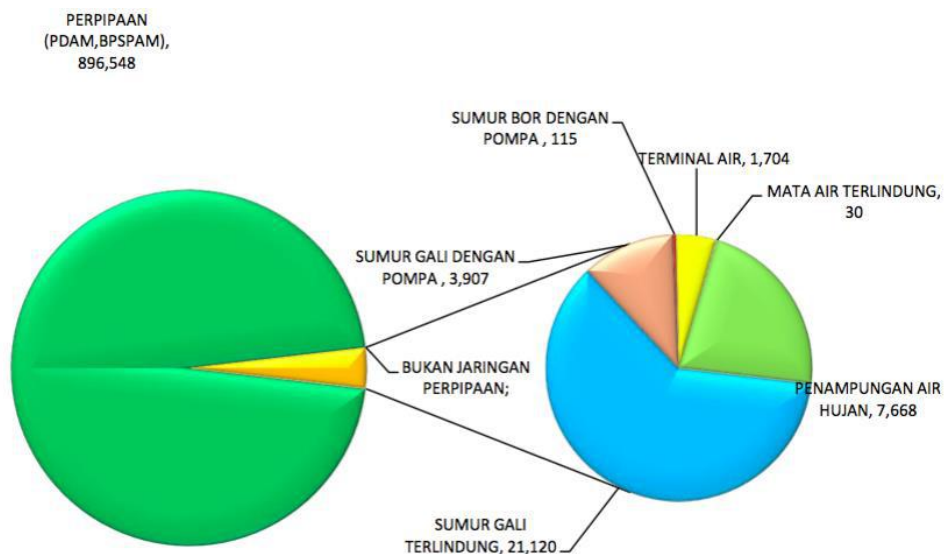


Gambar 2. 61 Proporsi Pembinaan Rumah Sehat dan Distribusi Rumah Sehat Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

7. Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak

Indikator lainnya pada program kesehatan lingkungan dapat dilihat dari sumber air bersih yakni sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila air tersebut dimasak dapat diminum. Secara fisik kualitas air bersih tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna dengan kualitas kimia kadar besi maksimal 0,3 mg/l, Kesalahan maksimal 500 mg/l serta syarat mikrobiologis koliform tinja dengan total koliform (maksimal 0 per 100 ml air). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Kota Batam tahun 2018, sebagian besar keluarga mempunyai sumber air minum menggunakan air meteran/ledeng (96%) dan sebagian menggunakan air kemasan dan air isi ulang, hal ini menunjukkan sebagian besar masyarakat sudah terakses sumber air minum yang berkualitas. Seperti gambar dibawah ini.



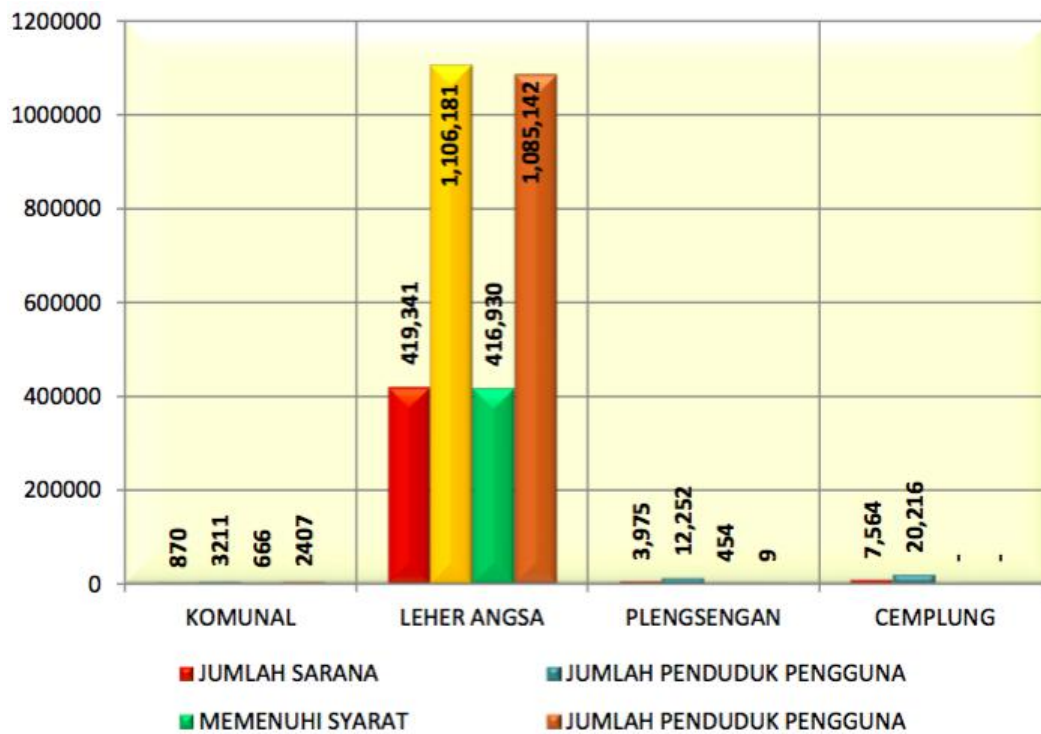
Gambar 2. 62 Proporsi Penduduk yang Memiliki Akses Air Minum Layak

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

8. Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak

Kondisi lingkungan dapat juga di lihat dari kepemilikan sanitasi dasar yang terdiri dari kepemilikan jamban, tempat pembuangan sampah dan Saluran Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Idealnya setiap rumah tangga mempunyai sarana sanitasi untuk pengelolaan limbah rumah tangga dengan berbagai bentuknya, sehingga tidak mencemari lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan keluarga itu sendiri

atau masyarakat sekitarnya. Kepemilikan sanitasi dasar merupakan kriteria penilaian rumah sehat. Berikut gambaran kepemilikan sanitasi dasar hasil survey yang dilakukan sanitarian pada tahun 2018.



Gambar 2. 63 Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

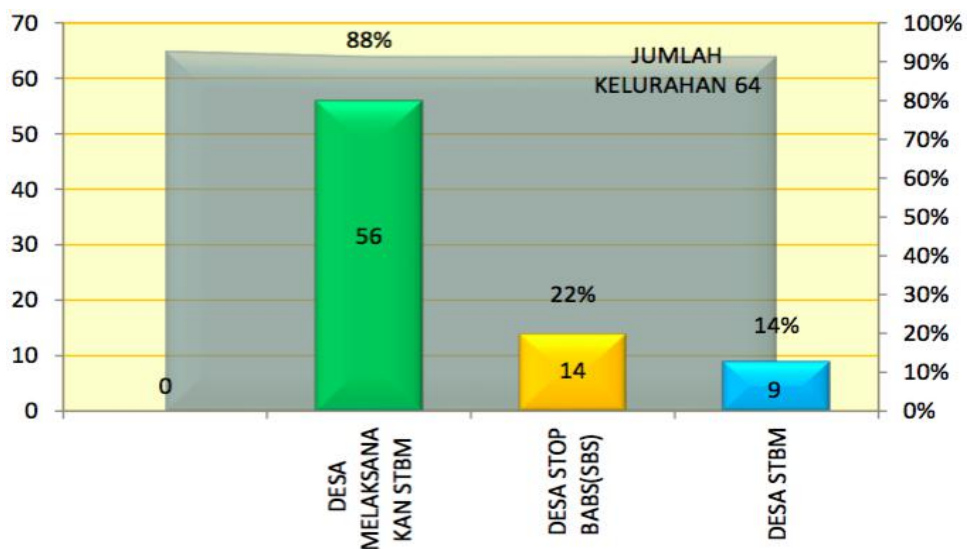
Kepemilikan sanitasi dasar jika dilihat pada grafik diatas terhadap rumah yang dilakukan pemeriksaan pada umumnya keluarga telah memiliki sanitasi dasar yang memenuhi syarat.

9. Desa STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Kepmenkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. STBM memiliki 6 (enam) strategi nasional, yaitu: 1). Penciptaan lingkungan yang kondusif (enabling environment), 2). Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*), 3). Peningkatan penyediaan sanitasi (*supply improvement*), 4). Pengelolaan

pengetahuan (knowledge management), 5). Pembiayaan 6). Pemantauan dan evaluasi.

Keunggulan program adalah satu-satunya program yang mengusung non subsidi untuk pembangunan sarana jamban tingkat rumah tangga. Sampai saat ini masih menjadi program sanitasi yang terbukti paling cepat meningkatkan akses sanitasi dan perubahan perilaku higiene di Indonesia. STBM adalah satu-satunya program sanitasi yang menasar langsung ke tingkat rumah tangga yang berfokus pada perubahan perilaku, bukan pembangunan sarana.



Gambar 2. 64 Proporsi Desa STBM Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pendekatan STBM selama ini banyak dilakukan didaerah rural atau pedesaan. Dengan pendekatan STBM, masyarakat mau berubah bahkan membuat fasilitas sanitasinya dengan biayanya sendiri. Penyadaran untuk melakukan perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat juga sangat dibutuhkan dikawasan urban atau perkotaan. Dari 64 jumlah kelurahan di Kota Batam sebanyak 9 Kelurahan (14%) sudah melaksanakan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat.

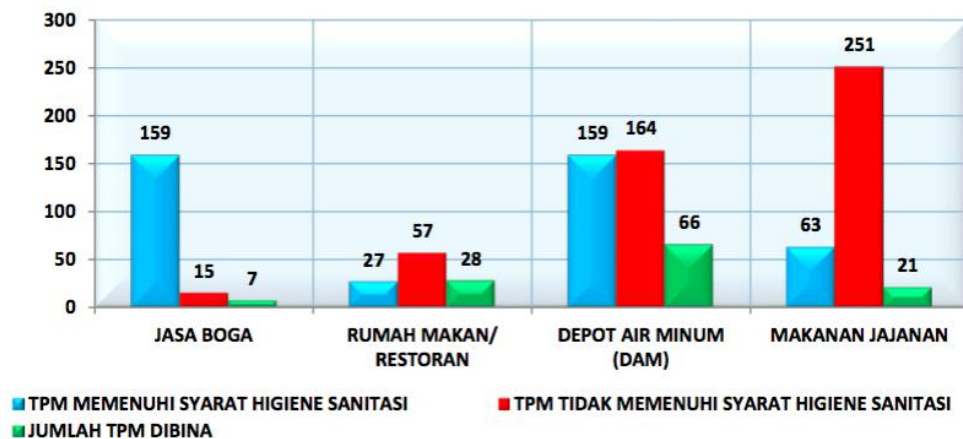
10. **Tempat-tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan**

Tempat-tempat umum merupakan tempat yang diperuntukkan bagi masyarakat umum bukan masyarakat khusus, ada tempat dan kegiatan permanen, di dalam

tempat tersebut dilakukan kegiatan atau aktivitas yg dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan, di dalam tempat tersebut terdapat fasilitas atau perlengkapan yg dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

Tempat tempat ini tak luput dari pengawasan karena tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya, untuk itu pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, Pelaksanaan dan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum dilakukan secara berkala dan menjadi tanggung jawab wilayah kerja Puskesmas setempat. Selain itu untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ditempat-tempat umum.

Berikut hasil pengawasan dan pembinaan pengolahan makanan di Kota Batam tahun 2018, berdasarkan gambar berikut.



Gambar 2. 65 Pembinaan Tempat Pengelola Makanan Tahun 2018

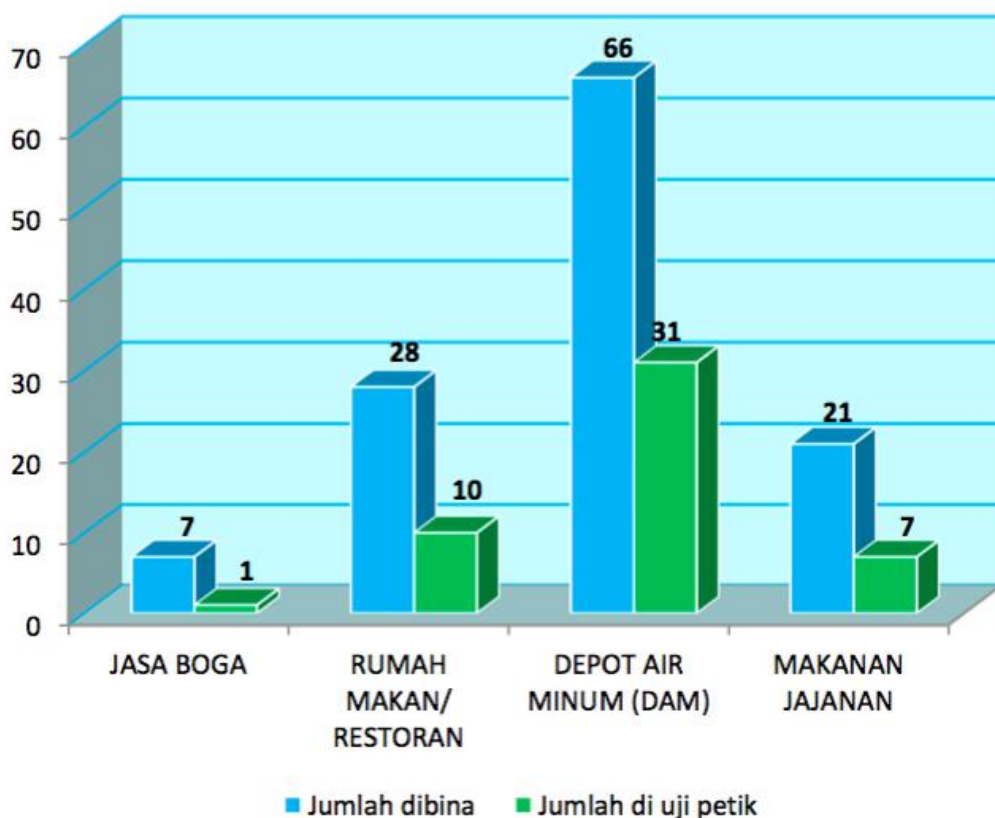
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Pengawasan tempat pengolahan makanan merupakan suatu bangunan yang dipergunakan untuk mengolah makanan seperti pengrajin makanan, jasa boga, pembuat kue, restoran, depot air minum dan lain-lain. Tempat pengolahan

makanan (TPM) memiliki potensi cukup besar untuk menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bahkan keracunan akibat dari makanan yang dihasilkan.

Tempat pengolahan makanan merupakan tempat dilakukannya pengolahan makanan mulai dari penerimaan bahan mentah hingga pengemasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap hygiene sanitasi berguna untuk menghindari penyakit bawaan makanan atau akibat kesalahan dari pengolahan makanan.

Di Kota Batam tahun 2018 jumlah TPM yang dibina antara lain jasa boga, rumah makan (restoran), depot air minum dan makanan jajanan dapat dilihat pada gambar berikut.



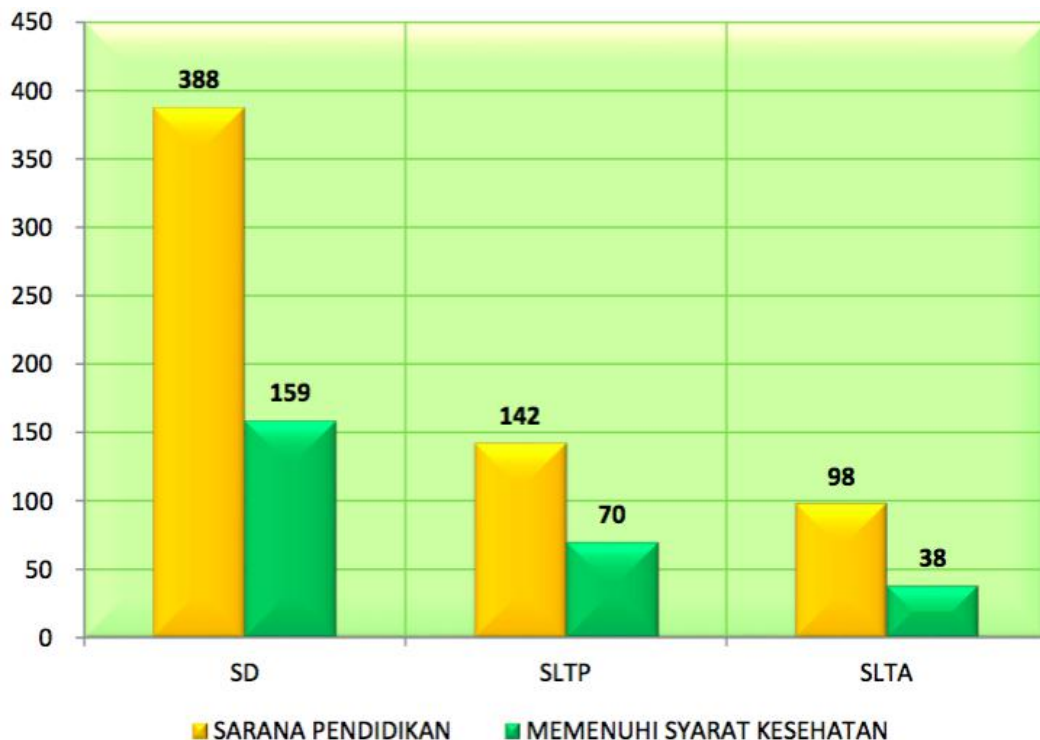
Gambar 2. 66 Distribusi TPM Yang Dibina Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Lingkungan sekolah adalah salah satu kesatuan lingkungan fisik, mental dan sosial dari sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat mendukung

proses belajar mengajar dengan baik dan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan murid secara optimal.

Faktor lingkungan sekolah dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, juga kesehatan warga sekolah. Kondisi dari komponen lingkungan sekolah tertentu dapat menyebabkan timbulnya masalah kesehatan. Faktor resiko lingkungan sekolah tersebut antara lain kondisi atap, dinding, lantai, pencahayaan, ventilasi, kepadatan kelas, kebisingan, ketersediaan tempat cuci tangan, air bersih, toilet, pengelolaan sampah, sana pembuangan air limbah, halaman sekolah, kantin dan perilaku masyarakat sekolah. Berikut gambaran sarana pendidikan yang memenuhi syarat kesehatan tahun 2018.

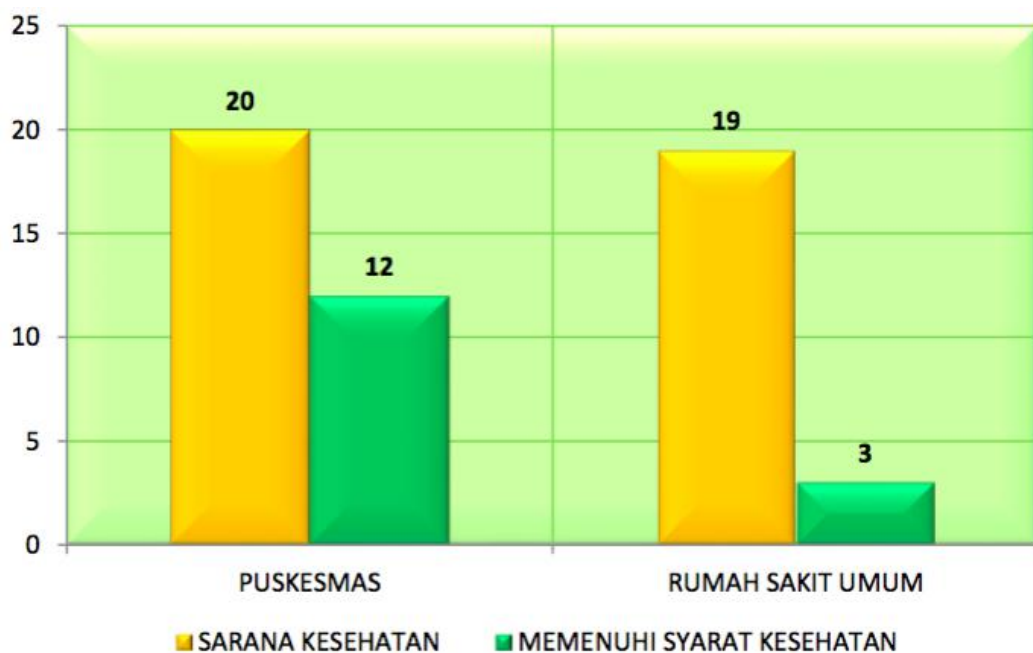


Gambar 2. 67 Distribusi Sarana Pendidikan Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Sanitasi sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit diatur secara khusus dalam regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit.

Lingkungan sarana kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit dan maupun orang sehat, sehingga memungkinkan menjadi tempat penularan penyakit, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Untuk pengawasan terhadap lingkungan saran pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara berkala. Beberapa indikator yang digunakan adalah tata graha, sarana pelayanan kesehatan, pencahayaan, ventilasi, kebisingan, kebersihan ruangan, sistem pengolahan limbah, zona risiko, kualitas udara dan lainnya. Hasil sarana kesehatan yang memenuhi syarat di Kota Batam tahun 2018 sebagai berikut.



Gambar 2. 68 Distribusi Sarana Kesehatan Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Sanitasi hotel merupakan usaha pencegahan timbulnya berbagai macam penyakit diantara karyawan maupun tamu hotel sebagai akibat dari tidak diperhatikannya faktor-faktor lingkungan hotel yang mengganggu. Sanitasi hotel menyangkut 2 aspek pembahasan yaitu yang berhubungan dengan perumahan disekeliling dan yang berhubungan dengan makanan dan minuman.

Hotel merupakan area publik yang perlu dilakukan pengawasan fasilitas sanitasi secara berkala, adapun pengawasan yang dilakukan sebagai persyaratan

memenuhi sanitasi kesehatan adalah kualitas air, kuantitas air, pembuangan air limbah, toilet untuk umum, kamar mandi dan jamban untuk tamu menginap, pengelolaan tempat sampah, peralatan pencegah masuknya serangga dan tikus. Berikut hasil pengawasan sanitasi hotel di Kota Batam.



Gambar 2. 69 Distribusi Sarana Hotel Memenuhi Syarat Kesehatan Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam

Selain itu persyaratan yg harus dipenuhi berkaitan dengan karyawan, pakaian kerja yg bersih dan utuh, memiliki surat keterangan sehat dari dokter yg masih berlaku, memiliki persyaratan kursus penyehatan makanan bagi petugas pengelola makanan, telah menjalani pemeriksaan *rectal swab* bagi penjamah makanan.

KESIMPULAN

Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik perlu ditunjang oleh kecukupan gizi dan penerapan pola hidup sehat oleh masyarakat, serta kecukupan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis serta tenaga penunjang medis lainnya. Kota Batam hingga tahun 2024 (asumsi jumlah penduduk proyeksi BPS di tahun 2024 sebesar 1.174.771 jiwa) masih memerlukan tambahan:

- 5 Puskesmas, 88 pustu (asumsi standar 1 puskesmas dibantu 5 pustu);
- 304 dokter umum (asumsi pemenuhan target nasional 50:100.000 di tahun 2024)
- 98 dokter gigi (asumsi target nasional 14:100.000 di tahun 2024);
- 934 perawat (asumsi target nasional 200:100.000 di tahun 2024);
- 928 bidan (asumsi target nasional 130:100.000 di tahun 2024);
- 82 kefarmasian (asumsi target nasional 30:100.000 di tahun 2024);
- 184 sanitarian (asumsi target nasional 20:100.000 di tahun 2024);
- 147 ahli gizi (asumsi target nasional 18:100.000 di tahun 2024);
- 43 keterampilan fisik (asumsi target nasional 6:100.000 di tahun 2024);
- 103 keteknisian medis (asumsi target nasional 18:100.000 di 2024);

Selain tenaga medis dan penunjang medis di atas, saat ini Kota Batam masih memerlukan tenaga manajemen, terutama di puskesmas.

Lebih lanjut perlu optimalisasi mekanisme pencatatan data terkait pelayanan kesehatan baik di tingkat puskesmas, posyandu maupun rumah sakit. Hal ini sangat penting karena dari beberapa kasus yang ditemui di lapangan, ternyata pelayanan tindakan medis sudah dilakukan, akan tetapi tidak didokumentasikan dengan baik sehingga tidak dilaporkan. Dengan demikian peningkatan kerjasama lintas sektor dengan mitra kesehatan sangat diharapkan sehingga dapat terwujud sistem manajemen dan informasi kesehatan yang valid dan terpercaya.

2.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penjabaran kondisi kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2015-2019 berdasarkan realisasi indikator kinerja *outcome* akan disampaikan dalam empat bagian, yakni bagian (1) Bina Marga, (2) Sumber Daya Air, dan (3) Cipta Karya dan (4) Tata Ruang. Penjabaran lebih lanjut disampaikan di bawah ini.

A. Bina Marga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2014, tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Bidang Bina Marga/ Jalan untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan indikator prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten/Kota baik dan sedang target sampai dengan 2019 adalah 60 persen. Terhadap target tersebut untuk urusan bidang PUPR sub bidang Bina Marga/Jalan telah mencapai target SPM yang ditetapkan, yaitu sampai dengan tahun 2019 kondisi jalan Kota baik dan sedang sudah mencapai 85,39 persen.

Indikator Panjang Jalan yang dibangun/ditingkatkan (km) selama periode 2016-2019 telah menunjukkan realisasi yang positif, secara total panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan pada periode tersebut sepanjang 177 Km. Adapun pencapaian sampai dengan tahun 2019 total panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan adalah sepanjang 119,61 Km dengan pencapaian sebesar 67,58 persen terhadap kebutuhan panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan pada periode RPJMD 2016-2021. Lebih lanjut, target tahunan sejak 2016-2018 selalu tercapai, hanya pada tahun 2019 target 30 Km hanya terrealisasi 25,59 Km. Hal tersebut dikarenakan pembangunan jalan yang dilakukan tidak hanya menambah panjang jalan tapi juga lebar jalan untuk mengurangi kemacetan, atau dengan kata lain 4,41 Km digunakan untuk menambah lebar jalan.

Untuk Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) selama periode RPJMD 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sepanjang 60 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 94 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 156 persen terhadap kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Untuk

pencapaian Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun tiap tahunnya rata – rata telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Untuk indikator Panjang Jalan yang dipelihara (Km) dengan total Panjang Ruas Jalan Kota Batam yang harus dipelihara sepanjang 646,16 Km, selanjutnya selama periode 2016-2019 pemeliharaan jalan telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Selanjutnya Selama periode 2016-2019 seluruh Jumlah Titik Lampu (PJU) yang dipelihara di Kota Batam telah terealisasi sesuai target. Pada Indikator panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi pada periode RPJMD 2016-2021 kebutuhannya adalah sepanjang 114.300 meter, sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 62.800 m atau dengan pencapaian 54,94 persen terhadap target RPJMD 2016-2021.

Adapun untuk Indikator Program jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama periode 2016-2019 telah menunjukkan realisasi yang positif. Secara total kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun, selama pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sebanyak 1.527 titik, adapun pencapaian sampai dengan tahun 2019 total jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun adalah sebanyak 1.157 titik, atau dengan pencapaian terhadap kebutuhan sebesar 75,77 persen terhadap kebutuhan jumlah titik lampu (PJU) yang dibangun selama pada periode RPJMD 2016-2021.

Sementara panjang jaringan PJU yang direhabilitasi pada tahun 2016-2017 mencapai target tahunan, namun tahun 2018-2019 tidak mencapai target, sehingga menyisakan 11.500 meter jaringan yang belum direhabilitasi di tahun 2019. hal ini disebabkan, rehabilitasi yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan menyesuaikan dengan pelebaran jalan.

Kebutuhan Jumlah peralatan dan alat berat untuk menunjang tugas ke Bina margaan dan Sumber Daya Air pada periode RPJMD 2016-2021, dengan indikator Jumlah Peralatan dan Alat Berat adalah sebanyak 20 unit alat. Sampai dengan

tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 15 unit alat dengan pencapaian sebesar 75 persen terhadap kebutuhan alat pada periode RPJMD 2016-2021. Untuk pencapaian tahun 2019 masih belum terealisasi, karena pengajuan permohonan peralatan ke Provinsi Kepulauan Riau masih mengganggu realisasinya.

Untuk pembangunan infrastruktur pada daerah hinterland terdiri dari beberapa indikator yaitu, Indikator Program Panjang jalan yang dibangun / ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland (Km) selama periode 2016-2021 adalah sepanjang 11 Km. Adapun realisasi sampai dengan tahun 2019 adalah sepanjang 10 Km dengan pencapaian 94,55 persen terhadap kebutuhan pembangunan/peningkatan jalan wilayah *hinterland* pada periode RPJMD 2016-2021. Demikian juga dengan Indikator Program Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland selama periode 2016-2021, Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan total Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland adalah sepanjang 1500 m. adapun realisasi sampai dengan tahun 2019 adalah sepanjang 1.040 m dengan pencapaian 69,35 persen terhadap kebutuhan total Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (m) di wilayah hinterland. Untuk indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang dibangun di wilayah hinterland dengan kebutuhan pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sebesar 168 titik, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 68 titik atau dengan pencapaian 40,48 persen. Pembangunan lampu PJU di wilayah hinterland belum dapat terpenuhi sesuai target dikarenakan Keterbatasan Daya PLN pada daerah *hinterland*. Untuk Indikator Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Tabel 2. 46 Realisasi Indikator Kinerja Bina Marga Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i		Target	–	25	25	28	30

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan (Km)	Realisasi	–	31,5	34,4	28,12	25,59
ii	Panjang Jembatan/ Pelantar yang dibangun (M)	Target	–	10	10	10	10
		Realisasi	–	15	36	12	31
iii	Panjang jalan yang dipelihara (Km)	Target	–	35	35	40	48
		Realisasi	–	35	35	40	48
iv	Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara (titik)	Target	–	11.348	11.727	12,247	12,507
		Realisasi	–	11.348	11.727	12,247	12,475
v	Jumlah titik lampu PJU yang dibangun (titik)	Target	–	227	260	260	260
		Realisasi	–	227	295	288	407
vi	Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi (m)	Target	–	14.300	20.000	20.000	20.000
		Realisasi	–	14.300	20.000	15.000	13.500
vii	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland (Km)	Target	–	1	2	2	2
		Realisasi	–	1	3	3	3,3
viii	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland	Target	–	379	397	427	457
		Realisasi	–	379	397	447	447
ix	Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland	Target	–	18	30	30	30
		Realisasi	–	18	50	0	0
x	Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland (m)	Target	–	250	250	250	250
		Realisasi	–	250	276	250	264

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

B. Sumber Daya Air

Indikator kinerja sumber daya air disampaikan pada Tabel ...Untuk Indikator Program Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan (m) selama periode RPJMD 2016-2021 telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dengan kebutuhan total Panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan pada periode RPJMD 2016-2021 adalah sepanjang 22.000 m, kemudian sudah terealisasi sampai dengan tahun 2019 sepanjang 29.489 m atau dengan tingkat pencapaian sebesar 134 persen terhadap kebutuhan total panjang jembatan/pelantar yang dibangun pada periode RPJMD 2016-2021. Untuk

Indikator Panjang drainase yang dipelihara telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

Kondisi drainase di Kota Batam sangat berkorelasi terhadap permasalahan klasik suatu perkotaan, yakni banjir. Untuk mengetahui wilayah dan luas genangan pada area terbangun di Kota Batam pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 47 Lokasi Genangan di Kota Batam

Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				Penyebab
	Luas Ha	Tinggi m	Lama Jam/hari	Frekuensi Kali/Th	
Pasar Melcem (Baru)	4	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
Depan Hotel Pasific (Baru)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
Jalan Bunga Raya (depan DC mall – menuju pasar pagi jodoh)	2	0,1-0,5	0,5-1	1	Daerah cekungan
Simpang Martabak Har (Baru)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
Simpang Hotel Virgo (Baru)	1	0,1-0,5	0,5-1	3	bangunan Pelintas
Kawasan Bengkong Bengkel (Baru)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
Belakang Perum Duta Mas (simpang rusunawa batamcentre)	2	0,1-0,5	0,5-1	5	Kapasitas saluran kecil
Simpang perum seruni/Sekolah Yos sudarso (Cekungan)	1	0,1-0,5	0,5-1	3	daerah cekungan
Simpang Kabil (Belakang Pos Polisi)	1	0,1-0,5	0,5-1	2	Kapasitas saluran kecil
Depan perum simpang raya indah (cekungan)	1	0,1-0,5	0,5-1	4	daerah cekungan
Depan gerbang masuk perum livia garden dan depan gerbang masuk perum mitra raya	2	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
Depan kantor camat batam kota	1	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Simpang 4 Bank Indonesia Batam Centre	1	0,1-0,5	0,5-1	1	Kapasitas saluran kecil
Depan Halte Kepri Mall	1	0,1-0,5	0,5-1	3	daerah cekungan

Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
	Luas	Tinggi	Lama	Frekuensi	Penyebab
	Ha	m	Jam/hari	Kali/Th	
Depan Botania Plasa	1	0,1-0,5	0,5-1	3	daerah cekungan
Jalan Ltjen R.Soeprapto (Depan Plasa Panbill)	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Perum Kodim Batu Aji	3	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Perum Sierra dan Masyeba Batu Aji	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Jalan Letjen R Soeprapto (Depan SP Plasa)	2	0,1-0,5	0,5-1	4	bangunan pelintas
Jalan Diponegoro (depan perum permata hijau dan villa 3 paradise)	3	0,1-0,5	0,5-1	4	daerah cekungan
SPBU simpang Base Camp	1	0,1-0,5	0,5-1	5	daerah cekungan
Jalan Letjen R Soeprapto (depan Buana Raya Batu Aji)	2	0,1-0,5	0,5-1	5	Kapasitas saluran kecil
Jalan di depan PT. Nippon Stell (Baru)	1	0,1-0,5	0,5-1	4	daerah cekungan
Jalan menuju pelabuhan rakyat sagulung	2	0,1-0,5	0,5-1	3	daerah cekungan
Jalan Menuju kantor camat sagulung (Baru)	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Jalan antara Fanindo dan MAN (baru)	2	0,1-0,5	0,5-1	3	Kapasitas saluran kecil
Jalan Gajah Mada (depan perum tiban ayu)	2	0,1-0,5	0,5-1	4	Kapasitas saluran kecil
Perumahan Taman Laguna Indah (marina) dan Perumahan Ricci	2	0,1-0,5	0,5-1	5	Kapasitas saluran kecil
Perumahan Devin Premire Marina	2	0,1-0,5	0,5-1	5	daerah cekungan
Perumahan Kartini Raya dan Pondok pratiwi	3	0,1-0,5	0,5-1	5	Kapasitas saluran kecil
Jalan Hang Kasturi (depan industry Taiwan)	2	0,1-0,5	0,5-1	5	daerah cekungan
Kantor Camat Nongsa (baru)	3	0,1-0,5	0,5-1	5	daerah cekungan
Kawasan sekolah kampung jabi kelurahan batu besar (baru)	3	0,1-0,5	0,5-1	5	daerah cekungan

Sumber: Dinas BMSDA Tahun 2017 (Strategi Sanitasi Kota Batam 2018-2022)

Dalam konteks penanganan banjir secara permanen, langkah normalisasi, pelebaran dan penambahan drainase saja tidak cukup, Kota Batam perlu memiliki

masterplan drainase yang menggambarkan ketentuan dan langkah intervensi terhadap jatuhnya air, dan akan dialirkan kemana air tersebut. Jika tidak memiliki masterplan, tatkala para pengembang memiliki izin mendirikan bangunan, maka drainase akan dibuat menggunakan aturan mereka sendiri. Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan pengembangan membangun perumahan, jika pengembang tersebut tidak memiliki gambaran ketentuan drainase kota, maka mereka akan membangun drainase sendiri, mereka kemungkinan besar hanya akan menyambungkan antara kawasan, tidak *connected* dengan drainase kota, ketika hal ini terjadi fenomena banjir sulit dihindari. Permasalahan banjir di Kota Batam perlu diselesaikan bersama-sama melibatkan stakeholder pembangunan dalam hal ini BP Batam, karena penyebab banjir bukan hanya terkait drainase, melainkan terkait aspek lain (perizinan lahan terhadap *cut and fill* yang tidak sesuai kaidah lingkungan, penutupan kolam retensi, dsb) yang bukan hanya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam saja, melainkan juga melibatkan aspek yang menjadi kewenangan BP Batam, sehingga sinkronisasi kebijakan Pemko dan BP Batam sangat diperlukan dalam menangani permasalahan banjir ini.

Tabel 2. 48 Realisasi Indikator Kinerja Sumber Daya Air Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan (m)	Target	–	7.609	3.000	3.000	4.000
		Realisasi	–	7.545	5.844	10.700	5.400
ii	Panjang drainase yang dipelihara (m)	Target	–	45	45	48	-
		Realisasi	–	4.500	4.500	4.800	-
iii	Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani (m)	Target	–	–	100	150	200
		Realisasi	–	–	100	333	90.20

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam

Sedangkan untuk panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani pada periode RPJMD 2016-2021 kebutuhannya adalah sepanjang 1.000 m sampai dengan tahun 2019 telah terealisasi sepanjang 523,2 m atau dengan pencapaian 52,32 persen terhadap target RPJMD 2016-2021. Lebih lanjut pada tahun 2019 dari target 200

m hanya tereralisasi 90,2 m dikarenakan pembangunan pengaman pantai menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dilapangan.

C. Cipta Karya

Wilayah pengelolaan air minum di Kota Batam terbagi menjadi dua, yakni wilayah *mainland* yang dikelola oleh BP Batam melalui PT. ATB sebagai operator air minum dan wilayah *hinterland* yang dikelola Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih. Untuk mengetahui kondisi pemenuhan air bersih di Kota Batam Tahun 2019 baik wilayah *mainland* maupun *hinterland* dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Berdasarkan Tabel 2.49 hingga tahun 2019 wilayah *mainland* telah terlayani air bersih dan sanitasi sebesar 98,17 persen dari total 262.282 rumah tangga di wilayah *mainland*, sehingga masih terdapat 257 rumah tangga yang belum terlayani air bersih dan sanitasi di wilayah *mainland*.

Sementara itu di wilayah *hinterland* yang menjadi kewenangan Pemko Batam, pada tahun 2019 terdapat 39,04 persen yang telah terlayani air bersih dari total 14.605 rumah tangga, atau masih terdapat 5.701 rumah tangga yang belum terlayani air bersih. Cakupan pelayanan berdasarkan kewenangan hanya meliputi lima kecamatan, yakni Belakang Padang, Bulang, Nongsa, Sagulung dan Galang. Sedangkan untuk sanitasi di wilayah *hinterland* sampai tahun 2019 hanya 9,18 persen yang telah memiliki sanitasi dari total 14.605 rumah tangga, atau masih terdapat 13.264 rumah tangga yang belum memiliki sanitasi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah *hinterland* terdapat empat belas *water treatment plant* /tampungan air baku (embung), enam sambungan pipa bawah laut dari PT ATB ke pulau, satu Seawater Reverse Osmosis (SWRO), dan satu mata air (*Broncaptering*). Untuk mengetahui jumlah dan lokasi sambungan rumah air bersih serta sumbernya dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2. 49 Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Mainland dan Hinterland Kota Batam Tahun 2019

NO	NAMA		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)	
	KECAMATAN/ KELURAHAN				JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (PT. ATB)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
I	BATU AMPAR		62,093	15,523	15,523	15,239	15,239			23	15,239	15,262
	1	TANJUNG SENGKUANG	27,402	6,851	6,851	6,725	6,725					
	2	SUNGAI JODOH	13,187	3,297	3,297	3,236	3,236					
	3	BATU MERAH	7,990	1,998	1,998	1,961	1,961					
	4	KAMPUNG SERAYA	13,514	3,379	3,379	3,317	3,317					
II	BELAKANG PADANG		20,469	5,117	-			5,117	3,339	618	3,339	618
	5	PEMPING	999	250				250				
	6	KASU	3,163	791				791				
	7	PULAU TERONG	3,393	848				848				
	8	PECONG	923	231				231				
	9	TANJUNG SARI	5,727	1,432				1,432				
	10	SEKANAK RAYA	6,264	1,566				1,566				
III	SEKUPANG		141,314	35,329	35,329	34,682	34,682			54	34,682	34,736
	11	SUNGAI HARAPAN	20,730	5,183	5,183	5,088	5,088					
	12	TANJUNG PINGGIR	4,921	1,230	1,230	1,208	1,208					
	13	TANJUNG RIAU	23,987	5,997	5,997	5,887	5,887					
	14	TIBAN INDAH	21,295	5,324	5,324	5,226	5,226					
	15	TIBAN BARU	25,136	6,284	6,284	6,169	6,169					
	16	TIBAN LAMA	21,324	5,331	5,331	5,233	5,233					
	17	PATAM LESTARI	23,921	5,980	5,980	5,871	5,871					
IV	BULANG		11,310	2,828	-			2,828	1332	145	1,332	145

NO	NAMA		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)	
	KECAMATAN/ KELURAHAN				JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (PT. ATB)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
	18	BULANG LINTANG	1,669	417				417				
	19	PULAU BULUH	3,049	762				762				
	20	TEMOYONG	1,475	369				369				
	21	BATU LEGONG	1,130	283				283				
	22	PANTAI GELAM	1,084	271				271				
	23	PULAU SETOKOK	2,903	726				726				
V	LUBUK BAJA		90,560	22,640	22,640	22,226	22,226			0	22,226	22,226
	24	KAMPUNG PELITA	9,905	2,476	2,476	2,431	2,431					
	25	LUBUK BAJA KOTA	13,639	3,410	3,410	3,347	3,347					
	26	BATU SELICIN	16,860	4,215	4,215	4,138	4,138					
	27	TANJUNG UMA	24,227	6,057	6,057	5,946	5,946					
	28	BALOI INDAH	25,929	6,482	6,482	6,364	6,364					
VI	NONGSA		71,847	17,962	17,594	17,272	17,272	368	105	114	17,377	17,386
	29	SAMBAU	10,778	2,695	2,695	2,645	2,645					
	30	BATU BESAR	28,800	7,200	7,200	7,068	7,068					
	31	KABIL	30,796	7,699	7,699	7,558	7,558					
	32	NGENANG	1,473	368				368				
VII	SAGULUNG		188,333	47,083	45,087	44,261	44,261	1,997	203	92	44,464	44,353
	33	TEMBESI	39,934	9,984	7,987	7,841	7,841	1,997	203			
	34	SUNGAI BINTI	25,268	6,317	6,317	6,201	6,201					
	35	SUNGAI LEKOP	20,751	5,188	5,188	5,093	5,093					
	36	SAGULUNG KOTA	28,180	7,045	7,045	6,916	6,916					
	37	SUNGAI LANGKAI	45,836	11,459	11,459	11,249	11,249					

NO	NAMA		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)		
	KECAMATAN/ KELURAHAN				JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (PT. ATB)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI	
	38	SUNGAI PELUNGGUT	28,364	7,091	7,091	6,961	6,961						
VIII	BATU AJI		130,012	32,503	32,503	31,908	31,908			0	31,908	31,908	
	39	TANJUNG UNCANG	37,789	9,447	9,447	9,274	9,274						
	40	BULIANG	43,463	10,866	10,866	10,667	10,667						
	41	KIBING	31,200	7,800	7,800	7,657	7,657						
	42	BUKIT TEMPAYAN	17,560	4,390	4,390	4,310	4,310						
IX	BATAM KOTA		176,287	44,072	44,072	43,265	43,265			0	0	43,265	43,265
	43	BALOI PERMAI	34,053	8,513	8,513	8,357	8,357						
	44	TAMAN BALOI	23,353	5,838	5,838	5,731	5,731						
	45	TELUK TERING	16,648	4,162	4,162	4,086	4,086						
	46	BELIAN	71,484	17,871	17,871	17,544	17,544						
	47	SUKAJADI	5,388	1,347	1,347	1,322	1,322						
	48	SUNGAI PANAS	25,361	6,340	6,340	6,224	6,224						
X	BENGKONG		111,923	27,981	27,981	27,469	27,469			0	0	27,469	27,469
	49	BENGKONG INDAH	21,861	5,465	5,465	5,365	5,365						
	50	BENGKONG LAUT	19,854	4,964	4,964	4,873	4,873						
	51	SADAI	35,280	8,820	8,820	8,659	8,659						
	52	TANJUNG BUNTUNG	34,928	8,732	8,732	8,572	8,572						
XI	SEI. BEDUK		86,220	21,555	21,555	21,160	21,160			0	0	21,160	21,160
	53	MUKA KUNING	7,596	1,899	1,899	1,864	1,864						
	54	DURIANGKANG	19,550	4,888	4,888	4,798	4,798						
	55	MANGSANG	39,577	9,894	9,894	9,713	9,713						
	56	TANJUNG PIAYU	19,497	4,874	4,874	4,785	4,785						

NO	NAMA		JUMLAH JIWA	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA MAINLAND			JUMLAH PELAYANAN RUMAH TANGGA HINTERLAND			TOTAL PELAYANAN RUMAH TANGGA (KOTA BATAM)	
	KECAMATAN/ KELURAHAN				JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH (PT. ATB)	SANITASI	JUMLAH RUMAH TANGGA	AIR BERSIH	SANITASI	AIR BERSIH	SANITASI
XII	GALANG		17,183	4,296				4,296	723	295	723	295
	57	SIJANTUNG	1,913	478				478				
	58	KARAS	2,761	690				690				
	59	GALANG BARU	3,040	760				760				
	60	SEMBULANG	2,980	745				745				
	61	REMPANG CATE	3,523	881				881				
	62	SUBANG MAS	787	197				197				
	63	PULAU ABANG	1,564	391				391				
	64	AIR RAJA	615	154				154				
	Jumlah Rumah Tangga		1,107,551	276,888	262,282	257,482	257,482	14,605	5,702	1,341	263,184	258,823
	Jumlah Jiwa Terlayani					1,029,929	1,029,929		22,808	6,705	1,052,737	1,036,634
	Persentase Terlayani					98.17%	98.17%		39.04%	9.18%	95.05%	93.48%

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tabel 2. 50 Sambungan Rumah Air Bersih Kota Batam Tahun 2019

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Ket
1	WTP Belakang Padang	1.158	9264	Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
2	SWRO Belakang Padang	768	3072	Kec. Belakang Padang	Air Laut
3	WTP Bulang Lintang	217	868	Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
4	WTP Pemping	200	800	Kec. Belakang Padang	
5	WTP Sembulang	80	320	Kel. Sembulang Kec. Bulang	Tampungan Air Baku (embung)
6	WTP Pulau Abang	279	1116	Kec. Galang	Tampungan Air Baku (embung)
7	WTP Pulau Mecan	293	1160	Kec. Belakang Padang	Tampungan Air Baku (embung)
8	WTP Pulau Air Raja	157	628	Kel. Air Raja	Tampungan Air Baku (embung)
9	WTP Pulau Terong	268	1072	Kel. Pulau Terong	Mata Air (Brouncapting)
10	WTP Pulau Setokok	109	436	Kel. Setokok	Tampungan Air Baku (embung)
11	WTP Pulau Kasu	218	872	Kel. Pulau Kasu	Tampungan Air Baku (embung)
12	IKK Pulau Lance	31	124	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
13	WTP Pulau Pecong	242	968	Kel. Pulau Pecong	Tampungan Air Baku (embung)
14	IKK Pulau Buluh	545	2180	Kel. Pulau Buluh	Sambungan dari PT. ATB)
15	WTP Subang Mas	69	276	Kel. Subang Mas	Tampungan Air Baku (embung)
16	IKK Pulau Tiangwangkan g	61	244	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
17	IKK Pulau Pulau Panjang	125	500	Kel. Setokok	Sambungan dari PT. ATB
18	IKK Pulau Akar	104	416	Kel. Setokok	Sambungan dari PT. ATB)
19	IKK Tanjung Gundap	111	444	Kel. Tembesi	Sambungan dari PT. ATB
20	WTP Geranting	195	780	Kel. Pulau Terong	Tampungan Air Baku (embung)

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	Lokasi	Ket
21	WTP Rempang Cate	138	552	Kel. Rempang Cate	Tampungan Air Baku (embung)
22	WTP Pulau Ngenang	105	420	Kel. Ngenang	Tampungan Air Baku (embung)
23	WTP Pulau Jaloh	232	928	Kel. Pantai Gelam	Tampungan Air Baku (embung)
J U M L A H		5.702	22.808		

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Untuk mengetahui kinerja cipta karya dapat dilihat pada Tabel 2.51 Indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan dan mencapai target tahunannya, meskipun peningkatan tahunannya tidak signifikan. Pada tahun 2016 tercatat 29 persen, kemudian dua tahun meningkat menjadi 39,04 di tahun 2019.

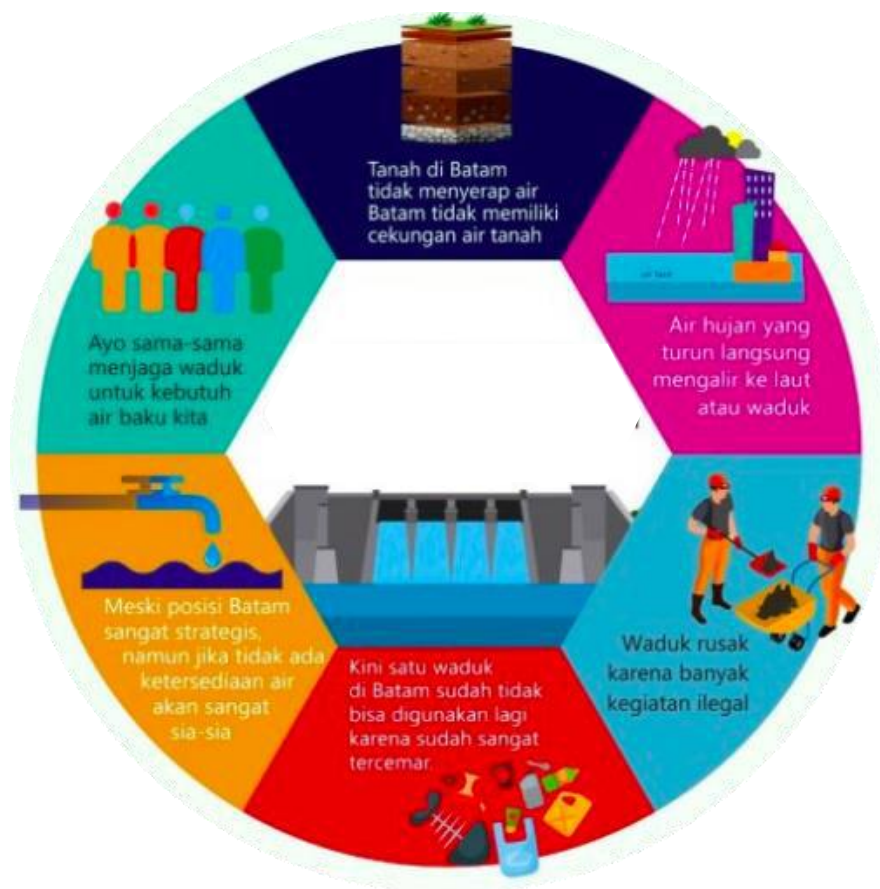
Sementara itu indikator penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai setiap tahun mencapai target dan selalu meningkat meskipun demikian capaiannya masih masuk kategori minim. Tahun 2016 hanya sebesar 2,40 persen dan meningkat menjadi 9,18 persen di tahun 2019. Peningkatan indikator ini sangat kecil karena seluruh anggaran hanya mengandalkan DAK, sehingga target menyesuaikan dengan anggaran. Namun demikian kondisi minimnya pelayanan sistim air limbah di level rumah tangga sangat berpotensi mengganggu kesehatan warga, sehingga kedepan perlu kerja keras untuk memberi solusi pencarian alternatif anggaran untuk sistim air limbah di wilayah *hinterland*.

Tabel 2. 51 Indikator Cipta Karya Tahun 2016-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Target	–	29	31,37	33,18	35,16
		Realisasi	–	29	31,37	35,78	39,04
ii	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Target	–	2,44	3,40	4,74	6,41
		Realisasi	–	2,40	3,40	7,60	9,18

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Permasalahan kekurangan air minum di Kota Batam telah menjadi ancaman bagi kelangsungan kegiatan perekonomian masyarakat, terutama sektor industri manufaktur, pariwisata perdagangan dan jasa. Kemarau yang panjang dan berkurangnya jumlah hari hujan menjadi penyebab penurunan intensitas hujan dan berimplikasi terhadap kelangkaan air di Kota Batam, sementara itu jenis permukaan tanah yang sulit menyerap air juga menjadi persoalan tidak adanya harapan untuk air tanah. Saat ini sebagian besar sumber air bersih berasal dari *Water Treatment Plant* (waduk, embung) penampung air hujan yang tentu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, jika memasuki kemarau praktis jumlah debit berkurang drastis dan muncul ancaman kelangkaan air bersih. Beberapa pelanggan terpaksa mengalami penggiliran air bersih. Selain itu terjadi pula pencemaran pada waduk akibat perilaku masyarakat yang tidak disiplin dalam membuang sampah, tentu hal ini menyebabkan pencemaran air di Kota Batam.



Gambar 2. 70 Infografis Kondisi Air Bersih Kota Batam

Sumber: batampos.co.id

Untuk mengatasi kekeringan di waduk, dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan bantuan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dengan penyemaian menggunakan pesawat Piper Cheyenne PK TMC dari dengan menyemai batang *flare* higroskopis. Namun langkah ini merupakan solusi jangka pendek, kendala utama adalah area terbang di sekitar wilayah target waduk utama (waduk Duriangkang) sebagian masuk wilayah penerbangan Singapura, secara *traffic* cukup padat jadwal penerbangan masuk dan keluar Singapura. Sehingga pesawat BPPT hanya diijinkan terbang di bawah ketinggian 6.000 ribu kaki.

Sementara itu selain menampung air hujan kedalam waduk, sumber air bersih di Kota Batam bersumber dari air laut, yakni dengan mengubah air laut menjadi air tawar dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO). Cara ini terbukti sangat efektif di beberapa negara maju menjadi alternatif sumber air bersih, namun biaya investasi yang tinggi mengakibatkan jumlah SWRO di Kota Batam sulit ditambah. Adapun sumber air bersih lainnya adalah mata air (*broncaptering*), namun demikian jumlah mata air sangat sedikit dan debit airnya terbatas.

Berdasarkan uraian pada paragraf sebelumnya, idealnya Kota Batam bersama-sama dengan BP Batam menyusun masterplan penyediaan dan pengelolaan air minum yang memuat secara rinci uraian permasalahan dan solusi terkait hal tersebut. Adapun alternatif solusi untuk penyediaan air bersih di Kota Batam, yang terbukti berhasil digunakan oleh negara-negara maju dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Daur Ulang Air Limbah (*Water Recycle*)

Daur ulang air limbah adalah memanfaatkan air bekas pakai baik air limbah rumah tangga maupun industri untuk kemudian air limbah tersebut didaur ulang menjadi steril dan higienis. Teknologi daur ulang menggunakan membran dan teknologi ultraviolet untuk mengubah air kotor menjadi bersih. Cara ini telah dipakai oleh Singapura sejak tahun 1970an dan kualitas air yang dihasilkan

telah diakui oleh WHO. Sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alternatif sumber air bersih di Kota Batam.

2. Desalinasi

Proses ini disebut desalinasi atau pemurnian air dari kadar garam. Cara ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk pelayanan air bersih di hinterland menggunakan SWRO Belakangpadang. Namun demikian biaya investasi cukup tinggi, maka perlu difikirkan untuk membuat skema *co benefit*, artinya dalam proses desalinasi air laut menjadi air tawar terdapat *reject water* yang dapat diproses menjadi garam, sehingga biaya penjualan air kepada masyarakat dapat ditekan karena ada produk garam yang bernilai ekonomi sebagai turunan dari proses desalinasi air laut. Dalam konteks ini garam yang dihasilkan dapat digunakan bagi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri, serta mendukung program peningkatan produksi garam nasional. Dalam perspektif kedepan, kedua alternatif ini perlu difikirkan, dikembangkan dan ditindaklanjuti, terutama skema kerjasama, investasi dan manajemen operasionalnya.

D. Tata Ruang

Kinerja tata ruang diukur melalui indikator-indikator yang terdapat pada Tabel 2.52. Indikator ketersediaan dokumen tata ruang sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan mencapai target tahunannya. Pada tahun 2017 tercatat 88 dokumen, kemudian meningkat menjadi 343 di tahun 2019. Dalam konteks ini dokumen tata ruang yang dimaksud adalah surat keterangan rencana kota (SKK) atau kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon untuk memanfaatkan ruang publik/privat di Kota Batam. Dalam hal ini rekomendasi atas SKK dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Idealnya pada periode kedepan perlu dirumuskan ukuran kinerja level *outcome* yang lebih *clear*, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari *output-output* kegiatan yang telah dilakukan.

Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Tata Ruang Tahun 2017-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
I	Ketersediaan dokumen Tata Ruang dan Kesesuaian dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang (dok)	Target	–	0	88	273	192
		Realisasi	–	0	88	273	343
II	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan tiap tahun (bangunan)	Target	–	665	240	250	305
		Realisasi	–	665	240	250	508
III	Penyelenggaraan Bangunan Gedung (unit)	Target	–	8	36	47	42
		Realisasi	–	8	36	46	52

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Untuk indikator jumlah bangunan gedung yang dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan sejak tahun 2016-2019 tiap tahunnya selalu mencapai target, bahkan di tahun 2019 jauh melampaui target, realisasi sebesar 508 sementara target 305. Namun demikian indikator ini kurang tepat/*misleading* dalam menggambarkan kinerja tata ruang, karena angka realisasi 508 adalah total bangunan dan menara yang diawasi, seharusnya angka yang ditampilkan adalah bangunan/menara yang sesuai dengan standar. Idealnya pada periode kedepan perlu dirumuskan ukuran kinerja *outcome* yang lebih *clear*, disertai dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga dapat benar-benar merepresentasikan kemanfaatan dari *output-output* kegiatan yang telah dilakukan. Dalam perspektif kedepan, melakukan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan gedung, laik fungsi, dan pengawasan terhadap menara perlu dilakukan dengan menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif dan efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan. Hal ini juga sebagai upaya kontribusi terhadap peningkatan penerimaan retribusi Kota Batam. Lebih lanjut uraian rekapitulasi data pengawasan bangunan dan menara disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Rekapitulasi Pengawasan Bangunan dan Menara Tahun 2019

No	Uraian	Jenis Bangunan/Menara	Jumlah	Ket
1	Pengawasan Bangunan Gedung	Rumah Tinggal, Ruko, Workshop/Gudang, sekolah	79	Tidak Memiliki IMB
2	Pengawasan Menara Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Monopole, Self Supporting Tower, Mini Tower, Micro Cell Pole	94	Tidak Memiliki Jangka waktu IMB Habis,
3	Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Seluruh Jenis Bangunan Gedung	335	
J U M L A H			508	

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kemudian untuk kinerja indikator penyelenggaraan bangunan gedung merupakan pembangunan bangunan gedung negara yang diajukan oleh dinas lain. Sehingga target dan realisasi bergantung pada permintaan pembangunan gedung. Selama periode 2016-2019 dapat kita ketahui bahwa 142 bangunan gedung negara telah diselesaikan.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menunjukkan realisasi yang positif. Berikut beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk perencanaan periode selanjutnya:

1. Bina Marga dan Sumber Daya Air:
 1. Kondisi jalan baik dan sedang mencapai 85,39% (target SPM 60%);
 2. Kebutuhan jalan yang dibangun/ditingkatkan 2016-2019 tercapai 119,61Km dari total kebutuhan 177Km, masih menyisakan 57,39Km;
 3. Panjang jembatan/pelantar yg dibangun 2016-2019 sepanjang 94m, melebihi target 60m;
 4. PJU yang dipelihara selama tahun 2016-2019 sepanjang 62.800m, sementara kebutuhannya adalah 114.300m, masih menyisakan 51.500m;
 5. PJU yang dibangun selama tahun 2016-2019 sebanyak 1.157 titik, sementara kebutuhan sebesar 1.527 titik, masih menyisakan 370 titik;
 6. PJU yang direhabilitasi selama 2016-2019 menyisakan 11.500m jaringan yang belum direhabilitasi;
 7. Alat berat periode 2016-2019 penambahan 15 unit, sementara kebutuhan 20 unit, menyisakan 5 unit yang belum terealisasi;
 8. Wilayah hinterland selama 2016-2019 total panjang jalan dibangun 10km, sementara terget 11km, masih menyisakan 1 km;
 9. Wilayah hinterland selama 2016-2019 panjang jembatan/pelantar yang dibangun sepanjang 1.040m, sementara kebutuhan sepanjang 1.500m, masih menyisakan 460m;
 10. Wilayah hinterland selama 2016-2019 dibangun PJU sebanyak 68 titik, dari kebutuhan 168 titik, masih menyisakan 100 titik (keterbatasan daya PLN);
 11. Kebutuhan pembangunan drainase 2016-2019 mencapai 22.000m, periode tersebut telah dibangun sepanjang 29.489m;
 12. Lokasi pantai abrasi yang ditangani kebutuhannya selama 2016-2019 sebesar 1.000, sementara realisasi hanya 523,2m;
 13. Untuk penanganan banjir secara permanen, perlu *masterplan* drainase yang berisi ketentuan dan intervensi terhadap jatuhnya air (akan dialirkan kemana air tersebut); perlu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan dengan BP Batam terkait upaya penanganan banjir secara permanen, karena penyebab banjir bukan hanya drainase, melainkan banyak hal lain yang menjadi kewenangan BP Batam (contoh *izin cut and fill* yang dapat mengakibatkan banjir);

KESIMPULAN

1. Cipta Karya

1. Pelayanan sistem air limbah rumah tangga (*hinterland*) sangat rendah (9,8%), hal ini dapat memicu penyakit diare akibat pola hidup tidak bersih (BABS), tahun 2017 rasio diare = 214 kasus diare per 1.000 orang;
2. Hingga tahun 2019 masih terdapat 257 rumah tangga yang belum terlayani air bersih di wilayah mainland;
3. Hingga tahun 2019 masih terdapat 8.903 rumah tangga yang belum terlayani air bersih di wilayah hinterland;
4. Masih terdapat 13.264 rumah tangga yang belum memiliki sanitasi;
5. Potensi sumber penyediaan air bersih berkelanjutan dapat dilakukan dengan Optimalisasi waduk/embung (dibantu teknologi modifikasi cuaca ketika kemarau); Memperbanyak SWRO dengan mulai memikirkan *co benefit approach* dimana proses desalinasi selain mengeluarkan air tawar, juga menghasilkan garam yang bernilai ekonomi; dan/atau Menyediakan air bersih melalui teknologi *recycle water* skala kota. Semua alternatif tsb perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kerjasama, pembiayaan dan investasi serta pengelolaannya;

6. Tata Ruang

1. Idealnya pada periode kedepan perlu dirumuskan ukuran kinerja level outcome yang lebih clear, disertai definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga tidak *misleading* dan benar-benar dapat merepresentasikan kemanfaatan dari *output-output* kegiatan yang telah dilakukan;
2. Pengawasan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang perlu menggunakan teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif, efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan, terlebih hal ini berkaitan dengan kontribusi terhadap peningkatan retribusi;

Selanjutnya, karena terkait infrastruktur yang perlu anggaran tinggi, maka dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan untuk mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *government to government* yang sangat mungkin dilakukan (Tahun 2014 Kota Bandung mendapatkan CSR pembangunan infrastruktur sebesar 1.7 Trilyun dari tiga negara eropa).

2.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hasil kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama tahun 2016 hingga tahun 2019 direpresentasikan oleh indikator kinerja pada Tabel 2.54. Selanjutnya pembahasan masing-masing indikator kinerja disampaikan pada paragraf selanjutnya dengan mengacu pada tabel bawah ini.

Tabel 2. 54 Realisasi Kinerja Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT						
	Data BDT (Jumlah Penerima RTLH)	39.901	39.129	37.996	37.393	36.402	
	Bantuan RTLH melalui DAK (jumlah rumah)		52	476	188	190	
	Bantuan RTLH melalui Satker SNVT Penyediaan Rumah/Kemen PUPR (jumlah rumah)		420	557	300	751	
	Bantuan RTLH melalui Dinsos/APBD (jumlah rumah)		300	100	115	50	
	Jumlah		772	1.133	603	991	
	Persentase penurunan RTLH		1,93	4,77	6,29	9,00	
ii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah Perkotaan	Target	–	62,27	71,49	77,16	82,83
		Realisasi	–	62,27	71,49	77,16	87,38
iii	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah hinterland	Target	–	62,025	68,35	74,68	81,01
		Realisasi	–	62,025	68,35	74,68	79,74
iv	Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara	Target	–	2,31	2,31	2,31	2,31
		Realisasi	–	2,31	2,31	2,31	2,46

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batam

A. Perumahan

Dalam mengurangi rumah tidak layak huni Kota Batam, data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial Kota Batam. Data tersebut mengalami peningkatan setiap

tahunnya sehingga perlu dilakukan identifikasi ulang untuk memastikan validitasnya, karena pada saat verifikasi dilapangan ditemukan ketidak kesesuaian data antara sasaran penerima bantuan RTH dengan kriteria penerima RTH. Selanjutnya untuk penyelesaian rumah tidak layak huni (RTLH) digunakan indikator persentase penurunan RTLH, berdasarkan Tabel 2.54 selama tahun 2016 hingga tahun 2019 telah terdapat 3.499 RTLH yang telah ditangani dari total 39.901 (baseline 2015).

Selama Tahun 2016-2019 pengurangan RTLH di Kota Batam dilakukan oleh dua instansi, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan (Perkimtan) serta Dinas Sosial (Dinsos), sedangkan pembiayaan bersumber dari APBN dan APBD. Sumber pembiayaan dari APBN menggunakan skema DAK yang dikelola Dinas Perkimtan dan skema yang dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR (SNVT), keduanya menasar untuk mengurangi jumlah RTLH. Kemudian untuk pembiayaan yang sumber dari APBD dikelola oleh Dinsos Kota Batam. Salah satu permasalahan dalam pengurangan RTLH adalah terbatasnya sumber pembiayaan sementara kebutuhan akan bantuan RTLH sangat tinggi, sehingga penerima bantuan RTLH harus benar-benar tepat sasaran.

Lebih lanjut dalam menangani persoalan perumahan, sejak tahun 2001 Kota Batam menyediakan hunian vertikal (rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2013 MBR di Kota Batam berjumlah 36.305 KK. Pemilihan lokasi rusunawa bagi MBR di kawasan padat dan kumuh perkotaan diarahkan pada lokasi-lokasi atau kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan sebagai kawasan atau lokasi industri, perniagaan dan jasa.

Tabel 2. 55 Jumlah Rusun di Kota Batam s/d Tahun 2019

No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	Perumnas	4 TB	21	384	TJ PIAYU	2001 s/d 2002
2	Perumnas	1 TB	21	96	TJ PIAYU	2007 s/d 2009
3	BPJS	6 TB	21	576	BT AMPAR	2001 s/d 2003
4	BPJS	1 TB	21	96	MK KUNING	2008 s/d 2009

No	Pengelola	Jumlah Blok	Tipe	Unit	Lokasi	Tahun Pembangunan
5	BPJS	10 TB	27	1.000	KABIL	2009 s/d 2011
6	BP	4 TB	21	384	BT AMPAR	2003 s/d 2004
7	BP	9 TB	21	864	MK KUNING	2004
8	BP	4 TB	21	384	SEKUPANG	2004 s/d 2006
9	BP	2 TB	27	160	KABIL	2009
10	BP	2 TB	27	170	KABIL	2010 s/d 2011
11	BP	1 TB	27	80	KABIL	2009
12	BP	2 TB	27	160	KABIL	2011
13	BP	2 TB	36	88	TJ UNCANG	2017 S/D 2018
13	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2003 s/d 2004
13	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2008 s/d 2009
14	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s/d 2010
15	PEMKO	2 TB	27	178	TJ UNCANG	2010 s/d 2011
16	PEMKO	1 TB	27	80	MK KUNING	2006 s/d 2007
17	PEMKO	4 TB	24	396	TJ UNCANG	2011 s/d 2012
18	PEMKO	2 TB	24	192	MK KUNING	2008 s/d 2009
19	PEMKO	4 TB	24	384	SEKUPANG	2007 s/d 2008
20	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s/d 2010
21	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2011 s/d 2012
22	PEMKO	2 TB	24	192	TEMBESI	2012 s/d 2013
23	PEMKO	3 TB	24	297	MK KUNING	2013 s/d 2014
24	REI	2 TB	21& 36	192	BTM CENTER	2008 s/d 2009
	JUMLAH	80 TB		7.365		

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Hingga saat ini kebutuhan pembangunan rusunawa di Kota Batam berdasarkan analisis data yang diperoleh yaitu jumlah tenaga kerja lokal (WNI) di Batam tahun 2019 sebesar 593.737 orang, dengan persentase pertumbuhan tenaga kerja lokal (WNI) tahun 2020 sebesar 1,06%. Perkiraan jumlah tenaga kerja lokal (WNI) yang masih belum memiliki tempat tinggal sendiri / termasuk penghuni rumah liar (Ruli) sebesar 69.300 orang, dengan probabilitas 40% tenaga kerja lokal (WNI) yang sudah berkeluarga sebesar 27.720 orang / kepala keluarga, atau jumlah tersebut dibutuhkan untuk 1 kepala keluarga untuk 1 satuan rumah susun (sarusun), dan 60 % tenaga kerja lokal (WNI) yang belum berkeluarga sebesar 41.580 orang / kepala keluarga dan atau jumlah tersebut dibutuhkan untuk 4 orang untuk 1 unit sarusun, sehingga jumlah yang dibutuhkan unit twin blok rusunawa yang dibutuhkan dengan tipe 36 sekitar 513 twin blok dan untuk keluarga dan dengan tipe 27 untuk yang belum berkeluarga sekitar 105 twin blok.

Tabel 2. 56 Data Hunian Kota Batam

Jumlah WNI 2017	Jumlah WNI 2019	Persentase Pertumbuhan	WNI belum punya tempat tinggal (Berkeluarga)	Berkeluarga /Twin Blok	WNI belum punya tempat tinggal (Belum Berkeluarga)	Belum Berkeluarga /Twin Blok
558,154	593,737	1,06%	27,720	513	41,580	105

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan hunian yang perlu diselesaikan dengan penyediaan rusunawa dari jumlah kebutuhan 618 twin blok dengan target hunian sebesar 35.010 unit sarusun, yang sudah terealisasi hanya 80 twin blok / 7.361 unit sarusun di kota batam, masih membutuhkan 538 twin blok yang belum terealisasi dengan persentase 78,97%, dan untuk kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR sebesar 87,05%.

Tabel 2. 57 Kebutuhan Hunian di Kota Batam

Hunian kebutuhan saat ini	Twin Blok	Target Hunian	Target Twin Blok	Twin Blok Yang dibutuhkan	Persentase Hunian belum terealisasi	kebutuhan yang harus disediakan untuk alternatif hunian MBR
7,361	80	35,010	618	538	78,97%	87,05%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Batam dalam Angka Tahun 2020)

Untuk memenuhi kebutuhan rusunawa yang ada di Kota Batam masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yakni:

1. *Kepemilikan Lahan.* Pemerintah kota batam tidak mempunyai wewenang terkait lahan yang ada di kota batam dikarenakan wewenang urusan lahan di kota batam dipegang kendali oleh BP Kawasan selaku pemegang lahan di kota batam.
2. *Titik Lokasi yang Representatif untuk Pembangunan Rusunawa.* Lahan yang berada di kota batam saat ini lebih banyak pengembangannya jauh dari pusat kota dan lokasi industri, sehingga daya minat masyarakat untuk menetap di rusunawa sangat minim.

3. *Keterbatasan Dana APBD Kota Batam*. Dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *government to government* yang sangat mungkin dilakukan.

B. Kawasan Kumuh

Berdasarkan Tabel 2.54 untuk indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan (*mainland*) dan wilayah *hinterland* selama kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan dan didominasi realisasi mencapai target setiap tahunnya. Untuk wilayah perkotaan pada tahun 2016 tercatat 62,27 persen, kemudian meningkat menjadi 87,38 persen di tahun 2019. Sementara untuk wilayah *hinterland* kondisinya sedikit tertinggal dibandingkan wilayah *mainland*, pada tahun 2016 tercatat 62,025 persen kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 79,74 persen.

Dalam perspektif pengurangan kawasan permukiman kumuh, kedua indikator di atas (Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan dan *hinterland*) secara langsung berkontribusi terhadap pengurangan kawasan permukiman kumuh di Kota Batam.

Upaya penanganan kawasan kumuh Kota Batam dilakukan melalui kegiatan yang ada pada Bidang Permukiman berfokus pada pemenuhan sarana prasarana dasar permukiman seperti Jalan Lingkungan, Drainase, Batu Miring baik *hinterland* maupun *mainland*. Selain itu dilakukan pula percepatan pembangunan infrastruktur permukiman kumuh dengan program PM-PIK yang dilakukan seluruh Kota Batam yang terdiri dari 62 Kelurahan yang termasuk didalamnya wilayah delineasi permukiman kumuh bersama Satuan Kerja Kota Tanpa Kumuh (Satker KOTAKU). Adapun anggaran yang menopang program dan kegiatan tersebut berasal dari APBN dan APBD Kota Batam.

Selain itu untuk memaksimalkan penanganan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam juga berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yakni Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Kawasan Permukiman di Kota Batam yang bersumber dari anggaran APBD Provinsi, khususnya yang termasuk kawasan delineasi permukiman kumuh.

Upaya penanganan kawasan kumuh sebenarnya berawal pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman yang menjadi salah satu prioritas Kota Batam sebagai mana tertuang pada RPJMD yang ada sehingga dampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut mempengaruhi berkurangnya total kawasan kumuh yang ada. Lebih lanjut, realisasi indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan (*mainland*) dan wilayah *hinterland* mampu berkontribusi dalam menangani masalah infrastruktur permukiman yang ada bahkan pengurangan luasan kawasan kumuh menjadi layak dan permukiman yang ada tumbuh menjadi lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan prasarana sarana utilitas yang memadai baik di wilayah *mainland* (perkotaan) maupun *hinterland* (pesisir).

Berdasarkan SK Walikota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 Tentang Penetapan Lokasi-Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 178 Ha atau 0,0016 persen dari total luas wilayah darat (1087,78 Km²), yang tersebar di 10 Kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 58 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam

No	Kawasan	Luas (Ha)	Kelurahan	Kecamatan	Tingkat Kumuh
1.	Tanjung Piayu	10,15	Tanjung Piayu	Sei Beduk	Sedang
2.	Mangsang	34	Mangsang	Sei Beduk	Sedang
3.	Nusa Jaya - Bukit Berbunga	5,37	Duriangkang	Sei Beduk	Sedang
4.	KSB Sei. Lekop	11	Sei. Lekop	Sagulung	Sedang
5.	KSB Sei. Pelunggut	56,47	Sei. Pelunggut	Sagulung	Sedang
6.	KSB Kabil	28	Kabil	Nongsa	Sedang
7.	Tiban Kampung	10	Tiba Lama	Sekupang	Sedang
8.	Bengkong Palapa	6,5	Tanjung Buntung	Bengkong	Sedang
9.	Bengkong Sadai	10	Sadai	Bengkong	Sedang
10.	Tanjung Sengkuang	6,5	Tanjung Sengkuang	Batu Ampar	Sedang
	Total	178			

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Pada tahun 2016 dilakukan reviu dan dilakukan pemutakhiran Data Kawasan Kumuh Kota Batam terhadap SK Walikota Batam Nomor: KPTS 68/HK/I/2015 oleh Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) melalui survei lapangan. Hasil pemutakhiran data tersebut dituangkan dalam bentuk SK Walikota Batam Nomor: KPTS.393/HK/XII/2017 Tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam sebagaimana tertuang pada rekapitulasi realisasi pengurangan kawasan kumuh berikut.

Tabel 2. 59 Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Batam hingga Tahun 2019

No	Lokasi	SK 2017	SK 2019	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh (Ha)		
				2017	2018	2019
1	Batam Kota	199,5	33,28	0	0	166,22
2	Batu Aji	138,50	113	0	0	25,50
3	Batu Ampar	146,20	97,51	3,35	2,75	45,94
4	Belakang Padang	312,79	312,79	0	0	00
5	Bengkong	233,41	98,24	7,06	9,59	125,58
6	Bulang	223,61	223,61	0	0	0
7	Galang	317,37	317,37	0	0	0
8	Lubuk Baja	77,41	32,2	0	0	45,21
9	Nongsa	263,34	186,3	14,37	13,72	10,44
10	Sagulung	228,85	90,7	40,47	19,56	77,81
11	Sei Beduk	60,51	29,18	24,84	24,03	8,56
12	Sekupang	125,62	93,21	2,28	8,23	39,20
	Jumlah	2.327,11	1.627,39	92,37	77,88	544,46

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Realisasi penanganan kawasan kumuh baru terlihat pada tahun 2017, setelah dilakukan pemutakhiran data kawasan kumuh, dari jumlah 2.327,11 Ha terealisasi 92,37 Ha. Pada tahun 2018 masih mengacu pada SK Walikota Tahun 2017 dengan hasil 77,88 Ha, sedangkan tahun 2019 realisasinya tercapai 544,46 Ha dari data kawasan kumuh Kota Batam Tahun 2017 sehingga capaian pengurangan kawasan kumuh hingga 2019 adalah 714,71 Ha dari tahun 2017.

C. Ruang Terbuka Hijau

Luasan wilayah RTH Publik yang tersedia di wilayah Kota Batam adalah 10.912,32 Ha didapat dari 20% dari Luas daratan 103.884 Ha dikurangi luas hutan 49.322,42 Ha. Luas RTH yang dipelihara adalah 251,54 Ha didapat dari 59,75 Ha Taman Kota

dan Taman Ruas Jalan ditambah 106,12 Ha Luas Taman ROW Jalan ditambah 85,66 Ha Kebun Raya sehingga persentase 10.912,32 Ha/251,54 Ha sebesar 2,31%.

Sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.61 capaian indikator Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara 2016-2019, bahwa target yang ditetapkan tersebut merupakan kondisi eksisting ruang terbuka hijau yang dipelihara oleh Bidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. Target 2.31% merupakan bagian dari 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batam yang dibagi menjadi 3 wilayah kewenangan yaitu wilayah pemeliharaan Pemerintah Kota Batam, wilayah pemeliharaan BP Kawasan dan wilayah pemeliharaan Satuan Kerja Jalan Nasional.

30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus tersedia di Kota Batam dicapai oleh Kota Batam dengan melibatkan seluruh instansi yang berkompeten untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut seperti BP Kawasan, Pemerintah Kota Batam dan pihak *private* baik swasta maupun instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap wilayah kerja masing-masing. Sedangkan untuk Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam sendiri, selama ini program dan kegiatan yang ada khususnya Bidang Pertamanan dan Pemakaman tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akuisisi lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selama ini yang dilakukan hanya kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting sesuai wilayah kerja. Untuk itu pemenuhan kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20% tidak dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang dikelola Pemerintah Kota Batam selama ini adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Taman Aktif Kota Batam

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M ²)	URAIAN
1	Dataran Engku Putri	900 M	56.541	Taman sering dipakai untuk kegiatan PEMKO BATAM dan hiburan rakyat dengan luas 5,6 Ha, dlfasilltasi dengan berbagai sarana seperti Lapangan Bola Basket, Zona Internet, Arena Gym,

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M ²)	URAIAN
				Joging, Arena SkatE Board, Roler Blade dan Berbagai Jenis Pohon Pelindung dan tanaman hias.
2	Taman Aspirasi Batam Centre	200 M	3.200	Taman aktif dengan berbagai tanaman dan fasilitas layar proyektor
3	Taman Seputaran DPRD, Bundaran dan Masjid Agung	1100 M	6.654	Taman rekreasi yang rekomendasi bagi pengunjung luar kota yang ramai di kunjungi pada sore hari dengan latar bukit clara (WELCOME TO BATAM), bangun taman
4	Taman Kolam Batam Centre	200 M	6.723	Taman Rekreasi dengan berbagai tanaman dan omamen hias dengan latar kolam yang menyejukan mata
5	Taman Park Way Batam Centre (Taman Mustika Alam)	1000 M	9.000	Taman dengan berbagai jenis tanaman bisa untuk rekreasi dan tempa olah raga jogging dan sepeda
6	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri)	900 M	32.900	Taman ramai dikunjungi pada pagi dan sore hari dengan berbagai permainan olahraga, permainan anak, pijat batu refleksi, arena jogging, dan berbagai jenis tanaman yang asri, bisa untuk rekreasi maupun olah raga
7	Taman Buluh Hangtuah	290 M	5.000	Taman yang bertema bambu, taman publik ramah anak, dilengkapi dengan sarana play ground, sarana jogging dan berbagai jenis tanaman
8	Kebun Raya Batam	3600 M	85.000	Taman yang menyimpan berbagai koleksi tanaman yang berada di perbukitan Nongsa yang hijau dengan pemandangannya yang asri.
10	Bufferzone Depan SMP3 - Taman jalan Kartini	200 M	13.151	Taman dengan pepohonan yang rindang dengan bangku taman.
11	Taman Kolam Sekupang	170 M	21.081	Taman kolam yang memanjakan mata dengan berbagai jenis ikan air tawar juga dapat berfungsi sebagai taman edukasi
12	Taman Wijaya Sekupang	700 M	10.577	Taman dengan fasilitas zona internet, arena gym, dan arena jogging dengan pepohonan yang rindang
13	Taman Seruni Kel Teluk Tering	110 M	175	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Joging Track, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.

NO	LOKASI	PANJANG PEDESTRIAN	LUAS (M ²)	URAIAN
14	Taman Cemara Asri	600 M	6.000	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Jogin Track, spot selfie bangku taman
15	Taman Perum Surya Kharisma Kibing	150 M	400	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Jogin Track, Gazebo, Kolam Pasir, Permainan Anak dan tanaman Hias.
16	Taman Buah Melayu	550 M	10.000	Taman Ramah Anak dengan fasilitas Joging Track,

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Tabel di atas merupakan bagian taman aktif di Kota Batam yang menjadi bagian dari lokasi pemeliharaan Pemerintah Kota Batam melalui Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari 16 Lokasi yang tersebar di Kota Batam. Sedangkan tabel di bawah ini merupakan persebaran lokasi pemeliharaan yang menjadi wilayah kerja Bidang Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam yang terdiri dari 92 Lokasi dengan luasan 704.387,91 m².

Tabel 2. 61 Ruang Terbuka Hijau Kota Batam

No	Lokasi	Ket.	Luas (M ²)
1	Median Simp. Bandara - Simp. Bundaran SMU 3	1 lokasi	3.917
2	Bundaran SMU 3	1 lokasi	63,90
3	Simp. Bandara - Simp. 3 Batu Besar (Jl. Hang Tuah)	1 lokasi	46.474
4	Bundaran SMU 3 - Median Jalan Blkg Per Permata	1 lokasi	4.787
5	Lengan Jalan Simp. Tiga Batu Besar	1 lokasi	980
6	Bufferzone Taman Kolam Depan Bandara	1 lokasi	17.532
7	Median Jalan Simp. KDA - Simp. RS Elizabeth	1 lokasi	5.000
8	Simp. RS. Elisabeth/Taman Bundaran RS Elisabeth - UNIBA - Simp. Taman Raya/Cikitsu (Jl. Raja Ali Kelana)	1 lokasi	3.711
9	Taman Buluh Hangtuah	1 lokasi	6.000
10	Simp. Fly Over - Simp. Rosedale (Jl. Raja Haji Fisabilillah)	1 lokasi	5.600
11	Bufertzone Depan Edukit - Bufertzone Oakley	1 lokasi	15.000
12	Pulau Jalan Simp Lampu Merah Rosdale	1 lokasi	1.928
13	Bahu Jalan Simp Rosdale - Simp Fly Over	1 lokasi	3.043
14	Simp. Rosedale - Kadin (Jl. Raja Haji Fisabilillah) - Taman Bundaran Madani	1 lokasi	6.000
15	Bahu Jalan Simp. Rosdale - Bundaran Buah Madani	1 lokasi	800
16	Bahu Jalan Bundaran Buah Madani - Lampu Merah Rosdale	1 lokasi	7.960

No	Lokasi	Ket.	Luas (M ²)
17	Taman Buah Melayu	1 lokasi	11.800
18	Simp. Kadin - Simp. Masjid Raya (Jl. Raja Haji Fisabilillah)	1 lokasi	588
19	Taman Bundaran Tropicana (kec Bengkong)	1 lokasi	1.962
20	Dataran Engku Putri	1 lokasi	60.600
21	Seputaran Pagar Dataran Engku Putri	1 lokasi	449,50
22	Bundaran Buah Madani	1 lokasi	2.814
23	Median Depan DPRD dan Bundaran DPRD	1 lokasi	771
24	Taman Aspirasi Batam Centre	1 lokasi	3.200
25	Taman Seputaran DPRD, dan Masjid Raya	1 lokasi	6.654
26	Simp. Mega Mall - Simp. BI - Simp. Kalista (Jl. Raja Isa)	1 lokasi	1.756
27	Median Simp. Calista - Sim KDA	1 lokasi	12.400
28	Simp. My Mart - Simp. Yos Sudarso - Greenland (Jl. M. Tahir)	1 lokasi	4.089
29	Taman Kolam Batam Centre	1 lokasi	6.723
30	Taman Lengan Jalan Diatas Terowongan (Jl. Yos Sudarso)	1 lokasi	2.088
31	Taman PKK Simpang Patung Kuda	1 lokasi	486
32	Median Simp. Terowongan Sei Panas - Simp. Kuda - Simp. Rosedale (Jl. Laksamana Bintan)	1 lokasi	8.898
33	Bufferzone Depan AIS - Depan Bank Riau		5.240
34	Simp. Rosedale - Simp. Angrek Sari - Simp. Frengky /Taman halte(Jl. Laksamana Bintan)	1 lokasi	2.927
35	Taman Park Way Batam Centre (Taman Mustika Alam)	1 lokasi	9.000
36	Taman Perum Seruni kell. Teluk Tereng	1 lokasi	175
37	Simp. Bengkong Seken - Bengkong Laut (Jl. Sumatera)	1 lokasi	5.638
38	Taman Ruas Jalan Bengkong Mahkota (depan taman tg. Buntung)	1 lokasi	2.042
39	Taman Tg. Buntung RT. 01/06	1 lokasi	557
40	Gerbang Bengkong Sadai - Simp Ocarina	1 lokasi	3.000
41	Simp. Batu Ampar - Simp. Melchem (Jl. Kerapu)	1 lokasi	8.317
42	Simp. Pasar Induk - Simp. Bundaran Nantongga (Jl. Duyung)	1 lokasi	1.700
43	Simp. Bundaran Nantongga - Simp MD - Simp. Hotel Alium	1 lokasi	2.991
44	Taman Segitiga Jl. Duyung	1 lokasi	454
45	Simp. Kak Dadut - Simp. Baloi Taman Kota (Jl. Gajah Mada)	1 lokasi	3.422
46	Simp. Pom Bensin Baloi Taman Kota - Simp baloi center (Jl. Baloi Taman Kota)	1 lokasi	4.640
47	Simp. Baloi Centre - Simp. Pasar Induk (Jl. Duyung)	1 lokasi	13.564
48	Simp. Baloi Centre - Simp. Apartemen Harmoni (Jl. Pembangunan)	1 lokasi	6.098

No	Lokasi	Ket.	Luas (M ²)
49	Simp. Dam Baloi - BCS - Simp. Baloi Centre (Jl. Bunga Raya)	1 lokasi	7.441
50	Simp. Lampu Merah Kp. Utama - Simp. Polsek Lubuk Baja (Jl. Raden Patah)	1 lokasi	1.556
51	Median dan Bahu Jalan Simp. MD - Simp Apartemen Harmony (Jl. Imam Bonjol)	1 lokasi	7.365
52	Median Depan Hotel Newton Jodoh	1 lokasi	420
53	Taman Ruas Jalan Simp. Seraya Atas - Terowongan (taman segitiga)	1 lokasi	2.088
54	Simp. Lippo Bank - Simp. Puri Garden - Simp. Sekolah Kartini (Jl. Teuku Umar)	1 lokasi	597
55	Bahu Jalan Simp Lippo - Simp Hotel Seruni	1 lokasi	3.675
56	Median Samping Hotel Alium - Kampung Bule - Median Simp City Walk	1 lokasi	1.080
57	Bahu Jalan Simp. Hotel Alium - Simp. Planet Holiday	1 lokasi	372
58	Taman Bahu Jalan dan Median Jalan Simp. The Hill Hotel - Simp Planet Holiday	1 lokasi	4.290
59	Taman Median dan Bahu Jalan Under Pass - Simp. Telkom -Simp. Pizza Hut	1 lokasi	4.200
60	Taman Segitiga Simp. Jam sisi awal brok (Jl. Gajah Mada)	1 lokasi	12.751
61	Taman Seputaran Fly Over	1 lokasi	2.017
62	Simp. Jam - Taman Segitiga Simp. Jam sisi puri casablanca/taman halte (Jl. Gajah Mada)	1 lokasi	7.747
63	Taman Simp Lampu Merah Indo Mobil	1 lokasi	2.800
64	- Taman Segitiga South Link	1 lokasi	306
65	-Taman U Turn Putaran South Link	1 lokasi	217
66	-Taman U Turn Putaran Tiban Centre	1 lokasi	441
67	-Taman JPO Tiban Kampung	1 lokasi	507
68	Taman Jalan Simp. Sei Harapan arah Batu Aji dan arah Marina	1 lokasi	2.167
69	Taman Halte Lengan Jalan Tiban Housing	1 lokasi	1.175
70	Taman Gajah Mada (Taman Tuan Putri) Bufferzone Tiban	1 lokasi	16.850
71	Taman Bundaran Rumah Sakit Otorita Batam (Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo)	1 lokasi	846
72	Taman U Turn putaran Pom Bensin Jln Martadinata , Taman JPO Sekupang	1 lokasi	310
73	Taman Jalan Palapa	1 lokasi	984
74	Bufferzone Depan SMP 3 - Taman jalan Kartini	1 lokasi	13.151
75	Taman Kolam Sekupang	1 lokasi	21.081
76	Taman Wijaya Sekupang	1 lokasi	13.000
77	Taman Rumah Dinas Walikota Batam Tanjung Pinggir	1 lokasi	650
78	Taman Rumah Dinas Sekdako Tanjung Pinggir	1 lokasi	450
79	Simp. Base Camp - Simp PT. Asiatic atau Hyundai (Jl. Brigjen Katamso)	1 lokasi	57.904

No	Lokasi	Ket.	Luas (M ²)
80	Taman Lengan Jalan Simp. Marina City (Jl. Kartini)	1 lokasi	224
81	Simp. Tobing - Simp. Taman Makam Pahlawan/taman area makam Pahlawan	1 lokasi	6.167
82	Nursery Bukit Mata Kucing	1 lokasi	15.000
83	Bukit Daeng - Simp. Basecamp (Jl. Letjen Suprpto), Taman Bawah JPO Batu Aji	1 lokasi	57.935
84	Taman Perum Griya Permata	1 lokasi	1.113
85	Simp. Barelang - Jembatan I Barelang (Jl. Trans Barelang)	1 lokasi	13.670
86	Simp. Panbil - Simp. Pintu 4 Kawasan Batamindo (Jl. S. Parman)	1 lokasi	31.879
87	Simp. Kabil - Simp. Panbil Muka Kuning (Jl. Ahmad Yani)	1 lokasi	27.647
88	Taman Sp. Kepri Mall	1 lokasi	15.730
89	Simp. Panbil - Simp. Rusun Muka Kuning (Jl. Letjen Suprpto)	1 lokasi	2.951
90	Simp. Rusun Muka Kuning - Bukit Daeng (Jl. Letjen Suprpto)	1 lokasi	13.390
91	Taman Depan Ruko Cemara Asri Batu Aji	1 lokasi	6.000
92	Taman Perum Griya Surya Kharisma Kibing	1 lokasi	400
Jumlah			704.387,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam

Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam konteks peningkatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, antara lain:

1. Lokasi pembibitan masih berstatus pinjam lahan dengan Instansi lain, sehingga perlu upaya pengajuan lokasi pembibitan *nursery* ke BP Batam, agar dapat menjadi aset Pemerintah Kota Batam;
2. Belum memiliki aturan/pedoman perencanaan seperti, RTRW Kota Batam, Master Plan perencanaan pembangunan RTH dan Ruang Terbuka Publik (RTP). Dengan demikian diperlukan inisiasi penyusunan kajian teknis draf Perda RTH dan Ruang Terbuka Publik (RTP) Kota Batam;
3. Lahan pemakaman setelah dihibahkan dari ahli waris kepada Lurah masih menunggu proses sertifikasi oleh BPPP Kota Batam. Saat ini untuk keperluan sertifikasi telah dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan telah diserahkan ke Badan Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan Kota Batam;
4. Belum adanya aturan pedoman pengelolaan pemakaman mengenai permintaan izin pemindahan kerangka keluar Batam dan permohonan

memakamkan jenazah orang asing di Batam. Sehingga perlu menyusun aturan terkait dalam bentuk Perda.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama tahun 2016-2019 menunjukkan realisasi yang positif. Capaian tahunan selama kurun waktu tersebut didominasi realisasi yang mencapai target. Namun demikian dalam perspektif pelayanan perumahan dan kawasan permukiman masih terdapat masalah berat yang perlu diselesaikan, antara lain:

1. Selama 2016-2019 rata-rata penurunan RTLH sebesar 5,4 persen, saat ini berdasarkan data BDT masih terdapat 36.402 kk yang perlu menerima bantuan RTLH;
2. Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria Kemen PUPR;
3. Kebutuhan hunian vertikal (rusunawa) di Kota Batam bagi pekerja dengan keluarga sebanyak 513 twin blok (TB) tipe 36, sementara bagi yang belum berkeluarga membutuhkan 105 TB tipe 27;
4. Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2019 adalah 1.627 Ha, sementara itu pengurangan luasan permukiman kumuh sejak tahun 2017 hingga di tahun 2019 sebesar 714,71 Ha, sehingga masih menyisakan 912,68 Ha kawasan permukiman kumuh;
5. Ruang terbuka hijau (RTH) hanya pada pengelolaan, sehingga penambahan RTH sulit diwujudkan.

Selanjutnya, karena urusan perumahan dan kawasan permukiman terkait dengan infrastruktur yang cenderung memerlukan anggaran tinggi, maka untuk percepatan penyelesaian permasalahan, dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR internasional dalam skema *government to government* yang sangat mungkin dilakukan (Tahun 2014 Kota Bandung mendapatkan CSR pembangunan infrastruktur sebesar 1.7 Trilyun dari tiga negara eropa).

2.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disampaikan pada Tabel 2.62 Untuk indikator pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 60,47 persen menjadi 75 persen

di tahun 2017, angka realisasi pada tahun tersebut memiliki capaian yang sama hingga tahun 2019. Dalam perspektif kedepan pencegahan konflik yang terselesaikan idealnya terus diupayakan untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya, meskipun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan jumlah personil.

Selanjutnya persentase masyarakat dalam pemilu tahun 2019 hanya mencapai 84 persen, kondisi ini bermakna terdapat 16 persen atau sebanyak 126.387 penduduk usia >17 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pemilu di Kota Batam, angka ini cukup besar. Setiap tahunnya, Badan Kesbangpol memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula berupa sosialisasi budaya politik untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, dengan banyaknya penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, perlu difikirkan pendekatan baru yang inovatif, kreatif dengan mengedepankan semangat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi sosial budaya pada periode selanjutnya.

Untuk indikator Persentase kesesuaian hasil Pertanggungjawaban Keuangan Parpol telah tercapai 100 persen sejak tahun 2016-2019. Laporan pertanggungjawaban keuangan parpol tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau dengan menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, keberhasilan ini disebabkan Kesbangol senantiasa setiap tahunnya memberikan pengetahuan kepada pengurus parpol berupa bimbingan teknis bagi pengurus parpol yang duduk di DPRD dengan demikian diharapkan laporan pertanggungjawaban semakin baik.

Tabel 2. 62 Realisasi Kinerja Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Pencegahan Konflik dalam Masyarakat yang terselesaikan	Target	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	60,47	75	75	75

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
ii	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Target	-	-	-	-	68
		Realisasi	-	-	-	-	84
iii	Persentase kesesuaian hasil Pertanggungjawaban Keuangan Parpol	Target	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kondisi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam Periode 2016-2019 secara umum telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini diketahui dari tercapainya target yang ditetapkan pada setiap tahunnya (Tabel 2.63). Namun demikian, seluruh indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki target yang secara ideal dapat menyelesaikan persoalan ketentraman dan ketertiban di Kota Batam, hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya baik jumlah petugas maupun anggaran yang dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih rinci, untuk indikator Tingkat Penyelesaian K3 selama empat tahun masih berada <50 persen, pada tahun 2019 hanya terealisasi 45 persen. disebabkan oleh banyaknya pelanggaran K3 di Kota Batam, sementara kualitas SDM masih kurang, dan belum tertibnya pengadministrasian/pelaporan kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga penanganan/penyelesaian pelanggaran K3 kurang maksimal.

Untuk realisasi indikator Persentase Penegakan Perda selama empat tahun masih berada di angka ≤ 50 persen, pada tahun 2019 tercatat hanya 50 persen upaya penegakan terhadap perda. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah PPNS yang ada di Satpol PP, yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga proses penanganan pelanggaran Perda kurang maksimal. Selain itu koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda masih kurang.

Sementara itu untuk indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat pada tahun 2019 hanya terealisasi 15. Angka tersebut perlu dikonfirmasi apakah definisi operasional yang digunakan sesuai dengan Permendagri No.69/2012, atau menggunakan definisi operasional yang berbeda. Idealnya angka cakupan linmas menggambarkan 1 orang untuk 1 RT. Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga. Sedikitnya jumlah Linmas di Kota Batam disebabkan oleh (1) masih rendahnya

kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberadaan satlinmas di lingkungan RT/RW masing-masing; (2) keanggotaan Linmas masih bersifat sukarela namun dalam pelaksanaan kegiatan harus didukung fasilitas, sarana dan prasarana serta akomodasi (biaya operasional); (3) kurangnya dukungan dari tingkat kelurahan tentang persekutuan anggota linmas sebagaimana yang diamanatkan Permendagri No 84 Tahun 2014, Lurah secara ex-officio sebagai Kepala Satuan Linmas; (4) Perlu adanya perhatian Pemerintah untuk diberikan insentif kepada anggota satlinmas setiap bulan.

Tabel 2. 63 Realisasi Kinerja Indikator Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Target	–	10,86	15,11	32	45
		Realisasi	–	10,86	15,11	32	45
ii	Persentase Penegakan Perda	Target	–	15	37	49	50
		Realisasi	–	15	37	49	50
iii	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	Target	–	13	14	15	15
		Realisasi	–	13	14	15	15

Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan pendidikan dan pelatihan dengan mengirim ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk mengikuti Diklat Polisi Pamong Praja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya menambah jumlah PPNS di Satpol PP Kota Batam baik itu melalui mutasi pegawai dengan kompetensi PPNS dari Dinas/Instansi lain maupun dengan mengirim ASN Satpol PP untuk mengikuti Diklat PPNS dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda.

KESIMPULAN

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencapai realisasi moderat, adapun yang perlu menjadi catatan adalah:

1. Pada tahun 2019 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 84 persen, artinya masih terdapat 126.387 penduduk usia >17 tahun yang tidak menggunakan hak pilihnya;
2. Ditengah keterbatasan sumber daya, dalam konteks periode kedepan tetap perlu diupayakan agar realisasi pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan dapat meningkat >90 persen;

Secara umum kinerja indikator Urusan Satuan Polisi Pamong Praja belum menggunakan target SPM dikarenakan keterbatasan anggaran.

1. Cakupan penegakan perda standar SPM adalah 100%, saat ini Kota Batam hanya memiliki realisasi 50%;
2. Tingkat Penyelesaian K3 standar SPM adalah 70% (tahun 2010), saat ini Kota Batam hanya memiliki realisasi 45%;
3. Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas;

Keterbatasan anggaran seyogyanya tidak menjadi hambatan utama dalam menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perlu dipikirkan upaya-upaya kreatif dan inovatif yang dapat mensiasati hambatan tersebut.

B. Pemadam Kebakaran

Total pos pemadam kebakaran di Kota Batam sebanyak 9 pos, namun demikian Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini hanya mengelola 3 pos (Sei Panas, Kabil dan Tembesi), selebihnya dikelola oleh BP Batam untuk cakupan 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan se Kota Batam. Jika melihat luas cakupan yang sangat besar, memang tiga unit pos pemadam masih sangat tidak mencukupi, namun hal ini dilengkapi oleh enam pos pemadam yang dikelola oleh BP Batam yang memiliki jangkauan yang sama. Saati ini Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai 4 (empat) Mobil Pompa (*Fire truck*) dan 3 (tiga) Suplai (*Fire Suplay*) Pemadam Kebakaran, untuk menanggulangi kebakaran di Kota Batam Dinas Pemadam Kebakaran berkoordinasi bersama Subdit PBK BP Batam dan Manggala Agni Kementrian Lingkungan Hidup.

Selanjutnya untuk indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran disampaikan pada Tabel 2.64 untuk tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di tahun 2019 tercatat 73,60 persen, jika dibandingkan dengan target SPM 75 persen, maka hal ini belum mencapai. Selanjutnya untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 94,11 persen, hal ini melampaui target SPM 80 persen. Untuk persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di tahun 2019 sebesar 39,35 persen, hal ini belum mencapai SPM sebesar 80 persen. Kemudian untuk ketersediaan mobil pemadam Tahun 2019 sebesar >3000-5000 liter di wilayah manajemen kebakaran, kondisi tersebut hanya mencapai 33,33 persen sementara target SPM sebesar 90 persen.

**Tabel 2. 64 Realisasi Kinerja Indikator Pemadam Kebakaran
Tahun 2015-2019**

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
i	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Rate</i>) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (target SPM 75%)	–	67,49	67,93	69,86	73,60
ii	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (target SPM 80%)	91,06	91,67	92,41	93,04	94,11
iii	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (target SPM 80%)	43,06	43,06	40,28	41,20	39,35
iv	mobil pemadam kebakaran di atas 3000-5000 liter Wilayah Manajemen Kebakaran (target SPM 90%)	25	25	25	25	33,33

Sumber: Kantor Pemadam Kebakaran Kota Batam

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Pemadam Kebakaran belum menggunakan target SPM dikarenakan keterbatasan anggaran. Saat ini kekuatan Dinas Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Pemko Batam masih jauh dari target SPM :

1. *Respon rate* manajemen kebakaran sebesar 73,60% (target SPM 75%);
2. Persentase pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi sebesar 39,35% (target SPM 80%);
3. Kapasitas mobil >3000-5000 liter wilayah manajemen kebakaran sebesar 33,33 % (target SPM 90%);

Namun demikian, target SPM dalam konteks ini dibuat dengan asumsi bahwa suatu daerah memiliki kekuatan Damkar tunggal. Sementara Kota Batam memiliki kekuatan Damkar Pemko dan Damkar BP Batam dengan cakupan kerja yang sama. Jika penghitungan SPM digabungkan antara kekuatan damkar BP dan damkar Pemko, kemungkinan dapat mencapai target SPM tersebut. Dengan demikian tidak tercapainya SPM dalam hal ini tidak menggambarkan rendahnya pelayanan pemadam kebakaran di Kota Batam. Untuk periode selanjutnya perlu diketahui kapasitas jangkauan pelayanan Damkar gabungan antara Pemko Batam dan BP Batam.

2.3.1.6 Urusan Sosial

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan Sosial. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Adapun data jumlah PMKS selama tahun 2015-2017 di Kota Batam cenderung mengalami penurunan, tercatat sebanyak 8.028 PMKS pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 4.959 di tahun 2017 dan pada tahun 2019 menurun menjadi 4.088 PMKS. Selama kurun waktu 2015-2017 PMKS di Kota Batam didominasi oleh korban bencana, paca,

gepeng, lansia/miskin, dan anak terlantar. Penjelasan lebih rinci disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2015-2019

Kriteria PMKS		Jumlah PMKS Per Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Wanita Tuna Susila	2.157	1.300	1.250	153	153
B	Waria	266	250	250	150	150
C	Paca	809	525	550	584	661
C.1	Paca yang diberi bantuan	0	58	39	161	8
D	Eks Paca Kronis	0	0	0	0	0
E	Pekerja Migran	0	0	0	0	0
E.1	Pekerja Migran yang diberi bantuan	139	0	0	0	0
F	Keluarga Veteran	0	19	19	19	19
G	Anak Terlantar	109	143	130	500	230
G.1	Anak Terlantar yang diberi bantuan	n.a	103	130	n.a	n.a
H	Orang Gila	50	60	60	73	62
I	Lansia/Miskin	600	400	400	540	350
J	Gepeng	150	415	1.200	333	660
K	Korban Bencana	315	1.700	800	1424	870
K.1	Korban Bencana yang diberi bantuan	1.800	1.700	733	1424	870
L	Koms Adat Terpencil	7	0	0	0	0
M	RTHS yang direnovasi	747	300	100	0	0
N	Eks Korban Napza	0	0	0	0	0
O	Eks Napi	0	0	0	0	0
P	Wanita Rawan Sosial	0	0	0	0	0
Total PMKS		8.028	5.112	4.959	5.461	4.088
Total PMKS Tertangani		3.017	3.761	2.662	n.a	n.a
Penanganan PMKS		37,58	73,57	53,68	n.a	n.a

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja urusan sosial periode 2015-2019 disampaikan pada Tabel 2.66. Secara umum seluruh indikator kinerja yang tercantum menunjukkan realisasi yang positif. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan selama tiga tahun terealisasi 75 persen, kemudian potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi menangani PMKS bertambah dari semula 25 persen di tahun 2016 menjadi 30 persen di tahun 2018. Untuk PMKS

yang dapat direhabilitasi pun mengalami kenaikan dari semula 60 persen di tahun 2016 menjadi 70 persen di tahun 2018, sementara PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan semula 45 persen di tahun 2016 menjadi 50 persen di tahun 2018, selanjutnya persentase lembaga organisasi yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan pun meningkat dari 70 persen di tahun 2017 menjadi 75 persen di tahun 2018.

Tabel 2. 66 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Sosial Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Target	–	–	–	–	35
		Realisasi	–	75 (36.108 KPM/1 .800 PMKS)	75	75	–
ii	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang berpartisipasi terhadap penanganan PMKS	Target	–	–	–	–	30
		Realisasi	–	25 (152)	25	30	–
iii	Persentase PMKS yang dapat direhabilitasi	Target	–	–	–	–	40
		Realisasi	–	60 (3.255 orang)	65	70	–
iv	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial	Target	–	–	–	–	50
		Realisasi	–	45 (2.500 org)	45	50	–
v	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan mandiri dalam pembangunan.	Target	–	–	–	–	80
		Realisasi	0	0	70 (642 Lgb, 4.762 org)	75	–

Sumber: Dinas Sosial Kota Batam

2.3.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

(pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial). Berdasarkan kewenangan tersebut, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kota Batam yang mencakup indikator-indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 67 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per tahun	Target	240	230	220	210	200
		Realisasi	280	250	205	233	209
ii	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Target	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		Realisasi	558.038	n.a	605.581	604.831	643.381
iii	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Target	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		Realisasi	67,46	n.a	67,65	65.25	66.35
iv	Pencari Kerja yang ditempatkan	Target	60	70	75	80	85
		Realisasi	47,66	53	50,49	59.22	76.70
v	Tingkat Pengangguran Terbuka	Target	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
		Realisasi	6,09	n.a	7,82	8.93	7.72
vi	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Target	80	81	83	84	89
		Realisasi	76,27	75,20	82,54	80	90,87
vii	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Target	35	20	15	60	40
		Realisasi	33,88	22.9	10,30	58,03	39,68
viii	Persentase tenaga kerja yang terserap	Target	60	70	75	80	85
		Realisasi	47,66	53,00	50,40	59,44	76,40
ix	Persentase besaran kasus yang	Target	82	84	86	88	90
		Realisasi	98	96.4	92.6	94.4	92.3

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan anjuran					

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk indikator angka sengketa pekerja per tahun selama periode 2015-2019, setiap tahunnya selalu mencapai >200 sengketa antara pekerja dan pengusaha. Untuk indikator angka partisipasi angkatan kerja selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sementara indikator tingkat partisipasi angkatan kerja pada periode yang sama mengalami penurunan. Angka partisipasi angkatan kerja tahun 2015 tercatat 558.038 orang, meningkat menjadi 643.381 di tahun 2019. Sementara untuk tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 tercatat 67,46 kemudian menurun menjadi 66,35 di tahun 2019. Dinamika angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh iklim investasi dan dinamika perekonomian di Kota Batam. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena tidak sesuai kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, banyaknya angkatan kerja yang datang dari luar Kota Batam mengakibatkan tingginya angka pencari kerja yang ada di Kota Batam, upaya-upaya peningkatan skill terhadap para pencari kerja juga tidak dapat secara instan mengurangi angka pencari kerja, karena peserta pelatihan tidak dapat langsung ditempatkan.

Lebih lanjut tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam selama tiga tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2019 pengangguran terbuka Kota Batam mencapai 7,72, angka ini jauh di atas rata-rata pengangguran terbuka nasional yang sebesar 5,28.

Untuk indikator persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi selama lima tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 tercatat 76,26 kemudian meningkat selama empat tahun menjadi 90,87 di tahun

2019, atau dengan kata lain terdapat 90,87 tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat keahlian.

Untuk indikator persentase tenaga kerja yang terserap selama periode 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun tidak pernah mencapai target tahunannya. Pada tahun 2015 tercatat 47,66 kemudian selama empat tahun menjadi 76,40 di tahun 2019. Hal ini terjadi karena pada umumnya perusahaan membuka lowongan dan merekrut tenaga kerja tanpa pemberitahuan kepada Dinas Tenaga Kerja. Perusahaan menggunakan jasa Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah – Antar Kerja Lokal (LPTKS AKAD-AKL) untuk mengisi lowongan pekerjaan. Namun demikian ini merupakan permasalahan klasik yang berlangsung sejak periode lalu, idealnya Dinas Tenaga Kerja perlu membuat kebijakan dan media pelaporan yang mengikat perusahaan untuk melaporkan data-data ketenagakerjaan, dalam perspektif periode RPJMD kedepan persoalan ini seharusnya sudah dapat diselesaikan.

Selanjutnya untuk indikator Persentase besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan anjuran di tahun 2019 mencapai 92,3 persen. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi mediasi Dinas Tenaga Kerja telah berjalan positif.

KESIMPULAN

Para pencari kerja merupakan asset sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan industri di Kota Batam, karena Kota Batam adalah kota industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja siap pakai dengan meningkatkan kompetensi skill, tidak hanya kesempatan memiliki skill tapi juga kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini tingkat pengangguran di Kota Batam tercatat 7,72 kondisi tersebut lebih tinggi diatas rata-rata nasional (5,28). Sementara itu Jumlah Tenaga Kerja Asing terus meningkat dari tahun sebelumnya, namun jumlah Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) menurun.

Sehingga dalam perspektif periode RPJMD selanjutnya perlu upaya :

1. Perlu diadakan koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral tentang masalah penempatan dan kompetensi yang sudah dilatih dengan melakukan kerjasama/MoU;
2. Dibutuhkan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dalam rangka menghimpun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) Perusahaan, dalam konteks ini perlu difikirkan upaya kreatif dan inovatif agar terlaksana movev yang efisien (dengan anggarn minim, namun tujuan movev dapat tercapai) ;
3. Menghimbau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk tetap memaksimalkan Antar Kerja Lokal (AKL);
4. Meningkatkan kompetensi SDM;
5. Perlu peran serta Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kontrak pekerjaan dengan Tenaga Kerja Asing;
6. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan berinvestasi , meningkatkan kewirausahaan, melatih tenaga kerja local agar dapat bersaing dengan tenaga asing;
7. Mengadakan tenaga fungsional pengantar kerja dan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi.

2.3.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak Kota Batam berupaya menggali potensi dan kapasitas Sumber daya perempuan sehingga mampu bersaing dan turut ambil bagian dalam pembangunan Kota Batam. Melalui berbagai pembinaan dan

pelatihan sepanjang tahun 2019 sebanyak 16.150 orang perempuan turut aktif dalam berbagai kegiatan. 250 orang perempuan dilatih dalam pemetaan dan strategi pemasaran hasil usaha ekonomi kreatif, 12.600 orang aktif dalam pembinaan akhlak mulia, 500 orang aktif dalam peringatan HKG PKK, 1800 orang aktif dalam pelatihan tata rias, 500 orang aktif dalam peringatan Hari Ibu dan 500 orang aktif dalam pembinaan pesantren. Diharapkan melalui partisipasi angkatan perempuan ini dapat meningkatkan akselerasi dan percepatan Indeks pembangunan dan pemberdayaan perempuan kota Batam yang pada akhirnya memperkecil kesenjangan/ketimpangan gender yang kerap menimpa kaum perempuan secara umumnya.

Disamping itu dilakukan juga upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program pengarusutamaan Gender yang melibatkan 80 perencana dan staf OPD se-Kota Batam. Perencana tersebut telah berkontribusi dalam penyusunan rencana teknis penganggaran program pembangunan kota Batam yang berbasis gender (Ketersediaan anggaran yang mengalokasikan kesetaraan gender/ *Gender Analysis Pathway/Gender Budgeting Statement GAB/GBS*). Hal tersebut diukur oleh indikator Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam yang selama tahun 2016-2019 realisasinya selalu mencapai target tahunan, pada tahun 2019 tercatat persentase ARG terhadap belanja langsung APBD sebesar 11,43 persen.

Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak yang telah disusun melalui pembangunan jaringan SIPUGA (Sistem Aplikasi Pengarusutamaan Gender dan Anak) yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender kota Batam. Ketersediaan data ini diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Batam dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat. Sejak tahun 2018-2019 Persentase pembaharuan data gender dan anak setiap tahun telah mencapai realisasi 100 persen.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, telah diupayakan berbagai hal baik berupa sosialisasi/penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di 12 kecamatan se-Kota Batam. Bukanlah hal yang biasa bagi kita saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap terjadi dan tidak jarang meninggalkan efek traumatis berkepanjangan dalam hidup kaum perempuan dan anak. Dipandang perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggiatkan Perda Nomor 2 Tahun 2016. Diharapkan perempuan semakin cerdas dalam membentengi diri dari berbagai tindakan kekerasan demikian halnya anak-anak mendapat perlindungan dan hak hidup sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, dari tahun 2012 s.d. tahun 2019 telah terbentuk 15 Kelurahan Layak Anak, 2 kecamatan Layak Anak (Kecamatan Sagulung dan Lubuk Baja), pembentukan Forum Anak Kecamatan kota Batam di 3 kecamatan (Batu Aji, Sekupang, Sagulung) dan aktif melaksanakan penyuluhan perlindungan anak di kota Batam yang pada tahun 2019 dilaksanakan di 4 kecamatan (Batu Aji, Sagulung, Sei Beduk, Lubuk Baja). Melalui wadah ini diupayakan juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ramah anak seperti tempat bermain, pojok baca, dan penyediaan klinik laktase di tempat-tempat umum (Mall, bandara, perkantoran, dll). Ketersediaan instrumen, fasilitas dan sarana diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tumbuh kembang anak di Kota Batam dalam upaya pencapaian Kota Batam sebagai Kota Layak Anak. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 indikator Skor Kota Layak Anak selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat 501, mengalami peningkatan menjadi 700 di tahun 2019. Capaian tahun 2019 tersebut masuk dalam kategori madya (601-700), sehingga Kota Batam dalam perspektif kedepan perlu menargetkan kategori nindya (701-800) untuk kemudian mencapai kategori utama (801-1000). Lebih lanjut penjabaran indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 68 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Persentase ARG terhadap belanja langsung APBD Kota Batam	Target	–	4.5	5.5	6.5	7.5
		Realisasi	–	4.5	6.37	9.93	11.43
ii	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	Target	–	5	5	5	5
		Realisasi	–	5	5	5.02	5.00
iii	Persentase pembaharuan data gender dan anak setiap tahun	Target	–	N.A	N.A	100	100
		Realisasi	–	N.A	N.A	100	100
iv	Skor Kota Layak Anak	Target	–	500	500	600	650
		Realisasi	–	501	536.05	630.02	700
v	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Target		90	100	100	100
		Realisasi		100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

KESIMPULAN

Untuk mencapai keberhasilan pelayanan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Batam sudah dilakukan hal-hal yang relevan dan memiliki capaian yang positif. Namun demikian, saat ini terdapat beberapa elemen-elemen pemberdayaan perempuan dan anak yang belum dapat diukur kinerjanya, sebagai contoh keterlibatan perempuan dalam dunia kerja di Kota Batam seharusnya menjadi ukuran di tingkat *impact*, karena berbagai upaya pelatihan, peningkatan skill, peningkatan ekonomi pada perempuan yang selama ini dilakukan, pada hakikatnya harus bermuara pada meningkatnya kontribusi perempuan pada aktifitas ekonomi, dalam hal ini dunia kerja.

Sehingga pada periode selanjutnya tingkat pengukuran keberhasilan perlu disempurnakan, artinya perlu menetapkan indikator-indikator yang benar benar dapat menggambarkan situasi dan kondisi elemen-elemen urusan pemberdayaan perempuan dan anak.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) saat ini menjadi target agenda pembangunan Nasional (RPJMN) dan agenda pembangunan Global (SDG's). Oleh karena itu tolak ukur untuk indikator kinerja urusan PPPA di Kota Batam dapat mengacu pada indikator nasional dan indikator global yang juga diacu di tingkat nasional.

Mengacu pada RPJMN 2020-2024 terdapat indikator yang dapat digunakan :

- (1) Indeks Perlindungan Anak (*impact/outcome*);
- (2) Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun (*outcome*);
- (3) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (*outcome*);
- (4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (*Impact*);
- (5) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%) (*outcome*);
- (6) Indeks Pembangunan Gender (*impact*);
- (7) Indeks Pemberdayaan Gender (*Impact*).

2.3.1.9 Urusan Ketahanan Pangan

Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi daerah sendiri, pasokan pangan dari luar daerah, memiliki cadangan pangan dan adanya bantuan pangan. Kota

Batam merupakan daerah yang kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari daerah lain. Hal ini mengingat kondisi tanah di Batam yang kurang sesuai untuk pertanian dan perkebunan. Bahkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah pun tidak ada lahan yang khusus diperuntukan untuk pertanian di Pulau Batam.

Adapun pola penyediaan ketersediaan pangan di Kota Batam dilakukan per 2 bulan. Hal ini disebabkan pemasokan barang dari luar daerah Kota Batam selama ini selalu lancar dan tidak ada kendala. Bahkan untuk beras telah diatur sedemikian rupa oleh Bulog agar jumlah ketersediaan di Kota Batam tidak kurang. Ketergantungan dengan swasta pada akhirnya disiasati dengan melakukan koordinasi penuh melalui Asosiasi Bahan Pokok Kota Batam agar jumlah persediaan di Kota Batam tidak kurang. Distribusi pangan di Kota Batam diperoleh melalui pasar rakyat dan modern (supermarket, mini market, dan ritel lainnya). Adapun jumlah pasar rakyat di Kota Batam pada tahun 2020 sebanyak 44 pasar yang terdiri dari Pasar Pemerintah 6 (enam) pasar dan Pasar Swasta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah.

Perkembangan indikator ketersediaan pangan selama tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami tren yang berfluktuatif, pada tahun 2017 tercatat 129,89 kg/jiwa/tahun, kemudian mengalami penurunan menjadi 97,135 kg/jiwa/tahun di tahun 2018, selanjutnya memasuki tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 108,45 kg/jiwa/tahun. Jika ditelaah lebih dalam, ketersediaan pangan tahun 2019 mengalami surplus, hal ini diketahui dari jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 1.329.773 jiwa, ketersediaan pangan sebesar 108,46 kg/jiwa/tahun atau setara 144.225 ton/tahun, sementara kebutuhan pangan sebesar 105,94 kg/jiwa/tahun atau setara 140,872 ton/tahun, sehingga terdapat surplus sebesar 3.354 ton.

Tabel 2. 69 Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Ketersediaan Pangan Utama Beras (kg/jiwa/tahun)	Target	-	-	-	132,49	137,84
		Realisasi	-	-	129,89	97,135	108,45

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
ii	Persentase Pangan Aman Konsumsi	Target	-	-	-	93,15	95
		Realisasi	-	-	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Lebih lanjut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam dalam konteks menjalankan fungsi ketahanan pangan memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan segar, atau dengan kata lain mendapat limpahan kewenangan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Selama tahun 2017 hingga tahun 2019 persentase pangan aman konsumsi dalam konteks pangan segar selalu mencapai 100 persen, dengan kata lain seluruh pangan segar di Kota Batam telah dijamin aman konsumsi.

KESIMPULAN

Secara umum kondisi ketersediaan pangan di Kota Batam selama periode 2016-2019 telah mencukupi. Untuk komoditas beras pada tahun 2019 bahkan mengalami surplus 3.354 ton. Kemudian, hingga April tahun 2020 kebutuhan beras per bulan sebanyak 9.703 ton, sementara ketersediaan beras sebanyak 16.261 ton, sehingga surplus 6.558 ton.

Mengacu pada data dan informasi kinerja yang telah disampaikan, untuk periode pembangunan jangka menengah selanjutnya, strategi yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kinerja ketahanan pangan (ketersediaan stok) dengan tetap berorientasi pada manajemen risiko ketahanan pangan.

2.3.1.10 Urusan Pertanahan

Penjabaran kinerja urusan pertanahan termuat dalam Tabel...Indikator rekomendasi izin lokasi dikeluarkan 5 izin di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 dikeluarkan 10 izin, untuk tahun 2019 belum ada permohonan izin karena adanya perubahan sistem melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, termasuk di dalamnya pemberian Izin Lokasi, serta adanya perubahan peraturan perundangan sebagai dasar pemberian izin lokasi, dan terakhir terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019.

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai regulasi dan petunjuk teknis penerbitan izin lokasi oleh pemerintah Kota Batam melalui sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan akan mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Lebih lanjut indikator pengaduan dan mediasi yang dilakukan selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, di tahun 2017 sebanyak 8 laporan, meningkat menjadi 14 laporan di tahun 2018, sementara di tahun 2019 terdapat 28 laporan. Namun demikian peningkatan pengaduan bersifat dinamis, tidak dapat diprediksi, hal terpenting adalah setiap laporan pengaduan dilakukan mediasi penyelesaian antara yang bersengketa.

Kemudian status tanah aset Pemko Batam yang masih belum memiliki dokumen lahan sebanyak 520 persil, sementara tanah aset yang sudah bersertifikat sebanyak 208 persil. Sehingga kedepan perlu upaya lebih optimal agar penataan administrasi tanah aset Pemko Batam dapat dilakukan pada seluruh aset. Adapun indikator pengurusan sertifikasi lahan masyarakat dengan lokasi hinterland selama periode 2016-2019 tercatat 200 dokumen. Lebih lanjut, saat ini terdapat 37 tanah kampung tua (mainland) yang akan diselesaikan legalitasnya, tahun 2019 sudah diselesaikan penataan dan sertifikasi di 3 lokasi kampung tua, kemudian tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua sudah diselesaikan penataan di 3 lokasi kampung tua, sehingga pada periode 5 tahun kedepan sejumlah 31 tanah kampung tua dapat diselesaikan legalitasnya.

Tabel 2. 70 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
i	Rekomendasi izin lokasi	-	-	5	10	-
ii	Laporan Pengaduan dan mediasi yang dilakukan	-	-	8	14	28
iii	Jumlah tanah aset Pemko Batam (persil)					

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
	Tanah aset bersertifikat	-	196	199	203	208
	Tanah aset memiliki dokumen PL	-	-	-	-	240
	Tanah aset hibah dari masyarakat	-	-	-	-	42
	Tanah aset belum memiliki dok lahan	-	-	-	-	238
iv	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam (persil)	-	-	-	26,00	46,00
v	Pengurusan sertifikasi lahan masyarakat (dokumen)	-	-	100	100	-
vi	Penataan lahan Kampung Tua	-	-	-	-	3

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Batam

<p>KESIMPULAN Secara umum kinerja indikator Urusan Pertanahan selama tahun 2016-2019 menunjukkan realisasi yang positif. Namun demikian masih terdapat masalah yang perlu diselesaikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Pemko yang belum memiliki dokumen lahan sebanyak 520 persil; 2. 31 lahan kampung tua belum diselesaikan; 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.3.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.71 untuk indikator indeks kualitas air di Kota Batam mengalami peningkatan tidak signifikan selama periode 2016-2018. Pada tahun 2016 tercatat 50,09 kemudian meningkat menjadi 51,30 di tahun 2018. Kondisi tersebut masuk dalam kategori cukup baik (50-59). Sementara untuk indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 94,34 menjadi 93,68 di tahun 2018, kemudian kembali menurun menjadi 88,53 di tahun 2019, namun demikian angka ini masih masuk dalam kategori baik (82-91). Selanjutnya untuk indeks tutupan lahan selama tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, di tahun 2016 tercatat 65,65 mengalami peningkatan menjadi 65,93 di tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 67,53 di tahun 2019, angka ini masuk dalam kategori baik (60-69).

Lebih lanjut kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di Kota Batam berdasarkan publikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kegiatan Industri pabrikasi, engineering, konstruksi, instalasi anjungan migas lepas pantai, makanan dan minuman, pelapisan logam, kimia dasar, gas equipment, perkebunan, permukiman, pertambangan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbulan sampah.

Untuk indikator persentase aduan masyarakat terkait lingkungan hidup yang ditindaklanjuti sejak tahun 2016 hingga 2019 sudah lebih dari 90 persen, pada tahun 2019 sebanyak 98 persen aduan telah ditindaklanjuti. Kemudian indikator Pembinaan/pengawasan terkait pelaksanaan pelaporan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemko Batam selama tahun 2016 hingga tahun 2019 realisasinya masih dibawah 50%, dalam koteks Batam sebagai wilayah industri, indikator ini bersifat strategis karena merupakan langkah pengawasan terutama terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam menaati pengelolaan limbah. Ideanya realisasi indikator ini sebesar 100 persen.

Tabel 2. 71 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Indeks Kualitas Air	Target		50,09	51,10	51,30	51,50
		Realisasi		50,09	51,10	51,30	-
ii	Indeks Kualitas Udara	Target		70,8	94,34	93,68	73
		Realisasi		70,8	94,34	93,68	88,53
iii	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Target		65,65	65,93	67,53	69,13
		Realisasi		65,65	65,93	67,53	-
iv	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terkait bidang lingkungan hidup	Target		90	90	90	90
		Realisasi		90	95,08	97,69	98,00
v	Pembinaan/pengawasan terkait pelaksanaan pelaporan izin	Target		26	27	28	29
		Realisasi		26	27	32,01	25

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
	lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemko Batam						
vi	Persentase sampah yang berkurang melalui 3 R	Target		2	3	4	5
		Realisasi		2	3	4	5
vii	Pengoperasian TPA	Target		70	70	75	80
		Realisasi		60	60	60	80
viii	Persentase sampah yang tertangani	Target		63,29	80	85	75
		Realisasi		63,29	84,91	81,15	67,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Untuk persampahan, realisasi indikator persentase sampah yang dikelola secara 3R (*reduce, reuse, recycle*) masih tergolong sangat kecil yakni hanya 5 persen di tahun 2019. Produksi sampah di Kota Batam tahun 2019 rata-rata 1.000 ton per hari, artinya hanya 50 ton yang dikelola secara 3R. Sementara itu untuk indikator pengoperasian TPA pada tahun 2019 memiliki realisasi 80 persen, artinya kapasitas TPA belum seluruhnya dapat dioptimalkan untuk mengelola sampah. Lebih lanjut indikator persentase sampah yang tertangani mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2018 sebesar 81,15 persen kemudian menurun menjadi 67,30 persen di tahun 2019.

Berdasarkan publikasi Strategi Sanitasi Kota (SSK) Batam Tahun 2018-2022, kondisi sampah yang terangkut ke TPA (langsung dan tidak langsung adalah sebesar 57,36% atau 1.523,20 m³/hari; Sampah dikelola Mandiri oleh masyarakat adalah sebesar 0,033% atau 0,95 m³/hari; Sampah Terproses 3R (TPS3R/TPST/Bank Sampah sebesar 0,52% atau 1,45 m³/hari; dan Sampah yang tidak terproses sebesar 42,56% atau 1.130,04 m³/hari. Adapun total timbulan sampah yang ada di Kota Batam adalah sebesar 2.655,63 m³/hari.

KESIMPULAN

Persoalan pada persampahan adalah :

1. Masih ada sampah yang dibakar yaitu sebesar 13,8% dan Sampah yang masih dibuang ke laut/sungai/danau/kali sebesar 13,5%
2. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk
3. 42.56% Sampah yang tidak terproses.
4. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan.
5. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah
6. Pemilahan TPST 3R yang ada tidak berjalan dan jumlahnya masih kurang sebanyak 2 unit untuk wilayah kota Batam
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai
8. Meningkatkan sosialisasi dan kampanye terkait pengelolaan persampahan pada tahun 2018
9. Masih kurangnya anggaran dalam pengelolaan persampahan selama 5 tahun terakhir
10. Potensi masyarakat yang belum dikembangkan secara sistematis dalam pemilahan sampah
11. 13,5% perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke laut/sungai
12. Penerapan sanksi hukum dari perda persampahan belum efektif
13. Masih rendahnya investasi dari dunia usaha atau swasta

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum perkembangan realisasi kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Batam tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan hasil yang positif. Cakupan penerbitan KTP selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target tahunan, pada tahun 2017 ditargetkan 98 persen, namun terealisasi 96,29 persen, sementara pada tahun 2019 realisasinya meningkat menjadi 96 persen, namun target sebesar 100 persen tetap belum tercapai. Kondisi demikian dikarenakan adanya keterbatasan blanko KTP yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga tidak semua penduduk yang mengurus KTP dapat mencetak KTP-nya.

Tabel 2. 72 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
1	Cakupan Penerbitan KTP	Target	-	-	98	98	100
		Realisasi	-	-	96,29	93	96
2	Persentase penduduk yang memiliki KK	Target	-	-	98	98	100
		Realisasi	-	-	91,75	97,2	97,5
3	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Target	-	-	80	80	83
		Realisasi	-	-	80	82	85
4	Persentase Pemanfaatan database kependudukan oleh <i>stakeholder</i>	Target	-	-	-	-	-
		Realisasi	-	-	83	88	89

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Untuk indikator persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga, realisasi selama tiga tahun terakhir meningkat, namun target tahunan tidak tercapai. Pada tahun 2017 ditargetkan 98 persen hanya terealisasi 91,75%, dua tahun kemudian ditargetkan 100 persen namun hanya terealisasi 97,5 persen. Kondisi demikian dipengaruhi karena adanya anggota keluarga yang sudah menikah belum melakukan pengurusan pisah KK dari keluarga asal, biasanya terjadi pada penduduk yang bekerja di sektor informal.

Sementara itu untuk indikator penerbitan akta kelahiran realisasi selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dan mencapai target tahunan. Pada tahun 2017 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 80 persen, kemudian meningkat menjadi 85 persen di tahun 2019. Kondisi belum mencapai 100 persen karena adanya perpindahan penduduk, sehingga anak yang lahir di Kota Batam kemudian pindah tidak diurus akte kelahirannya di Kota Batam. Selanjutnya untuk indikator persentase pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder mengalami kenaikan setiap tahunnya, di tahun 2017 tercatat 83 persen kemudian selama dua tahun meningkat menjadi 89 persen di tahun 2019. Indikator ini menggambarkan kemanfaatan database kependudukan oleh instansi yang mensyaratkan data dan

informasi kependudukan bagi mitra nya, sebagai contoh perbankan, KPU, Kepolisian, Pajak, KPK, dst.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2016-2019 menunjukkan realisasi yang positif. Permasalahan terkait administrasi kependudukan antara lain adalah blanko KTP yang terbatas, namun kendala ini tidak dapat diintervensi karena merupakan kewenangan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Selain itu dalam perspektif kedepan masih perlu melakukan persuasif dan stimulus ke masyarakat agar berinisiatif dalam tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2.3.1.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan Persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/ CPR*). CPR mempunyai definisi Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai alat kontrasepsi pada saat pencacahan. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Kota Batam Tahun 2019 sebanyak 233.626 pasang. Untuk peserta KB aktif Kota Batam. pada tahun 2019 sebanyak 187.504 peserta. Rumus dari CPR adalah Peserta KB Aktif (PA) dibagi Pasangan Usia Subur (PUS) x 100. Pada tahun 2019 capaian dari indikator ini sebesar 80.23 % dan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 73 %. Memang terlihat ada penurunan dibanding pencapaian tahun 2018 sebesar 84.3 %. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pasangan yang memasuki fase menopause dan mengalami kehamilan.

Pencapaian CPR (*contraceptive prevalence rate*) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12 kecamatan se-Kota Batam. Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam Pencapaian CPR (*contraceptive prevalence rate*) ini dilakukan melalui penyuluhan dan layanan program keluarga berencana di 12

kecamatan se-Kota Batam. Dengan menggiatkan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK) masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan program KB dalam keluarga, remaja sedini mungkin diberikan pemahaman yang matang dalam perencanaan perkawinan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang sangat penting dalam melahirkan tunas generasi yang unggul.

Penggerakan Kampung KB merupakan pemetaan penduduk dengan tingkat kelahiran yang tinggi yang perlu dijadikan prioritas program layanan KB yang didukung oleh kader Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 76 orang), Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD /sub PPKBD 128 orang) sebagai ujung tombak penggerak program KB di kecamatan dan kelurahan.

Dalam hal meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaksanakan program KB ini, maka ketercapaian *Contraceptive Prevalence rate* di kota Batam sebesar 80,26% dapat membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk tahun 2019. Dengan kata lain capaian indikator ini terintegrasi dari keberhasilan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan peran serta PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD Kota Batam.

**Tabel 2. 73 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Tahun 2015-2019**

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	Target	–	71.5	72,00	72,50	73,00
		Realisasi	–	71.50	83.29	84.30	80.26
ii	Cakupan kelompok bina ketahanan keluarga	Target	–	236	242	249	256
		Realisasi	–	236	242	249	285
iii	Cakupan tenaga lini lapangan yang didayagunakan perangkat daerah KB	Target	76	76	140	204	268
		Realisasi	76	76	140	204	268
iv	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	Target	–	0	0	70	0
		Realisasi	–	0	0	70	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam

KESIMPULAN

Secara umum kinerja indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menunjukkan realisasi positif. Namun demikian, sejalan dengan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) masuk sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maka Dinas PPPAPKB Kota Batam perlu meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern, meminimalkan peserta KB yang putus pakai, menurunkan *unmet need*, yang semuanya bermuara pada penurunan *total fertility rate*.

2.3.1.14 Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Sejak tahun 2004 Kota Batam telah memiliki sistem transportasi perkotaan Trans Batam, secara gradual system transportasi tersebut mengalami peningkatan jumlah koridor setiap tahunnya. Adapun perkembangan jumlah koridor yang dilayani disampaikan di bawah ini:

1. Tahun 2004-2014 terdapat 2 Koridor, dengan jumlah Armada awal 7 unit dan meningkat menjadi 42 unit;
2. Tahun 2015 terdapat 3 koridor, dengan jumlah Armada menjadi 57 unit;
3. Tahun 2016 terdapat 6 Koridor, dengan jumlah Armada 72 unit;
4. Tahun 2017-2020 terdapat 8 Koridor, dg jumlah Armada 72 unit;
5. Pada tahun 2019 ditargetkan jumlah Koridor yang harus terpenuhi sebanyak 11 Koridor dengan kebutuhan armada sebanyak 130 unit. Namun karena keterbatasan armada dan biaya operasional maka 11 Koridor belum dapat terpenuhi.

Peningkatan jumlah koridor dan armada diikuti dengan peningkatan jumlah penumpang Trans Batam. Perkembangan peningkatan jumlah penumpang disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74 Jumlah Penumpang Trans Batam Tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Penumpang
2012	515,898

Tahun	Jumlah Penumpang
2013	544.400
2014	541.140
2015	734.956
2016	1.018.635
2017	2.019.603
2018	2.388.718
2019	2.647.305

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Dalam membantu Kota Batam mengurai kemacetan, dalam perspektif pembangunan jangka menengah periode 2021-2024, Dinas Perhubungan Kota Batam akan mengoperasikan dan menyediakan pelayanan angkutan orang trayek pengumpan (*Feeder*) perintis bagi pelayanan angkutan penumpang Bus Trans Batam yang dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam. Lebih lanjut, upaya tersebut turut menunjang pelayanan transportasi massal yang terintegrasi mulai dari pelayanan transportasi laut, bus Trans Batam dan Trayek Pengumpan (*Feeder*). Adapun Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (*Feeder*) perintis yang telah disusun oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan disampaikan pada tabel di bawah ini.

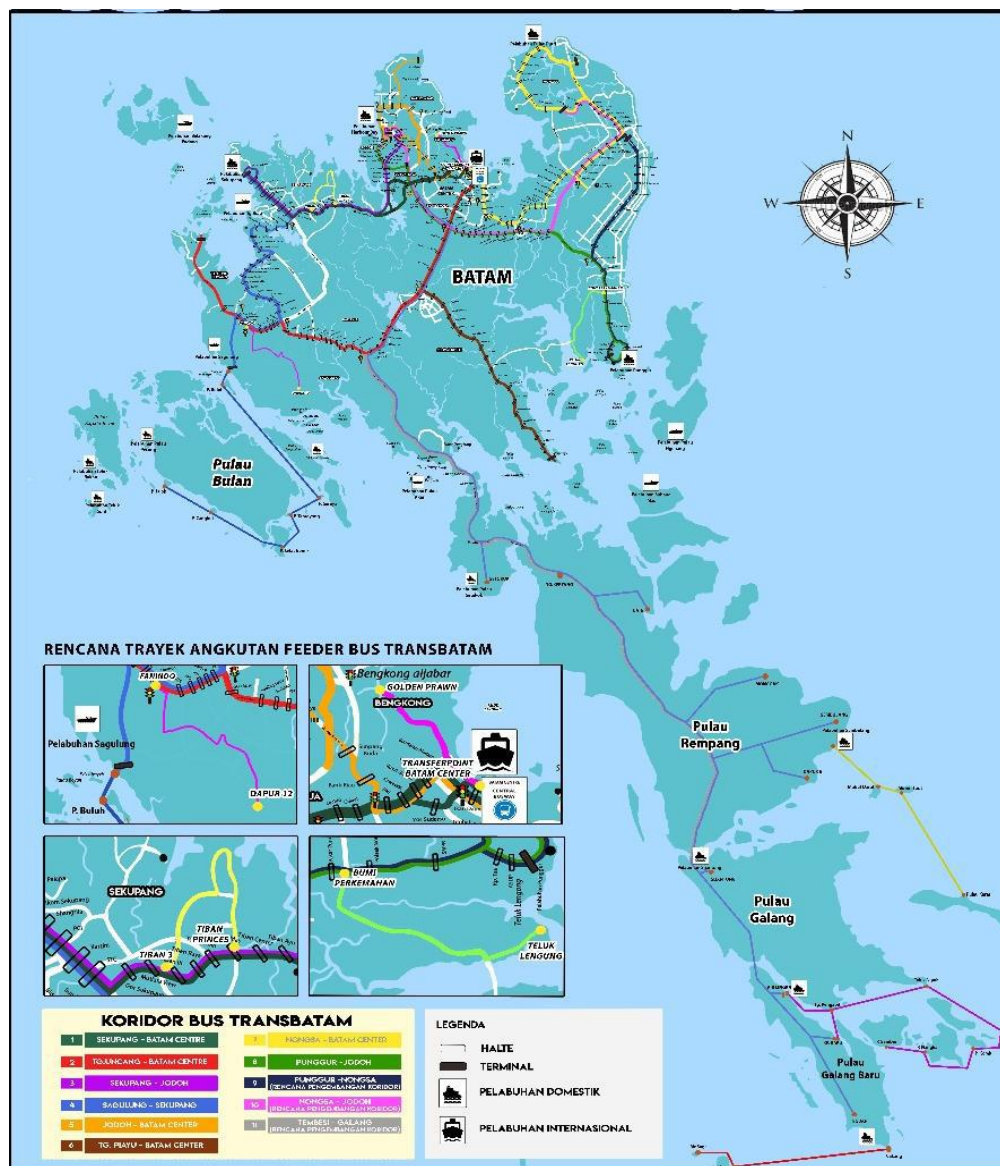
Tabel 2. 75 Rencana Rute Angkutan Orang Trayek Pengumpan (Feeder)

No	Jurusan Trayek	Kode Trayek	Rute	Kuota
1.	Halte Trans Batam Fanindo – Kp Tua Dapur 12 Sagulung (PP)	TF.01	Halte Trans Batam Fanindo – Simpang Tiga Klinik Elizabeth - Pasar Seroja – Simpang Kantor Lurah Sei Pelunggut – Kavling Melati – Kampung Tua Dapur 12 Sagulung (PP)	20
2.	Halte Trans Batam SP Plaza – Halte Trans batam Pasar Melayu (PP)	TF.02	Halte Trans Batam SP Plaza – Kantor Camat Sagulung – kantor Polsek sagulung – Kantor Lurah Sei Langkai – Simpang Nato – Kantor Lurah Sei Lekop – Kavling Lama – Simpang Kantor Lurah Sagulung Kota – Halte Trans batam Pasar Melayu (PP)	20
3.	Halte Trans Batam Tiban Kampung – Tiban Housing (PP)	TF.03	Halte Trans Batam Tiban Kampung – Tiban BTN – Sekolah Ulil Albab – Simpang Gereja Tiban 3 – GOR Badminton Tiban – POM Bensin Tiban 3 – Tiban Koperasi – Tiban Housing (PP)	20

No	Jurusan Trayek	Kode Trayek	Rute	Kuota
4.	Halte Trans Batam Engku Puteri – Halte Trans Batam Jalan Yos Sudarso (PP)	TF.04	Halte Trans Batam Engku Puteri – Hotel Harmoni One – Tabitha Furniture (BCM) – Bundaran Tropicana – Bengkong Sadai – Kantor Camat Bengkong – Bengkong Laut – Bengkong Garama – Halte Trans Batam Jalan Yos Sudarso (PP)	20

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Selanjutnya peta rencana pengembangan sistem transportasi Kota Batam, koridor bus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 71 Peta Koridor Bus Trans Batam, Rute Bus Sekolah Batam, Trayek Angkutan Laut Perintis dan Rencana Trayek Angkutan Feeder Bus Trans Batam

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Sementara itu, gambaran transportasi tahun 2019 di Kota Batam berdasarkan data dari ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.76, terlihat bahwa jenis kendaraan taksi paling banyak beroperasi di kawasan Kota Batam. Sebanyak 2.545 ijin trayek untuk taksi telah dikeluarkan selama periode 2015–2019. Sementara itu sebanyak 1.745 ijin trayek cabang telah dikeluarkan selama periode 2015– 2019. Meski demikian, apabila dilihat dari rasio ijin trayek terlihat bahwa angkutan umum di Kota Batam cenderung masih kecil. Rasio ijin trayek untuk taksi pada tahun 2019 hanya sebesar 0,00223 hal ini berarti terdapat 2,23 taksi setiap 1.000 penduduk Kota Batam pada tahun 2019.

Tabel 2. 76 Rasio Ijin Trayek di Kota Batam Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	1.030.528	1.055.040	1.062.250	1.329.773	1.376.009
2	Jumlah ijin trayek					
	Taksi	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
	trayek utama	617	617	617	617	617
	trayek cabang	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
	trayek ranting	101	101	101	101	101
	angkutan karyawan	317	322	334	338	351
	angkutan pariwisata	118	128	136	147	168
3	Rasio ijin trayek					
	Taksi	0,00223	0,00223	0,00223	0,00223	0,00223
	trayek utama	0,00061	0,00061	0,00061	0	0
	trayek cabang	0,00002	0,00002	0,00002	0,00001	0,00001
	trayek ranting	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010
	Angkutan karyawan	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029	0,00029
	angkutan pariwisata	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010	0,00010

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Terkait uji KIR angkutan umum, dari Tabel 2.77. terlihat bahwa truk dan mobil angkutan barang merupakan jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diarahkan sebagai kota industry dan perdagangan.

Tabel 2. 77 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah uji KIR angkutan umum :						
1	Taksi	2.507	1.150	1.586	1.415	296
2	Oplet	1.737	104	104	68	40
3	Bis	3.004	1.297	1.795	1.670	150
4	Truk	20.818	9.681	18.562	1.004	1.709
5	Truk tempel	856	497	559	514	46

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

Untuk indikator jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat 108 titik parkir tepi jalan, kemudian selama lima tahun meningkat menjadi 548 titik parkir tepi jalan. Pertimbangan utama dalam menambah titik parkir adalah adanya peluang peningkatan retribusi dari sektor perparkiran, namun demikian hingga tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah titik parkir tidak diikuti dengan peningkatan retribusi. Pada akhirnya dampak negatif yang muncul dari banyaknya titik parkir tepi jalan adalah mengurangi keindahan kota, dan juga mengorbankan ruang dan kenyamanan pejalan kaki. Trotoar yang sering kali berhadapan dengan parkiran, daripada gedung dan etalase yang menarik, membuat pengalaman berjalan kaki jadi tidak menarik. Penggunaan kendaraan pribadi juga menutup kemungkinan interaksi antar penduduk. Beda ceritanya bila suatu kota lebih banyak ruang terbuka hijau, ruang publik dan trotoar yang nyaman dan menarik. Lebih jauh lagi, parkir atau ketersediaan ruangnya malah mendorong orang untuk membawa kendaraan pribadi yang akan bersumbangsih pada kemacetan. Parkir sebenarnya adalah faktor yang sering diabaikan padahal berkontribusi terhadap krisis perumahan kota dan kurangnya ruang terbuka hijau. Terlebih lagi, tanpa disadari, semua orang termasuk yang tidak memiliki kendaraan ikut mensubsidi parkir lewat peraturan pemerintah. Bukannya meringankan beban kota, parkir justru memperberat perkembangan kota bagi penduduknya. Kondisi perparkiran di Kota Batam perlu dilakukan evaluasi agar pada periode selanjutnya dapat diputuskan kebijakan perparkiran yang sesuai dengan semangat penataan kota yang baik.

Sebagai alternatif, dalam konteks jangka menengah ini pemerintah Kota Batam perlu mempersiapkan antisipasi fenomena kemacetan yang pasti akan muncul jika tidak ada upaya dini untuk itu, antara lain berfokus pada area yang sudah dilayani oleh transportasi massal yang andal seperti Trans Batam, dan beberapa alternatif lainnya sebagai berikut:

1. Batasi persediaan ruang parkir. Daripada harus mensyaratkan kuota parkir minimum, pemerintah daerah sebaiknya memperbarui peraturan dan mengubahnya menjadi kuota maksimum penyediaan parkir.
2. Hapus batas tarif parkir dan biarkan harga pasar bekerja. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk naik angkutan umum.
3. Beri insentif konversi ruang parkir yang ditujukan untuk aktivitas masyarakat.
4. Ciptakan kawasan-kawasan ramah pejalan kaki dengan area-area tanpa tempat parkir.
5. Perkenalkan konsep *park-and-ride* di kantong-kantong transit di pinggiran kota sehingga masyarakat tidak perlu membawa kendaraan pribadi ketika ke pusat kota.

Selanjutnya, untuk indikator tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan (%) sejak tahun 2016-2018 selalu mencapai target tahunan, namun pada tahun 2019 tidak mencapai target, realisasi sebesar 70 persen dari target 85 persen. Untuk persentase angkutan layanan darat dan laut yang tercatat di tahun 2019 adalah 56 persen. Kemudian untuk Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun (terminal, rambu, halte, transfer point, marka, traffict lighth) mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sebesar 65 persen, meningkat menjadi 69 persen di tahun 2019. Sedangkan untuk indikator sarana dan prasarana perhubungan yang terpelihara mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2016 sebesar 80 persen, kemudian menjadi sebesar 25 persen di tahun 2017, sebesar 30 persen di tahun 2018, dan naik tidak signifikan di tahun 2019 menjadi 40 persen. Selanjutnya cakupan pembangunan pelabuhan di hinterland sejak 2016 hingga 2019 tidak memenuhi target setiap tahunnya, pada tahun 2019 realisasi tercatat 67 persen sementara target pada tahun tersebut 85 persen.

Tabel 2. 78 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
i	Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum	Target	38	47	50	69	81
		Realisasi	108	188	198	482	548
ii	Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan (%)	Target	76	80	80	85	85
		Realisasi	70	80	80	85	70
iii	Persentase layanan angkutan darat dan laut	Target	70	24	47	52	56
		Realisasi	70	24	47	52	56
iv	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun (<i>terminal, rambu, halte, transfer point, marka, traffict light</i>)	Target	28	40	51	55	65
		Realisasi	28	40	60	65	69
v	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terpelihara	Target	16	20	25	30	40
		Realisasi	16	80	25	30	40
vi	Cakupan pembangunan pelabuhan di hinterland	Target	64	70	75	80	85
		Realisasi	64	3	2	55%	67%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Batam

KESIMPULAN

Kota Batam masih membutuhkan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi. Pada tahun 2019 kebutuhan 11 koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada belum tercapai. Pengoperasian *feder* untuk mendukung *integrated transportation system* masih perlu dioptimalkan. Menimbang kebutuhan pembangunan sistem transportasi memerlukan anggaran yang besar, maka dalam perspektif kedepan penting perlu difikirkan untuk mencari skema pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR lokal atau internasional dalam skema *government to government* yang sangat mungkin dilakukan (Tahun 2014 Kota Bandung mendapatkan CSR pembangunan infrastruktur sebesar 1.7 Trilyun dari tiga negara eropa yang diantaranya ditujukan untuk sektor transportasi).

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah periode selanjutnya, seyogyanya Dinas Perhubungan perlu menetapkan indikator-indikator yang memiliki definisi operasional dan rumus perhitungan yang jelas serta penetapan indikator kinerja harus benar-benar bisa menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dari implementasi suatu program.

2.3.1.15 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation (USO)* atau kewajiban pelayanan universal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Batam, selama tiga bulan terakhir tahun 2019, sebanyak 72,63 persen penduduk Kota Batam telah mengakses internet. Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), sarana prasarana telepon pintar/komputer/desktop/notebook dan ketersediaan akses internet di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan, pada tahun 2019 sebanyak 88,05 persen penduduk Kota Batam sudah menggunakan sarana prasarana tersebut.

Tabel 2. 79 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Presentase kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan informasi	Target		n.a	62,51	62,51	62,51
		Realisasi		n.a	65	70	75
ii		Target		n.a	29	52	68

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi	Realisasi		40	55	59	63

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada tahun 2019 mengemban tugas dan fungsi baru yang menjalankan peran hubungan masyarakat (*public relation*) Pemerintah Kota Batam, sehingga dalam Renstra periode selanjutnya perlu tergambarkan peran humas dalam mengimplementasikan *government public relation*. Praktisi humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih jauh lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Humas pemerintah merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah. Selain itu, humas sebagai corong atau sumber informasi, dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik. Jadi pada prinsipnya, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar visi misi kepala daerah dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja.

Humas pemerintah harus mampu bersinergi/bermitra dengan wartawan media cetak dan elektronik serta netizen yang menggunakan media sosial. Tak hanya itu lembaga pers juga perlu diajak kerjasama dalam membantu pemerintah untuk

menyebarkan informasi program pembangunan kepada masyarakat, karena persepsi publik tentang pemerintahan ditentukan oleh informasi dari media.

KESIMPULAN

Pelayanan informasi kepada masyarakat perlu terus dioptimalkan sehingga dalam periode kedepan realisasi persentase kepuasan masyarakat yang mendapatkan akses informasi dapat meningkat (>70 persen). Selain itu layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkat (>63 persen). Dalam perspektif kedepan perlu upaya inovatif dan kreatif yang tidak menjadikan permasalahan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan pelayanan. Sebagai contoh, Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengemban fungsi sandi dan statistik membutuhkan suatu masterplan atau grand design pengembangan pelayanan, penyusunan masterplan tentu memerlukan anggaran besar, namun anggaran tersebut dalam konteks ini masih bersifat *unpredictable* dan *uncertainty*. Sehingga untuk menerapkan efisiensi, seyogyanya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika difungsikan sebagai grand design/masterplan yang memuat seluruh aspek yang diperlukan dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.3.1.16 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja urusan koperasi dan usaha mikro disampaikan pada Tabel 2.80 Secara umum indikator yang mengukur pelayanan terhadap koperasi dan usaha mikro binaan menunjukkan rata-rata capaian yang positif. Untuk indikator koperasi aktif di Kota Batam selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 berfluktuatif tapi masih berada dibawah 30 persen, pada tahun 2019 tercatat hanya 21,29 persen koperasi aktif dari total 1.034 koperasi yang ada di Kota Batam. Uraian lebih rinci terkait kondisi perkoperasian sampai dengan 31 Desember 2019 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 80 Kondisi Koperasi di Kota Batam hingga Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Koperasi	1034 unit
2	Koperasi Aktif	207 unit
3	Jumlah Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	76 unit
4	Jumlah Anggota Koperasi	26100 orang
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap	193 orang
6	Jumlah modal sendiri	Rp.147,404,425,374,-

No	Uraian	Jumlah
7	Jumlah modal luar	Rp. 96,995,840,474,-
8	Jumlah Volume Usaha	Rp. 218, 401, 065,307
9	Jumlah SHU	Rp. 20,635,258,383
10	Jumlah Koperasi Baru	24 unit
11	Jumlah Koperasi yang di bubarkan	151 unit
12	Jumlah Koperasi dalam proses pencabutan Badan Hukum	40 unit
13	Koperasi dalam proses penyelesaian pembubaraan koperasi oleh pemerintah	111 unit

Sumber: Dinas PMPKUKM

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Koperasi belum bisa berperan sebagai lembaga ekonomi yang dapat mensejahterakan anggotanya disebabkan lemahnya manajemen, kurangnya keterkaitan usaha koperasi dengan kepentingan ekonomi anggotanya, kurangnya pemahaman anggota, pengurus, dan pengawas koperasi tentang perkoperasian dan Koperasi belum dikelola secara professional. Sehingga masih diperlukan sosialisasi, bimtek, pelatihan dan penerapan manajemen informasi sistem keuangan perkoperasian kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi dan kepada kelompok-kelompok orang yang akan mendirikan koperasi. Namun demikian mekanisme sosialisasi, bimtek dan pelatihan yang telah dilakukan pada periode terdahulu perlu dilakukan telaah dan evaluasi, hal ini untuk mengetahui model *transfer knowledge* seperti apa yang efektif, jangan sampai kegiatan sosialisasi tidak berdampak dalam mewujudkan tujuan. Hakikatnya kegiatan sosialisasi dan *transfer knowledge* harus dapat merubah *mindset* kelompok yang akan mendirikan koperasi dan para penggiat koperasi sehingga bermuara pada perubahan perilaku peningkatan kualitas manajemen koperasi. Dinas PMPKUKM perlu menyusun langkah strategis dalam melakukan *transfer knowledge* cara-cara baru yang bersifat kekinian yang telah terbukti berhasil dilakukan daerah lain, sehingga terus terjadi *continuous improvement* dalam pelayanan kepada masyarakat dan tidak terperangkap dalam model pelayanan *business as usual*.

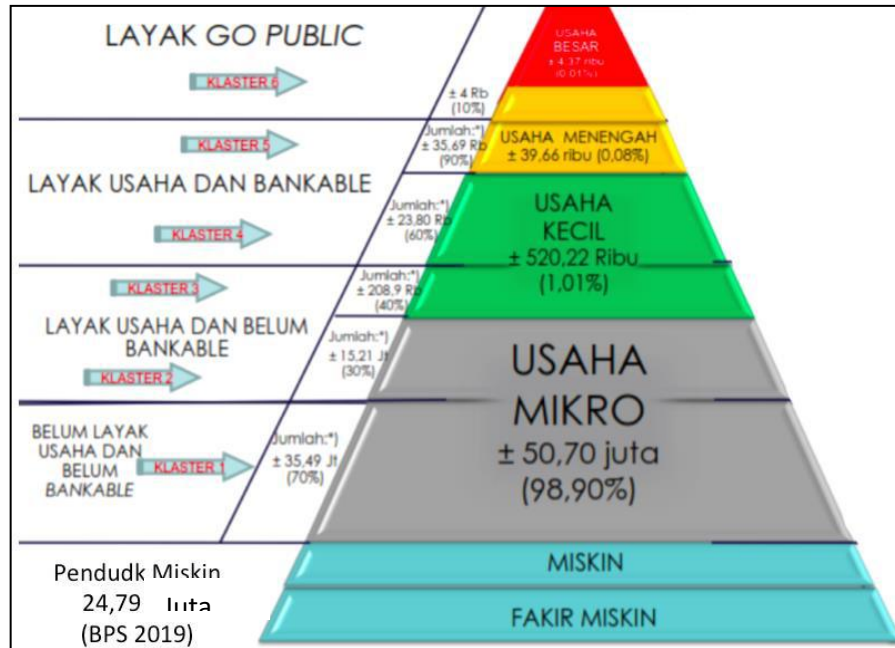
Tabel 2. 81 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Presentase Koperasi Aktif	Target	19%	20%	21%	22%	23%
		Realisasi	20.52%	22,65	23,33	22,97	21,29
ii	Pembinaan Usaha Mikro (%)	Target	-	15%	26%	35%	47%
		Realisasi	-	15%	51%	57%	60%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Selanjutnya untuk indikator persentase pembinaan usaha mikro mengalami peningkatan, pada tahun 2016 tercatat 15 persen, kemudian dalam tiga tahun meningkat menjadi 60 persen di tahun 2019. Saat ini berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi jumlah UMKM di Kota Batam adalah 81.129 unit, 1.212 unit diantaranya adalah usaha mikro (sektor kuliner, fashion, kerajinan, dll). Jika mengacu pada indikator pembinaan usaha mikro, maka saat ini terdapat 727 unit usaha mikro yang belum dilakukan pembinaan.

Di berbagai belahan dunia, usaha mikro yang tergabung dalam *Small Medium Enterprise* (SME) berperan sangat sentral terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional suatu negara. Kontribusi UMKM di Perancis mencapai 99.80% dari total jumlah perusahaan, dengan kontribusi lebih dari 56% GDP dan menyerap lebih dari 61% tenaga kerja, UMKM di Jerman mencapai 99,55% dengan kontribusi 53% GDP dan menyerap 61% tenaga kerja, UMKM di Italia mencapai 99,92% dengan kontribusi 71% GDP dan menyerap 81% tenaga kerja, UMKM di Nederlands mencapai 99,72% dengan kontribusi 62% GDP dan menyerap 68% tenaga kerja (*Europen Commision, 2012*). Begitu pula di Indonesia, dimana 98,90 persen perekonomian ditopang oleh usaha mikro (Gambar 2.70), dan mempunyai tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97 persen dari seluruh tenaga kerja nasional dan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57 persen.



Gambar 2. 72 Piramida Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Berdasarkan uraian paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa usaha mikro adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia, sehingga peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengembangan usaha mikro pada tingkat daerah selanjutnya menjadi suatu prioritas. Sejalan dengan itu, cara-cara baru, inovasi-inovasi kekinian, kreatifitas dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan terhadap usaha mikro menjadi suatu keharusan di Kota Batam.

Hingga saat ini pelayanan Dinas PMPKUKM terhadap usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Lebih lanjut (1) proses pendataan dilakukan melalui registrasi pendataan UMKM ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan melengkapi persyaratan yang ada, seperti perizinan IUMK / NIB (PP No. 24 Tahun 2018) serta pengisian form binaan Dinas, (2) proses fasilitasi kemitraan dilaksanakan antara pelaku usaha mikro dengan pengelola toko modern (mini market, supermarket, 212 mart, lotte mart, carefour dan hypermart), (3) proses penguatan kelembagaan dilakukan dengan memfasilitasi

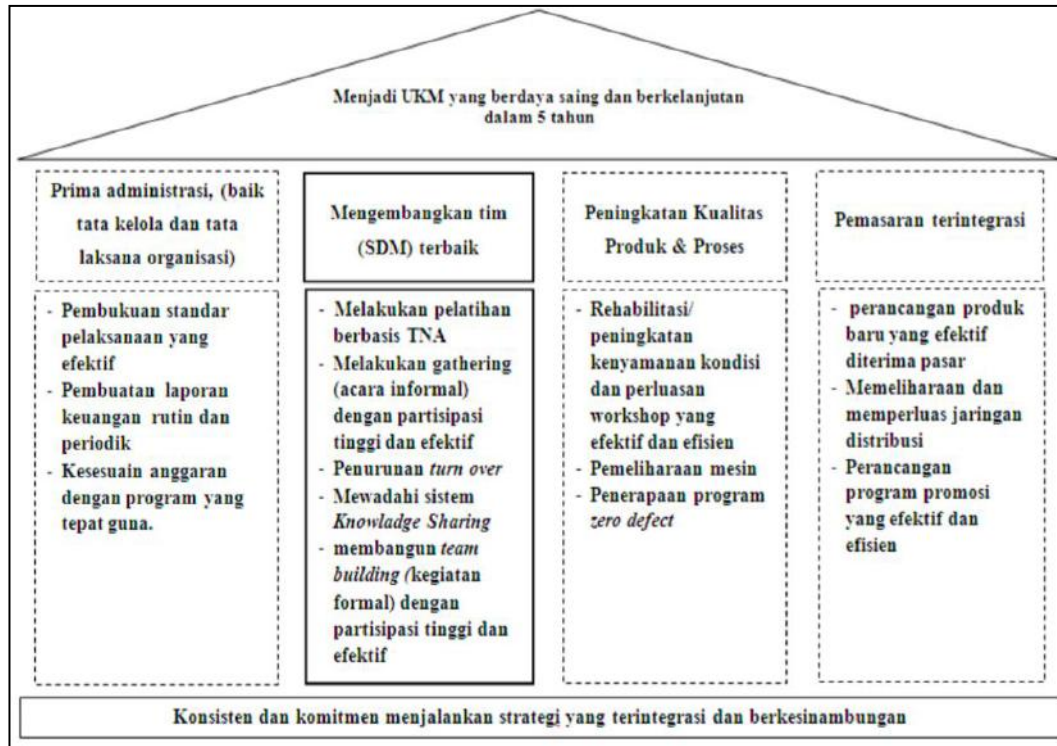
pendaftaran perizinan melalui aplikasi OSS dan memfasilitasi perizinan lainnya seperti Halal dan PIRT, dan (4) proses koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan memfasilitasi kepentingan Pengusaha/BUMN/BUMD seperti KUR, Pendaftaran Merek dan HCCP, dll.

Secara umum persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro antara lain (1) kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam izin usaha; (2) kurangnya pemahaman tentang perencanaan bisnis (*Business Plan*); (3) produk belum memenuhi standar mutu (PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi Halal, Komposisi Produk, Masa Produk dan Registrasi Produk); (4) Belum memiliki catatan transaksi usaha; (5) terbatasnya akses teknologi dan pemasaran; (6) sulitnya terhadap akses pembiayaan; (7) terbatasnya tenaga pendampingan terhadap pelaku usaha.

Setidaknya terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pendekatan pertama dari sisi internal pelaku usaha mikro itu sendiri, dan pendekatan kedua adalah dari sisi eksternal, yakni pemberdayaan yang dilakukan oleh DPMPKUKM Kota Batam kepada pelaku usaha mikro.

1. Pendekatan dari sisi internal

Pelaku usaha mikro perlu memiliki komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan skill usaha, terlebih saat ini akses *knowledge* yang mendukung pelaku usaha mikro lebih mudah dijangkau, selain itu juga perlu komitmen menjalankan strategi usaha yang terintegrasi dan berkesinambungan sebagai landasan menjalankan usaha. Setidaknya terdapat empat pilar utama yang bersifat iteratif dalam menjalankan usaha mikro yakni (1) prima administrasi (terkait dengan pembukuan, perhitungan keuangan rutin, pendaftaran IUMK, dst); (2) mengembangkan tim (SDM) terbaik; (3) peningkatan kualitas produk dan proses; dan (4) pemasaran terintegrasi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 73 The House Model Small Enterprise

Sumber: Jurnal Manajemen dan Organisasi, IPB Vol V, No 2, Agustus 2014

2. Pendekatan dari sisi eksternal

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam bekerja sama dengan Kecamatan melakukan sosialisasi pengurusan IUMK dan dalam pelaksanaan dibantu oleh pendamping KUMKM yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, sehingga dengan memiliki IUMK para pelaku usaha dapat lebih mudah mengakses bantuan, baik dari Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Kota Batam juga memberikan bantuan fasilitasi permodalan melalui BLUD, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran HAKI, *Business Matching* pelaku usaha mikro, *Pre event* Indonesia *marketers* festival, Sosialisasi pinjaman dana bergulir, Bimtek SMKI berbasis indeks KAMI, Bimtek peningkatan kapasitas tenaga pendamping KUMKM, pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi UMKM, pelatihan uji kompetensi SDM KUMKM melalui SKKNI bidang UKM ekspor, pelatihan peningkatan standarisasi mutu dan sertifikasi produk, konsultasi dan pemberkasan dalam rangka standarisasi PIRT, konsultasi desain

dan kemasan serta pemberkasan pendaftaran merek produk KUMKM, pelatihan pemasaran online bagi UMKM, pelatihan belajar membuka toko *online* di tokopedia, pelatihan *enterprener* bagi pelaku usaha mikro yang di dampingi, seminar peningkatan kesadaran masyarakat pelajar dan siswa terhadap produk dalam negeri. Dalam hal pendampingan dilakukan melalui melengkapi sarana dan prasarana pendukung gedung PLUT KUMKM, membangun akses jalan dan jembatan serta *recruitment* tenaga konsultan pendamping yang dibiayai oleh Kementerian KUMKM RI sebanyak 5 orang. Lebih lanjut usaha mikro kecil di Kota Batam perlu didorong masuk kedalam ekosistem digital, karena *e-commerce* telah terbukti merupakan satu-satunya sektor yang paling sedikit mendapatkan dampak negatif dari adanya pandemi covid-19. Bank Indonesia mencatat, pada Maret 2020 volume transaksi melalui *e-commerce* di Indonesia mencapai 98,3 juta atau meningkat 18,1 persen (mtm), dengan total nilai transaksi Rp 20,9 triliun atau meningkat 9,9 persen (mtm). Peningkatan transaksi terbesar bersumber dari kebutuhan primer atau makanan dan minuman (52 persen), perlengkapan sekolah (34 persen), dan perawatan pribadi seperti sanitasi tangan dan masker (29 persen). Saat ini peluang tingginya bisnis di toko online tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM, dari sekitar 64 juta populasi UMKM di Indonesia, baru 13 persennya saja yang telah terhubung ke ekosistem digital.

Sementara itu terdapat beberapa masyarakat yang tinggal di hunian tidak resmi, sehingga tidak dapat mengurus legalitas usahanya. Hal tersebut berpengaruh terhadap minat pelaku usaha mikro yang tinggal di hunian tidak resmi untuk mendaftarkan usahanya kurang, sehingga bantuan dan pembinaan (karena mereka tidak terdaftar di database) tidak dapat diperoleh mereka. Dalam mengatasi hal ini perlu pemetaan lebih rinci terhadap pelaku usaha mikro yang tidak dapat mengurus izin karena kendala status huniannya.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja urusan Koperasi dan Usaha Mikro binaan menunjukkan arah positif. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Jumlah koperasi aktif hanya 207 unit dari total 1.034 unit yang terdaftar, atau hanya 20 persen yang aktif. Saat ini solusi utama mendorong koperasi supaya aktif hanya dilakukan melalui *transfer knowledge* (bintek/sosialisasi/pelatihan,dst). Jika periode 2016-2019 telah dilakukan upaya *transfer knowledge* tersebut, dan pada periode 2020-2024 akan dilakukan hal yang sama, maka harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *transfer knowledge* yang sebelumnya telah dilakukan karena tidak efektif (hanya mampu mengaktifkan koperasi 20% saja). Jika tidak mampu membuat pola baru/pendekatan baru/cara baru untuk *transfer knowledge* yang lebih efektif dan efisien, maka bintek/ sosialisasi/ pelatihan tidak perlu dilakukan lagi;
2. Saat ini terdapat 727 unit usaha mikro yang belum mendapat pembinaan;
3. Pola pembinaan terhadap UKM perlu dilakukan evaluasi, apakah selama ini yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien, mengingat pada era digital saat ini kemudahan akses mendapatkan ilmu pengetahuan/*best practice* terkait UKM dari seluruh dunia sangat mudah untuk diakses oleh pelaku UKM, sehingga sangat dimungkinkan sebagian UKM hanya membutuhkan konten pembinaan dan mengakses melalui daring. Saat ini Kota Batam membutuhkan transformasi pelayanan dari pola *business as usual* menjadi pola pelayanan yang inovatif, kreatif, *breakthrough, out of the box*.
4. Arah pengembangan UKM periode selanjutnya harus mendorong seluruh UKM untuk terhubung ke ekosistem digital (*e-commerce*). Karena satu-satunya sektor yang terbukti tidak terkena dampak negatif akibat pandemi covid-19 adalah sektor *e-commerce*.
5. Terdapat beberapa masyarakat pelaku usaha mikro yang tinggal di hunian tidak resmi, sehingga tidak dapat mengurus legalitas usahanya, sehingga perlu dipetakan lebih rinci pelaku usaha yang terkendala status legalitas huniannya;
6. Pada periode selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja yang benar-benar dapat merepresentasikan *goals* yang ingin dicapai, tentu indikator tersebut harus dilengkapi dengan definisi operasional dan rumus perhitungan yang jelas, sebagai contoh : jika UKM didorong untuk terhubung kedalam ekosistem digital, maka perlu ditetapkan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan hal tersebut.

2.3.1.17 Urusan Penanaman Modal

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Batam. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Batam selama kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 82 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Penanaman Modal
Tahun 2015-2019**

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terbit sesuai waktu SOP	Target					
		Realisasi	n.a	n.a	n.a	n.a	65,7
ii	Realisasi Investasi di Kota Batam (miliar rupiah)	Target					2.500
		Realisasi		816	664	439	4.876
iii	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
	PMDN	Terdaftar	38	35	86		
		Realisasi	19	28	60	145	384
	PMA	Terdaftar	164	146	151		
		Realisasi	58	71	74	601	913

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	
iv	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)						
	PMDN (Juta Rp)	Terdaftar	2.450.443	165.411	1.781.979		
		Realisasi	245.352	815.971	663.356	3.181.498.50	4.876.613.800
	PMA (Juta US \$)	Terdaftar	1.987.196.664	5.167.386	411.809		
		Realisasi	460.225.794	462.844	1.116.807	572.118.65	461.045
v	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja						
	PMDN	Terdaftar		1.354	15.425		
		Realisasi	832	1.575	3.656	6.341	1.891
	PMA	Terdaftar		1.175	11.231		
		Realisasi	3.040	4.571	683	22.135	25.209
vi	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rp)	Terdaftar					
	Realisasi	133.126	570.619	-152.615	191.49	53.28	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Indikator iv, v dan vi mohon konfirmasi apakah satuannya sudah sama/sesuai Ketepatan waktu penerbitan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SOP menurut data tahun 2019 masih cukup rendah sebesar 65,7 persen. dari sisi eksternal, terdapat beberapa pemohon yang mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan (sertifikat, penguasaan lahan, terutama di IMB) sehingga proses perizinannya terkendala. Sedangkan dari sisi internal, masih terdapat kekurangan SDM, misalnya dalam pengurusan izin IMB perlu petugas survei ke lapangan sedangkan jumlah petugas yang dimiliki masih terbatas. Selain itu, aplikasi yang mendukung pelayanan perizinan yaitu aplikasi OSS (One Single Submission) baru efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga banyak terjadi pelaku usaha mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya setelah aplikasi ISS efektif digunakan.

Indikator realisasi investasi di Kota Batam menunjukkan angka yang fluktuatif meskipun secara umum dari tahun 2016 hingga 2019 tercatat menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Meski demikian pada tahun 2017 realisasi investasi di Kota Batam turun menjadi 664 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 816 miliar rupiah di tahun 2016. Penurunan terjadi lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 439 miliar rupiah sebelum meningkat sangat tinggi menjadi 4.876 miliar

rupiah di tahun 2019. Nilai realisasi investasi di tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan sebesar 2.500 miliar rupiah. Perlu diingat juga bahwa terdapat pembagian kewenangan dalam pengelolaan investasi di Kota Batam dimana PMA dikelola oleh BP Batam dan PMDN dikelola oleh Pemko Batam.

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Meskipun realisasi investasi dalam nilai rupiah mengalami fluktuasi, indikator jumlah investor berskala nasional baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah investor berskala nasional untuk PMDN meningkat dari 19 di tahun 2015 menjadi 28 di tahun 2016 dan menjadi 60 di tahun 2017. Peningkatan yang cukup besar pada jumlah investor berskala nasional PMDN terjadi di tahun 2018 menjadi 145 dan kemudian meningkat lagi menjadi 84 di tahun 2019. Sedangkan untuk PMA, jumlah investor di tahun 2015 sebesar 58 dan meningkat menjadi 71 dan 74 di tahun 2016 dan 2017. Peningkatan yang cukup besar pada jumlah investor berskala nasional PMA terjadi di tahun 2018 menjadi 601 dan kemudian meningkat lagi menjadi 913 di tahun 2019.

Sejalan dengan realisasi investasi yang menunjukkan angka yang fluktuatif, daya serap tenaga kerja baik PMDN maupun PMA juga menunjukkan hasil yang fluktuatif meskipun secara umum masih menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Daya serap tenaga kerja PMDN pada tahun 2015 sebesar 832 kemudian meningkat menjadi 1.575 di tahun 2016, dan 3.656 di tahun 2017. Daya serap tenaga kerja PMDN mencapai puncak di tahun 2018 sebesar 6.341 sebelum turun menjadi 1.891 di tahun 2019. Begitu pula dengan daya serap tenaga kerja PMA yang mencatatkan 3.040 di tahun 2015 dan meningkat menjadi 4.571 di

tahun 2016 sebelum turun drastis menjadi 683 di tahun 2017. Setelah itu, daya serap tenaga kerja PMA di tahun 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan yang sangat besar menjadi 22.135 dan 25.209.

Terkait dengan investasi di Kota Batam, perlu juga dilakukan pengukuran daya tarik investasi sebagai sebuah acuan dalam meningkatkan kinerja di bidang penanaman modal. Dalam indeks daya tarik investasi terdapat sembilan indikator yang akan diukur yaitu indikator perijinan, perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, infrastruktur (jalan raya), infrastruktur publik (listrik, telepon, air, dan gas), kondisi keamanan, perolehan tanah untuk investasi, akses pembiayaan perusahaan, dan kondisi lingkungan bisnis. Kesembilan indikator tersebut perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi di Kota Batam.

Selain mengandalkan investasi di sektor industri, pemerintah daerah dapat mendorong lebih banyak investasi di daerah melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau dikenal juga dengan istilah *public private partnership* (PPP). KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Dengan mendorong KPBU, pemerintah daerah dapat mendorong investasi dalam bidang infrastruktur dengan bekerja sama dengan pihak ketiga berupa badan usaha swasta sehingga selain investasi di daerah meningkat, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari infrastruktur yang dibangun menggunakan skema tersebut.

2.3.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pada hakekatnya kegiatan olahraga merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan

integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas. Semua aspek ini merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis. Berdasarkan nilai yang terkandung dalam olahraga tersebut, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan pada posisi penting dan dikelola secara profesional.

Dengan demikian, pembangunan olahraga sesungguhnya tidak cukup hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medal khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan pada tingkat daerah. Olahraga sebagai instrumen pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk tidak saja pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Kinerja urusan olahraga di Kota Batam cenderung masih diukur dari perolehan medali dan prestasi olahraga. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2019 terdapat 35 cabang olahraga yang mendapatkan juara 1 di berbagai ajang lomba dan kejuaraan, kemudian dalam periode yang sama terdapat 136 atlit berprestasi yang 92 persen terdiri dari atlit muda. Peraih prestasi cabang olahraga dan atlit berprestasi tidak terlepas dari peran para pelatih yang kompeten pada bidangnya, pada tahun 2019 pelatih tersertifikasi sudah sebanyak 60 persen.

Sementara itu untuk indikator persentase angka partisipasi masyarakat yang berolahraga selama empat tahun mengalami kenaikan, di tahun 2016 tercatat 60 persen kemudian menjadi 75 persen di tahun 2019. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif selama empat tahun capaiannya masih dibawah 50 persen, meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jumlah ini masih masuk dalam kategori sangat rendah. Sedangkan indikator Persentase

Pemberdayaan aktifitas pemuda, Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan realisasi selama empat tahun masih dibawah 40%, pada tahun 2016 tercatat 28 persen, kemudian meningkat menjadi 32 persen di tahun 2019.

Tabel 2. 83 Realisasi Kinerja Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2019

No	Indikator	Realisasi Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Prestasi Olahraga (cabor)	6	0	21	10
2	Jumlah Atlit Berprestasi	13	3	78	54
3	Persentase Atlit muda berprestasi	92	40%	92%	0%
4	Persentase Pelatih Bersertifikasi	30%	65%	50%	60%
5	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat yang berolahraga	60%	65%	70%	75%
6	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	29%	36%	45%	46%
7	Persentase Pemberdayaan aktifitas pemuda, Kewirausahaan , Kepeloporan dan Kepemimpinan	28%	28%	31%	32%

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam

Dalam perspektif perencanaan periode selanjutnya, seyogyanya perlu dirumuskan tolak ukur kinerja yang lebih *clear*, terutama dalam mengukur pelayanan olahraga kepada masyarakat. Saat ini beberapa indikator yang telah diutarakan pada tabel di atas tidak memiliki definisi operasional yang jelas dan cara perhitungan yang tepat. Sebagai contoh, dalam menghitung angka partisipasi masyarakat idealnya perlu didukung mekanisme pelaksanaan pemantauan di lapangan, perlu dirumuskan kriteria masyarakat berolahraga seperti apa, mekanisme pemantauannya seperti apa, apakah olahraga yang dilakukan secara private di masing-masing rumah penduduk dapat masuk dalam kriteria, tentu jika demikian akan sulit melakukan monitoring di lapangan.

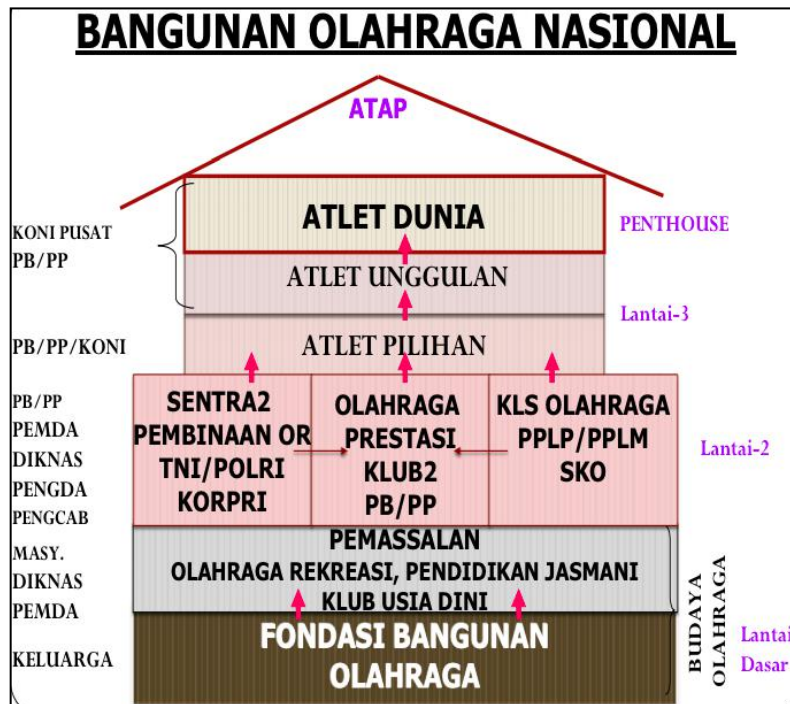
Idealnya pengukuran partisipasi masyarakat dalam berolahraga dinilai dari intensitas masyarakat menggunakan fasilitas olahraga di tempat publik. Saat ini Kota Batam telah membangun beberapa fasilitas lapangan olahraga, seharusnya fasilitas ini menstimulus masyarakat untuk melakukan olahraga dan dibuktikan dengan tolak ukur indikator yang tepat. Atau sejauhmana masyarakat

memanfaatkan *car free day* sebagai sarana olahraga. Kemudian perlu juga dibuat kegiatan-kegiatan olahraga bersama komunitas, seperti lomba, olahraga rekreasi, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan lomba atau olahraga bersama tidak harus secara formal dianggarkan dalam suatu kegiatan, mengingat banyak pertimbangan dalam efisiensi anggaran APBD. Sehingga paradigma pelayanan saat ini dan kedepan, anggaran bukan menjadi faktor utama sebagai hambatan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat, dalam konteks ini pemerintah melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga dapat menjadi katalisator dan fasilitator, persoalan anggaran sudah banyak skema kerjasama non APBD, terlebih event olahraga skala kecil sudah merupakan *lifestyle* di masyarakat, sehingga banyak peluang menyelenggarakan kegiatan/event melalui skema non APBD sangat memungkinkan. Dalam konteks ini jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi hambatan untuk tidak kreatif dan inovatif dalam menstimulus masyarakat untuk berolahraga menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah atau fasilitas yang disediakan oleh *private sector*.

Dalam perspektif menggerakkan ekonomi wilayah, sektor olahraga saat ini dapat menjadi penggerak sektor lainnya, terutama sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Sebagai ilustrasi, penyelenggaraan event olahraga seperti maraton dan *city tour* sepeda dapat menjadi pintu masuk wisatawan untuk berpartisipasi, dan tentu perputaran ekonomi berdampak pada sektor perhotelan, restoran dan *leisure economic* lainnya, terlebih Kota Batam sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga event olahraga perlu dikemas dalam skema pariwisata sehingga olahraga dapat bernilai ekonomi, dalam perspektif kedepan Kota Batam memerlukan hal-hal seperti ini.

Lebih lanjut pengarusutamaan olahraga masyarakat pada level keluarga dalam skema model bangunan olahraga nasional menjadi fondasi utama untuk mencetak bakat-bakat calon atlit berprestasi. Upaya-upaya menggiring masyarakat untuk berpartisipasi olahraga sangat penting sekali dilakukan, dalam perspektif ini menstimulus masyarakat untuk berolahraga lebih utama dibandingkan

menyediakan bangunan fasilitas olahraga, karena banyak jenis olahraga yang tidak memerlukan fasilitas khusus, fasilitas olahraga hanya sebagai penunjang, hal utama adalah melakukan *mainstreaming* aktivitas olahraga kepada masyarakat.



Gambar 2. 74 Model Bangunan Olahraga Nasional

Sumber: Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bappenas

Berdasarkan model Bangunan Olahraga Nasional peran pemerintah Kota Batam ada pada lantai dasar atau pemassalan atau pengarusutamaan (*mainstreaming*) olahraga, kemudian naik ke lantai dua yakni kluster pembinaan yang berorientasi prestasi. Penjelasan berikutnya terkait gambar di atas adalah bahwa budaya olahraga menjadi pondasi dalam pembangunan olahraga nasional. Pengembangan budaya olahraga dapat dilakukan melalui peningkatan peran serta keluarga, masyarakat dan institusi pendidikan melalui kegiatan pemassalan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan di sekolah, serta pembinaan olahraga melalui klub-klub dan komunitas olahraga, sebagaimana yang telah diutarakan pada paragraf terdahulu. Setelah budaya olahraga berkembang di tengah masyarakat, maka siswa didik dan masyarakat yang memiliki bakat dan prestasi di bidang olahraga akan memperoleh pembinaan lebih lanjut di PPLP/PPLM, klub-

klub olahraga dan sentra-sentra pembinaan olahraga di lingkungan kerja dan masyarakat. Pembinaan atlet berbakat ini merupakan upaya dalam pengembangan olahraga berprestasi. Dalam upaya pengembangan olahraga berprestasi diperlukan dukungan dari Pengurus Besar/Pengurus Pusat masing-masing cabang olahraga, private sektor, serta instansi terkait.

Lebih lanjut untuk sub urusan kepemudaan, pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau the Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2017 di Kota Batam sebanyak 72,49 persen dari total penduduk merupakan usia muda (15-44 tahun) sehingga pemberdayaan dan pengembangan terhadap generasi muda menjadi hal yang sangat penting di Kota Batam. Bentuk dan mekanisme pemberdayaan serta pengembangan dapat ditempuh melalui beragam cara, namun tujuan utamanya adalah pemuda di Kota Batam harus produktif di semua bidang yang diminatinya dan harus ada komitmen dari Pemerintah Kota Batam untuk hal itu, sehingga generasi muda dapat terhindar dari *middle income trap* di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Secara umum kinerja urusan pemuda dan olahraga menunjukkan arah positif. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Pengembangan olahraga perlu ditempatkan dalam konteks pengembangan ekonomi wilayah. Sektor olahraga saat ini dapat menjadi penggerak sektor ekonomi terutama sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Penyelenggaraan event olahraga seperti maraton dan *city tour* sepeda dapat menjadi pintu masuk wisatawan untuk berpartisipasi, dan tentu perputaran ekonomi berdampak pada sektor perhotelan, restoran dan *leisure economic* lainnya, terlebih Kota Batam sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia, sehingga event olahraga perlu dikemas dalam skema pariwisata sehingga olahraga dapat bernilai ekonomi, dalam perspektif kedepan Kota Batam memerlukan hal-hal seperti ini;
2. Dalam perspektif perencanaan periode selanjutnya, perlu dirumuskan tolok ukur kinerja yang lebih *clear*, terutama dalam mengukur pelayanan olahraga kepada masyarakat. Saat ini beberapa indikator tidak memiliki definisi operasional yang jelas dan cara perhitungan yang tepat. Sebagai contoh, dalam menghitung angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga idealnya perlu didukung mekanisme pelaksanaan pemantauan di lapangan, perlu dirumuskan kriteria masyarakat berolahraga seperti apa, mekanisme pemantauannya seperti apa, apakah olahraga yang dilakukan secara *private* di masing-masing rumah penduduk dapat masuk dalam kriteria, tentu jika demikian akan sulit melakukan monitoring di lapangan;
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau the Sustainable Development Goals (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peranan mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2017 di Kota Batam sebanyak 72,49 persen dari total penduduk merupakan usia muda (15-44 tahun) sehingga pemberdayaan dan pengembangan terhadap generasi muda menjadi hal yang sangat penting di Kota Batam.

2.3.1.19 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa di tingkat pemerintahan Kabupaten/Kota urusan statistik mencakup penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Adapun Buku Kota Dalam Angka selama periode Tahun 2015-2019 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta

ekonomi dan keuangan. Selain itu Buku PDRB selama tahun 2015-2019 selalu tersedia. Kedua buku tersebut merupakan sumber data dan informasi sosial ekonomi Kota Batam yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.

Tabel 2. 84 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Buku "kabupaten/kota dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "PDRB kabupaten/kota"	ada	ada	ada	ada	ada
3	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	n.a	n.a	4	12,9	100

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

Selanjutnya indikator Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 tercatat hanya 4 persen, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM. Untuk bidang sosial dan ekonomi sudah terealisasi dengan melakukan survey data statistik di 1 sektor industri (kuliner, material, shipyard, garmen, depot air, advertising, furniture, otomotif, jamu dan obat), sementara bidang lainnya belum dilakukan pada tahun 2017. Memasuki tahun 2018 realisasi mengalami peningkatan menjadi 12,9 persen, hal ini meliputi 20 sektor yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya menjadi 3 sektor, yaitu sektor Restoran (hotel dan restoran); sektor kependudukan (kependudukan 12 kecamatan); sektor Pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan PKBM); sektor perikanan (budidaya ikan, nelayan), namun realisasi kegiatan berupa buku statistik tentang pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah tidak terlaksana karena terjadi perubahan pagu anggaran. Selanjutnya untuk tahun 2019 telah terealisasi 100 persen, yang bermakna semua sektor terpenuhi dan sudah terdapat dan terkumpul. Adapun tantangan dan permasalahan pengembangan pelayanan urusan statistik periode selanjutnya adalah:

1. Belum adanya sistem pengumpulan data yang komprehensif dan terpadu berdampak belum optimalnya ketersediaan basis data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam hal perencanaan, perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan;
2. Penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan bidang statistik belum didukung oleh sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran yang memadai;
3. Dokumen renstra yang seharusnya berfungsi sebagai masterplan urusan statistik belum memuat langkah-langkah pengembangan urusan statistik secara komprehensif;
4. Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah belum diberdayakan secara optimal sehingga koordinasi, komunikasi dan sinergitas belum dilaksanakan secara berkelanjutan;
5. Produsen Data belum mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel sehingga berdampak belum optimalnya distribusi data kepada Wali Data dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika.

KESIMPULAN

Sebagai bentuk penyempurnaan pelayanan urusan statistik perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu mengoptimalkan system informasi yang ada saat ini dengan mengintegrasikan dengan system data yang lainnya, sehingga dapat tercipta data yang terpadu, aktual, valid dan akuntabel. Pengumpulan, analisa, pengelolaan dan diseminasi data Statistik harus dilakukan dengan metode dan prinsip-prinsip keilmuan di Bidang Statistik. Perlu inovasi dan kreatifitas dalam hal ini, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam peningkatan pelayanan;
2. Dokumen **RENSTRA** periode selanjutnya harus berfungsi sebagai **Grand Design** atau **Masterplan** urusan Statistik yang memuat tentang perencanaan, anggaran, sumber daya manusia sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan urusan statistik di Lingkup Pemerintah Daerah dapat terlaksana secara terarah sesuai target dan tujuan yang ingin dicapai;
3. Forum Satu Data harus diberdayakan dan difungsikan secara optimal, efektif dan efisien sehingga koordinasi, komunikasi dan sinergitas dapat terus dilaksanakan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia tingkat Daerah. Diseminasi data statistik harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap berpedoman pada prinsip kerahasiaan dan karakteristik data yang akan dipublikasikan. Pertemuan Forum Satu Data harus rutin dilaksanakan, meskipun secara virtual untuk menghemat pengeluaran, karena pada hakikatnya yang terpenting adalah substansi dari pertemuan tersebut, bukan bentuk pertemuan dengan anggaran khusus. Melalui Forum Satu Data, diseminasi serta publikasi data sektoral menjadi kegiatan yang strategis karena data merupakan wadah komunikasi dan koordinasi kegiatan statistik. Hal ini dapat menumbuhkan sinergitas dalam menyediakan data khususnya data sektoral;
4. Setiap Produsen Data wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kominfo selaku Wali Data. Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud maka Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai pintu masuk perolehan data atau **clearing data**.

2.3.1.20 Urusan Persandian

Urusan Persandian ditujukan untuk pengamanan informasi pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan indikator Persentase Sumber Daya Manusia yang memahami

Pengamanan Informasi, Perangkat/peralatan yang memadai, Peraturan/SOP, Operasional Pelaksanaan Pengamanan Informasi (empat elemen utama). Berdasarkan Tabel 2.85 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 hanya 11 persen, hal ini bermakna dari keempat elemen yang ditargetkan sebanyak 25 persen per elemen, realisasi saat ini belum mencapai target pencapaian elemen elemen tersebut.

Tabel 2. 85 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Sumber Daya Manusia yang memahami Pengamanan Informasi, Perangkat/peralatan yang memadai, Peraturan/SOP, Operasional Pelaksanaan Pengamanan Informasi			4	5	11

Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

KESIMPULAN

Penggunaan sandi dalam pengamanan informasi antar perangkat daerah masih terkendala karena keterbatasan perangkat, sumber daya manusia, regulasi dan pembiayaan. Dalam pemenuhan/Moratorium sarana/peralatan Sandi ketentuannya harus dari BSSN sehingga sulit bagi daerah untuk memenuhinya, selanjutnya kurangnya SDM Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Dalam perspektif kedepan, karena adanya keterbatasan APBD, sehingga perlu difikirkan peluang mendapatkan pembiayaan selain dari APBD, sehingga secara gradual perangkat daerah yang menggunakan sandi di Kota Batam dapat bertambah.

2.3.1.21 Urusan Kebudayaan

Berdasarkan Tabel 2.86 dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 diselenggarakan enam festival seni dan budaya, kemudian di tahun 2019 diselenggarakan delapan festival seni dan budaya, capaian kinerja tersebut mencapai target setiap tahunnya. Lebih lanjut, setiap tahun target 15 benda, situs

dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan selalu tercapai. Untuk karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 setiap tahunnya sebanyak 20 karya budaya dan selalu mencapai target tahunannya. Dalam perspektif pengembangan ekonomi pariwisata, perlu dilakukan analisis korelasi antara pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya serta karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi terhadap aktifitas ekonomi yang diperoleh masyarakat. Idealnya anggaran pemeliharaan dan pelestarian serta biaya revitalisasi dan inventarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, minimal yang berkegiatan di daerah sekitar situs atau kawasan cagar budaya. Lebih lanjut indikator kinerja urusan kebudayaan disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 86 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Target		6	6	6	8
		Realisasi		6	6	6	8
ii	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Target		15	15	15	15
		Realisasi		15	15	15	15
iii	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Target		20	20	20	20
		Realisasi		20	20	20	20

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam

KESIMPULAN

Urusan kebudayaan yang ditempatkan dalam kerangka pariwisata seyogyanya dalam perspektif kedepan perlu diarahkan agar produk dari berbagai unsur kebudayaan yang ada di Kota Batam dapat memiliki nilai tambah ekonomi khususnya bagi para penggiat dan pelestari budaya, umumnya bagi perkembangan pariwisata Kota Batam. Jika telah terbentuk *linkages* antara kebudayaan dengan produk budaya sehingga menciptakan permintaan pasar untuk menikmati produk budaya, maka kelestarian eksistensi nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan menjadi keniscayaan.

2.3.1.22 Urusan Perpustakaan

Kinerja pelayanan urusan perpustakaan diukur melalui indikator persentase pengunjung perpustakaan per tahun yang selama periode 2016-2019 memiliki capaian rendah. Pada tahun 2016 tercatat 9,76 persen penduduk usia 10-59 tahun yang mengunjungi perpustakaan di Kota Batam, kemudian meningkat tidak signifikan di tahun 2017 menjadi 10,42 persen, dalam dua tahun mengalami penurunan hingga menjadi 7 persen di tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 hanya 60.170 orang dari total penduduk usia 10-59 tahun (859.583 orang) yang berkunjung ke perpustakaan. Dalam konteks ini data kunjungan perpustakaan meliputi kunjungan di seluruh perpustakaan yang ada di Kota Batam (perpustakaan sekolah, kecamatan, perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus).

Tabel 2. 87 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun		9,76	10,42	6	7

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Batam

Selain itu, kondisi persoalan urusan perpustakaan saat ini Kota Batam antara lain belum memiliki gedung perpustakaan daerah secara mandiri, belum memiliki tenaga perpustakaan (*librarian*) kemudian fasilitas perpustakaan digital saat ini juga belum berjalan. Dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap perpustakaan, saat ini belum terpetakan secara pasti jumlah perpustakaan private maupun publik di Kota Batam, selain itu belum seluruhnya perpustakaan melaporkan jumlah kunjungan di perpustakaanya, sehingga angka kunjungan perpustakaan 7 persen per tahun belum berasal dari seluruh perpustakaan di Kota Batam.

KESIMPULAN

Pelayanan perpustakaan pada era digital saat ini seyogyanya ditunjang oleh teknologi, sehingga dalam perspektif kedepan perlu berfokus pada pengembangan perpustakaan digital, kemudian untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap seluruh perpustakaan di Kota Batam pun perlu menggunakan teknologi. Idealnya terdapat formulir elektronik berbasis aplikasi atau web dalam melakukan *updating* data jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah koleksi buku, dan lainnya.

2.3.1.23 Urusan Kearsipan

Bersarkan UU No. 43 tahun 2009 pasal 4 Kearsipan pemerintah daerah melalui Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) dalam melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kota Batam harus memperhatikan 14 Asas dalam pengelolaan arsip secara Akuntabilitas. Pemerintah Daerah Kota Batam telah menerbitkan 5 (lima) Peraturan walikota sebagai berikut:

1. Perwako yang terdiri Perwako No. 5 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah.
2. Perwako No 52 tahun 2019 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, Penyusutan Arsip, dan Pengolahan Arsip Vital
3. Perwako No. 23 tahun 2020 Jadwal Retensi Arsip
4. Perwako No. 35 Tentang Klasifikasi Arsip.
5. Perwako No 55 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Untuk penyimpanan arsip, Pemerintah Kota Batam belum melakukan penyusutan arsip, saat ini perangkat daerah melakukan penyimpanan arsip di tempat masing-masing. Lebih lanjut, indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 masih berada pada angka 50 persen. Angka tersebut berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa saat ini perangkat daerah telah memenuhi instrumen tata naskah dan penyimpanan secara baku, namun instrumen lainnya masih berproses menuju standar pengelolaan arsip berdasarkan peraturan perundangan.

Tabel 2. 88 Realisasi Indikator Kinerja Usrusan Kearsipan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	-	0	50	50	50

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Batam

KESIMPULAN

Dalam perspektif kedepan perlu dirumuskan indikator dengan definisi operasional dan rumus yang benar-benar dapat merepresentasikan kinerja pembinaan dan pelayanan urusan kearsipan pada seluruh instansi di Kota Batam. Selanjutnya terdapat tiga instrumen yang perlu dilengkapi oleh perangkat daerah di Kota Batam dalam mengelola kearsipan, yakni kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, dan kode keamanan arsip.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kota Batam merupakan salah satu Kota yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dari 223 kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan kajian teknis, pusat minapolitis di Kota Batam terletak di Pulau Galang Baru, sedangkan pada hirarki II berada pada Pulau Karas Besar dan Pulau Abang Kecil sebagai penunjang dari sarana dan prasarana sub pusat minapolitis dan hirarki III berada pada Pulau Nguan, Pulau Sembur dan Pulau Mubut laut sebagai sentra penghasil produk perikanan. Pada awalnya penerapan kawasan minapolitan di Kota Batam sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena terkendala belum adanya Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau (RZWP) Kecil dan Daerah Pesisir, namun pada tahun 2015 ini RZWP ini sedang dalam pengerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan BSPL Padang. Diharapkan dengan adanya RZWP ini nantinya program minapolitan di

Kota Batam dapat dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan produksi sektor perikanan di Kota Batam.

Jumlah produksi perikanan di Kota Batam mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 37.570,42 ton, meningkat menjadi 42.901,05 ton pada tahun 2019. Dalam hal konsumsi ikan, terjadi peningkatan konsumsi ikan per kapita di Kota Batam dari sebesar 33,05 kg perkapita di tahun 2016 menjadi 37,06 kg perkapita di tahun 2019. Nilai ini melebihi target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 36,82 kg perkapita.

Tabel 2. 89 Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan (ton)	Target		37.213,5 2	36.700,0 0	37.500,0 0	38.000,0 0
		Realisasi		37.570,4 2	39.903,9 9	40.935,3 5	42.901,0 5
2.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (persen)	Target		3%	3%	3%	3%
		Realisasi		7,23%	2,38%	2,58%	4,8%
3.	Meningkatnya Konsumsi Ikan per Kapita per Tahun (kg)	Target					36,82
		Realisasi		33,05%	34,5%	35,92%	37,06%

Sumber: BPS Kota Batam, Dinas Perikanan Kota Batam

Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebagai alat ukur kesejahteraan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100. NTN >100, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN sama dengan 100 memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. Sedangkan NTN kurang dari 100, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan

nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2019 sebesar 106,3. Meskipun memiliki NTN lebih tinggi dari 100, NTN di Kota Batam masih lebih rendah dibandingkan NTN nasional pada tahun yang sama sebesar 114,29.

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 sebesar 36.153,86 ton dan produksi Perikanan Budidaya Tahun 2019 sebesar 6.747,19. Dari produksi perikanan tersebut, produksi olahan hasil perikanan tahun 2019 sebesar 1.467,86 ton dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 90 Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan Kota Batam

No	Nama Produk	Jumlah Produksi Tahun 2018 (Ton)
1.	Bakso Ikan	487,40
2.	Ikan Asin	562,50
3.	Kerupuk Ikan, udang, sotong	50,54
4.	Sirip Hiu	19,54
5.	Valueadded Breaded Shrimp / Tempura Shrimp	84,94
6.	Abon Ikan	1,78
7.	Ikan Salai	12,70
8.	Tulang Ikan hiu	4,21
9	Bandeng Presto	1,64
10	Dried Shrimp Shell Meal	180,74
11	Nugget ikan	2,05
12	Gelembung Renang ikan	0,86
13	Teripang kering	2,70
14	Otak-otak	33,01
15	Empek-empek	23,25
	Jumlah	1.467,86

Sumber: Dinas Perikanan Kota Batam

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kinerja urusan kelautan dan perikanan menunjukkan hasil yang memuaskan baik dari tren peningkatannya maupun pencapaian target. Ketiga indikator menunjukkan pencapaian yang melebihi target serta tren kinerja yang meningkat. Meski demikian, berdasarkan data nilai tukar nelayan, kesejahteraan nelayan di Kota Batam masih perlu ditingkatkan karena nilainya masih cukup jauh dari nilai NTN nasional sedangkan Kota Batam merupakan wilayah yang memiliki garis pantai cukup panjang dibandingkan luas wilayahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas nelayan dan meningkatkan nilai tambah produk-produk perikanan.

2.3.2.2 Urusan Pariwisata

Kota Batam merupakan salah satu kota destinasi wisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau, nasional bahkan internasional. Kota Batam menempati urutan ke 3 dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak setelah Bali dan Jakarta. Dalam pengembangan sektor pariwisata, indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sementara itu, jika realisasi wisman dibandingkan dengan target tahunan, maka hanya tahun 2018 dan 2019 yang melampaui target, tahun 2018 target wisman tercatat 1.811.243 dengan realisasi 1.887.284, pada tahun 2019 target wisman tercatat 1.919.917 dengan realisasi 1.947.943.

Namun demikian, jika diamati lebih jauh, persentase peningkatan kunjungan wisman mengalami penurunan 3,22% di tahun 2019, dari 20,61% di tahun 2018. Turunnya persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2019 dikarenakan beberapa alasan, antara lain:

1. Kondisi geo-strategis Kota Batam yang sangat terkait dan tergantung dengan situasi dan kondisi global khususnya dalam kepariwisataan yang sejak tahun 2018 sudah mengalami turbelensi dengan keterpurukan ekonomi global seperti perang dagang Amerika dan China.
2. Kebijakan Nasional yang menetapkan penerapan VOA (*Visa on Arrival*). memberikan peluang yang sama dan kemudahan bagi wisatawan mancanegara untuk mencari variasi kunjungan ke daerah lain di luar Kota Batam.

Lebih lanjut indikator lama kunjungan wisatawan (*length of stay*) yang selalu mencapai target kecuali pada tahun 2016 dan menunjukkan tren yang meningkat dari 1,9 hari di tahun 2015 menjadi 3,22 hari di tahun 2019.

Tabel 2. 91 Indikator Urusan Pariwisata

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	Target	1.545.818	1.612.000	1.708.720	1.811.243	1.919.917
		Realisasi	1.545.818	1.432.472	1.564.717	1.887.284	1.947.943
2.	Length of Stay (Rata-rata Lama Menginap di hotel/jasa akomodasi) (hari)	Target	1,9	1,93	1,97	2,01	2,05
		Realisasi	1,9	1,73	2,07	2,80	3,22
3.	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Target	(perlu target 2014)	6,61	11,66	5,56	5,26
		Realisasi	6,31	-7,33	9,23	20,61	3,22
4.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (persen)	Target		18,03	18,60	18,04	17,45
		Realisasi		18,03	18,60	18,04	24,34

Sumber: BPS Kota Batam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Tren peningkatan kunjungan wisatawan disertai dengan meningkatnya lama kunjungan berimplikasi terhadap naiknya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2016 tercatat sebesar 18,03 persen dan meningkat menjadi 18,60 persen di tahun 2017, sedikit turun menjadi 18,04 persen di tahun 2018 dan meningkat secara signifikan menjadi 24,34 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sektor pariwisata di Kota Batam menyumbang 24,34% pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Batam.

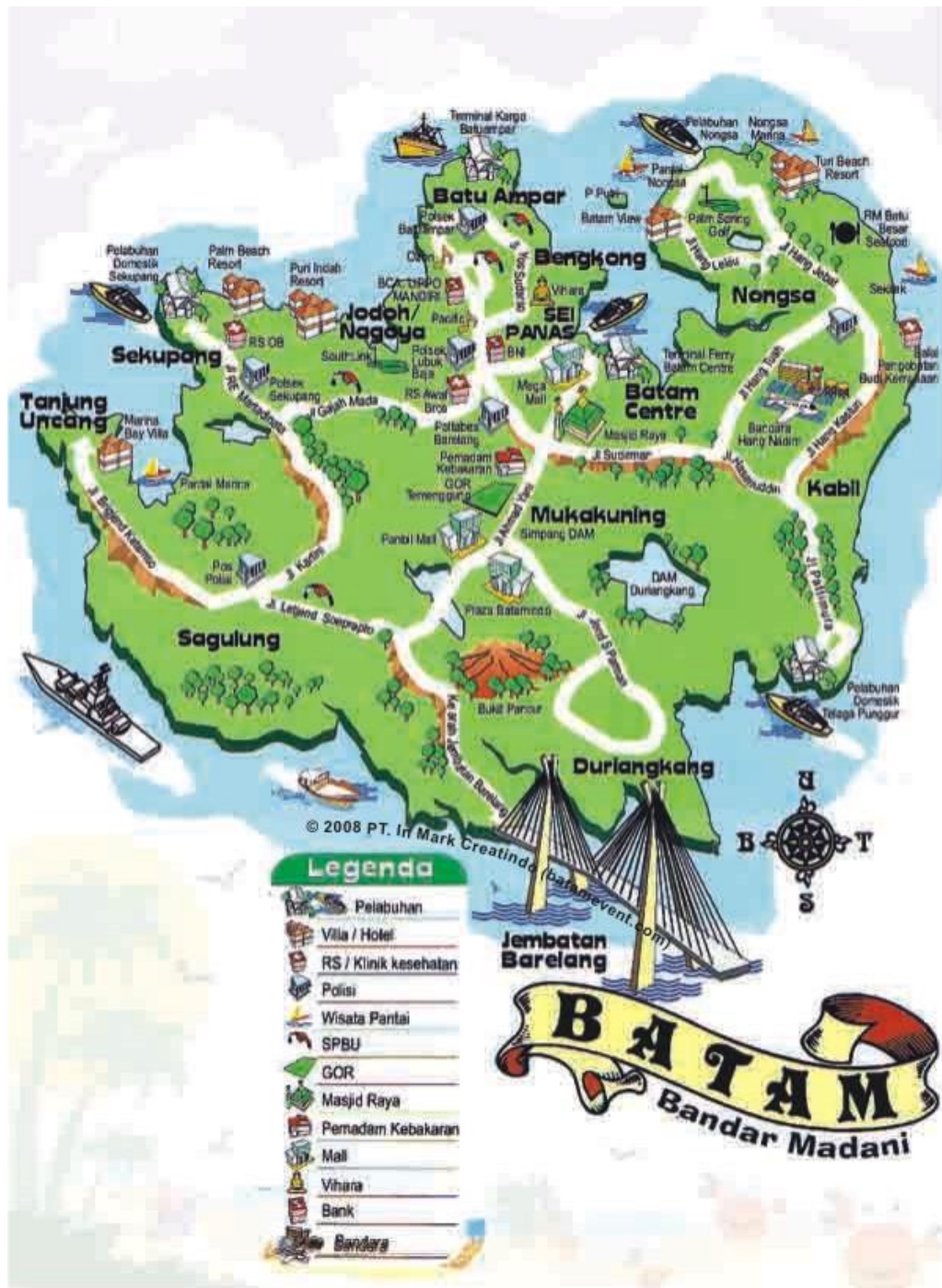
Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 87 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun, sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi unggulan yang harus dikembangkan secara sinergis dan berkelanjutan untuk pengembangan perekonomian kawasan. Di dalam RPJMN

Tahun 2020-2024, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang dijadikan tumpuan untuk membawa Indonesia menuju negara dengan pendapatan menengah-tinggi dan Kota Batam menjadi salah satu dari 11 destinasi wisata potensial yang akan dikuatkan bersama dengan Kabupaten Bintan. Penguatan destinasi wisata potensial tersebut dilakukan untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan pengeluaran wisatawan melalui perbaikan aksesibilitas, amenities dan atraksi di destinasi-destinasi wisata yang ditentukan.

Sektor pariwisata harus dipandang sebagai sektor yang berfungsi menjadi katalisator pembangunan (*agent of development*) yang berkontribusi terhadap proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas. Sektor pariwisata di Kota Batam ini tumbuh antara lain karena efek multiplier dari posisi Kota Batam sebagai daerah industri sehingga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata terutama sebagai kota wisata konvesi atau MICE. Meski demikian, destinasi wisata lain selain MICE yang ada di Kota Batam tetap harus dioptimalkan terutama untuk mengoptimalkan aksesibilitas Kota Batam yang sudah cukup baik dengan meningkatkan amenities dan atraksi wisata lain yang ada di Kota Batam.

Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan. Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain. Sedangkan Atraksi wisata adalah

seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata. Berikut ini merupakan peta wisata Kota Batam.



Gambar 2. 75 Peta Wisata Kota Batam

Sumber: arsipskpd.batam.go.id

Pengembangan pariwisata Kota Batam dapat difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata di Kota Batam dengan fokus wisata dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berikut:

1. Wisata Religi

Sebagai Kota heterogen, penduduk Batam memeluk berbagai agama, karena itulah Batam memiliki banyak tempat ibadah yang mewakili dari tiap aliran agama yang ada dan diakui di Indonesia.

2. Wisata Warisan Budaya

Batam merupakan bagian dari Kesultanan Riau Lingga, sehingga banyak peninggalan warisan budaya di kota Batam. Sebut saja “Rumah Limas Potong” yang merupakan Rumah Tradisional Melayu Asli di Nongsa. Kemudian ada juga makam Zuriat Nong Isa, dimana Nong Isa atau juga disebut Raja Isa bin Raja Ali merupakan salah satu penguasa yang pertama yang ada di Pulau Batam. Sekitar 1829, Nong Isa mendapatkan sebuah mandat dari Sultan Riau dan juga diberikan perintah oleh Muda Riau VI agar memerintah pada kawasan Nongsa dan juga wilayah sekitarnya. Surat mandat yang diberikan kepada Nong Isa tersebut dikeluarkan pada 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah atau tahun masehinya jatuh pada 18 Desember 1829. Tanggal tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Kota Batam.

3. Wisata Kuliner

Dengan lokasi Batam yang berada di kepulauan, banyak pilihan menu seafood segar yang menggugah selera.

4. Wisata Mice

Sebagai daerah perbatasan, banyak aktivitas MICE dilaksanakan di Batam. Ratusan amenities tersedia untuk kebutuhan pertemuan, seperti Ballroom dengan kapasitas hingga ribuan orang dan tersebar di berbagai hotel bintang berkelas di Batam.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kinerja pariwisata di Kota Batam menunjukkan tren yang positif meskipun terdapat beberapa kali tidak mencapai target. Meski demikian, kinerja pariwisata di Kota Batam perlu ditingkatkan karena sektor pariwisata merupakan salah satu fokus unggulan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Peningkatan kinerja sektor pariwisata dapat dilakukan dengan penguatan aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata terutama pada wisata selain MICE seperti wisata religi, budaya, dan kuliner.

2.3.2.3 Urusan Pertanian

Meskipun Kota Batam bukan merupakan wilayah pertanian, namun terdapat beberapa kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian palawija dan perkebunan. Dalam urusan pertanian, indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi pertanian dan peternakan. Produksi pertanian dan peternakan di Kota Batam meskipun menunjukkan hasil yang fluktuatif secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Produksi pertanian dan peternakan pada tahun 2017 menghasilkan 63.524 ton yang meningkat menjadi 68.403 ton pada tahun 2018. Produksi pertanian dan peternakan sempat mengalami penurunan menjadi 60.313 ton pada tahun 2018 sebelum kemudian meningkat menjadi 67.446 ton pada tahun 2019. Meskipun mengalami peningkatan, apabila capaian ini dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 dan 2019, capaian pada kedua tahun tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Indikator berikutnya, persentase peningkatan produksi pertanian menunjukkan hasil yang fluktuatif antara -13 persen hingga 10 persen sepanjang periode tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, produksi pertanian mengalami penurunan sebesar -1,05 persen. Persentase peningkatan produksi pertanian mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 4,24 persen. Produksi pertanian mengalami penurunan sebesar -13 persen di tahun 2018 dan kemudian meningkat menjadi 10 persen di tahun 2019. Dari sisi pencapaian target selama empat tahun, target peningkatan produksi pertanian tercapai hanya di tahun 2017 dan 2019.

Berbeda dengan persentase peningkatan produksi pertanian, peningkatan produksi peternakan di Kota Batam terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, persentase peningkatan produksi peternakan di Kota Batam tercatat sebesar 0,52 persen yang meningkat menjadi 5,56 persen di tahun 2017. Terjadi peningkatan pada tahun berikutnya sebesar 7,2 persen di tahun 2018 dan sebesar 0,9 persen di tahun 2019. Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 6 persen dan 8 persen, pada kedua tahun tersebut, persentase peningkatan produksi peternakan di Kota Batam mengalami peningkatan.

Indikator lain dalam urusan pertanian adalah persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan. Besaran persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan di Kota Batam menunjukkan hasil yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016, persentase cakupan pelayanan hewan di Kota Batam tercatat sebesar 0,6 persen yang mana nilai ini tumbuh menjadi 0,7 persen di tahun 2017 dan tumbuh lagi menjadi 0,94 persen di tahun 2018. Meski demikian, pada tahun 2019 persentase cakupan pelayanan kesehatan hewan di Kota Batam turun menjadi 0,43 persen. Selain menunjukkan penurunan, apabila dibandingkan dengan target persentase cakupan pelayanan kesehatan, capaian indikator ini selalu berada target yang ditetapkan masing-masing sebesar 5,3 persen di tahun 2016, 1,1 persen di tahun 2017, 0,8 persen di tahun 2019 dan 0,9 persen di tahun 2019. Secara lebih lengkap, realisasi indikator kinerja urusan pertanian dari tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 92 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2019

No.	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Produksi Pertanian dan Peternakan (ton)	Target	-	-	-	66.530	68.954
		Realisasi	-	63.524	68.403	60.313	67.446
2.	Presentase peningkatan	Target	-	1,12%	1,99%	2%	2%
		Realisasi	-	-1,05%	4,24%	-13%	10%

No.	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	produksi Pertanian						
3.	Presentase peningkatan produksi Peternakan	Target	-	-	-	6%	8%
		Realisasi	-	0,52%	5,56%	7,2%	15,5%
4.	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan	Target	-	5,30%	1,1%	0,8%	0,9%
		Realisasi	-	0,6%	0,7%	0,94%	0,43%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Dari sisi ketersediaan dan kebutuhan pangan, Kota Batam yang pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa dengan ketersediaan beras sebesar 108,46 kg per kapita memiliki ketersediaan beras sebanyak 144.225 ton. Dibandingkan dengan kebutuhan perkapita beras sebesar 105,94 kg dan total kebutuhan sebesar 140.872, Kota Batam memiliki surplus beras sebesar 3.354 ton di tahun 2019.

Tabel 2. 93 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kota Batam Tahun 2019

Komoditi Pangan	Jumlah Penduduk 2019	Ketersediaan (Kg/kapita)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Kg/kapita)	Kebutuhan (Ton)	Surplus/Defisit (Ton)
2	3	4	5	6	7	8 = (5-7)
Beras	1.329.773	108,46	144.225	105,94	140.872	3.354

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batam, kontribusi sektor pertanian selalu menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar 1.210 miliar rupiah yang meningkat menjadi 1.289 miliar rupiah di tahun 2016, 1.379 miliar rupiah di tahun 2017, 1.479 miliar rupiah di tahun 2018 dan 1.617 miliar rupiah di tahun 2019. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHK pada

tahun 2015 sebesar 956 miliar rupiah pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 990 miliar rupiah di tahun 2016, 1.024 miliar rupiah di tahun 2018, 1.052 miliar rupiah di tahun 2018 dan 1.119 miliar rupiah di tahun 2019. Data kontribusi ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi kuantitas ton produksi mengalami fluktuasi, dari sisi nilainya sektor pertanian tetap menunjukkan perkembangan positif di Kota Batam.

Tabel 2. 94 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

No	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7
i	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	ADHB	1.210	1.289	1.379	1.479	1.617
		ADHK	956	990	1.024	1.052	1.119
iii	Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian		6.418				

Sumber: BPS dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam

Pengembangan sektor pertanian di daerah yang didominasi wilayah industri dan perkotaan memiliki tantangan tersendiri begitu pula dengan Kota Batam. Fluktuatifnya produksi perikanan dan peternakan di Kota Batam salah satunya adalah terkait dengan faktor ketersediaan lahan pertanian. Saat ini banyak lahan pertanian yang digunakan bukan lah lahan yang secara spesifik diperuntukkan untuk pertanian sehingga memiliki kemungkinan cukup tinggi atas terjadinya alih fungsi lahan tersebut. Hal ini mengakibatkan luas lahan pertanian produktif yang ada di Kota Batam menjadi fluktuatif dan begitu pula dengan produksinya. Selain itu, petani yang ada saat ini masih didominasi oleh petani gurem yang memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasaran pertanian serta daya tawar terhadap tengkulak.

Pada kondisi daerah seperti Kota Batam, untuk meningkatkan kedaulatan pangan adalah dengan melakukan intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian ini dapat menjadi pilihan pada saat ekstensifikasi pertanian yang membutuhkan banyak lahan sulit untuk dilakukan. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang

sudah ada. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani, yang kemudian dilanjutkan dengan program Sapta Usaha Tani. Sapta usaha tani yang dapat dilakukan antara lain adalah pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan yang tepat, pengendalian hama penyakit, pengairan atau irigasi yang baik, penanganan pasca panen, dan pemasaran hasil pertanian. Untuk mendukung sapta usaha tani tersebut, pengoptimalan kawasan pertanian terpadu yang ada perlu ditingkatkan. Selain itu kelompok tani yang ada juga perlu dioptimalkan baik dalam bentuk penyuluhan maupun dalam menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian untuk mendorong peningkatan produksi pertanian yang ada di Kota Batam.

KESIMPULAN

Meskipun secara nilai, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Batam menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari sisi kuantitas produksi pertanian di Kota Batam mengalami beberapa hambatan dalam upaya untuk menciptakan kedaulatan pangan salah satunya adalah keterbatasan lahan. Perlu upaya intensifikasi pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Batam sehingga dapat meningkatkan kedaulatan pangan untuk mendukung kemandirian daerah.

2.3.2.4 Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan di Kota Batam melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator jumlah PKL yang dibina menunjukkan bahwa setiap tahun telah melebihi target. Target 2016 sebanyak 100 PKL dalam realisasi 2016 tercapai sebanyak 1.298 PKL. Sedangkan target 2017 masih seperti tahun 2016 yaitu sebanyak 100 PKL dan realisasinya pada tahun 2017 mencapai sebanyak 1.532 PKL. Target tahun 2018 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1.166 PKL. Target tahun 2019 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.177 PKL. Pembinaan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pembinaan tera ulang untuk PKL sehingga jumlahnya lebih besar dari target. Jadi dalam indikator program jumlah PKL yang dibina dari tahun 2018 – 2019 telah melebihi target.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan adalah memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok. Target tahun 2016 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2016 sebesar 70%. Target tahun 2017 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2017 sebesar 75%. Target 2018 sebesar 70% dengan realisasi sebesar 83,09%. Target tahun 2019 yaitu sebesar 75% dan realisasinya mencapai 2019 sebesar 83,09 % seperti pada realisasi tahun sebelumnya. Indikator memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok menunjukkan status melebihi target. Pada indikator lainnya yaitu persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, berdasarkan realisasi tahun 2016 – 2019 persentase indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi tahun 2016 sebesar 18%, meningkat menjadi 24% pada realisasi tahun 2017, meningkat kembali menjadi 35% dalam tahun 2018, dan pada realisasi tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 59%.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan di Kota Batam adalah persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi tahun 2016 sebesar 18,43%, realisasi tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 6,37%, namun realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7.36%. Indikator yang terakhir adalah jumlah UTTP bertanda tera sah, realisasi tahun 2016 menunjukkan jumlah UPTTP sebanyak 13.122. Pada realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 17.605, jumlah UTTP dalam realisasi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 15.980.

Tabel 2. 95 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2019

No.	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah PKL yang dibina	Target	n/a	100	100	100	100
		Realisasi	n/a	1.298	1.531	1.166	1.177
2.	Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok	Target	n/a	65	65	70	75
		Realisasi	n/a	70	75	95,71	83,09
3.		Target	n/a	18%	24%	35%	59%

No.	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	Realisasi	n/a	18%	24%	35%	59%
4.	Persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan	Target	n/a	18%	19%	20%	22,62
		Realisasi	n/a	18,43	6,37	7,36	22.62
5.	Jumlah UTTP bertanda tera sah	Target	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
		Realisasi	8.313	13.122	17.605	15.980	15.357

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar ketiga bagi perekonomian Kota Batam setelah sektor industri dan konstruksi. Kontribusi sektor perdagangan selalu menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada PDRB ADHB sektor perdagangan tumbuh dari 7,33 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 11,03 triliun rupiah di tahun 2019. Sedangkan pada PDRB ADHK tahun 2010, sektor perdagangan mencatatkan nilai 5,76 triliun rupiah di tahun 2015 dan tumbuh menjadi 7,12 triliun rupiah di tahun 2019. Meski demikian, terdapat tren yang menurun pada kinerja ekspor Kota Batam yang meskipun mencapai puncak pada tahun 2018 sebesar 9,5 juta US Dollar, mengalami penurunan dari 9,17 juta US Dollar di tahun 2015 menjadi 8,78 juta US Dollar di tahun 2019.

Tabel 2. 96 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

Indikator		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	ADHB	7.332.143.49	8.137.122.80	8.929.540.07	10.125.672.19	11.034.232.62
	ADHK	5.760.304.08	6.141.980.40	6.374.988.23	6.816.434.37	7.123.698.99
Ekspor Kota Batam (Juta USD)		9.166.83	8.412.17	8.708.70	9.507.43	8.775.38

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

KESIMPULAN

Secara umum, kinerja urusan perdagangan menunjukkan kinerja dengan tren meningkat dan mencapai target pada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam urusan perdagangan. Selain itu, kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Batam juga terus meningkat.

Meski demikian, perlu dicermati adanya penurunan kinerja ekspor di Kota Batam. Saat ini, tujuan ekspor Kota Batam masih sangat didominasi oleh ekspor ke Singapura disusul oleh Amerika Serikat dengan komoditas paling besar adalah bahan bakar mineral disusul oleh Minyak dan lemak hewan/Nabati. Diversifikasi negara tujuan dan komoditas ekspor akan dapat meningkatkan kestabilan kinerja ekspor apabila terjadi fluktuasi kondisi perekonomian global.

2.3.2.5 Urusan Perindustrian

Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kota Batam, yang pertama yaitu indikator jumlah sentra industri yang dibentuk. Dalam target jumlah sentra industri yang dibentuk dari tahun 2017 hingga 2019 target yang ditetapkan sebanyak 1 sentra industri yang dibentuk setiap tahunnya. Meski demikian, pada realisasinya, dari tahun 2017 hingga 2019 belum ada sentra industri yang berhasil dibentuk. Jumlah sentra industri yang dibentuk tidak tercapai karena pada praktiknya, pelaksanaan lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM yang akan ditempatkan pada sentra industri. Untuk membentuk sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang dapat memenuhi standar.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri kecil menengah. Realisasi persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Dalam realisasi tahun 2016 pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 41,62%, pada realisasi tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 41,75%. Pertumbuhan industri kecil dan menengah dalam realisasi tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 16,7% dan di tahun 2019 realisasi mengalami penurunan kembali menjadi 11,82%.

Sebagai kota industri, perekonomian Kota Batam bertumpu pada kinerja sektor industri. Kinerja di sektor industri akan memberikan *multiplier effect* kepada sektor lain sehingga menggerakkan perekonomian bagi seluruh Batam.

Berdasarkan data kontribusi sektoral, nilai sektor industri di Kota Batam selalu menunjukkan nilai yang meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 baik dari PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun dasar 2010. Pada PDRB ADHB sektor industri Kota Batam, pada tahun 2015 mencatatkan kinerja sebesar 67,7 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 89,03 triliun rupiah di tahun 2019.

Tabel 2. 97 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Tahun 2015-2019

Indikator		Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB (Juta Rupiah)	ADHB	67.730.980	72.303.679	75.340.147	81.309.771	89.033.272
	ADHK	50.220.332	52.548.433	53.433.484	55.303.168	59.176.665

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Indikator kinerja urusan perindustrian yang lainnya adalah jumlah sektor industri yang dibentuk. Dari target sebesar 1 sentra industri setiap tahun, dari tahun 2015 hingga 2019 belum terdapat sentra industri yang terbentuk karena kurang siapnya IKM yang akan dijadikan tumpuan sentra industri tersebut. Di sisi lain, persentase pertumbuhan IKM di Kota Batam juga terus turun meskipun masih menunjukkan pertumbuhan. Persentase pertumbuhan IKM di tahun 2015 sebesar 41,62 persen turun menjadi 8,69 persen di tahun 2019.

Tabel 2. 98 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2019

No.	Indikator		Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah sentra industri yang dibentuk	Target	n/a	1	1	1	1
		Realisasi	n/a	0	0	0	0
2.	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	Target	n/a	41,62	41,75	16,7	10,5
		Realisasi	n/a	41,62	41,75	16,7	8,69

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Data lebih detail terkait dengan jumlah IKM di Kota Batam menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 terdapat 133 IKM dengan investasi sebesar 1,40 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja sebesar 384 orang. Pada tahun 2016, jumlah IKM mengalami penurunan menjadi 133 IKM dengan investasi sebesar 14,52 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja sebesar 492 orang. Pada tahun 2017 terdapat 116 IKM dengan investasi sebesar 10,71 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja sebesar 715 orang. Pada tahun 2018 terdapat 156 IKM dengan investasi sebesar 2,08 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja sebesar 232 orang. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat 44 IKM dengan investasi sebesar 2,03 milyar rupiah dan jumlah tenaga kerja sebesar 92 orang.

Secara total, IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM di bidang pangan disusul oleh IKM di bidang kerajinan dan IKM di bidang aneka industri masing-masing sebesar 312, 175, dan 61 IKM.

Tabel 2. 99 Jumlah IKM di Kota Batam berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019

TAHUN	Jenis Usaha Industri	Jumlah IKM	Investrasi (Rp)	Jumlah Naker
2015	Pangan	95	1,253,375,000.00	291
	Aneka Industri	9	25,200,000.00	15
	Kerajinan	29	124,200,000.00	78
	Total	133	1,402,775,000.00	384
2016	Pangan	81	4,323,800,000.00	455
	Aneka Industri	10	116,000,000.00	11
	Kerajinan	8	79,000,000.00	26
	Total	99	4,518,800,000.00	492
2017	Pangan	75	10,547,000,000.00	620
	Aneka Industri	18	108,500,000.00	54
	Kerajinan	23	53,540,000.00	41
	Total	116	10,709,040,000.00	715
2018	Pangan	40	760,000,000.00	80
	Aneka Industri	22	342,000,000.00	42
	Kerajinan	94	979,000,000.00	110

TAHUN	Jenis Usaha Industri	Jumlah IKM	Investrasi (Rp)	Jumlah Naker
	Total	156	2,081,000,000.00	232
2019	Pangan	21	1,903,695,000.00	65
	Aneka Industri	2	22,500,000.00	2
	Kerajinan	21	105,000,000.00	25
	Total	44	2,031,195,000.00	92
TOTAL 2015 - 2019	Pangan	312	18,787,870,000.00	1511
	Aneka Industri	61	614,200,000.00	124
	Kerajinan	175	1,340,740,000.00	280
		548	20,742,810,000.00	1915

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Pada IKM-IKM yang ada, juga dilakukan pembinaan dengan jumlah pembinaan setiap tahunnya mengalami fluktuatif menyesuaikan dengan jumlah IKM yang ada.

Tabel 2. 100 Jumlah IKM di Kota Batam berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					TOTAL
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah Pembinaan IKM	213	247	315	117	132	1,024

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Sebagai kota industri dengan lahan yang terbatas, sektor industri menjadi sektor vital dalam perekonomian. Di satu sisi, sektor IKM dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong pemerataan pendapatan masyarakat karena cenderung lebih padat karya dibandingkan sektor industri besar. Berdasarkan data yang ada, sektor IKM masih terfokus pada IKM pangan dan kerajinan, hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam.

Untuk dapat mendorong keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri dibutuhkan peningkatan daya saing IKM agar dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi pemasok dalam rantai pasok industri antara lain dalam hal standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi.

KESIMPULAN

Kinerja urusan perindustrian masih kurang baik apabila dilihat dari pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada indikator jumlah sentra industri, kinerja tidak tercapai karena masih harus menyiapkan industri yang akan dibentuk menjadi sentra industri. Sedangkan pertumbuhan industri kecil dan menengah justru mengalami penurunan. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kinerja perindustrian terutama pada IKM yang ada di Kota Batam.

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Urusan Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan Spasial dan A-spasial pada intinya merupakan suatu sistem yang meliputi penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan, monitoring evaluasi perumusan serta implementasi kebijakan, dan monitoring evaluasi hasil kinerja pembangunan. Secara umum indikator kinerja urusan perencanaan selama periode 2015-2019 menunjukkan hasil yang positif.

Implementasi pendekatan perencanaan partisipatif di Kota Batam yang ditunjukkan dengan indikator Persentase Keterlibatan Publik dalam Proses Musrenbang tahunan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2017 sebesar 53,59 persen, menjadi 87 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepedulian penduduk terhadap kualitas program dan kegiatan pembangunan melalui penyaluran aspirasi usulan saat musyawarah perencanaan pembangunan.

Sementara itu implementasi kebijakan RPJMD ke dalam RKPD yang diukur dengan indikator Penjabaran Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD yang selama tahun 2016-2019 mencapai realisasi 100 persen. Untuk implementasi kebijakan RKPD ke dalam APBD selama 2016-2019 memiliki capaian yang sama yakni 100 persen. Hal yang penting diperhatikan pada proses penjabaran RKPD ke APBD adalah bahwa nomenklatur kegiatan serta target output RKPD perlu dijabarkan dalam KUA PPAS hingga APBD, adapun jika terdapat penambahan kegiatan diluar yang tercantum dalam RKPD, maka legalitas hal tersebut

memerlukan berita acara kesepakatan antara Walikota dengan Ketua DPRD (Pasal 343 Permendagri 86/2017).

Selanjutnya dalam hal penyediaan data dan informasi pembangunan yang tepat waktu selama tahun 2016-2019 mencapai capaian 100 persen. Dalam konteks ini yang penting menjadi fokus penyempurnaan adalah kualitas/validitas dan kemudahan mengakses serta mengolah data dan informasi tersebut. Dengan mempertimbangkan pendeknya jangka waktu perencanaan kebijakan dan anggaran tahunan, musrenbang tahunan, evaluasi triwulanan, evaluasi tahunan dan rangkaian kegiatan lainnya dalam kalender perencanaan yang baku, maka kebutuhan kecepatan dan ketepatan ketersediaan data informasi pembangunan mutlak diperlukan. Sehingga penyempurnaan sistem data dan informasi menjadi pintu masuk bagi terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Dalam hal keberhasilan pencapaian target pembangunan yang diukur dengan indikator Persentase Indikator Kinerja sasaran Daerah dalam RPJMD yang mencapai Target, selama tahun 2016-2019 belum menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2016 hanya 51 persen sasaran pembangunan yang mencapai target, kemudian meningkat menjadi 67 persen pada tahun 2017 dan 2018, kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 70 persen. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa berdasarkan peraturan perundangan indikator sasaran daerah merupakan indikator agregat atau komposit yang dihasilkan dari kumpulan indikator-indikator program, sementara indikator program merupakan indikator agregat atau komposit yang dihasilkan dari kumpulan indikator-indikator kegiatan. Sehingga jika persentase pencapaian indikator sasaran daerah hanya 70 persen, dapat dimaknai bahwa terdapat lebih dari 30 persen indikator program yang tidak mencapai target, serta terdapat lebih dari 30 persen indikator kegiatan yang tidak mencapai target. Namun demikian dapat pula terjadi pencapaian indikator sasaran daerah tidak berkorelasi dengan pencapaian indikator program, artinya indikator program tidak berkontribusi terhadap indikator sasaran daerah atau

indikator sasaran daerah tidak bisa menjadi ukuran keberhasilan bagi pencapaian kumpulan indikator-indikator program. Penyebab tersebut dapat diketahui secara akurat ketika terdapat analisis evaluasi kinerja di seluruh level indikator. Sehingga idealnya proses monitoring dan evaluasi dapat menjangkau permasalahan yang lebih dalam dari implementasi suatu kebijakan pemerintah.

Tabel 2. 101 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan	n.a	53,59	86,71	87
2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100
3.	Penjabaran konsistensi Program di RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100
4.	Persentase ketersediaan data/informasi yang tepat waktu	100	100	100	100
5.	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	51	67	67	70
6.	Persentase Jumlah Program yang tidak Terlaksana	n.a	n.a	n.a	n.a
7.	Persentase Jumlah Kegiatan yang tidak Terlaksana	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

KESIMPULAN

Salah satu permasalahan utama urusan perencanaan adalah belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi, hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan hulu dari proses perencanaan, dimana hasil monitoring dan evaluasi akan menyediakan landasan bagi perumusan kebijakan dalam kerangka *evidence based policy*.

Monitoring dan evaluasi juga berfungsi sebagai langkah mitigasi bagi pencapaian-pencapaian sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah. Persentase pencapaian sasaran daerah sebesar 70 persen dapat dihindari jika rangkaian monitoring dan evaluasi sejak triwulanan, tahunan hingga evaluasi tengah periode pada seluruh jenjang dokumen perencanaan dilaksanakan secara optimal dan hasil evaluasi segera ditindaklanjuti. Sebagai contoh, evaluasi triwulanan RKPD merupakan landasan mutlak dalam penyusunan RKPD, sehingga kegiatan/target yang diketahui tidak berkinerja baik berdasarkan evaluasi triwulanan, segera diketahui dan ditindaklanjuti untuk tidak terjadi lagi pada pelaksanaan RKPD tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi hasil kinerja pada hakikatnya bukan hanya sekedar mengetahui capaian indikator (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah), namun juga perlu mengungkapkan penyebab dari capaian tersebut, untuk kemudian menyiapkan upaya tindak lanjut penyempurnaan.

Bapelitbangda Kota Batam sebagai leading sektor perencanaan pembangunan perlu memperkuat fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah lainnya agar dapat tercipta perencanaan yang berkualitas dengan implementasi yang prima.

2.3.3.2 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan inovasi daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

(a) peningkatan pelayanan publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 387 dijelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintah daerah mengacu pada prinsip :

(a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f)

dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pada periode Tahun 2015-2019 urusan penelitian dan pengembangan di Kota Batam belum dapat dimaknai pelaksanaannya dikarenakan keterbatasan data dan informasi yang dapat merepresentasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Dalam perspektif kedepan Kota Batam perlu terus menstimulasi proses penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2. 102 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Litbang Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	n.a	n.a	100	0	4

Sumber: Bapelitbangda Kota Batam

2.3.3.3 Urusan Keuangan

Fungsi penunjang urusan keuangan dalam kebijakan yang terkait otonomi daerah pada hakikatnya ditunjukkan untuk menilai kinerja di bidang keuangan dalam konteks sebagai fungsi penunjang urusan yang dijalan oleh 2 OPD, yaitu BPKAD dan BP2RD. Evaluasi dan proyeksi terhadap kinerja keuangan daerah sendiri disajikan dalam Bab tersendiri, yaitu di Bab III. Kinerja urusan keuangan menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah selama ini dijalankan. Kualitas ini dapat menggambarkan secara umum proses pengelolaan keuangan daerah. Berikut data perkembangan urusan keuangan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 103 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pertumbuhan SILPA	-82.26%	181.72%	-50.61%	-32.55%	-20.31%

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)	2.20%	6.27%	2.96%	1.86%	1.40%
	Persentase SILPA terhadap Total Penerimaan Daerah	2.15%	5.90%	2.87%	1.83%	1.38%
4	Persentase Belanja Pendidikan	27.38%	27.94%	23.55%	22.59%	27.38%
	Belanja Pendidikan	589,881,642,631	594,438,274,942	524,115,939,021	537,968,227,503	589,839,319,983
5	Persentase Belanja Kesehatan	14.29%	14.80%	13.28%	12.86%	20.40%
	Belanja Kesehatan	307,744,161,646	314,834,574,219	295,427,852,635	306,229,368,843	439,523,386,580
6	Persentase Belanja Langsung	63.23%	62.98%	64.33%	61.46%	61.60%
7	Persentase Belanja Tidak Langsung	36.77%	37.02%	35.67%	38.54%	38.40%
8	Persentase Belanja Bagi	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Hasil ke Desa					
9	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	tepat	tidak tepat	tidak tepat	tepat	tepat
	Tanggal Penetapan	30 Desember 2014	29 Januari 2016	27 Januari 2017	22 Desember 2017	28 Desember 2018
10	Peningkatan Pelayanan BLUD Dana Bergulir Kota Batam (%)	NA	100	100	100	100

Sumber: BPKAD Kota Batam

Secara keseluruhan kualitas proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Batam sudah baik, dengan didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam dari BPK RI selama 5 tahun terakhir. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Batam telah berjalan transparan dan akuntabel.

Jika dilihat dari aspek pengelolaan anggaran yang tertuang dalam APBD, terdapat 2 kinerja yang perlu mendapatkan sorotan, yaitu masih terjadinya keterlambatan dalam penetapan APBD dan semakin menurunnya pertumbuhan SILPA. Keterlambatan dalam penetapan APBD dapat berdampak pada keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan tahun berjalan karena adanya APBD tidak dapat berjalan tepat pada 2 Januari. Keterlambatan pada 2 tahun anggaran tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan DAK dan penyelesaian lahan sehingga masih perlu adanya penyesuaian atas rancangan APBD tahun berikutnya. Selain itu juga, masih adanya ketidakcermatan dalam perkiraan target pendapatan daerah menyebabkan harus adanya anggaran

kegiatan yang masih harus direalisasikan pada tahun berikutnya dan harus dianggarkan pada rancangan APBD tahun berikutnya. Begitu juga, adanya fenomena penurunan pertumbuhan SILPA menunjukkan semakin besarnya kebutuhan anggaran belanja yang menuntut adanya kenaikan realisasi pendapatan daerah. Di masa mendatang, penting bagi Pemerintah Kota Batam untuk lebih cermat dalam memperkirakan target penerimaan daerah sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya dan perlu untuk melakukan kajian yang mendalam terkait potensi daerah.

2.3.3.4 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan Tabel 2.104 dapat diketahui kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Secara umum indikator kinerja masuk dalam kategori realisasi rendah, karena dalam implementasinya hanya menggunakan sumber anggaran APBD yang sangat terbatas. Untuk indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (tugas belajar untuk peningkatan karir) selama tahun 2016-2019 masih < 1 persen. Selanjutnya persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (diklat Pim) selama tahun 2017-2019 masih < 1 persen. Sementara indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pada tahun 2019 terealisasi sebesar 8,79 persen. Untuk persentase ASN yang mengikuti program minat dan bakat di tahun 2019 terealisasi 2,44 persen. Adapun indikator pelanggaran pegawai di tahun 2019 sebesar 0,22 persen. Selanjutnya untuk indikator persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian sejak tahun 2018 hingga 2019 telah mencapai realisasi 91 persen.

Dalam perspektif periode selanjutnya perlu difikirkan untuk memanfaatkan peluang-peluang peningkatan kompetensi pegawai (diklat/tugas belajar, dst) menggunakan anggaran APBN. Dalam kerangka mempersiapkan perampingan organisasi sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo bahwa struktur organisasi instansi pemerintah perlu disederhanakan (tepat struktur kaya fungsi), maka

pelatihan-pelatihan terhadap pegawai fungsional menjadi fokus dalam peningkatan kompetensi pegawai.

Tabel 2. 104 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian		87,1	88,35	91,05	91,76
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		0,03	0,08	0,08	0,12
3	Persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		n.a	0,73	0,55	0,90
4	Persen ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional		n.a	6,3	6,35	8,79
5	Persentase ASN yang mengikuti program minat dan bakat		n.a	1,68	1,78	2,44
6	Persentase pelanggaran pegawai		0,66	0,67	0,61	0,22

Sumber: BKPSDM Kota Batam

KESIMPULAN

Pelaksanaan Diklat/peningkatan kompetensi pegawai saat ini hanya menggunakan APBD, sehingga peserta sangat bergantung terhadap ketersediaan anggaran. Dalam perspektif kedepan perlu dimanfaatkan peluang-peluang peningkatan kompetensi pegawai dengan menggunakan anggaran APBN. Kondisi saat ini :

1. ASN yang mengikuti Diklat formal hanya 0,12 persen;
2. ASN yang mengikuti Diklat structural hanya 0,90 persen;
3. ASN yang mengikuti Diklat teknis fungsional hanya 8,79 persen;

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan termuat dalam RPJMN 2020-2024, instansi pemerintah perlu melakukan penyederhanaan struktur dengan berorientasi pada ketepatan struktur dan kaya fungsi, sehingga Kota Batam perlu menindaklanjuti hal tersebut.

2.3.3.5 Urusan Pengawasan

Fungsi penunjang urusan pengawasan berkaitan dengan penilaian atas kinerja pengawasan yang dijalankan oleh fungsi pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Kualitas pengawasan internal akan memberikan gambaran tentang jaminan kualitas atas proses pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah data perkembangan kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 105 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Pemerintah Kota Batam	98	96	95	93	95
2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK	72	58	41	59	70
3	Penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Batam	NA	2	2	3	3
4	Penilaian level kapabilitas APIP Pemerintah Kota Batam	NA	2	2	3	3
5	Jumlah Temuan BPK (sumber: LHP BPK RI)	31	27	49	30	11

Sumber: Inspektorat Kota Batam

Jika dilihat dari tabel di atas, kinerja pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan kualitas SPIP dan kapabilitas APIP yang berada di level 3 selama 2 tahun terakhir ini, dan juga tingginya persentase tindak lanjut atas hasil rekomendasi temuan BPK dan temuan

APIP. Kinerja yang sudah baik tersebut juga turut andil dalam konsistensi Pemerintah Kota Batam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun terakhir sebagaimana telah diungkap dalam kinerja urusan keuangan di atas.

Namun demikian, meski secara umum kinerja pengawasan telah baik, bukan berarti tanpa kelemahan dan kendala. Kelemahan yang paling pokok dihadapi oleh fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah masih berjalannya pola post audit, sementara probity audit belum dilakukan hingga tahun 2019, dan rencananya akan dilakukan di tahun 2020 ini, meski kemungkinan akan tertunda hingga tahun 2021 karena adanya wabah pandemi Covid 19. Saat ini audit belum dapat diselenggarakan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, sehingga dukungan peningkatan sistem IT menjadi keharusan dalam peningkatan pengawasan.

Selain masih kurangnya dukungan IT, persoalan kuantitas dan kualitas SDM menjadi hambatan peningkatan pengawasan. Berdasarkan standar pelayanan minimal pengawasan internal, idealnya auditor madya sebanyak 5 orang dan auditor muda sebanyak 15 orang, sedangkan auditor pertama harusnya 45. Namun, saat ini secara keseluruhan auditor masih ada 32 orang (madya 5 orang, muda 14 orang dan pertama 8 orang). Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah) menurut standar sejumlah 48 orang, akan tetapi saat ini hanya tersedia 2 orang. Masih kurangnya kebutuhan SDM ini perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan secara berlanjut di masa mendatang.

Terakhir, belum adanya penilaian atas zona integritas dalam pengukuran kinerja pengawasan disebabkan karena adanya wabah covid 19, BPS mengundurkan diri dari survei penilaian integritas untuk tahun 2019. Rencana awal, terdapat 6 opd yang akan dijadikan pilot project dalam penerapan survei penilaian integritas. Sampai dengan tahun 2020 ini kemungkinan survei atas penilaian integritas masih belum dapat dilakukan.

2.3.3.6 Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD selama periode tahun 2016 hingga tahun 2019 secara umum menunjukkan hasil yang positif. Indikator persentase penyelesaian agenda DPRD selama tahun 2018 hingga 2019 berada di angka 90 persen. Kemudian indeks pelayanan sekretariat DPRD yang sesuai SOP pada selama empat tahun selalu meningkat, hingga pada tahun 2019 tercatat sebesar 80 persen. Untuk indikator persentase Perda yang disahkan tepat waktu (berdasarkan yang tercantum dalam APBD) pada tahun 2019 tercatat 83 persen. Angka tersebut tidak mencapai 100 persen karena dinamika politik terutama dari sisi eksternal sangat menentukan pencapaian indikator tersebut. Selanjutnya untuk persentase penetapan penganggaran tepat waktu pada tahun 2019 mencapai 100 persen, dalam konteks ini kriteria tepat waktu berdasarkan mekanisme penetapan APBD/produk hukumnya.

Tabel 2. 106 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penyelesaian agenda DPRD		85	89,5	90	90
2	Persentase indeks pelayanan Sekretariat DPRD Kota Batam sesuai SOP		65	70	75	80
3	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu (berdasarkan yang di APBD)		n.a	n.a	n.a	83
4	Persentase penetapan penganggaran tepat waktu (dari aspek mekanisme penetapan APBD/produk hukumnya)		n.a	n.a	n.a	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Batam

Secara umum persoalan pada Sekretariat DPRD adalah terkait dengan aspek kelembagaan, dimana saat ini masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat dewan, dengan kata lain peta dalam analisis jabatan tidak sesuai dengan jabatan yang ditempati oleh pegawai di Sekretariat Dewan.

2.3.3.7 Urusan Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Tabel 2.107 dapat diketahui indikator kinerja urusan administrasi pemerintahan Kota Batam Periode Tahun 2015-2019. Indikator Tersedianya LPPD tepat waktu menunjukkan bahwa selama tahun 2015-2019 penetapan LPPD dilakukan pada tanggal 4 Maret. Sementara itu nilai LPPD menunjukkan tren peningkatan selama Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Indikator persentase perkara yang ditangani mengalami penurunan selama lima tahun, pada Tahun 2016 tercatat 17 perkara, kemudian menurun setiap tahunnya sehingga menjadi 4 perkara di Tahun 2019. Jumlah perkara yang ditangani cenderung menurun karena (1) tidak adanya gugatan perdata/ TUN yang harus ditangani; (2) adanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat; dan (3) menunjukkan keberhasilan penyuluhan taat hukum.

Selama periode Tahun 2015-2019 Kota Batam menetapkan perda sebanyak 39, sementara perwako sebanyak 296. Perda terbanyak dihasilkan pada Tahun 2016, sementara perbup terbanyak dihasilkan pada Tahun 2017. Untuk nilai LAKIP selama lima tahun mengalami peningkatan secara bertahap, pada Tahun 2015 tercatat nilai Lakip sebesar 41,08 kemudian meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 64,83 pada Tahun 2019. Indikator persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga selama periode Tahun 2017-2019 telah menghasilkan 525 MoU, dimana terbanyak dihasilkan pada Tahun 2019 (225 MoU). Indikator peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara umum mengalami peningkatan, setiap tahunnya selama 2015-2018 mencapai target 100 persen. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 107 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	1 Dokumen	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN
2	Meningkatnya Nilai LPPD	2.9165	2.1875	3.1431	3.0857	n.a

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase Desa Sadar Hukum	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
4	Persentase perkara yang ditangani	17 Perdata dan 4 TUN	2 Perdata dan 4 TUN	3 Perdata dan 1 TUN	1 Perdata dan 6 TUN	4 Perdata dan 5 TUN
5	Perda dan Perbup yang dihasilkan	5 perda dan 38 Perwako	10 Perda dan 62 Perwako	9 Perda dan 79 Perwako	6 Perda dan 60 Perwako	9 Perda dan 57 Perwako
6	Meningkatnya nilai LAKIP daerah	41.08	50.36	61.05	64.74	64.83
7	Tersedianya dokumen perubahan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8	Persentase peningkatan jumlah kerjasama antar lembaga	n.a	n.a	100	200	225
9	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah	1.000.000.000 (100%)	900.000.000 (100%)	900.000.000 (100%)	1.000.000.000 (100%)	n.a

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Batam'

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan

bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pada tabel pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan Kota Batam tahun 2015-2019 dapat dilihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan sebesar Rp1.706.412 yang terdiri dari Rp777.096 konsumsi makanan dan Rp929.316 konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut meningkat menjadi Rp1.747.003 di tahun 2017 dan Rp1.749.746 di tahun 2018. Pada tahun 2019 jumlah konsumsi rumah tangga per kapita per bulan meningkat menjadi Rp2.020.847 yang terdiri dari Rp854.178 pengeluaran konsumsi makanan dan Rp1.166.669 pengeluaran bukan makanan.

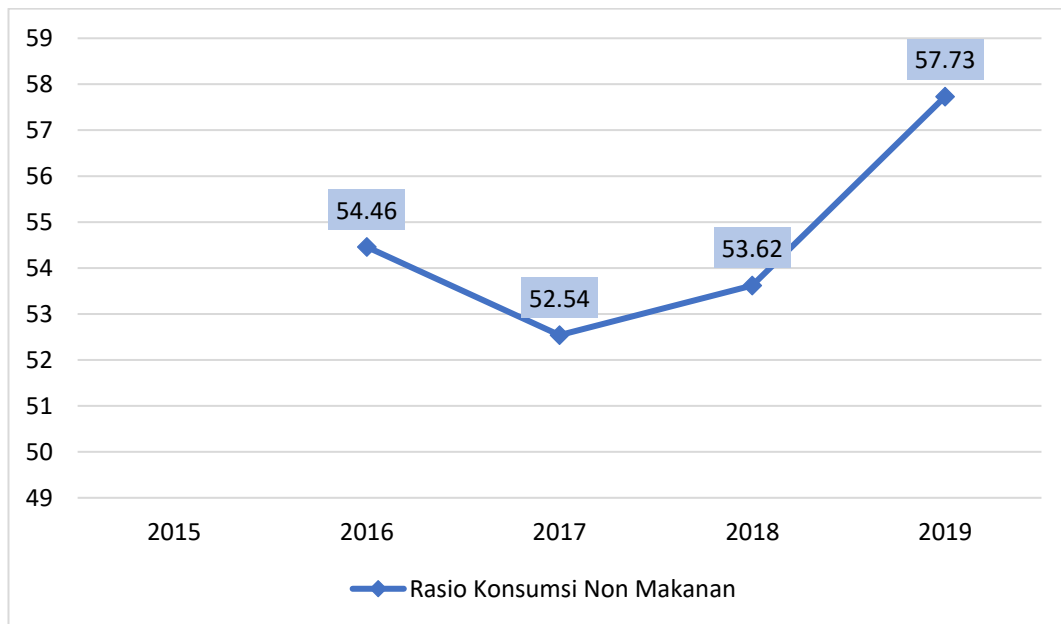
Tabel 2. 108 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Batam Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Makanan		777.096	829.062	811.553	854.178
Konsumsi Non Makanan		929.316	917.941	938.193	1.166.669
Total		1.706.412	1.747.003	1.749.746	2.020.847

Sumber: BPS Kota Batam

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa baik pengeluaran makanan maupun non makan di Kota Batam mengalami peningkatan. Selain itu, konsumsi non makanan menunjukkan proporsi yang lebih tinggi atau lebih dari 50 persen seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Rasio konsumsi makanan per kapita sebulan di Kota Batam pada tahun 2016 sebesar 54,46 persen dan meningkat menjadi 57,73 persen di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan

proporsi konsumsi non pangan di Kota Batam meskipun sempat turun menjadi 52,54 persen di tahun 2017 dan 53,62 persen di tahun 2018. Peningkatan konsumsi non pangan per kapita dapat dipahami bahwa secara umum, pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan sudah dapat terpenuhi sehingga terjadi pergeseran untuk memenuhi kebutuhan non pangan lainnya.



Gambar 2. 76 Rasio Pengeluaran Non Makanan Kota Batam Tahun 2015-2019

Sumber: BPS Kota Batam

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Salah satu ukuran daya saing infrastruktur daerah adalah ketersediaan layanan perbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian. Ketersediaan layanan perbankan dapat direpresentasikan melalui jumlah kantor cabang bank yang ada di daerah tersebut. Pada bank umum, jumlah kantor perbankan di Kota Batam terus mengalami peningkatan dari 68 kantor di tahun 2015 menjadi 206 kantor di tahun 2019. Pada tahun 2015 terdapat 47 kantor cabang dan cabang pembantu di Kota Batam dan 21 kantor kas bank umum di Kota Batam. Pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi 101 kantor cabang dan cabang pembantu serta 43 kantor kas bank umum di Kota Batam dengan total terdapat 144 bank umum. Pada tahun 2019 jumlah tersebut meningkat lagi menjadi 140 kantor cabang dan

cabang pembantu serta 66 kantor kas bank umum dengan total 2016 kantor bank umum di Kota Batam.

Tabel 2. 109 Bank Umum Pemerintah

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	47		101		140
Kantor Kas	21		43		66
Jumlah	68		144		206

Sumber: BPS Kota Batam

Selain bank umum, terdapat pula bank perkreditan rakyat (BPR) di Kota Batam yang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 terdapat 5 kantor BPR yang kemudian meningkat menjadi 16 kantor BPR di tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 47 kantor cabang dan 5 kantor kas BPR di Kota Batam pada tahun 2019.

Tabel 2. 110 BPR

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	5		16		47
Kantor Kas	0		0		5
Jumlah	5		16		52

Sumber: BPS Kota Batam

Meningkatnya jumlah kantor perbankan di Kota Batam menunjukkan bahwa infrastruktur keuangan dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kota Batam selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing daerah Kota Batam. Meski demikian, ke depannya indikator jumlah kantor perbankan bukan lagi menjadi indikator daya saing infrastruktur keuangan daerah melainkan penetrasi layanan teknologi finansial dalam mendukung aktivitas perekonomian. Semakin berkembangnya layanan teknologi finansial selain perlu dimanfaatkan juga perlu diwaspadai supaya tidak dimanfaatkan oleh pelaku teknologi finansial yang kurang bertanggung jawab.

2.4.2.2 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Hotel dan restoran merupakan salah satu infrastruktur wilayah yang mendukung aktivitas perekonomian. Tersedianya hotel dan restoran yang mencukupi dapat meningkatkan daya saing daerah terutama dalam penyediaan akomodasi yang mendukung aktivitas bisnis bagi pelaku usaha. Selain itu, hotel dan restoran juga mendukung aktivitas pariwisata di daerah terutama untuk jenis pariwisata kuliner dan MICE. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2018 dan 2019, terdapat peningkatan jumlah restoran dari 367 restoran dan rumah makan di tahun 2018 menjadi 782 restoran dan rumah makan di tahun 2019.

Tabel 2. 111 Jumlah Restoran di Kota Batam Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Belakang Padang				4	1
Bulang				0	5
Galang				5	12
Sungai Beduk				10	30
Sagulung				11	17
Nongsa				18	14
Batam Kota				75	261
Sekupang				40	73
Batu Aji				89	113
Lubuk Baja				197	197
Batu Ampar				9	48
Bengkong				9	11
TOTAL				367	782

Sumber: BPS Kota Batam

2.4.2.3 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik merupakan infrastruktur penting bagi daya saing daerah. Ketersediaan listrik yang memadai akan mendukung berjalannya industri di suatu daerah karena energi merupakan salah satu faktor produksi penting dalam memproduksi barang dan jasa. Selain itu, listrik juga merupakan prasarana penting bagi masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh, persentase rumah tangga pengguna listrik secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun

2015 sebesar 67,07 persen menjadi 85,13% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang dapat mengakses listrik di Kota Batam.

Meski semakin banyak yang dapat mengakses listrik, dari sisi ketersediannya listrik di Kota Batam masih belum mencukupi. Berdasarkan data, rasio ketersediaan listrik di Kota Batam mengalami perkembangan yang fluktuatif antara 15,40 persen hingga 42,85 persen. Rasio ketersediaan tersebut cukup rendah mengingat nilainya masih di bawah 50 persen. Hal ini berarti belum semua kebutuhan listrik dapat dipenuhi sehingga masih perlu adanya pemadaman atau pemenuhan listrik menggunakan sumber sendiri baik untuk masyarakat maupun pelaku usaha.

Saat ini terdapat Sembilan desa/kelurahan yang memperoleh listrik hanya 14 jam/hari yakni desa/kelurahan (1) Pemping, (2) Bulang Lintang, (3) Pulau Buluh (4) Temoyong, (5) Batu Legong, (6) Pantai gelam, (7) Karas, (8) Subang Mas, dan (9) Air Raja. Secara umum, dari 88 pulau yang berpenghuni di Kota Batam, masih terdapat 28 pulau yang belum memiliki listrik, sedangkan 27 pulau menggunakan listrik PLN dan 33 pulau menggunakan listrik Non PLN.

Tabel 2. 112 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase rumah tangga pengguna listrik	67,07%	66,07%	66,11%	85,44%	85,13%
Rasio ketersediaan listrik	35,55%	15,40%	37,30%	42,85%	26,13%

Sumber: PT PLN (Persero)

Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah, ketersediaan listrik memegang peranan penting dalam mencukupi kebutuhan energi terutama untuk industri. Dalam perencanaan ketenagalistrikan, pemerintah daerah melalui Provinsi Kepri telah berkoordinasi dengan PT PLN sebagai penyedia listrik agar secara gradual meningkatkan pelayanan demi memenuhi kebutuhan listrik baik bagi masyarakat maupun industri.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu tahun dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Tingkat keamanan suatu wilayah akan menentukan iklim berinvestasi di wilayah tersebut. Berdasarkan data BPS Kota Batam, angka kriminalitas di Kota Batam dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan dari 3.978 menjadi 2.694. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan Kota Batam semakin baik. Disisi lain, demonstrasi merupakan salah satu penyaluran aspirasi yang masyarakat. Meski demikian, jumlah demonstrasi yang terlalu banyak akan menghambat iklim investasi. Jumlah demonstrasi di Kota Batam tahun 2015 sebanyak 40 yang turun menjadi 25 demonstrasi di tahun 2017 dan 2018 dan meningkat menjadi 30 demonstrasi di tahun 2019.

Tabel 2. 113 Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi Kota Batam Tahun 2015-2019

Tahun	Angka Kriminalitas	Jumlah Demonstrasi
2015	3.978	40
2016	3.146	
2017	2.993	25
2018	2.602	25
2019	2.694	30

Sumber: BPS Kota Batam

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kota Batam. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang menamatkan perguruan tinggi.

Perkembangan rasio lulusan perguruan tinggi selama periode 2015-2019 menunjukkan hasil yang meningkat. Pada tahun 2015, rasio lulusan perguruan tinggi Kota Batam mencapai 3,34 dan meningkat menjadi 4,39 pada tahun 2017.

Hal ini bermakna bahwa terdapat 439 orang lulusan perguruan tinggi dari 10.000 penduduk Kota Batam di tahun 2017.

Tabel 2. 114 Kualitas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Lulusan perguruan tinggi	Jiwa	34.668		55.865		
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.037.187		1.271.357		
Rasio Lulusan perguruan tinggi	Persen	3,34		4,39		

Sumber: BPS Kota Batam

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum, rasio ketergantungan di Kota Batam menunjukkan kinerja yang baik dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2015, rasio ketergantungan sebesar 47,06 dan sempat naik menjadi 47,08 di tahun 2016 dan turun menjadi 46,81 di tahun 2017, 46,34 di tahun 2018 dan menjadi 45,70 di tahun 2019.

Tabel 2. 115 Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun dan usia >64 tahun)	Jiwa	380.506	395.742	409.144	421.083	431.568
Jumlah penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun)	Jiwa	808.479	840.657	874.052	908.690	944.441
Rasio Ketergantungan	persen	47,06	47,08	46,81	46,34	45,70

Sumber: BPS Kota Batam

BAB III
GAMBARAN UMUM
KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Batam dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan daerah Kota Batam secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, dan tidak memasukkan realisasi APBD TA 2020 dalam perhitungan rata-rata pertumbuhan disebabkan adanya dampak atas wabah Covid-19 yang menyebabkan data TA 2020 bersifat anomali. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ditambah 1 tahun transisi yaitu tahun 2026 sesuai dengan SE Menteri Dalam Negeri tentang periodisasi RPJMD. Perkiraan proyeksi selama 5 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya wabah Covid-19.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan menandingkan antara penerimaan dikurangi dengan

pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan menandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan daerah dalam sub bab ini akan dibagi dalam kerangka penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab penerimaan daerah akan dianalisis kinerja realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan, yang kemudian perhitungan proyeksi selama 6 tahun ke depan (dari tahun 2021 s.d tahun 2026) akan dijelaskan pada sub bab tersendiri.

A. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,

Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara rinci dapat disajikan dalam bentuk Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam dari Tahun 2015 s.d 2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	+/(-)
1	2	3	4	5	6
1	2015	2,104,943,277,115.23	1,936,406,807,579.72	91.99%	(168,536,469,535.51)
2	2016	2,276,443,231,337.92	2,215,680,286,681.50	97.33%	(60,762,944,656.42)
3	2017	2,352,145,967,331.55	2,157,662,190,348.08	91.73%	(194,483,776,983.47)
4	2018	2,508,604,184,132.21	2,360,092,860,079.71	94.08%	(148,511,324,052.50)
5	2019	2,746,310,491,516.42	2,522,890,256,865.30	91.86%	(223,420,234,651.12)

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

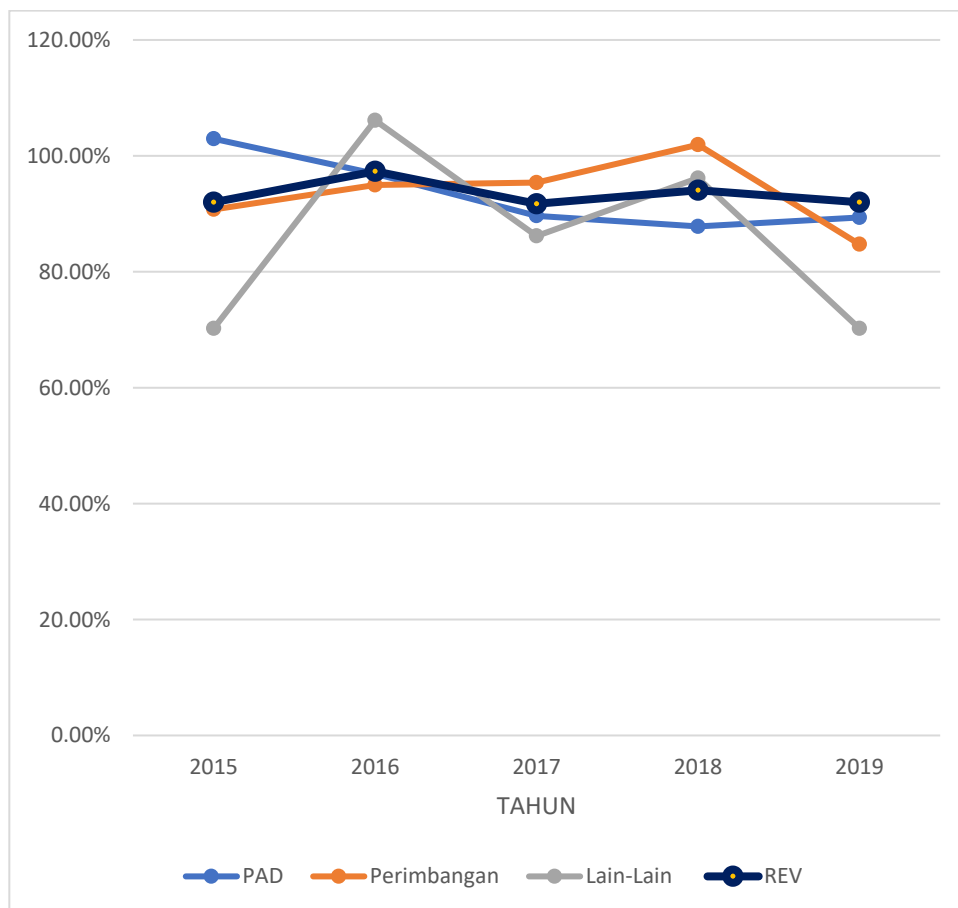
Adapun rincian target dan realisasi untuk masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Batam untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Daerah Tahun 2015			
	a. PAD	812,739,614,159.94	836,713,858,341.88	102.95%
	b. Pendapatan Transfer	1.289.203.662.955,29	1.094.740.144.637,84	84,92%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	3.000.000.000,00	4.952.804.600,00	165,09%
	Jumlah	2,104,943,277,115.23	1,936,406,807,579.72	91.99%
2.	Pendapatan Daerah Tahun 2016			
	a. PAD	909,266,681,460.69	881,268,969,156.50	96.92%
	b. Pendapatan Transfer	1.367.176.549.877,23	1.334.411.317.525,00	97,60%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	2,276,443,231,337.92	2,215,680,286,681.50	97.33%
3.	Pendapatan Daerah Tahun 2017			
	a. PAD	1,086,585,819,982.57	974,124,203,684.08	89.65%
	b. Pendapatan Transfer	1.265.560.147.348,98	1.183.537.986.664,00	93,52%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	2,352,145,967,331.55	2,157,662,190,348.08	91.73%
4.	Pendapatan Daerah Tahun 2018			
	a. PAD	1,235,027,230,923.76	1,084,640,559,852.99	87.82%
	b. Pendapatan Transfer	1.165.316.078.599,13	1.179.622.117.473,00	101,23%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	108.260.874.609,32	95.830.182.753,72	88,52%
	Jumlah	2,508,604,184,132.21	2,360,092,860,079.71	94.08%
5	Pendapatan Daerah Tahun 2019			
	a. PAD	1,284,363,117,436.42	1,147,685,950,193.30	89.36%
	b. Pendapatan Transfer	1.363.668.774.080,00	1.277.894.831.625,00	93,71%
	c. Lain-lain Pendapatan yang sah	98.278.600.000,00	97.309.475.047,00	99,01%

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Jumlah	2,746,310,491,516.42	2,522,890,256,864.30	91.86%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam



Gambar 3. 1 Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Batam Tahun 2015-2019

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum, kinerja pendapatan daerah mengalami fluktuatif selama tahun 2015 hingga 2019, yang terlihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kinerja pendapatan naik-turun dan masih di bawah target. Jadi, secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah Kota Batam masih di bawah kinerja (underperformance) dan cenderung stagnan.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik Kota Batam terjadi pada tahun 2016, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 97,33% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada realisasi. Kinerja realisasi PAD dan Pendapatan Transfer masih di bawah target yaitu masing-masing sebesar 96,92% dan 97,06%.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua Kota Batam terjadi pada tahun 2018, yaitu dengan realisasi Pendapatan Daerah mencapai 94,08% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi Pendapatan Transfer yang di atas target, yaitu sebesar 101,23%. Sementara itu, kinerja realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih di bawah target, yaitu masing-masing sebesar 87,82% dan 88,52%. Sedangkan, kinerja pendapatan daerah terendah terjadi pada tahun 2017 dengan pencapaian hanya 91,73% dari yang ditargetkan. Rendahnya kinerja realisasi pendapatan daerah pada tahun 2017 disebabkan tidak ada realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan PAD hanya sebesar 89,65%. Sedangkan kinerja realisasi Pendapatan Transfer cukup besar yaitu sebesar 93,52%, meski masih di bawah target.

Kinerja PAD memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 44.09%. Komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pos Pajak Daerah, dengan rata-rata kontribusi 33.04%. Rata-rata kontribusi terbesar Pajak Daerah berasal dari BPHTB (10,87%) dan Pajak Penerangan Jalan (6,84%). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PAD ditopang dari besarnya pungutan pajak daerah dan ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang baik.

Pajak Daerah memiliki rata-rata kinerja 90.7% (di bawah target) dan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (33.04%), lebih tinggi dibandingkan dengan DAU (26.07%). Kontribusi terbesar pajak daerah berasal dari BPHTB (10.87%), diikuti oleh PPJ (6.84%), PBB-P2 (5.77%), Pajak Hotel (4.38%), dan Pajak Restoran (3.14%). Dari kelima obyek pajak daerah tersebut, hanya BPHTB yang kecenderungannya relatif stabil, sedangkan yang lain memiliki kecenderungan

tren naik. Hal ini disebabkan Kota Batam yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai kawasan industri, perdagangan, pariwisata, *transhipmen* dan jasa telah menarik investor untuk menanamkan modalnya dan perkembangan ekonomi ini telah memicu tingginya transaksi pengalihan hak atas tanah baik yang terjadi untuk bisnis maupun tempat tinggal sehingga berkontribusi terhadap penerimaan pajak dari sektor BPHTB. Selain itu juga, tingginya pajak dari sektor PPJ (Pajak Penerangan Jalan) disamping bersumber dari listrik konsumsi rumah tangga juga bersumber dari listrik untuk kebutuhan industri (yang dikelola PLN) maupun yang diadakan sendiri oleh Perusahaan atau Kawasan Industri.

Namun, tingginya kinerja BPHTB dan PPJ memiliki resiko adanya penurunan realisasi di kemudian hari karena banyak mengandalkan dari *external effort* (notaris dan kebutuhan listrik). Kinerja pencapaian target dari BPHTB dan PPJ sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro daerah dan daya beli masyarakat, untuk itu ketergantungan terhadap dua sektor pajak ini perlu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dari sumber pajak lain seperti Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Reklame dan PBB-P2, yang memang menjadi prioritas yang harus dilakukan di masa mendatang dan BPPRD telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan sektor-sektor penerimaan pajak daerah tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah. Untuk itu perlu untuk memiliki data potensi optimal dari beberapa obyek pajak misal: perbaikan NJOP, hotel, restoran (dan sejenisnya), parkir, hiburan.

Retribusi daerah memiliki rata-rata kinerja 90.43% dan rata-rata kontribusi 4.01%. Kontributor terbesar adalah retribusi perpanjangan IMTA (1.24%) dan retribusi pelayanan persampahan (1.23%). Namun retribusi perpanjangan IMTA memiliki kecenderungan penurunan, dan sebaliknya untuk retribusi pelayanan persampahan. Untuk retribusi berkinerja terbaik (mencapai target) adalah retribusi pemeriksaan alat Damkar dan retribusi pelayanan kesehatan. Hal ini perlu juga mendapatkan perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan (potensi peningkatan tarif) dan potensi yang dapat diperoleh (intensifikasi). Hal ini dikarenakan seperti retribusi pelayanan pasar cenderung menurun dan di bawah

target. Jadi diperlukan upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah.

Namun demikian jika dilihat dari nilai realisasinya, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kecenderungan kenaikan realisasi (lihat Tabel 3.3 di bawah). Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah juga menunjukkan persentase yang lebih besar dibanding dengan DAU. Hal ini terjadi karena adanya inovasi/terobosan yang terus dilakukan oleh BPPRD untuk pencapaian penerimaan pajak secara optimal, antara lain:

- Melakukan penguatan basis data objek pajak;
- Penambahan *Payment Point* pajak bekerjasama dengan Bank Kasda;
- Pemasangan Perangkat Perekaman Transaksi Pembayaran (*Tapping Box*) pada Objek Pajak Hotel, Restoran, hiburan dan Parkir;
- Penerapan Aplikasi e-Billing berbasis Web (Web-base) yang dapat diakses langsung oleh Subject Pajak yang akan membayar pajak daerah (selain pajak PBB-P2 dan BPHTB);
- Pengadaan kegiatan bulan panutan pajak dengan membuka akses pembayaran pajak PBB-P2 ke masyarakat;
- Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi pajak ke masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- Dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari efektifitas insentif pemungutan terhadap total pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh, maka dapat diketahui hasilnya sebagai berikut:

1. Efektifitas insentif pemungutan pajak daerah adalah sebesar 1 Rupiah biaya pemungutan pajak dapat menghasilkan Rp32,94 realiasi pajak daerah (Rp1 : Rp32,94) pada tahun 2016 dan meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi Rp1 : 1.030,57;
2. Efektifitas insentif pemungutan retribusi daerah adalah Rp1 : Rp24,55, artinya untuk biaya pemungutan senilai Rp1 dapat menghasilkan realisasi retribusi

daerah senilai Rp24,55 pada tahun 2016, dan kemudian meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi Rp1 : Rp373,82;

3. Efektifitas anggaran belanja BP2RD dibandingkan dengan pajak daerah yang diperoleh senilai Rp1 : Rp10,79 pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2019 senilai Rp1 : Rp28,63.

Kinerja deviden dari BUMD hanya pada tahun 2019 melampaui target dan memiliki rata-rata kontribusi 0.51%. Perlu adanya peninjauan kembali atas kebijakan penyertaan modal dan pendirian 2 BUMD lainnya (PT Pembangunan dan Usaha Kepelabuhan) agar kebijakan pendirian dan penyertaan modal BUMD ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada Daerah. Kontributor Lain-lain PAD yang Sah diperoleh sebagian besar dari Pendapatan BLUD dari RSUD (3.34%). Namun, pada tahun 2019 cenderung kinerjanya di bawah 90% dan semakin menurun.

Pendapatan Transfer selama 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 dan 2018 realisasinya cenderung menurun dan kemudian meningkat kembali di tahun 2019. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2019. Kinerja DAU memiliki kinerja yang konsisten meningkat dibandingkan kinerja Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan DAK. Perkembangan pendapatan transfer ini tentu perlu mendapatkan perhatian untuk tahun-tahun mendatang karena adanya pelemahan ekonomi nasional dan dunia sehingga akan berdampak pada perolehan pendapatan Negara.

Sementara itu, untuk kinerja Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, selama 5 tahun terakhir relatif terjadi penurunan kinerja, terutama dari kontributor utamanya, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Realisasi kinerja Dana bagi hasil pajak dari Pemprov terbesar terjadi pada tahun 2016, dan setelah itu mengalami penurunan, di hampir seluruh obyek pajak provinsi yang dibagi ke Kota Batam. Selain dana bagi hasil pajak dari Pemprov, sumber lainnya dari pendapatan hibah dan pendapatan dari dana penyesuaian,

terutama Dana Insentif Daerah (DID) karena berhasilnya Pemerintah Kota Batam mempertahankan opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk dapat menghitung proyeksi pendapatan daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Batam untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	9
	PENDAPATAN						
1	Pendapatan Asli Daerah	836.713.858.342	881.268.969.157	974.124.203.684	1.084.640.559.853	1.147.685.950.193	8,25%
	Pajak Daerah	614.910.861.602	648.110.809.097	648.218.537.855	845.697.306.043	934.458.907.797	11,59%
	Retribusi Daerah	84.459.384.010	93.194.628.137	91.582.658.447	94.581.392.976	90.518.037.599	1,90%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.200.379.075	7.667.300.466	13.848.550.711	13.897.911.908	11.836.597.248	51,43%
	Lain - Lain PAD yang Sah	134.143.233.655	132.296.231.457	220.474.456.671	130.463.948.926	110.872.407.550	2,36%
2	Pendapatan Transfer	1.094.740.144.638	1.334.411.317.525	1.183.537.986.664	1.179.622.117.473	1.277.894.831.625	4,65%
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	849.850.347.882	991.714.849.932	962.500.055.668	897.475.587.149	955.858.409.492	3,37%
	Dana Bagi Hasil Pajak	103.432.846.150	153.099.242.859	126.284.472.444	104.694.249.054	63.403.441.380	-6,51%
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	103.650.821.732	91.318.882.061	94.400.978.051	117.946.833.795	101.787.230.511	0,68%
	Dana Alokasi Umum	529.988.410.000	576.930.711.000	577.144.597.000	599.074.016.000	659.164.959.000	5,68%
	Dana Alokasi Khusus	112.778.270.000	170.366.014.012	164.670.008.173	75.760.488.300	131.502.778.601	5,41%
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	105.804.769.000	40.405.162.000	-	86.400.150.226	123.854.964.336	78,59%
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
	Dana Penyesuaian	105.804.769.000	40.405.162.000	-	86.400.150.226	123.854.964.336	78,59%
	Transfer Pemerintah Provinsi	137.085.027.756	302.291.305.593	221.037.930.996	195.746.380.098	198.181.457.797	20,86%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	137.085.027.756	302.291.305.593	221.037.930.996	195.746.380.098	198.181.457.797	20,86%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	9
	Bantuan Keuangan	2.000.000.000	-	-	-	-	0,00%
3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	4.952.804.600,00	0,00	0,00	95.830.182.753,72	97.309.475.047,00	1,54%
	Pendapatan Hibah	4.952.804.600	-	-	95.830.182.754	97.309.475.047	1,54%
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	1.936.406.807.580	2.215.680.286.682	2.157.662.190.348	2.360.092.860.080	2.522.878.551.656	7,02%

Sumber: Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kota Batam

Berdasarkan data selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam dapat diketahui tingkat peningkatan maupun penurunannya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan hampir di seluruh komponen pendapatan daerah.

B. Penerimaan Pembiayaan

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penerimaan daerah terdiri dari realisasi pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan. Selama 5 tahun terakhir realisasi penerimaan pembiayaan hanya pada pos Penggunaan SiLPA saja. Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel 3.4 di bawah.

Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Pendapatan Daerah	1.936.406.807.580	2.215.680.286.682	2.157.662.190.348	2.360.092.860.080	2.522.878.551.656	7.02%
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	264.969.086.842	44.868.397.129	133.301.586.366	65.839.607.920	44.408.264.485,74	7.72%

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penggunaan SiLPA	264.969.08 6.842	44.868.397. 129	133.301.58 6.366	65.839.607. 920	44.408.26 4.485,74	7.72%
	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0.00%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0.00%
	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0.00%
	Penerimaan Kembali Pinjaman	0	0	0	0	0	0.00%
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0.00%
	Total Penerimaan Daerah	2.201.37.,8 94.422	2.260.548.6 83.810	2.290.963.7 76.714	2.425.932.4 68.000	2.567.286.8 16.142	3.94%

Sumber: Diolah dari LRA dan APBD Pemerintah Kota Batam

3.1.1.2 Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan masuk dalam pembiayaan daerah, bersama penerimaan pembiayaan. Secara garis besar, sistematika APBD tersusun dari pendapatan dikurangi belanja menghasilkan surplus dan defisit. Surplus dan defisit tersebut kemudian dimanfaatkan atau ditutup dengan pembiayaan sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SiLPA). SiLPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang masuk dalam penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Berikut analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan Kota Batam selama 3 tahun terakhir dan perhitungan proyeksi untuk 5 tahun mendatang.

A. Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan. Dalam realisasi APBD Pemerintah Kota Batam selama kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami perkembangan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Batam sebesar Rp2.225.121.485.774,77 dan meningkat menjadi sebesar Rp2.381.523.875.914,02 di tahun 2018, kemudian pada tahun anggaran 2019 realisasi belanja daerah sebesar Rp2.531.917.988.612,87,- dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 5,98%. Rata-rata pertumbuhan tersebut ditopang dari rata-rata pertumbuhan belanja modal yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar, yaitu mencapai 7,71%, dan belanja operasional sebesar 5,5%. Hal ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian dan investasi daerah oleh Pemerintah Kota Batam. Semakin besarnya alokasi anggaran untuk belanja modal memberikan bukti bahwa Pemerintah Kota Batam sangat serius dalam meningkatkan infrastruktur wilayah agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat dan daerah, sebagai daerah investasi dan industri. Untuk melihat gambaran kinerja belanja daerah disajikan dalam tabel 3.5 dan 3.6 di bawah.

Tabel 3. 5 Kinerja Belanja Daerah Kota Batam selama Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Operasi	91,57%	94,99%	94,47%
	Belanja Pegawai	95,38%	97,91%	97,38%
	Belanja Barang dan Jasa	88,83%	92,42%	92,46%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	86,09%	90,55%	87,93%
	Belanja Bantuan Sosial	70,36%	100,00%	52,62%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%
2	Belanja Modal	82,96%	86,61%	81,58%
	Belanja Tanah	82,54%	0,00%	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	92,98%	91,71%	93,57%
	Belanja Gedung dan Bangunan	80,25%	94,28%	80,08%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82,23%	83,29%	83,96%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00%	84,65%	47,65%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Tidak Terduga	3,46%	9,72%	0,29%
	Belanja Tidak Terduga	3,46%	9,72%	0,29%
4	Transfer	97,42%	100,00%	100,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	89,14%	92,58%	90,72%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

Tabel 3.5 di atas menggambarkan bahwa kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Batam cukup baik dengan tingkat penyerapan mencapai di atas 90%. Kinerja penyerapan belanja terbesar ada di belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa yang mencapai lebih dari 90%. Sedangkan, belanja modal selalu masih di bawah 90% kinerja penyerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam perlu lebih meningkatkan kinerja realisasi belanja modalnya, terutama yang terkait dengan peningkatan infrastruktur wilayah agar berdampak signifikan

terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat gambaran kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Batam dapat dilihat dari perhitungan proporsi jenis belanja terhadap total belanja daerah berikut.

Tabel 3. 6 Proporsi Setiap Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Operasi	74,94%	74,21%	74,11%
	Belanja Pegawai	33,74%	36,38%	35,71%
	Belanja Barang dan Jasa	39,34%	35,73%	35,75%
	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%
	Belanja Hibah	1,78%	1,99%	2,52%
	Belanja Bantuan Sosial	0,08%	0,12%	0,13%
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	0,00%
2	Belanja Modal	25,05%	25,78%	25,89%
	Belanja Tanah	3,66%	0,00%	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	5,15%	2,01%	2,04%
	Belanja Gedung dan Bangunan	15,73%	6,78%	8,05%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,51%	16,21%	15,04%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00%	0,78%	0,76%
	Belanja Aset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%
3	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,01%	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,01%	0,00%
4	Transfer	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Retribusi	0,00%	0,00%	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL BELANJA DAERAH	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

Dari segi kebijakan alokasi anggaran, tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam lebih berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui kebijakan porsi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang

lebih besar dibanding jenis belanja lainnya. Proporsi kedua belanja relatif sama atau Pemerintah Kota Batam memiliki komitmen untuk dapat mempertahankan alokasi anggaran kedua belanja tersebut. Hal ini terlihat jelas pada persentase proporsi realisasi kedua belanja tersebut selama 3 tahun terakhir dimana belanja barang dan jasa berada pada kisaran 35%, sedangkan belanja modal stabil berada di kisaran 25%. Untuk dapat menghitung proyeksi belanja daerah di masa mendatang maka perlu menghitung terlebih dahulu pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 3 tahun terakhir, sesuai yang diminta dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Batam untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2017 s.d 2019

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3 Tahun Terakhir
1	2	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH				
1	Belanja Operasi	1.668.091.284.498,38	1.767.794.160.432,77	1.876.777.686.499,72	5,50%
	Belanja Pegawai	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	6,25%
	Belanja Barang dan Jasa	874.549.381.808,38	850.235.081.538,77	904.406.874.943,00	3,62%
	Belanja Bunga	-	-	-	0,00%
	Belanja Subsidi	-	-	-	0,00%
	Belanja Hibah	39.508.565.350,00	47.260.687.489,00	63.788.146.428,72	50,55%
	Belanja Bantuan Sosial	1.849.250.000,00	2.842.500.000,00	3.332.450.000,00	6,75%
	Belanja Bantuan Keuangan	2.001.604.500,00	1.716.454.845,00	1.754.922.078,00	2,78%
2	Belanja Modal	556.926.371.276,39	613.438.215.481,25	655.137.393.960,15	7,71%
	Belanja Tanah	81.309.827.118,57	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Peralatan dan Mesin	114.464.498.137,58	47.892.055.674,23	51.629.877.319,27	-16,32%
	Belanja Gedung dan Bangunan	349.763.998.741,48	161.346.168.485,29	203.770.635.793,58	65,83%
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.388.047.278,76	385.669.659.853,40	380.617.502.525,30	1063,08%
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	18.530.331.468,33	19.119.378.322,00	11,60%
	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%

3	Belanja Tidak Terduga	103.830.000,00	291.500.000,00	2.908.153,00	-97,35%
	Belanja Tidak Terduga	103.830.000,00	291.500.000,00	2.908.153,00	-97,35%
4	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH	2.225.121.485.774,77	2.381.523.875.914,02	2.531.917.988.612,87	5,98%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk realisasi belanja setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,98%. Jika dilihat dari proporsi realisasi belanja dan rata-rata pertumbuhan komponen belanja tersebut, menunjukkan adanya keberpihakan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kota Batam untuk lebih memprioritaskan peningkatan pembangunan daerah.

Sama halnya dengan yang terjadi pada pendapatan daerah, jika dilihat pertumbuhan per jenis belanja baik dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung, nilai rata-rata pertumbuhannya relatif terlalu tinggi, terutama untuk belanja hibah. Disisi lain, jika dilihat per tahunnya pertumbuhannya fluktuatif tidak menunjukkan kecenderungan tertentu, misal naik atau menurun. Oleh karena itu, dengan tetap berpegang pada prinsip konservatif, perlu adanya penyesuaian nilai rata-rata pertumbuhan pada saat akan melakukan perhitungan proyeksi anggaran belanja daerah. Di masa mendatang perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kota Batam, terutama oleh Bappeda dan BPKAD, untuk memantau kinerja keuangan dan anggaran Pemerintah Daerah agar tidak terlalu fluktuatif sehingga dapat memberikan informasi peramalan untuk perencanaan keuangan di masa mendatang dengan lebih baik. Begitu juga, sama dengan yang dilakukan pada proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan perlu mempertimbangkan dan memperhatikan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam LKPD Tahun 2020. Apalagi, adanya penyesuaian akibat dampak wabah Covid-19 sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Penggunaan data realisasi APBD TA 2020 perlu dipertimbangkan karena data yang dihasilkan banyak mengandung bias dan abnormal. Terkait dengan penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2020 akibat adanya wabah pandemi Covid-19 akan dibahas lebih lanjut dalam sub bahasan proyeksi.

B. Kinerja Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam selama 3 tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 3. 8 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran 2017 - 2019

Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00%
- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00%

Sumber: Diolah dari LRA Pemerintah Kota Batam

Tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam selama 3 tahun terakhir tidak ada kebijakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan terutama untuk kebijakan penyertaan modal yang biasanya selalu ada di hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia. Tidak adanya kebijakan alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal kepada Bank Daerah atau BUMD lainnya, disebabkan karena regulasi atau Perda terkait penyertaan modal masih belum diperbaharui

dan ditetapkan. Sedangkan, terdapat 2 BUMD yang saat ini masih melakukan restrukturisasi organisasi dan pemilihan direksi baru. Untuk itu, dalam proyeksi ke depan kemungkinan besar pengeluaran pembiayaan terutama untuk penyertaan modal perlu untuk dialokasikan.

KESIMPULAN

- ⇒ Kinerja pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir mengalami performa di bawah target meski cenderung meningkat, dan hanya tahun 2017 yang kinerjanya mengalami penurunan;
- ⇒ Kinerja PAD memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Daerah, dengan rata-rata 44.09%;
- ⇒ Pajak Daerah memiliki rata-rata kinerja 90.7% (di bawah target) dan kontribusi tertinggi terhadap pendapatan daerah (33.04%), lebih tinggi dibandingkan dengan DAU (26.07%);
- ⇒ Kontribusi Pajak Daerah menunjukkan persentase yang lebih besar dibanding DAU. Hal ini terjadi karena adanya invoasi/terobosan yang terus dilakukan oleh BPPRD untuk pencapaian penerimaan pajak secara optimal;
- ⇒ Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata 11,59% dan 1,90%;
- ⇒ Rata-rata kontribusi terbesar Pajak Daerah berasal dari BPHTB (10,87%) dan Pajak Penerangan Jalan (6,84%);
- ⇒ Tingginya BPHTB dan PPJ memiliki resiko adanya penurunan realisasi di kemudian hari karena banyak mengandalkan dari external effort (notaris dan kebutuhan listrik), untuk itu perlu untuk memiliki data potensi optimal dari beberapa obyek pajak misal: perbaikan NJOP, hotel, restoran (dan sejenisnya), parkir, hiburan;
- ⇒ Retribusi daerah memiliki rata-rata kinerja 90.43% dan rata-rata kontribusi 4.01%;
- ⇒ Kontributor terbesar adalah retribusi perpanjangan IMTA (1.24%) dan retribusi pelayanan persampahan (1.23%). Namun retribusi perpanjangan IMTA memiliki kecenderungan penurunan, dan sebaliknya untuk retribusi pelayanan persampahan;
- ⇒ Hal ini perlu juga mendapatkan perhatian untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan (potensi peningkatan tarif) dan potensi yang dapat diperoleh (intensifikasi). Karena seperti pelayanan pasar cenderung menurun dan di bawah target;
- ⇒ Kinerja deviden dari BUMD hanya pada tahun 2019 melampaui target dan memiliki rata-rata kontribusi 0.51%. Deviden terbesar diperoleh dari Bank RIAU KEPRI;
- ⇒ Kontributor Lain-lain PAD yang Sah diperoleh sebagian besar dari Pendapatan BLUD dari RSUD (3.34%);
- ⇒ Rata-rata pertumbuhan realiasi belanja modal terbesar (7,71%) dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa dan belanja pegawai. Namun demikian, kinerja realiasi belanja modal lebih rendah (di bawah 90%) dibandingkan dengan kinerja realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa;
- ⇒ Tidak adanya kebijakan alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal kepada Bank Daerah atau BUMD lainnya, disebabkan karena regulasi atau Perda terkait penyertaan modal masih belum diperbaharui dan ditetapkan. Padahal, terdapat 2 BUMD yang saat ini masih melakukan perubahan manajemen yang di kemudian hari akan memerlukan kebijakan terkait dengan penyertaan modal.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan pemerintah daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah. Berikut ini tabel 3.9 perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Tabel 3.10 berikut akan menyajikan hasil analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kota Batam selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. 9 Perkembangan Neraca Daerah Pemerintah Kota Batam Tahun 2015 - 2019 dan Rata-rata Pertumbuhannya

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	47,063,056,582.87	135,223,354,808.80	65,934,586,363.37	44,431,434,547.51	35,402,657,726.94	20.79%
Kas di Kasda	29,759,120,823.58	123,616,708,499.23	47,740,064,211.72	28,737,850,896.05	20,022,572,609.62	45.97%
Kas di Bendahara Pengeluaran	9,550,094,812.50	1,992,431,366.39	0.00	0.00	626,100.00	-89.55%
Kas di Bendahara Penerimaan	21,824,011.00	300,811,667.00	7,638,000.00	21,244,300.00	24,839,700.00	343.99%
Kas di BLUD	6,151,279,292.77	7,481,905,132.44	10,081,787,954.75	10,237,781,560.06	7,769,257,498.67	8.45%
Kas Lainnya	1,580,737,643.02	1,831,498,143.74	8,105,096,196.90	5,434,557,791.40	7,585,361,818.65	91.26%
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang	276,774,026,761.00	314,529,974,655.00	360,616,926,762.00	394,758,218,679.00	456,328,122,631.00	13,34%
Piutang Pajak	275,741,903,860.00	311,918,910,287.00	358,269,486,443.00	391,185,884,715.00	452,643,429,076,00	13,22%
Piutang Retribusi	1,032,122,901.00	2,611,064,368.00	2,347,440,319.00	3,572,333,964.00	3,684,693,555,00	49,55%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Piutang Lain-lain/Lainnya	320,175,563,260.5 2	226,449,712,191.86	215,828,839,663.85	214,184,859,357.59	369.366.134.756,58	9,43%
Penyisihan Piutang	(260,150,792,174.0 0)	(284,991,674,217.41)	(284,094,693,458.47)	(364,827,315,041.75)	(373.410.519.700,68)	10,00%
Belanja dibayar Dimuka	9,263,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Persediaan	21,983,704,442.12	27,935,544,594.47	26,444,720,819.68	42,492,333,485.56	46.996.484.773,30	23,26%
Jumlah Aset Lancar	405,854,821,887.5 1	419,146,912,032.72	384,730,380,150.43	331,039,531,027.91	534.682.880.187,14	10,66%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Investasi Non Permanen Lainnya	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	0.00%
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	0.00	0.00	(7,848,731,495.68)	(7,848,731,495.68)	(7,836,522,594.02)	-0.08%
Jumlah Investasi Non Permanen	22,221,929,790.00	22,221,929,790.00	14,373,198,294.32	14,373,198,294.32	14,385,407,195.98	-8.81%
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	66,715,944,174.11	67,997,011,627.88	70,905,438,407.37	74,052,662,879.05	71,700,340,656.35	1.87%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Investasi Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jumlah Investasi Permanen	66,715,944,174.11	67,997,011,627.88	70,905,438,407.37	74,052,662,879.05	71,700,340,656.35	1.87%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	88,937,873,964.11	90,218,941,417.88	85,278,636,701.69	88,425,861,173.37	86,085,747,852.33	-0.75%
ASET TETAP						

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tanah	698,096,302,139.08	699,843,419,139.08	617,752,408,087.58	722,524,056,220.58	1.932.412.790.866,58	43,23%
Peralatan dan Mesin	523,416,264,784.71	597,998,237,109.82	660,104,007,380.83	642,831,198,109.61	707.406.607.333,25	8,02%
Gedung dan Bangunan	1,204,654,898,801.75	1,407,453,594,990.13	1,366,798,922,539.82	1,512,225,819,664.23	2.598.968.197.867,27	24,11%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,355,910,367,759.36	1,593,813,289,963.33	1,933,095,153,952.69	2,296,465,555,898.36	2.521.900.917.980,73	16,86%
Aset Tetap Lainnya	38,096,514,730.74	85,332,106,512.24	146,881,029,988.62	222,528,912,839.29	312.933.474.118,11	72,06%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6,626,923,168.86	26,989,338,603.61	67,472,869,613.61	167,669,746,872.98	47.728.502.109,08	133,56%
Akumulasi Penyusutan	(961,772,317,077.73)	(1,214,548,145,152.98)	(1,453,307,677,038.37)	(1,771,005,198,359.11)	(2.723.377.171.895,78)	30,39%
Jumlah Aset Tetap	2,865,028,954,306.77	3,196,881,841,165.23	3,338,796,714,524.78	3,793,240,091,245.94	5.397.973.318.379,24	17,98%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Aset Tak Berwujud	31,319,710,872.28	37,842,442,522.28	40,708,862,766.68	42,639,592,552.42	43.184.892.552,42	8,61%
Aset Lain - Lain	62,482,390,050.57	39,155,436,334.94	154,254,330,334.85	85,894,906,811.87	87.468.804.436,93	53,53%
Kas yang dibatasi penggunaannya	0.00	1,290,580,947.86	1,438,720,999.96	1,648,799,000.86	1.821.420.600,86	12,18%
Amortisasi	(18,820,271,943.03)	(26,467,278,110.28)	(32,806,266,408.63)	(38,245,938,028.42)	(41.093.947.598,46)	22,15%

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Jumlah Aset Lainnya	74,981,828,979.82	51,821,181,694.80	163,595,647,692.86	91,937,360,336.73	91.381.169.991,75	35,10%
JUMLAH ASET	3,434,803,479,138.21	3,758,068,876,310.63	3,972,401,379,069.76	4,304,642,843,783.95	6.110.123.116.410,46	16,36%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	431,129,493.32	90,270,299.32	94,287,862.32	22,842,488.77	22,124,988.77	-38.38%
Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Pendapatan diterima dimuka	234,863,206.93	75,181,501.67	105,730,000.00	911,173,100.92	888,737,287.39	182.99%
Utang Belanja	20,151,384,956.94	1,843,598,685.00	84,047,028,386.56	69,655,504,643.59	84,242,459,060.18	1092.96%
Utang Jangka Pendek Lainnya	6,256,798,827.07	10,052,533,745.11	17,787,693,328.31	13,904,427,668.21	14,072,602,753.95	29.25%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	27,074,176,484.26	12,061,584,231.10	102,034,739,577.19	84,493,947,901.49	99,225,924,090.29	172.69%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
JUMLAH KEWAJIBAN	27,074,176,484.26	12,061,584,231.10	102,034,739,577.19	84,493,947,901.49	99,225,924,090.29	172.69%
EKUITAS						
Ekuitas	3,407,729,302,653.95	3,746,007,292,079.53	3,870,366,639,492.57	4,220,148,895,882.46	6.010.897.192.320,17	16,18%
Jumlah Ekuitas	3,407,729,302,653.95	3,746,007,292,079.53	3,870,366,639,492.57	4,220,148,895,882.46	6.010.897.192.320,17	16,18%

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 5 Tahun Terakhir
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
JUMLAH EKUITAS	3,407,729,302,653.95	3,746,007,292,079.53	3,870,366,639,492.57	4,220,148,895,882.46	6.010.897.192.320,17	16,18%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,434,803,479,138.21	3,758,068,876,310.63	3,972,401,379,069.76	4,304,642,843,783.95	6.110.123.116.410,46	16,36%

Tabel 3. 10 Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kota Batam Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Rasio Likuiditas					
	Aset Lancar	405,854,821,887.51	419,146,912,032.72	384,730,380,150.43	331,039,531,027.91	534.682.880.187,14
	Persediaan	21,983,704,442.12	27,935,544,594.47	26,444,720,819.68	42,492,333,485.56	46.996.484.773,30
	Kewajiban Jangka Pendek	27,074,176,484.26	12,061,584,231.10	102,034,739,577.19	84,493,947,901.49	99.225.924.090,29
1	Rasio Lancar	14.99	34.75	3.77	3.92	5,39
2	Rasio Quick	14.18	32.43	3.51	3.42	4,91
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	3,434,803,479,138.21	3,758,068,876,310.63	3,972,401,379,069.76	4,304,642,843,783.95	6.110.123.116.410,46
	Total Hutang	27,074,176,484.26	12,061,584,231.10	102,034,739,577.19	84,493,947,901.49	99.225.924.090,29
	Total Ekuitas	3,407,729,302,653.95	3,746,007,292,079.53	3,870,366,639,492.57	4,220,148,895,882.46	6.010.897.192.320,17
1	DAR	0.0079	0.0032	0.0257	0.0196	0,0162

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2	DER	0.0079	0.0032	0.0264	0.0200	0,0165
C	Rasio Aktivitas					
	Pendapatan Daerah	1,936,406,807,579.72	2,215,680,286,681.50	2,157,662,190,348.08	2,360,092,860,079.71	2.522.890.256.865,30
	Saldo Awal Piutang	420,066,973,021.57	596.949.590.021,52	540,979,686,846.86	576,445,766,425.85	608,943,076,036.59
	Saldo Akhir Piutang	596,949,590,021.52	540,979,686,846.86	576,445,766,425.85	608,943,076,036.59	825,694,257,387.58
1	Rata-rata Umur Piutang	95.8505	93.7284	94.5144	91.6631	103.7783
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	165,607,045,634.32	199,594,367,785.74	166,050,176,054.96	157,747,979,329.61	158,573,882,188.40
	Saldo Awal Persediaan	11,948,177,480.00	21,983,704,442.12	27,935,544,594.47	26,444,720,819.68	42.492.333.485,56
	Saldo Akhir Persediaan	21,983,704,442.12	27,935,544,594.47	26,444,720,819.68	42,492,333,485.56	46.996.484.773,30
2	Rata-rata Umur Persediaan	37.3931	45.6439	59.7675	79.7539	102,9912

Sumber: Diolah dari Neraca Daerah dan CaLK Pemerintah Kota Batam

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Batam positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, meski nilai rasio menunjukkan nilai yang riil setelah tahun 2017 karena pada 2 tahun sebelumnya masih adanya penyesuaian dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh. Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Batam cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

Rata-rata Umur Piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, adanya kecenderungan penurunan, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Daerah (antara 95-91 hari), meski pada tahun 2019 terjadi peningkatan umur piutang. Sedangkan, rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 45-103 hari). Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

KESIMPULAN

- ⇒ Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1, meski nilai rasio menunjukkan nilai yang riil setelah tahun 2017 karena pada 2 tahun sebelumnya masih adanya penyesuaian dalam penerapan SAP berbasis akrual secara penuh;
- ⇒ Kinerja kedua rasio tersebut menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Batam cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya;
- ⇒ Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas;
- ⇒ Adanya kecenderungan penurunan Rata-rata umur piutang, hal ini berarti terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemda (antara 95-91 hari), meski pada tahun 2019 terjadi peningkatan umur piutang;
- ⇒ Dari analisis neraca menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan, hal ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan (antara 45-103 hari);
- ⇒ Hal ini menunjukkan perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Batam merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Berikut 2 analisis kedua kebijakan tersebut akan dijelaskan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Batam selama 3 tahun terakhir.

Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam Tahun Anggaran 2017 - 2019

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran [Belanja + Pengeluaran Pembiayaan] (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	2017	750.182.482.840,00	2.225.121.485.774,77	33,71%
2	2018	865.739.436.560,00	2.381.523.875.914,02	36,35%

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran [Belanja + Pengeluaran Pembiayaan] (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
3	2019	903.495.293.050,00	2.531.917.988.612,87	35,68%

Sumber: Diolah dari LRA, dan LKPJ Bupati Pemerintah Kota Batam

Jika dilihat dari tabel 3.11 di atas, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2017 realisasi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar Rp750.182.482.840,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp865.739.436.5603,00 pada tahun 2018, atau meningkat sebesar 6,25% per tahun. Namun demikian, pada tahun 2019, realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat menjadi sebesar Rp903.495.293.050,00.

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut masih cenderung meningkat. Pada tahun 2017, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 33,71% dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya sedikit naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 36,35% dan kemudian turun kembali pada tahun selanjutnya menjadi sebesar 35,68% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan Daerah Kota Batam berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan daerah Kota Batam adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang.

Analisis realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, beserta proyeksinya sudah dibahas dan dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya, masuk dalam kategori penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pada sub bab ini akan dibahas lebih mendalam pada komponen dalam Pembiayaan, misalnya analisis Penutup Defisit Anggaran, analisis SiLPA, dan analisis Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Jika dilihat dari tabel 3.12 di bawah, diketahui bahwa penggunaan SiLPA relatif mengalami penurunan. Penurunan terhadap Penggunaan

SILPA ini tentu dipengaruhi oleh SILPA yang terus berkurang juga setiap tahunnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi fiscal distress (tekanan anggaran). Sedangkan, pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagaimana telah disajikan dalam Tabel 3.8 di atas, diketahui bahwa dalam 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal ke BUMD sebagaimana lazimnya Pemerintah Daerah di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan analisis perhitungan surplus (defisit) riil dan pengaruhnya terhadap kebijakan pembiayaan daerah.

**Tabel 3. 12 Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Kota Batam
Tahun 2017 - 2019**

No	Uraian	2017 (RP)	2018 (RP)	2019 (RP)
1	2	3	4	5
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.157.662.190.348,08	2.360.092.860.079,71	2.522.890.256.865,30
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	2.225.121.485.774,77	2.381.523.875.914,02	2.531.917.988.612,87
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-
A	Surplus (Defisit) Riil	(67.459.295.426,69)	(21.431.015.834,31)	(9.027.731.747,57)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan			
	- Penggunaan SiLPA	133.301.586.365,74	65.839.607.920,05	44.408.264.485,74
	- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	- Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
	- Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	133.301.586.365,74	65.839.607.920,05	44.408.264.485,74
A+B	SILPA	65.842.290.939,05	44.408.592.085,74	35.380.532.738,17

Sumber: Diolah dari LRA, APBD, dan LKJP Bupati Pemerintah Kota Batam

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Meskipun terjadi defisit riil selama 3 tahun terakhir, saldo penggunaan SiLPA pada penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA dan dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2017 defisit riil sebesar -Rp67.459.295.426,69 ditambah penggunaan SiLPA sebesar Rp133.301.586.365,74 sehingga SILPA yang terbentuk menjadi sebesar Rp65.842.290.939,05. Pada tahun 2018 defisit riil yang terjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang mencapai sebesar -Rp21.431.015.834,31 ditambah realisasi penggunaan SiLPA sebesar Rp65.839.607.920,05 sehingga SILPA menjadi hanya tinggal sebesar Rp44.408.592.085,74 jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2017. Terakhir, pada tahun 2019 terjadi realisasi defisit riil sebesar -Rp9.027.731.747,57, sehingga SILPA diperkirakan turun hanya menjadi sebesar Rp35.380.532.738,17.

Berdasarkan informasi di atas, maka dapat disajikan tabel analisis sisa lebih riil perhitungan anggaran tahun berjalan sebagai berikut. Perhitungan sisa lebih riil anggaran diperoleh dari sisa kas daerah pada akhir tahun anggaran dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak ketiga dan kegiatan lanjutan. Untuk itu akan diperoleh data sisa anggaran sebenarnya yang dapat digunakan untuk memproyeksi sisa anggaran riil (secara kas) yang dapat digunakan untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah. Perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran dilakukan untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran tetap mempergunakan angka hasil perhitungan pada tahun 2019. Berikut disajikan perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran.

Tabel 3. 13 Analisis Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Batam Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp
1	Saldo Kas Neraca Daerah	65.934.586.363,37	44.431.434.547,51	35.402.657.726,94
	Kas di Kasda	47.740.064.211,72	28.737.850.896,05	20.022.572.609,62
	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.638.000,00	21.244.300,00	25.465.800,00
	Kas di BLUD	10.081.787.954,75	10.237.781.560,06	7.769.257.498,67
	Kas Lainnya	8.105.096.196,90	5.434.557.791,40	7.585.361.818,65
	Dikurangi:			
2	Kewajiban kepada Pihak Ketiga s.d Akhir Tahun belum Terselesaikan	0,00	0,00	0,00
3	Kegiatan Lanjutan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Kapitasi dan BOS	11.087.154.899,66	7.920.680.416,29	7.585.361.818,65
1-(2+3+4)	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	54.847.431.463,71	36.510.754.131,22	27.817.295.908,29

Sumber: Diolah dari LRA, Neraca, dan LKPJ Bupati Pemerintah Kota Batam

Data pada tabel 3.14 di atas, menunjukkan bahwa saldo kas dalam Neraca Daerah per 31 Desember tidak mencerminkan posisi kas di kasda yang sebenarnya. Jika dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) saldo kas dalam Neraca Daerah terdiri dari kas di kas daerah (kasda), kas di Bendahara Pengeluaran, kas di Bendahara Penerimaan, kas di BLUD, dan kas lainnya. Posisi seharusnya pada akhir tahun, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, tidak ada kas yang ada pada Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran kecuali terkait dengan pengelolaan dana PFK yang belum disetor. Namun demikian, pada 3 tahun terakhir terlihat bahwa ada sejumlah dana yang masih ada di kas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, jika dilihat dari data komposisi penggunaan SiLPA tidak ada keterangan yang jelas terkait dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan. Untuk itu, seluruh saldo kas dalam Neraca Daerah dianggap sebagai sisa kas riil yang dapat dimanfaatkan untuk menghitung proyeksi kemampuan riil keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan data realisasi SILPA riil sebagaimana pada tabel 3.13 di atas dengan hasil perhitungan sisa lebih riil perhitungan anggaran pada tabel 3.14, maka terdapat selisih, meski cukup kecil, antara SILPA dengan sisa kas riil perhitungan anggaran. Selain itu juga, nilai SILPA tidak berbanding lurus dengan nilai sisa lebih kas riil perhitungan anggaran. Hal ini perlu dilakukan analisis lebih mendalam lagi untuk mencari penyebab dan kejadian transaksi yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat akan menentukan proyeksi sisa lebih (riil) perhitungan anggaran yang tidak mampu diakomodasi oleh format tabel dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai pengurang dari sisa kas, yaitu adanya sisa kas yang berasal dari Dana Kapitasi dan Dana BOS. Fenomena tersebut terjadi pada Pemerintah Kota Batam, sehingga sisa kas yang disajikan dalam Neraca masih merupakan sisa kas yang diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Kapitasi dan Dana BOS yang ada di Puskesmas dan Sekolah. Selain itu juga, sesuai dengan informasi hasil dari FGD, Pemerintah Kota Batam masih terdapat kegiatan yang bersumber dari DAK yang belum direalisasikan, serta masih adanya tunda bayar kepada pihak ketiga yang tidak diungkap dalam pengungkapan SILPA. Untuk itu, sisa kas terakhir berbeda dengan SILPA dan dari 3 tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun sama halnya dengan kondisi SILPA. Terdapat kecenderungan penurunan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran selama 3 tahun terakhir, jadi ada indikasi *Fiscal Distress*.

KESIMPULAN

- ⇒ Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, meski secara besaran nominal belanja untuk aparatur tersebut semakin naik;
- ⇒ Terlihat adanya penurunan SILPA tiap tahunnya sehingga mengurangi penggunaan SiLPA pada tahun berikutnya pada penerimaan pembiayaan. Kenaikan realisasi pendapatan tidak sebanding dengan kenaikan total belanja sehingga pada tahun 2017 Penggunaan SiLPA lebih besar untuk menutupi defisit riil anggaran. Hal ini juga terjadi pada 2 tahun setelahnya. Gejala ini tentu mengarah pada potensi adanya kondisi *fiscal distress* (tekanan anggaran);
- ⇒ Sisa kas yang disajikan dalam Neraca masih merupakan sisa kas yang diperuntukkan untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Kapitasi dan Dana BOS yang ada di Puskesmas dan Sekolah. Sehingga, sisa kas terakhir berbeda dengan SILPA dan dari 3 tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun sama halnya dengan kondisi SILPA. Terdapat kecenderungan penurunan Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran selama 3 tahun terakhir, jadi ada indikasi *Fiscal Distress*;

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Hasil perhitungan rata-rata pertumbuhan masing-masing komponen dalam pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan sebagaimana pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas menunjukkan angka pertumbuhan yang relatif sangat optimistik. Rata-rata pertumbuhan pada komponen PAD di atas 8,25% dengan angka pertumbuhan setiap tahunnya sangat fluktuatif (turun-naik). Sedangkan, perkembangan Pendapatan Transfer relatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,65%, meski tingkat pertumbuhan DAK dinilai terlalu optimistik, yaitu rata-rata naik 5,41% per tahun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan bagi hasil dari pajak Pemerintah Provinsi sebesar 20,86% dinilai terlalu optimistik. Pertumbuhan Dana Penyesuaian, berupa DID biasanya, sebesar 78,59% juga terlalu tinggi. Belum lagi dengan adanya dampak krisis ekonomi akibat adanya wabah Covid-19 tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah.

Oleh karena itu, dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimistik. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Apalagi jika dilihat dari pertumbuhan setiap jenis pendapatan per tahunnya, masih sangat fluktuatif, bahkan beberapa pos pendapatan mengalami kecenderungan pertumbuhan negatif. Penetapan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan dilakukan dengan hanya mengakui angka pertumbuhan sebesar 50%, serta mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan Pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah Covid-19. Penyesuaian terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah juga telah dilakukan serta penurunan dan relaksasi terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan juga perlu dipertimbangkan. Penurunan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari Pemerintah serta bagi hasil pajak provinsi juga harus diperhitungkan. Penerimaan Dana Alokasi Umum juga diperkirakan akan terjadi pada 2 tahun ke depan, sesuai dengan arahan dari Pemerintah, sebesar 10%-20% dari realisasi TA 2020.

Selain itu, tahun dasar menggunakan anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian APBD akibat adanya wabah Covid-19. Adanya wabah nasional dan dunia berupa pandemi covid 19 (virus corona) yang menyebabkan terjadinya bencana kesehatan dunia dan nasional, telah berdampak pada kondisi ekonomi dunia dan nasional yang sedang mengalami krisis yang sangat berat, selain ancaman korban jiwa yang semakin banyak. Oleh karena itu, selain tentu pastinya akan terjadi penurunan kapasitas fiskal, juga perlu adanya kebijakan yang cepat dan tepat untuk mengadakan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan, termasuk

keuangan daerah, untuk mengatasi dan menanggulangi wabah beserta dampak langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah aturan setingkat Perppu sampai dengan aturan teknis setingkat Menteri terkait, untuk menanggulangi kejadian bencana kesehatan seperti saat ini.

Berdasarkan kebijakan terkait penanggulangan dampak atas wabah Covid-19 di tahun 2020, maka Pemerintah Kota Batam melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2020 dan begitu juga data realisasi APBD TA 2020 menunjukkan adanya penurunan atas kinerja pendapatan yang sangat drastic, terutama pada PAD. Atas dasar hal tersebut maka untuk tahun dasar tetap menggunakan data realisasi APBD TA 2020, akan tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-rata pertumbuhan karena sifat data yang abnormal.

Sedangkan, untuk proyeksi tahun 2021 menggunakan data yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun 2021. Khusus, untuk data proyeksi pajak dan retribusi daerah TA 2022 sampai dengan TA 2026 menggunakan data yang dirilis oleh BP2RD. Berdasarkan asumsi dan kebijakan di atas, maka perhitungan proyeksi penerimaan daerah daerah disajikan dalam tabel 3.14 sebagai berikut.

Tabel 3. 14 Proyeksi Pendapatan Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Total Penerimaan Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2024

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2020)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (Rp)***	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
PENDAPATAN								
Pendapatan Asli Daerah	975.568.562.748,32		1.432.639.685.193	1.104.374.326.529	1.178.559.357.293	1.262.419.600.512	1.348.341.020.049	1.443.729.907.421
Pajak Daerah	755.878.193.409,76	5,80%	1.156.408.239.166,00	866.100.569.850,00	926.807.946.342,50	991.638.236.019,63	1.061.004.332.645,81	1.135.096.104.816,18
Retribusi Daerah	92.616.063.190,00	0,50%	145.516.700.000,00	111.531.061.230,00	115.842.667.654,60	124.047.682.587,69	128.478.663.955,85	135.741.088.075,05
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.601.742.730,00	25,71%	11.685.992.811,00	14.691.012.319,45	18.468.763.969,05	23.217.953.611,87	29.188.383.739,50	36.694.092.837,22
Lain - Lain PAD yang Sah	118.472.563.418,56	1,18%	119.028.753.216,00	112.051.683.130,00	117.439.979.326,50	123.515.728.292,83	129.669.639.707,47	136.198.621.692,84
Pendapatan Transfer	1.432.995.313.284,00		1.319.207.339.209,00	1.404.643.178.175,67	1.524.206.532.712,20	1.641.529.857.751,00	1.769.544.728.960,37	1.909.252.573.053,72
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.058.103.342.486,00		1.063.483.071.209	1.146.363.737.076	1.262.125.775.682	1.375.377.786.339	1.499.024.895.535	1.634.039.438.638
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	297.076.594.012,00	7,50%	219.261.686.209,00	180.979.656.209,00	205.811.686.618,60	219.477.582.610,08	234.050.894.095,39	249.591.873.463,32
Dana Alokasi Umum	629.854.829.000,00	2,84%	633.957.071.000,00	711.610.330.200,00	782.771.363.220,00	861.048.499.542,00	947.153.349.496,20	1.041.868.684.445,82
Dana Alokasi Khusus	131.171.919.474,00	2,71%	210.264.314.000,00	253.773.750.666,67	273.542.725.843,60	294.851.704.186,82	317.820.651.942,97	342.578.880.729,33
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	167.515.720.197		23.865.024.000	26.420.197.100	29.062.216.810	31.968.438.491	35.165.282.340	38.681.810.574
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	167.515.720.197,00	10,00%	23.865.024.000,00	26.420.197.100,00	29.062.216.810,00	31.968.438.491,00	35.165.282.340,10	38.681.810.574,11
Transfer Pemerintah Provinsi	207.376.250.601		231.859.244.000	231.859.244.000	233.018.540.220	234.183.632.921	235.354.551.086	236.531.323.841
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	205.376.250.601,00	2,50%	231.859.244.000,00	231.859.244.000,00	233.018.540.220,00	234.183.632.921,10	235.354.551.085,71	236.531.323.841,13

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2020)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (Rp)***	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	169.226.557.955,00		109.016.200.000,00	109.016.200.000,00	109.179.724.300,00	109.343.493.886,45	109.507.509.127,28	109.671.770.390,97
Pendapatan Hibah	169.226.557.955,00	0,15%	109.016.200.000,00	109.016.200.000,00	109.179.724.300,00	109.343.493.886,45	109.507.509.127,28	109.671.770.390,97
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.577.790.433.987,32		2.860.863.224.402,00	2.618.033.704.705,12	2.811.945.614.304,85	3.013.292.952.149,47	3.227.393.258.136,27	3.462.654.250.865,97
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan								
- Penggunaan SILPA	35.095.093.566,17	3,86%	107.710.833.667,00	131.000.000.000,00	136.056.600.000,00	141.308.384.760,00	146.762.888.411,74	152.427.935.904,43
- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.095.093.566,17		107.710.833.667,00	131.000.000.000,00	136.056.600.000,00	141.308.384.760,00	146.762.888.411,74	152.427.935.904,43
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	2.612.885.527.553,49		2.968.574.058.069,00	2.749.033.704.705,12	2.948.002.214.304,85	3.154.601.336.909,47	3.374.156.146.548,01	3.615.082.186.770,40

Sumber: * dari data LRA 2020 Anaudited; **dari data ringkasan APBD 2021; ***dari data proyeksi BPPRD dan BPKAD sd 2026

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Lampiran Permendagri No 86 Tahun 2017 Tabel T-B.10 dijelaskan bahwa pengeluaran dan belanja wajib mengikat dan prioritas utama terdiri dari Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan serta Insentif Pimpinan Daerah), Belanja Bunga, Belanja Subsidi, dan Belanja Bagi Hasil. Ditambah lagi dengan Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang dan Penyertaan Modal. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kota Batam selama 3 tahun terakhir serta pertumbuhan per tahunnya.

Tabel 3. 15 Rata-rata Pertumbuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2017 - 2019

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6
A	Total Belanja Wajib dan Mengikat	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	6,25%
	Belanja Pegawai	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	6,25%
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%) 3 Tahun Terakhir
1	2	3	4	5	6
	Belanja Bantuan Keuangan ke Pemdes	0,00	0,00	0,00	0,00%
B	Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah	750.182.482.840,00	865.739.436.560,00	903.495.293.050,00	6,25%

Sumber: Diolah dari LRA Bupati Pemerintah Kota Batam

Berdasarkan perhitungan di tabel 3.15 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun tidak disebabkan karena adanya kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya. Jika dilihat data keuangan per tahun anggaran, maka data yang relevan yang masuk menjadi perhitungan dalam belanja wajib dan mengikat hanya belanja pegawai, karena selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan belanja bunga, belanja subsidi, dan tidak ada belanja transfer ke Pemerintah Desa. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan, selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kota Batam tidak melakukan kebijakan penyertaan modal maupun pengeluaran pembiayaan lainnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bahasan penentuan proyeksi pendapatan, khusus untuk proyeksi tahun 2021 perlu mempertimbangkan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam LKPD Tahun Anggaran 2020 sebagai tahun dasar, setelah adanya penyesuaian kebijakan

anggaran akibat adanya dampak wabah Covid-19. Perubahan yang terjadi pada alokasi anggaran belanja dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran juga penting untuk melihat kemungkinan alokasinya di tahun 2021. Perkiraan dari sejumlah hasil riset dan pendapat ahli, bahwa kemungkinan dampak dari adanya wabah pandemic Covid-19 ini, terutama untuk pemulihan perekonomian, akan memakan waktu sampai dengan 2 tahun ke depan, atau sampai dengan tahun 2022. Informasi tersebut tentu akan berdampak pada perkiraan alokasi anggaran belanja pada tahun 2 tahun pertama, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.

Baru kemudian, pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk menentukan proyeksi belanja wajib mengikat dan prioritas utama dilakukan dengan mengkalikan proyeksi terakhir dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Sedangkan, proyeksi realisasi pengeluaran pembiayaan yang kemungkinan dari penyertaan modal, dianggarkan berdasarkan kewajiban penyertaan modal daerah sesuai dengan Perda penyertaan modal yang rencananya akan ditetapkan di tahun 2020.

Dengan demikian proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat disajikan sebagaimana tabel 3.16 di bawah.

Tabel 3. 16 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Batam Tahun Anggaran 2021 - 2024

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2020)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Belanja Wajib dan Mengikat	879.057.813.329,00		884.551.479.603,99	887.315.479.057,90	890.088.115.310,41	892.869.415.349,33	895.659.406.246,80	898.458.115.159,55
Belanja Pegawai	879.057.813.329,00	0,31%	884.551.479.603,99	887.315.479.057,90	890.088.115.310,41	892.869.415.349,33	895.659.406.246,80	898.458.115.159,55
Belanja Bunga	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemesan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	-		-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun Dasar (Realisasi APBD TA 2020)*	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi					
			APBD TA 2021 (Rp)**	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah	879.057.813.329,00		884.551.479.603,99	887.315.479.057,90	890.088.115.310,41	892.869.415.349,33	895.659.406.246,80	898.458.115.159,55

Sumber: * dari data LRA 2020 Anaudited; **dari data ringkasan APBD 2021

Dari tabel 3.16 di atas, penyesuaian angka pertumbuhan yang digunakan dilakukan dengan mengkalikan angka rata-rata pertumbuhan pada tabel 3.7 dan tabel 3.8 dikali 10%. Atau, hanya 10% saja dari nilai pertumbuhan per tahunnya yang digunakan untuk menghitung proyeksi.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang berakhir tahun 2026, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah sebagaimana pada tabel 3.5 di atas ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran seperti pada tabel 3.14 di atas, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kota Batam tahun 2021 s.d tahun 2026 disajikan pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3. 17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2024

Uraian	Proyeksi					
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Pendapatan Daerah	2.860.863.224.402,00	2.618.033.704.705,12	2.811.945.614.304,85	3.013.292.952.149,47	3.227.393.258.136,27	3.462.654.250.865,97
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	107.710.833.667,00	131.000.000.000,00	136.056.600.000,00	161.704.059.697,09	192.186.214.579,23	228.414.432.782,23
Total Penerimaan	2.968.574.058.069,00	2.749.033.704.705,12	2.948.002.214.304,85	3.174.997.011.846,56	3.419.579.472.715,51	3.691.068.683.648,20
Dikurangi:						
Total Belanja dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.045.221.940.830,00	1.048.487.994.802,30	1.051.764.254.366,49	1.055.050.751.412,44	1.058.347.517.929,70	1.061.654.586.007,76
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.923.352.117.239,00	1.700.545.709.902,82	1.896.237.959.938,37	2.119.946.260.434,12	2.361.231.954.785,81	2.629.414.097.640,44

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam dan Data Proyeksi dari BPPRD dan BPKAD

Tabel 3.17 di atas menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Batam terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam meski cukup tinggi tapi jika dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2019 tidak lebih baik karena adanya dampak wabah pandemic Covid-19 ini menyebabkan adanya krisis perekonomian global dan nasional, yang juga menyebabkan adanya tekanan anggaran (*fiscal distress*). Perekonomian dunia dan nasional diperkirakan akan kembali normal setelah 2 tahun dari selesainya wabah pandemic Covid-19, atau jika diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2020 wabah ini akan mereda, maka baru tahun 2023 perekonomian global akan kembali normal. Di masa 2 tahun ke depan diperkirakan fiskal Pemerintah dan Pemerintah Daerah akan mengalami tekanan dan penurunan kapasitas. Sehingga, diperkirakan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 kemarin, baru pada tahun 2024 kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Batam akan melampaui dari tahun anggaran 2019.

Kemudian, Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam 5 tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD ini. Sebagaimana adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pola nomenklatur Program-Kegiatan-Sub Kegiatan dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, maka perlu adanya pendefinisian ulang terkait penyelarasan antara kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah yang telah diproyeksikan di atas dengan total kerangka pendanaan program yang ada di Bab VII RPJMD ini. Untuk itu, penyelarasan total proyeksi anggaran pada pendanaan program tidak dapat lagi dibandingkan dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, melainkan dibandingkan dengan proyeksi total penerimaan daerah.

Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar (urusan wajib pelayanan dasar);
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Walikota (Janji Walikota) termasuk di dalamnya adalah program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar; dan terakhir
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diperoleh proyeksi alokasi anggaran indikatif untuk ketiga prioritas di atas dibandingkan dengan kapasitas total penerimaan daerah.

Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

Uraian	Proyeksi					
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (Total Penerimaan Daerah)	2.968.574.058.069	2.749.033.704.705	2.948.002.214.305	3.154.601.336.909	3.374.156.146.548	3.615.082.186.770
Prioritas I	1.089.020.636.438	982.976.494.190	972.702.736.117	1.075.889.157.026	1.103.058.656.898	1.217.445.520.371
Prioritas II (Termasuk Prioritas I)	1.759.721.582.903	1.467.172.109.652	1.661.242.949.643	1.764.114.881.715	1.925.108.495.166	2.101.829.951.962
Prioritas III	1.314.389.370.664	1.219.617.221.196	1.289.330.555.448	1.343.221.272.368	1.493.545.095.945	1.569.378.735.200

Sumber: Data Diolah

Jika dilihat dari Tabel 3.18 di atas, maka dapat diperoleh persentase proyeksi alokasi anggaran untuk ketiga prioritas di atas selama 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2021 s.d 2026, adalah untuk prioritas I pada tahun 2021 memiliki alokasi 36,68% dari total proyeksi penerimaan daerah tahun 2021, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 menjadi hanya sebesar 32,69% dari

proyeksi total penerimaan daerah tahun 2025, dan tahun 2026 naik menjadi 33,68% dari proyeksi total penerimaan daerah tahun 2026. Sedangkan, untuk prioritas II, dimana di dalamnya juga termasuk adanya program yang masuk Prioritas I, pada tahun 2021 memiliki alokasi 59,28% dari total proyeksi penerimaan daerah tahun 2021, kemudian menurun drastis pada tahun 2022 menjadi hanya sebesar 53,37% dan kembali meningkat secara perlahan-lahan sehingga pada tahun 2026 menjadi 58,14% dari proyeksi penerimaan tahun 2026. Sebaliknya, untuk proyeksi alokasi anggaran Prioritas III cenderung mengalami stagnan dengan kisaran proporsi sebesar 43-44%.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJMD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat wajib.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi yang cukup tinggi antara 2,19 persen hingga 5,92 persen dengan pertumbuhan ekonomi terakhir pada tahun 2019 menunjukkan angka 5,92 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil di antara 4,88 persen hingga 5,17 persen dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Batam dapat dikatakan relatif tidak stabil dengan dua periode tahun 2017 dan 2018 tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan nasional. Stabilitas pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor ekonomi makro merupakan faktor fundamental yang diperlukan untuk menjamin stabilitas keberlanjutan pembangunan daerah. Fluktuasi kondisi ekonomi di Kota Batam ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global sebagaimana yang diketahui bahwa transaksi perdagangan internasional di Kota Batam cukup tinggi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, fluktuasi perekonomian yang cukup besar ini juga terjadi karena perekonomian Kota Batam sangat terfokus pada industri pengolahan yang menyumbang lebih dari separuh dari keseluruhan perekonomian sehingga guncangan pada sektor ini akan mempengaruhi keseluruhan perekonomian daerah.

Untuk meningkatkan kestabilan perekonomian daerah, Kota Batam harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Tingginya kontribusi sektor industri pengolahan yang ada saat ini perlu dimanfaatkan dengan mengoptimalkan

multiplier effect dari sektor tersebut terhadap sektor-sektor lain. Hal yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan rantai pasok industri lokal dengan meningkatkan daya saing industri-industri kecil dan menengah yang ada sehingga kebutuhan pasokan industri besar dapat sebagian dialihkan dari bahan baku impor ke bahan baku lokal serta meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

Inflasi adalah suatu proses terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan sistem pasar. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan, likuiditas di pasar yang berlebihan hingga proses distribusi yang tidak lancar. Penyebab inflasi adalah karena kenaikan biaya produksi. Inflasi bisa disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan terjadi secara terus-menerus. Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah karena permintaan dan minat masyarakat terhadap suatu barang meningkat. Jika suatu barang atau jasa laris dan banyak dibutuhkan masyarakat, maka bisa membuat harga menjadi naik. Meskipun inflasi merupakan salah satu tanda meningkatnya perekonomian di daerah, inflasi yang terlalu tinggi dapat memberikan dampak negatif ke masyarakat seperti menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya daya saing ekspor, dan mengurangi minat investasi.

Meskipun pada tahun 2019 Kota Batam mencatatkan laju inflasi yang lebih rendah dari laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang, selama periode 2015 hingga 2018, laju inflasi di Kota Batam selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional dan Kota Tanjungpinang sebagai pembanding. Meskipun laju inflasi di Kota Batam masih tergolong dalam laju inflasi ringan di bawah 10%. Meski demikian, salah satu dampak dari inflasi adalah melemahnya nilai mata uang yang berpengaruh pada keengganan masyarakat untuk menyimpan uangnya terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tetap sehingga secara jangka panjang akan berpengaruh pada tingkat daya tarik investasi di Kota Batam. Inflasi di Kota Batam perlu dijaga secara relatif terhadap daerah-daerah sekitar dan daerah di Indonesia secara umum supaya posisi Kota Batam sebagai tujuan investasi dapat terjaga.

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah. Kedua pelayanan tersebut di Kota Batam sudah berjalan secara baik, namun seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika perubahan lingkungan regional, nasional maupun global maka pelayanan Kesehatan dan Pendidikan secara iteratif perlu terus dioptimalkan. Dalam pelayanan Pendidikan masih diperlukan pemerataan kualitas antara wilayah *mainland* dan *hinterland*, perluasan kapasitas pelayanan Pendidikan sesuai standar masih harus terus dilakukan. Seiring dengan hal tersebut, pelayanan Kesehatan juga masih perlu peningkatan pemerataan, kapasitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta tenaga pendukungnya masih perlu dioptimalkan baik di wilayah *mainland* dan *hinterland*.

Pembangunan gender selama ini belum mendapatkan prioritas yang cukup dalam pembangunan daerah Kota Batam salah satunya ditunjukkan dengan pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang baru mulai dilakukan pada tahun 2019 lalu. Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diterapkan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. IKM memiliki jumlah yang besar dan menyumbang penyerapan tenaga kerja industri yang sangat besar. Disamping itu IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber

pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional dan daerah yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Pengembangan IKM diharapkan akan meningkatkan jumlah unit usaha IKM rata-rata sebesar 1 persen per tahun atau sekitar 30 ribu unit usaha IKM per tahun dan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 3 persen per tahun secara nasional. Pengembangan IKM di Kota Batam perlu mengacu pada sasaran nasional tersebut untuk mendukung pengembangan IKM secara nasional. Dari sisi kelembagaan, diharapkan terbentuknya sentra IKM serta UPT terkait yang mampu menyediakan penyuluh dan konsultan pengembangan IKM. Dari sisi fasilitas, peningkatan kompetensi SDM, fasilitas produksi dan permodalan perlu diupayakan untuk meningkatkan daya saing IKM di daerah.

Permasalahan makro lain yang perlu diperhatikan di Kota Batam adalah masih relatif lebih tingginya tingkat pengangguran dibandingkan dengan provinsi maupun rata-rata nasional. Sebagai daerah pusat industri, hal ini perlu menjadi perhatian lebih mengingat industri diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang ada di daerah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Batam selalu fluktuatif dari tahun ke tahun namun dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Dengan meningkatnya angka pengangguran, nilai pendapatan masyarakat pun ikut menurun, artinya jika pendapatan menurun maka daya beli masyarakat juga mulai menurun. Hal ini menjadi menimbulkan permasalahan lainnya seperti perlambatan ekonomi. Masalah dalam pergerakan perekonomian dilihat dari daya beli dan pengangguran ini berdampak pada melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa masalah bagi sektor ketenagakerjaan di Kota Batam. Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat,

sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Tabel 4. 1 Permasalahan Makro Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil	Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi belum optimal	Perekonomian terlalu bertumpu pada industri besar yang ada di kawasan industri sehingga pengembangan sektor ekonomi lain belum optimal.
2.	Tingginya Laju Inflasi	Meningkatnya harga pada kelompok barang penyusun inflasi terutama dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.	Masih belum optimalnya pengelolaan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan barang, kelancaran distribusi, kemudian koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam mengendalikan harga.
3	Kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan belum merata	Kapasitas pelayanan Pendidikan SD-SMP, serta kapasitas pelayanan Kesehatan masih belum sesuai standar;	Masih belum tercukupinya daya tampung sarana dan prasarana pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, serta belum tercukupinya jumlah tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan serta tenaga pendukungnya.
4	Kualitas infrastruktur belum merata	Pemenuhan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih kurang	Sulitnya penyediaan lahan untuk pemenuhan hunian vertikal untuk MBR, pemanfaatan anggaran selain APBD untuk penyediaan lahan dan pembangunan hunian vertikal belum dioptimalkan.
		Pemenuhan perumahan di wilayah hinterland belum optimal	Kendala penyediaan lahan dan potensi pembiayaan selain APBD belum dioptimalkan.
		Rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan rendah	Masih kurangnya moda transportasi massal yang handal memicu penambahan kendaraan bermotor, sehingga penurunan rasio Panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cukup tinggi. Pembangunan transportasi massal merupakan pendekatan <i>green infrastructure</i> yang dapat menekan produksi asap kendaraan bermotor, selain itu pembangunan transportasi massal akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan hanya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pembangunan/penambahan panjang jalan.
		Kualitas permukaan jalan (kondisi mantap) masih perlu dioptimalkan	Laju penurunan kualitas permukaan jalan belum di imbangi dengan tingkat pemeliharaan jalan.
		Ketersediaan air bersih belum merata antara wilayah mainland dengan hinterland	Faktor geografis kepulauan dan jenis struktur tanah berimplikasi pada sulitnya ketersediaan air tanah, serta faktor iklim yang berdampak pada kekeringan. Selain itu masih kurangnya sumber-sumber penampung air bersih beserta jaringan pipa distribusi air.
5	Kualitas pelayanan di tingkat kecamatan belum merata	Area pelayanan di beberapa kecamatan sangat besar sehingga tidak efektif dalam menjangkau masyarakat	Faktor demografis pertumbuhan penduduk di suatu kecamatan belum di imbangi dengan pemekaran kecamatan sehingga menjauhkan pelayanan kepada masyarakat
6.	Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah	Belum optimalnya partisipasi IKM dalam rantai pasok industri	Daya saing IKM yang masih rendah
7.	Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Rendahnya serapan pasar tenaga kerja di Kota Batam	Kesesuaian kompetensi tenaga kerja serta <i>link & match</i> antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri
8.	Semakin menurunnya pertumbuhan pertambahan SILPA yang berpotensi adanya resiko tekanan anggaran	Penurunan SILPA dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang memadai	Penentuan target pendapatan yang selalu diatas perkiraan realisasinya sehingga dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam alokasi anggaran pengeluaran dan juga disebabkan masih bergantungnya kinerja realisasi PAD dari kinerja faktor eksternal yang sulit untuk dikendalikan.

Sumber: Hasil analisis

4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II tentang kondisi kinerja pemerintah Kota Batam berdasarkan capaian kinerja pelayanan pemerintahan di seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan penunjang Tahun

2016-2019, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi di periode pembangunan Tahun 2021-2024.

Permasalahan pembangunan daerah muncul dari adanya celah/*gap expectation* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan. Celah tersebut juga dapat muncul antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut disusun. Untuk itu, dari hasil analisis pada Bab II akan dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah Kota Batam sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Pendidikan	<p>1. Belum merata nya akses pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Rombel terhadap murid jenjang SD dan SMP masih belum sesuai standar; • Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya; • Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling; <p>2. Belum Optimalnya mutu pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka mengulang kelas SD sebesar 885 murid, angka mengulang SMP 171 murid, ini bermakna mengulang tidak naik kelas; • Sekolah dengan Akreditasi A jenjang SMP hanya 43,6 persen, sementara jenjang SD hanya 35,9 persen; • Persentase guru yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) sangat rendah, 75,45 persen guru PAUD, 74,19 persen guru SD, dan 71,1 persen guru SMP yang tidak mencapai nilai 55 (nilai standar); • 71,7 persen guru SMP belum tersertifikasi, 75,4 persen guru SD belum tersertifikasi, 85,3 guru PAUD belum tersertifikasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas daya tampung fasilitas pendidikan; 2. Peningkatan mutu, kedisiplinan dan peningkatan kesadaran pengabdian bagi guru/tenaga kependidikan; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (perpustakaan, laboratorium, dst); 4. Menyusun regulasi kemitraan sekolah dalam mengelola perpustakaan dengan komunitas-komunitas literasi, dan menyusun regulasi lainnya yang mendorong percepatan peningkatan urusan pendidikan di Kota Batam; 5. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang pendidikan di seluruh jenjang instansi terkait yang pendidikan; 6. Meningkatkan keterjangkauan dan validitas data kinerja penyelenggaraan pendidikan.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ul style="list-style-type: none"> • 36,8 persen guru PAUD belum berpendidikan D4/S1, 7,6 persen guru SD belum berpendidikan D4/S1, 3,4 persen guru SMP belum berpendidikan D4/S1; • Angka harapan lama sekolah (HLS) di Kota Batam pada tahun 2019 sebesar 13,15 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,15 tahun atau hanya setara dengan Diploma I; <p>3. Belum optimalnya tata kelola pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat; • Beberapa data realisasi indikator pendidikan Kota Batam berbeda dengan data realisasi indikator yang sama versi Kemendikbud; • Dalam beberapa indikator penting, penggunaan nomenklatur indikator kinerja Kota Batam tidak sama dengan indikator pendidikan Kemendikbud skala kota/kab yang telah memiliki definisi operasional yang jelas, perhitungan dan angka realisasi yang jelas; 	
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusinya yang tidak merata (rasio dokter umum dan rasio bidan belum mencapai target pemenuhan HAM aspek kesehatan); 2. Masih terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Batam hingga tahun 2024 (asumsi jumlah penduduk proyeksi BPS di tahun 2024 sebesar 1.174.771 jiwa) masih memerlukan tambahan :

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>3. Masalah Gizi masyarakat, masih terdapat kasus stunting di wilayah Kota Batam;</p> <p>4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Puskesmas, 88 pusku (asumsi standar 1 puskesmas dibantu 5 pusku); • 304 dokter umum (asumsi pemenuhan target nasional 50:100.000 di tahun 2024) • 98 dokter gigi (asumsi target nasional 14:100.000 di tahun 2024); • 934 perawat (asumsi target nasional 200:100.000 di tahun 2024); • 928 bidan (asumsi target nasional 130:100.000 di tahun 2024); • 82 kefarmasian (asumsi target nasional 30:100.000 di tahun 2024); • 184 sanitarian (asumsi target nasional 20:100.000 di tahun 2024); • 147 ahli gizi (asumsi target nasional 18:100.000 di tahun 2024); • 43 keterampilan fisik (asumsi target nasional 6:100.000 di tahun 2024); • 103 keteknisian medis (asumsi target nasional 18:100.000 di 2024); • Selain tenaga medis dan penunjang medis di atas, saat ini Kota Batam masih memerlukan tenaga manajemen, terutama di puskesmas. • Rasio puskesmas tahun 2019 sebesar 0,56:30.000 masih kurang dari standar 1:30.000;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> • Masih kekurangan jumlah pustu, (standar satu puskesmas dibantu 3-5 pustu), di Kota Batam satu puskesmas hanya dibantu 2 pustu; 2. Meningkatkan peran serta/dukungan <i>stake holder</i> yang terkait kesehatan di Posyandu baik pemerintah, swasta dan layanan non pemerintah; 3. Peningkatan aktifitas di Posyandu sebagai upaya persuasif sehingga muncul ketertarikan para ibu untuk memeriksakan anaknya; 4. Menurunkan kasus stunting; 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Batam Kota Sehat
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Bina Marga dan Sumber Daya Air masih menyisakan beberapa target yang belum terealisasi 100 persen pada periode lalu, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan jalan yang dibangun/ditingkatkan 2016-2019 tercapai 119,61Km dari total kebutuhan 177Km, masih menyisakan 57,39Km; 2. PJU yang dibangun selama tahun 2016-2019 sebanyak 1.157 titik, sementara kebutuhan sebesar 1.527 titik, masih menyisakan 370 titik; 3. PJU yang direhabilitasi selama 2016-2019 menyisakan 11.500m jaringan yang belum direhabilitasi (potensi direhabilitasi); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran (menghindari target yang terlalu optimis atau terlalu pesimis); 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>4. Alat berat periode 2016-2019 penambahan 15 unit, sementara kebutuhan 20 unit, menyisakan 5 unit yang belum terealisasi;</p> <p>5. Wilayah hinterland selama 2016-2019 total panjang jalan dibangun 10km, sementara terget 11km, masih menyisakan 1 km;</p> <p>6. Wilayah hinterland selama 2016-2019 panjang jembatan/pelantar yang dibangun sepanjang 1.040m, sementara kebutuhan sepanjang 1.500m, masih menyisakan 460m;</p> <p>7. Wilayah hinterland selama 2016-2019 dibangun PJU sebanyak 68 titik, dari kebutuhan 168 titik, masih menyisakan 100 titik (keterbatasan daya PLN);</p> <p>8. Kebutuhan pembangunan drainase 2016-2019 mencapai 22.000m, periode tersebut telah dibangun sepanjang 29.489m;</p> <p>9. Lokasi pantai abrasi yang ditangani kebutuhannya selama 2016-2019 sebesar 1.000, sementara realisasi hanya 523,2m;</p>	
		<p>Cipta Karya antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut:</p> <p>1. Pelayanan sistem air limbah rumah tangga (<i>hinterland</i>/Rumah tangga yang berada diatas laut-pinggiran sungai) sangat rendah (9,8%), hal ini dapat memicu penyakit diare akibat pola hidup tidak bersih (BABS), tahun 2017 rasio diare = 214 kasus diare per 1.000 orang;</p>	<p>1. Potensi sumber penyediaan air bersih berkelanjutan dapat dilakukan dengan (i) Optimalisasi waduk/embung (dibantu teknologi modifikasi cuaca ketika kemarau) serta membendung air laut untuk menjadi waduk; (ii) Memperbanyak SWRO dengan mulai memikirkan <i>co benefit approach</i> dimana proses desalinasi selain mengeluarkan air tawar, juga menghasilkan garam yang bernilai</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Hingga tahun 2019 masih terdapat 257 rumah tangga yang belum terlayani air bersih di wilayah mainland; 3. Penyediaan Sumber Air Baku di wilayah Hinterland 4. Hingga tahun 2019 masih terdapat 8.903 rumah tangga yang belum terlayani air bersih di wilayah hinterland; 5. Masih terdapat 13.264 rumah tangga yang belum memiliki sanitasi; 6. Ketersediaan sumber air baku belum merata. 	<p>ekonomi; dan/atau (iii) Menyediakan air bersih melalui teknologi <i>recycle water</i> skala kota. (iv) Penyambungan pipa bawah laut untuk suplai dari reservoir/waduk air baku ke rumah tangga. Semua alternatif tsb perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kerjasama, pembiayaan dan investasi serta pengelolannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD; 3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; 4. Perlu bersinergi dengan perangkat daerah yang lain, terutama terkait penyediaan sanitasi dalam rangka mewujudkan <i>open defecation free</i> di Kota Batam.
		<p>Tata Ruang antara lain memiliki permasalahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memiliki rujukan dokumen tata ruang (RTRW) yang sudah diperda kan; 2. Indikator kinerja program belum dapat benar-benar merepresentasikan kinerja tata ruang; 3. Pengawasan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang masih dilakukan manual, belum terintegrasi sehingga pelaksanaan pengawasan kurang efektif dan efisien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu percepatan dalam pengesahan RTRW Kota Batam; 2. Penguatan kualitas perencanaan agar tepat sasaran, target tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis, serta perumusan indikator <i>outcome</i> yang lebih clear, disertai definisi operasional dan rumus perhitungan yang konkret, sehingga tidak <i>misleading</i> dan benar-benar dapat merepresentasikan kemanfaatan dari <i>output-output</i> kegiatan yang telah dilakukan; 3. Pengawasan terkait penggunaan dan pemanfaatan ruang perlu menggunakan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			teknologi, sehingga kegiatan pengawasan lebih efektif, efisien serta data pengawasan lebih valid, akurat dan transparan, terlebih hal ini berkaitan dengan kontribusi terhadap peningkatan retribusi;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama 2016-2019 rata-rata penurunan RTLH sebesar 5,4 persen, saat ini berdasarkan data BDT masih terdapat 36.402 kk yang perlu menerima bantuan RTLH; 2. Kebutuhan hunian vertikal (rusunawa) di Kota Batam sebanyak 618 twin blok (lahan tersedia di Batamindo-Muka Kuning, Tanjung Ugang Rusun Putra Jaya, masing-masing lahan hanya cukup untuk 1 TW/54 unit); 3. Ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah susun masih terkendala; 4. Luas kawasan permukiman kumuh tahun 2017 adalah 2.327,11 Ha, sementara itu pengurangan luasan permukiman kumuh sejak tahun 2017 hingga di tahun 2019 sebesar 714,71 Ha, sehingga masih menyisakan 1.627,39 Ha kawasan permukiman kumuh; 5. Ruang terbuka hijau (RTH) hanya pada pengelolaan, sehingga penambahan RTH sulit diwujudkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan validasi data BDT terkait data penerima bantuan yang benar-benar memenuhi kriteria penyaluran bantuan RTLH berdasarkan kriteria baku; 2. Mencari alternatif pembiayaan selain APBD (APBN, PPP, CSR); 3. Penguatan sistem kontrol dalam pembangunan infrastruktur; 4. Meningkatkan koordinasi dengan BP Batam dan Kantor pertanahan untuk menyediakan lahan pembangunan Rumah Susun; 5. Perlu dibuat regulasi yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan RTH dan peningkatan luasannya untuk mencapai proporsi ideal.
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 84 persen, artinya masih terdapat 126.387 penduduk usia >17 tahun yang tidak menggunakan hak pilihnya; 2. Cakupan penegakan perda standar SPM adalah 100%, saat ini Kota Batam hanya memiliki realisasi 50%; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu cara-cara baru dan strategi yang bukan <i>business as usual</i> dalam pendekatan kepada masyarakat supaya mereka memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu; 2. Perlu optimalisasi sistem penegakan perda yang dibantu dengan pendekatan ICT

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tingkat Penyelesaian K3 standar SPM adalah 70% (tahun 2010), saat ini Kota Batam hanya memiliki realisasi 45%; 4. Cakupan petugas linmas standar SPM adalah 1 orang pada 1 RT, saat ini di Kota Batam belum seluruh RT memiliki petugas linmas; 5. <i>Response rate</i> manajemen kebakaran sebesar 73,60% (target SPM 75%); 6. Persentase Aparatur/SDM pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi sebesar 39,35% (target SPM 80%); 7. Kapasitas mobil pemadam >3000-5000 liter wilayah manajemen kebakaran sebesar 33,33 % (target SPM 90%); 	<p>sehingga meningkatkan coverage pemantauan untuk menindak pelanggaran Perda;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perlu konsolidasi bersama BP Batam terkait dengan sinergitas kekuatan <i>rescue and firefighter resource</i>, sehingga menjadi suatu kesatuan yang memiliki sinergitas dalam mekanisme pelaksanaan pelayanan di Kota Batam, dengan memasukan BP Batam sebagai elemen kekuatan dalam pelayanan damkar, maka SPM damkar di Kota Batam dapat tercapai. 4. Ditengah keterbatasan sumber daya, dalam konteks periode kedepan tetap perlu diupayakan agar realisasi pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan dapat meningkat >90 persen;
6	Sosial	<p>Adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Antara lain dipengaruhi oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih berfluktuatifnya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial; 3. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; 4. Masih rentan terhadap konflik sosial; dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial; 2. Perlu melakukan pemberdayaan sosial dan menyediakan jaminan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial; 3. Penyusunan perda/perwal jika diperlukan; 4. Perlu verifikasi data secara rutin;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 6. Kurang optimalnya SLRT. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam menangani permasalahan PMKS, perlu dilakukan ocialma dengan Lembaga sosial keagamaan maupun Lembaga non pemerintah yang bergerak pada upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat; 6. Meningkatnya fungsi SLRT dalam pelayanan kepada masyarakat miskin.
7	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya hasil koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral tentang masalah penempatan dan kompetensi yang sudah dilatih dengan melakukan kerjasama/MoU; 2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan dalam rangka menghimpun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) Perusahaan; 3. Perlu upaya ekstra untuk menghimbau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk tetap memaksimalkan Antar Kerja Lokal (AKL); 4. Masih lemahnya kompetensi SDM; 5. Dinas Tenaga Kerja belum berperan dalam memberikan rekomendasi terkait dengan kontrak pekerjaan dengan Tenaga Kerja Asing; 6. Belum adanya tenaga fungsional pengantar kerja dan meningkatkan kualitas pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu optimalisasi tata Kelola urusan tenaga kerja, meliputi penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi, pelatihan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan; 2. Perlu difikirkan upaya kreatif dan inovatif agar monitoring dan evaluasi terlaksana secara efisien (dengan anggarn minim, namun tujuan monev dapat tercapai) ; 3. Perlu Peningkatan motivasi bekerja pada pencari kerja untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan memberikan motivasi bekerja pada pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan, kerjasama dengan perusahaan pengguna tenaga kerja untuk megembalikan kartu kuning;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Kerjasama dengan Bidang pendidikan terutama Sekolah Kejuruan untuk membuka Jurusan sesuai formasi yang dibutuhkan baik di Perusahaan maupun Lemabaga lainnya; 5. Wajib lapor baik data pekerja/buruh baik penerima pekerjaan dan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan; 6. Menyediakan dan memanfaatkan Balai Latihan Kerja sebagai upaya munculnya kemandirian dalam berwirausaha; 7. Perlu koordinasi lintas sektor untuk mendorong pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dengan memberikan kemudahan berinvestasi, meningkatkan kewirausahaan, melatih tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga asing;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kualitas perencanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan dengan terbatasnya indicator kinerja outcome yang dapat merepresentasikan keberhasilan tugas dan fungsi instansi pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; 3. masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. Masih rendahnya kapasitas SDM perempuan dalam upaya peningkatan mutu keluarga sejahtera. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga target sasaran serta indicator selaras dengan program kegiatan yang dilaksanakan; 2. Pemberdayaan perempuan di bidang sosial, ekonomi dan politik; 3. peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; 4. pemenuhan hak anak 5. peningkatan pelayanan korban tindak kekerasan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A); 6. Peningkatan pemberdayaan dan keterampilan perempuan dalam upaya pencapaian keluarga mandiri dan sejahtera.
9	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keragaman konsumsi pangan masih rendah, hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok yaitu beras; 2. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini berpengaruh terhadap prevalensi stunting di Kota Batam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu digalakan diversifikasi pangan; 2. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA);
10	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Pemko yang belum memiliki dokumen lahan sebanyak 520 persil; 2. 31 lahan kampung tua belum diselesaikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan tata Kelola urusan pertanahan, seperti mengoptimalkan fungsi

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>perencanaanm pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan pendekatan kreatif dan inovatif, meninggalkan pola <i>business as usual</i> yang kurang responsive dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pelayanan pertanahan;</p>
11	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desradasi kualitas udara ambien akibat emisi sumber bergerak dan tidak bergerak, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi dan pengelolaan limbah domestik; 2. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran bersumber dari kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, Penataan lahan dsb. 3. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan (erosi, abrasi, sedimentasi, intrusi air laut), perhutanan ilegal, pemamfaatan hutan ilegal, penyalahan konservasi lindung. 4. Meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana; 5. Masih ada sampah yang dibakar yaitu sebesar 13,8% dan Sampah yang masih dibuang ke laut/sungai/danau/kali sebesar 13,5%; 6. Jumlah armada sampah yang tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk; 7. 42.56% Sampah yang tidak terproses; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu meningkatkan tata Kelola urusan lingkungan hidup terutama dalam aspek perencanaan, aspek perencanaan, pemamfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum 2. Memastikan kelayakan emisi kendaraan bermotor melalui uji emisi dengan berkoordinasi, sosialisasi Dinas Perhubungan; 3. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pengolahan sampah di tingkat rumah tangga (pemilahan, pengkomposan, dst); 4. Menyediakan infrastruktur pendukung pengeolaan sampah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan timbulan sampah yang dihasilkannya; 5. Memberikan informasi ke masyarakat tentang dampak dari sampah yang dibakar dan dibuang ke laut dan sanksi terhadap pelanggaran sesuai dengan PERDA secara continue dengan keterlibatan masyarakat itu

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>8. Penempatan TPS Permanen dan BIN container mengalami kesulitan karena berhubungan dengan lahan;</p> <p>9. 86.8% rumah tangga belum melakukan pemilahan sampah;</p> <p>10. Pemilahan TPST 3R yang ada tidak berjalan dan jumlahnya masih kurang sebanyak 2 unit untuk wilayah kota Batam;</p> <p>11. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum memadai;</p> <p>12. Potensi masyarakat yang belum dikembangkan secara sistematis dalam pemilahan sampah;</p> <p>13. 13,5% perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke laut/sungai;</p> <p>14. Masih rendahnya investasi dari dunia usaha atau swasta;</p>	<p>sendiri atau melalui komunitas komunitas yang peduli terhadap lingkungan;</p> <p>6. Dengan jumlah pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat, masyarakat sudah harus dapat melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA agar APBD tidak dibebani setiap tahun untuk pembelian armada hal tersebut juga tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan dan keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk bekerja sama dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya;</p> <p>7. Arah kebijakan pengelolaan persampahan sesuai perpres nomor 97 tahun 2017 bahwa pengelolaan sampah lebih dititik beratkan kepada keterlibatan masyarakat, sampah yang tidak terproses diakibatkan oleh kekurangan armada dan hal ini juga dapat melibatkan dana dari csr dalam pengelolaan persampahan dengan melibatkan masyarakat;</p> <p>8. Dengan SOP dalam penempatan Bin Container dalam satu wilayah akan lebih baik agar masyarakat tidak memandang sampah adalah suatu yang menimbulkan bau jika tidak dikelola dengan baik dan keterlibatan</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<p>masyarakat juga dibutuhkan dalam penempatan satu bin;</p> <p>9. Informasi yang lebih sering ke masyarakat untuk melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya dan untuk armada pengangkutan sudah harus dengan armada model terpilah agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya untuk bumi yang lebih baik;</p> <p>10.TPS 3R di Kota Batam yang dikelola masyarakat masih minim untuk selanjutnya keterlibatan dari Kelurahan untuk membangun TPS 3R di satu kelurahan untuk meminimalisir sampah yang akan dibuang ke TPA;</p> <p>11.Dukungan dari APBD, APBN dan dana CSR dalam ketersediaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi dan sarana prasarana sudah harus dengan model sampah terpilah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat</p> <p>15.Dengan sarana prasarana armada yang terpilah sekaligus masyarakat diajak untuk melaksanakan pemilahan sampah dari sumbernya</p> <p>16.Apresiasi perlu diberikan kepada masyarakat yang patuh terhadap perda pengelolaan persampahan agar masyarakat tidak membuang sampah ke laut;</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>1. Daya Tampung Cell Pembuangan Sampah sudah terbatas sementara volume sampah semakin meningkat, sampai saat ini sampah yang masuk ke TPA telaga punggur.mencapai rata-rata 850 ton Per hari</p> <p>2. Penanganan sampah ditpa masih mengalami kendala terutama dalam penataan sampah (Control landfill/sanitari landfill);</p> <p>3. Pengelolaan Limbah sampah domestik (Air Lindi) tidak optimal karena sarna dan prasarana pengelolaan lindi belum memadai</p> <p>4. Pengelolaan limbah air lindi/leachate tidak optimal</p> <p>5. Penataan sampah dilokasi tidak optimal;</p> <p>6. Proses pembuangan oleh armad menjadi terganggu karena system landfill tidak optimal karena system landfill tidak optimal;</p> <p>7. Dukungan dari investor untuk pengelolaan atau pemrosesan sampah dari TPA agar lahan yang sudah terpakai atau digunakan dapat dioptimalkan sehingga sampah yang ada sebelumnya dan sampah yang akan masuk ke TPA dapat diproses, Dibutuhkan alat berat sebagai kebutuhan pemrosesan sampah di TPA dengan alat dukung seperti bulldozer, excavator, dumptruck dan becak motor</p>	<p>17.Memberikan kemudahan perizinan kepada investasi yang akan mengelola sampah agar dapat ikut serta dalam membantu pengelolaan persampahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>1. perlu melakukan pembangunan cell buang yang baru yang representative</p> <p>2. Perlu dilakukan penanbahan alat berat sebagai pendukung utama (Buldozer dan Excavator) serta pendukung Izinnya (Dumtruk, becak motor dll);</p> <p>3. Meyediakan infrastruktur Pengelolaan Limbah Sampah Domestik (Air Lindi) sesuai dengan volume air limbah Melalui Peningkatan Kapasitas Instalasi Penglolaan Air Limbah (IPAL);</p> <p>4. Volume timbulan sampah di kota Batam semakin meningkat;</p> <p>5. Sarana dan parsarana IPAL masih minim dan tidak optimal;</p> <p>6. Jumlah alat utama minim dengan kondisi alat yang dihasilkan dimakan usia (excavator dan bulldozer);</p> <p>7. Armada pendukung penataan sampah terbatas karena hanya ada 2 unit dumptruck</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Batam yang tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Batam dan penduduk non permanen di Kota Batam. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS; 2. Ketergantungan logistic perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah; dan 3. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok (pulau di <i>hinterland</i>);^[1] 4. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan.^[2] 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan kompetensi dan Integritas SDM serta peningkatan kuantitas SDM; 2. Perlu menyediakan system untuk pendataan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, valid dengan biaya murah; 3. Perlu penyediaan dukungan infrastruktur untuk pelayanan jemput bola di wilayah kepulauan;
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum <i>massive</i> nya penggunaan alat kontrasepsi modern, dan belum optimalnya upaya meminimalkan peserta KB yang putus pakai, menurunkan <i>unmet need</i>, yang semuanya bermuara pada penurunan <i>total fertility rate</i>; 2. Belum optimalnya koordinasi antar PD untuk menurunkan angka Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I; 3. Jumlah PKB/PLKB sebagai koordinator lapangan terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu upaya iterative dalam optimalisasi peningkatan penggunaan alat kontrasepsi modern; 2. Peningkatan Peran DPPKB sebagai <i>leading sektor</i> pengendalian penduduk.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
14	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2019 kebutuhan 11 koridor Trans Batam dan penambahan 130 armada belum tercapai; 2. Pengoperasian <i>feeder</i> untuk mendukung <i>integrated transportation system</i> belum optimal; 3. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi ke wilayah kepulauan (<i>hinterland</i>); 4. Adanya potensi terganggunya kerapihan kota akibat peningkatan jumlah titik parkir setiap tahunnya; 5. Belum optimalnya penetapan indikator kinerja urusan perhubungan (indikator belum dapat merepresentasikan kinerja fungsi perhubungan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencari skema pembiayaan selain APBD, dapat melalui APBN, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, PPP atau memanfaatkan dana CSR lokal atau internasional dalam skema <i>government to government</i> yang sangat mungkin dilakukan; 2. Mengoptimalkan pengelolaan <i>feeder</i> dalam mendukung <i>integrated transportation system</i>; 3. Perlu peningkatan pelayanan angkutan antara pulau di wilayah <i>hinterland</i>; 4. Perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perparkiran untuk kemudian dilakukan penataan titik parkir yang tidak bertentangan dengan estetika kota dan efisiensi penggunaan lahan public; 5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum; 6. Menyediakan fasilitas uji KIR keliling dalam konteks jemput bola pelayanan kepada masyarakat 7. Untuk mengukur kinerja perlu menetapkan indikator-indikator yang memiliki definisi operasional dan rumus perhitungan yang jelas serta penetapan indikator kinerja harus benar-benar bisa menggambarkan sesuatu

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			yang dihasilkan dari implementasi suatu program
15	Komunikasi dan informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>e-Government</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah; 2. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/website, data, serta infrastruktur TI; 3. Belum adanya standar keamanan informasi; 4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur pada beberapa layanan TI; dan 5. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI; 6. Persentase kepuasan masyarakat yang mendapatkan akses informasi masih <70 persen; 7. Layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dapat meningkat masih <63 persen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti Perpres No 95/2018 dengan penyusunan Perda/Perwako; 2. Menyusun strategi pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika (standar-standar yang saat ini belum ada) dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kominfo 2021-2024; 3. Dalam situasi penuh dengan keterbatasan anggaran perlu upaya inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan pelayanan urusan komunikasi dan informatika; 4. Mengoptimalkan peran humas pemerintah dalam meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder pembangunan di Kota Batam
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merubah Indikator Kinerja dari jumlah koperasi yang aktif menjadi jumlah koperasi yang di bina hal ini didasarkan pada undang-undang omnibuslaw; 2. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas Aparat Pembina melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Khompetensi Perkoperasian;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi melalui Pelatihan/BIMTEK dan Uji Kompetensi Perkoperasian; 4. Melakukan Tindakan Hukum kepada Koperasi yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 5. Memfasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Koperasi dengan Koperasi dan Pelaku Usaha Lainnya; 6. Menyiapkan regulasi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; 7. Perlu adanya Penambahan petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan tenaga Pendamping; 8. Perlu dilakukan Sertifikasi Koperasi dan Pendaftaran Nomor Induk Koperasi (NIK) 9. Pemberdayaan Gerakan Koperasi /DEKOPINDA;
		2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Pengelolaan KSP/USP Koperasi dan Pemisahan Pembukuan	<ul style="list-style-type: none"> 10. Perlu dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Bagi Apratur 11. Perlu dilakukan Pelatihan Pengelolaan simpan pinjam berbasis kompetensi
		3. Belum Optimalnya Pengawasan terhadap KSP/USP	<ul style="list-style-type: none"> 12. Perlu di lakukan peningkatan kapasitas pengawas koperasi. Sertifikasi Pengawas Koperasi; 13. Penunjukan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Masih minimnya Pembinaan bagi Pelaku Usaha Mikro dari sisi Pemanfaatan serta Pengembangan akses pemasaran dan promosi.	14. Merubah Nomenklatur dari Dinas Pemberdaya Masyarakat, Pasar, Koperasi Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Koperasi dan usaha Mikro; 15. Merubah Indikator Kinerja dari Pelaku Usaha Kecil Menengah menjadi Jumlah Usaha Mikro yang dbina; 16. Peningkatan Kapasitas kepada Pelaku Usaha Mikro Binaan; 17. Memfasilitasi Legalitas Usaha dan Standarisasi Mutu Produk; 18. Fasilitasi akses pemasaran/Promosi; 19. Pengembangan jaringan Usaha dan Kemitraan; 20. Pemanfaatan Ekosistem Digital dalam Pemasaran; 21. <i>Marketingpoint</i> Produk Usaha Mikro.
		5. Masih Minim nya Data Pelaku Usaha Mikro	22. Penyiapan Database Usaha Mikro secara Online
		6. Belum Optimalnya PLUT KUMKM Kota Batam dalam Fasilitasi Layanan Pendampingan	23. Perlunya Pengembangan Pemanfaatan gedung sebagai rumah KUMKM 24. Penambahan tenaga konsultan pendamping. 25. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung 26. Menjadikan PLUT KUMKM menjadi Media Centre pengembangan KUMKM

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
17	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari sisi eksternal, terdapat beberapa pemohon yang mengalami kendala dalam melengkapi persyaratan (sertifikat, penguasaan lahan, terutama di IMB) sehingga proses perizinannya terkendala. Sedangkan dari sisi internal, masih terdapat kekurangan SDM, misalnya dalam pengurusan izin IMB perlu petugas survei ke lapangan sedangkan jumlah petugas yang dimiliki masih terbatas. Selain itu, aplikasi yang mendukung pelayanan perizinan yaitu aplikasi OSS (One Single Submission) baru efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga banyak terjadi pelaku usaha mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya setelah aplikasi ISS efektif digunakan; 2. Belum sesuai kualitas kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; 3. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha; 4. Belum mendukung infrastruktur perkotaan dalam konteks peningkatan investasi (lintas sektor); 5. Perlu optimalisasi fungsi tim teknis dalam penyelenggaraan PTSP; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya koordinasi untuk mensinergikan antara peraturan pusat dan daerah; 2. Penyederhanaan peraturan daerah yang ada; 3. Pemberiaan insentif-disinsentif sesuai perda; 4. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penindakan; 5. Koordinasi kepada dinas terkait dalam penyediaan infrastruktur perkotaan yang mendukung investasi; 6. Tim Teknis ditetapkan setiap Tahun;
18	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penggunaan indikator sebagai tolak ukur kinerja yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi kepemudaan di Kota Batam. 2. Belum terpetakannya kondisi partisipasi pemuda di Kota Batam dalam lapangan dan kesempatan kerja; 3. Belum terpetakannya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan (kesesuaian target sasaran, indicator sebagai tolak ukur kinerja dengan program dan kegiatan yang di lakukan); 2. Melakukan sinergi Bersama Dinas Pariwisata untuk menyelenggarakan event olahraga tingkat kota maupun tingkat nasional yang

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan; 5. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Kota Batam; 6. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan; 7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Kota Batam yang melakukan kegiatan olahraga; 8. Belum adanya sarana olahraga yang berstandar nasional; 9. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pembinaan kepada Cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi; 4. Memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada atlet disabilitas; 5. Pelatihan dan pembinaan wirausahawan muda; 6. Melakukan sinergi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam dalam pembinaan Cabor untuk meningkatkan prestasi; 7. Melakukan sinergi dengan Disnaker Kota Batam dalam pelaksanaan pembinaan pelatihan tenaga kerja usia muda; 8. Membangun sarana olahraga berstandar nasional melalui peluang pembiayaan APBN dan APBD
19	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola oleh Bidang statistik belum maksimal pengelolaan data diperangkat daerah masih rendah sehingga <i>supply</i> masih dinamis; 2. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya tim teknis yang mengelola database dan belum tersosialisasi; 3. Rendahnya SDM pengelola statistik sektoral serta pembinaan pengelolaan data statistik sektoral; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu optimalisasi koordinasi antar lintas perangkat daerah terkait penyediaan dan penyajian data statistic yang baik untuk mendukung pengambilan kebijakan pembangunan Kota batam; 2. Dalam situasi kekurangan anggaran dan SDM, tetap perlu melakukan optimalisasi sistem satu data dan peningkatan pengelolaan statistic sektoral dalam

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur penyelenggaraan statistik sektoral; 5. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspaspial; dan 6. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam men-<i>supply</i> data tepat waktu. 	mendukung penyampaian, penyediaan, dan penyajian data pembangunan yang valid dan mudah diakses;
20	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan sandi dalam pengamanan informasi antar perangkat daerah masih terkendala karena keterbatasan perangkat, sumber daya manusia, regulasi dan pembiayaan; 2. Dalam pemenuhan/Moratorium sarana/peralatan Sandi ketentuannya harus dari BSSN sehingga sulit bagi daerah untuk memenuhinya; 3. Selanjutnya kurangnya SDM Sandiman dan kurangnya peralatan sandi sehingga operasional sandi tidak bisa berjalan dengan maksimal; 4. Masih perlunya <i>mainstreaming</i> kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (<i>security awarness</i>) sehingga meminimalkan adanya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, penyebaran informasi di antara masyarakat yang belum diketahui kebenarannya; 5. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas 1. belum mempunyai perangkat pendukung kontra penginderaan; 2. <i>jamming</i>; dan 3. jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan; 	1. Dalam situasi kekurangan anggaran dan SDM, tetap perlu mengoptimalkan kinerja persandian dengan memenuhi aspek minimum kriteria-kriteria standar pelayanan persandian;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>6. Permasalahan VA (<i>vulnerability assesment</i>) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi.</p> <p>7. Permasalahan Kontra Penginderaan (<i>Sterilisasi</i>) yang berkaitan dengan pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih dilakukan.</p>	
21	Kebudayaan	<p>1. Urusan kebudayaan cenderung belum disinergikan dengan aspek pariwisata;</p>	<p>1. Urusan kebudayaan perlu disinergikan dengan unsur pariwisata agar produk dari berbagai unsur kebudayaan yang ada di Kota Batam dapat memiliki nilai tambah ekonomi khususnya bagi para penggiat dan pelestari budaya, umumnya bagi perkembangan pariwisata Kota Batam. Jika telah terbentuk sinergi antara kebudayaan dengan menciptakan produk budaya sehingga permintaan pasar untuk menikmati produk budaya, maka kelestarian eksistensi nilai-nilai budaya dengan sendirinya akan menjadi keniscayaan.</p>
22	Perpustakaan	<p>1. Belum optimalnya regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;</p> <p>2. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi : pengembangan koleksi, SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga</p>	<p>1. Perlu melengkapi regulasi tentang penyelenggaraan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca yang mengatur lintas sektor terkait dengan peningkatan literasi masyarakat di Kota Batam;</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perpustakaan yang sudah ada sebagian besar belum menginput data melalui aplikasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional; 4. Perpustakaan Umum Kota belum memiliki prasarana gedung permanen; 5. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; 6. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah kepulauan (<i>hinterland</i>); 7. Masih rendahnya pemahaman pengelola perpustakaan yang sesuai standar nasional; 8. Perpustakaan belum dijadikan tempat pelestarian yang bernilai sejarah lokal atau <i>the new city landmark</i>; dan 9. Perpustakaan belum dijadikan kebutuhan primer dalam membangun pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan urusan perpustakaan perlu mengacu pada standar nasional; 3. Perlu optimalisasi fungsi pembinaan
23	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; 2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. Program Kearsipan; 4. Aspek Pengolahan Arsip Inaktif sekurang-kurangnya 10 Tahun; 5. Ketertiban Pelaksanaan Penyusutan Kearsipan; 6. Pengolahan Arsip Statis; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan dengan menetapkan target sasaran dan indikator (yang memiliki definisi operasional dan rumus yang jelas) yang sesuai dengan program kegiatan; 2. Pembinaan PD tentang pentingnya kearsipan;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		7. SDM Kearsipan; 8. Kelembagaan; 9. Prasarana dan Sarana Kearsipan.	3. Peningkatan sarana dan prasaran kearsipan (gedung, depo); 4. Penyediaan sistem elektornik kearsipan; 5. Penyusunan Perwako Kearsipan;
24	Kelautan dan Perikanan	1. Pelabuhan perikanan Kota Batam belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll). 2. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematis antara hulu dan hilir. 3. Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi oleh nelayan. 4. Pencemaran perairan umum dan laut. 5. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil.	1. Penyediaan sarpras perikanan budidaya-tangkap; 2. Penyediaan pakan ikan-induk ikan dan sarana pendukung lainnya; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pembenihan (Penyuluh); 4. Koordinasi antar sektor yang terkait dalam menyelesaikan persoalan terkait pencemaran dan optimalisasi pengelolaan zona wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil 0-12 mil; 5. pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sehingga terintegrasi di hulu dan di hilir; 6. Menumbuhkan gerakan gemar makan ikan (diversifikasi produk pengolahan ikan, sosialisasi ke masyarakat); 7. Pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap usaha produksi perikanan
25	Pariwisata	1. Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari Covid-19; 2. Belum adanya galeri ekonomi kreatif dan sentra kerajinan;	1. Sektor pariwisata perlu meyakinkan wisatawan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten,

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>3. Masih perlu peningkatan kualitas SDM bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;</p>	<p>sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung ke Kota Batam.</p> <p>2. Perlu adanya sinergi antara sektor pariwisata dengan sektor-sektor pendukung lainnya secara terintegrasi, seperti sektor olahraga, sektor seni budaya, sektor usaha mikro dan kecil, sektor industri kreatif dan sektor lainnya yang dapat menjadi pengungkit sektor pariwisata Kota Batam;</p> <p>3. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, maka perlu peningkatan inisiatif SDM di bidang pariwisata untuk meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui sumber-sumber pembelajaran informal dengan memanfaatkan keterbukaan akses memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi melalui buku bacaan atau melalui daring mengingat ilmu pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan ilmu populer yang bisa dipelajari secara mandiri;</p>
26	Pertanian	<p>1. Data kinerja urusan pertanian sangat terbatas dan belum memadai (tidak ada data kontribusi komoditas pertanian terhadap PDRB, tidak ada data Nilai Tukar Petani, dst);</p> <p>2. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;</p> <p>3. Minimnya lahan pertanian;</p>	<p>1. Menggalakan budaya urban farming di masyarakat, minimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (subsisten);</p> <p>2. Memberdayakan masyarakat melalui cara-cara penanaman baru dengan orientasi optimalisasi lahan;</p>

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi	3. Membuat pilot project pertanian kota berbasis teknologi yang sesuai dengan kondisi Kota Batam melalui pemanfaatan lahan tidur, bertujuan untuk mendiseminasikan teknologi pertanian dalam mengajak masyarakat untuk bertani di lahan masing-masing dengan dukungan teknologi pertanian yang murah dan efektif;
27	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrolgian perlu ditingkatkan; 2. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional; 3. Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut; 4. Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan; 5. Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi; 6. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan; 7. Minimnya produk ekspor unggulan Kota Batam. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan Sarpras kemetrolgian; 2. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; 3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien; 4. Membangun sistem aplikasi jaringan perdagangan; 5. Pembinaan para pelaku usaha gas LPG; 6. Peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui mekanisme APBN; 7. Peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor;
28	Perindustrian	1. Persentase pertumbuhan IKM turun dari 41,62 persen di tahun 2015 menjadi 8,69 persen di tahun 2019;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan-pelatihan SDM yang meningkatkan kualitas para pelaku IKM; 2. Banyaknya bantuan fasilitasi mesin/Alat peningkatan teknologi produksi;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam; 3. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan; 4. IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi; 5. Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi; 6. Belum tersedianya grand design pembangunan Industri Kota Batam. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Berupaya menghubungkan IKM kedalam rantai pasok industry di Kota Batam; 4. Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi; 5. Mendorong IKM agar terkoneksi ke dalam <i>e-commerce</i>; 6. Pemutakhiran Data; 7. Penyelesaian rencana pembangunan industry Kota Batam yang sejalan dengan RPIK Provinsi dan RIPIN Nasional
29	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya kualitas indikator kinerja <i>outcome</i> dan <i>impact</i> yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah Kota Batam; 2. Masih lemahnya kelengkapan dan validitas data realisasi indikator kinerja pembangunan; 3. Pelaksanaan evaluasi baru sebatas realisasi anggaran, belum melakukan evaluasi dengan pendekatan <i>gap analysis</i> yang membandingkan (1) realisasi anggaran kegiatan dengan output fisik kegiatan; (2) realisasi anggaran per program dengan masing-masing indikator <i>outcome</i> program; (3) realisasi indikator <i>impact</i> dengan realisasi <i>outcome</i> program nya; 4. Persentase pencapaian sasaran daerah pada tahun 2019 hanya sebesar 70 persen; 5. Masih lemahnya data dan informasi yang menggambarkan kinerja penelitian dan pengembangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu ditingkatkan kualitas fungsi pembinaan terhadap perangkat daerah terkait kualitas perencanaan di seluruh perangkat daerah Kota Batam (ketepatan perencanaan kegiatan dengan permasalahan, ketepatan arsitektur kinerja OPD, menjamin kualitas pelaksanaan monev di masing-masing OPD, dst); 2. Perlu dilaksanakannya sistem evaluasi kinerja yang holistik pada setiap jenjang dokumen perencanaan yang berfokus pada evaluasi anggaran kegiatan, <i>output</i> fisik, <i>outcome</i> program dan <i>impact</i> sasaran daerah; 3. Perlu digunakannya hasil-hasil evaluasi sebagai basis menyusun perencanaan;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			<ul style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pendekatan penyusunan perencanaan yakni tematik, holistik, integratif, spasial perlu digunakan secara optimal; 5. Menyusun Perda Sistem Inovasi Daerah;
30	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadinya keterlambatan dalam penetapan APBD 2. Semakin menurunnya pertumbuhan SILPA. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik dan akurat terutama untuk kegiatan yang didanai dari DAK; 2. Pentingnya memperkirakan target realisasi pendapatan daerah yang lebih cermat, terutama untuk PAD; 3. Pentingnya untuk melakukan kajian atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berdasarkan potensi daerah untuk meningkatkan kualitas kemandirian keuangan daerah;
31	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM sebagai auditor internal yang masih kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai; 2. Masih belum diterapkannya zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Batam; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perlunya dukungan IT dan kualitas SDM yang memadai untuk penerapan fungsi pengawasan internal yang memadai; 2. Perlunya melakukan pemetaan kompetensi SDM aparatur pengawasan internal Pemerintah; 3. Perlunya kebijakan beserta penerapannya yang serius untuk mengimplementasikan zona integritas di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
32	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan masih bertumpu sepenuhnya dengan APBD, idealnya diimbangi dengan peluang pembiayaan APBN (ASN yang mengikuti Diklat formal hanya 0,12 persen; ASN yang mengikuti Diklat struktural hanya 0,90 persen; ASN yang mengikuti Diklat teknis fungsional hanya 8,79 persen); 2. Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai dalam hal teknis. 3. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Manajemen kepegawaian secara tegas sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Alur manajemen kepegawaian merupakan tahapan manajemen yang harus dilakukan secara simultan oleh BKD Kota Batam. Belum sesuai antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu memanfaatkan peluang pembiayaan APBN; 2. Perlu optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait dalam mensiasati kekurangan SDM; 3. Perlu penyusunan Perencanaan Manajemen Kepegawaian; 4. Berupaya memenuhi hak pengembangan kompetensi bagi PNS sesuai dengan PP 11/2017; 5. Perlu dibangun balai diklat agar kegiatan peningkatan kompetensi mudah dilaksanakan;

No	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.</p> <p>4. Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 jam pelajaran dalam setahun) Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS.</p>	

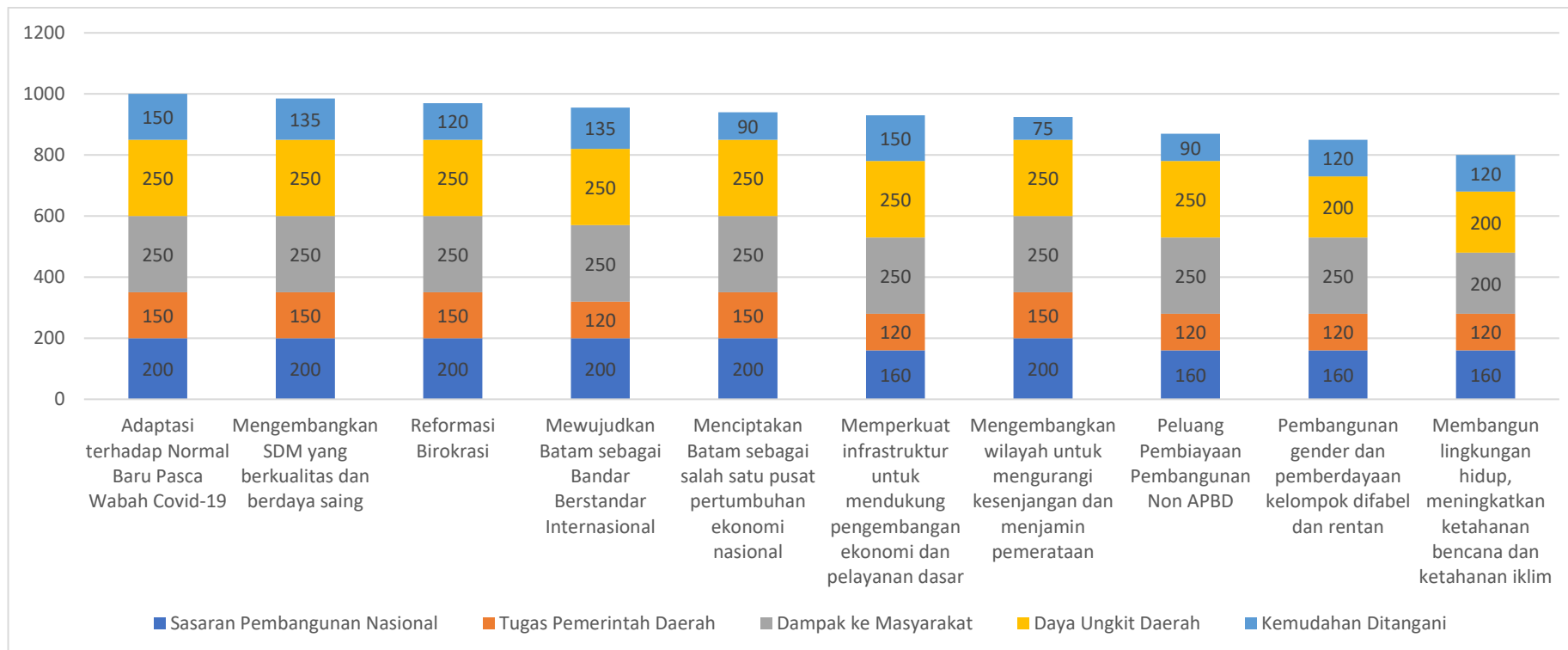
Sumber: Hasil Analisis

4.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Komponen pembentuk isu strategis (Gambar 4.1) merupakan sintesis dari penelaahan isu/agenda pada RPJMN 2020-2024, RPJPD Kota Batam 2005-2024, Agenda Pembangunan Global, serta Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan 2016-2019 dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, daya ungkit terhadap pembangunan daerah, serta kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani. Gambar 4.2 menyajikan kriteria pembobotan isu strategis yang mengacu pada lampiran Permendagri 86/2017, dengan 10 isu strategis yang ditetapkan. Uraian lebih rinci disampaikan pada Sub bab 4.3.1 hingga Sub bab 4.3.10.



Gambar 4. 1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Kota Batam



Gambar 4. 2 Pembobotan Isu Strategis Kota Batam 2020-2024

Keterangan Bobot:

- Sasaran Pembangunan Nasional = 20
- Tugas Pemerintah Daerah = 15
- Dampak ke Masyarakat = 25
- Daya Ungkit Daerah = 20
- Kemudahan Ditangani = 15

4.3.1 Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19

Wabah COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menyebabkan pandemik global yang mempengaruhi mayoritas negara di dunia termasuk negara-negara yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia seperti Tiongkok, AS, Jerman, Britania Raya, Italia, Jepang, dan lain-lain. Wabah ini dipicu pada Desember 2019 di kota Wuhan di provinsi Hubei, Tiongkok. COVID-19 terus menyebar ke seluruh dunia.

Dalam dunia yang sangat terhubung dan terintegrasi, dampak penyakit di luar mortalitas (korban jiwa akibat Covid-19) dan morbiditas (mereka yang tidak mampu atau merawat yang tidak mampu dan tidak dapat bekerja selama periode tertentu) telah tampak jelas sejak munculnya wabah. Pandemi ini membuat Tiongkok harus melakukan karantina di berbagai wilayahnya; menutup akses keluar-masuk dan menghentikan berbagai kegiatan sosial dan bisnis. Dampaknya, rantai pasokan dunia terganggu karena Tiongkok merupakan salah satu negara pengekspor barang terbesar di dunia, juga salah satu dari tiga negara manufaktur terbesar. Pasalnya, perusahaan di seluruh dunia, terlepas dari ukurannya, yang bergantung pada impor dari Tiongkok telah mulai mengalami kesulitan dalam produksi. Transportasi pun menjadi sangat terbatas sehingga semakin memperlambat kegiatan ekonomi global; lebih dari 100 negara telah memberlakukan *travel restriction* (BBC, 27/03/2020). Kepanikan konsumen dan perusahaan telah mendistorsi pola konsumsi yang biasa dan menciptakan anomali pasar. Pasar keuangan global juga responsif terhadap perubahan dan indeks saham global telah jatuh. Sejak Januari 2020, pada tanggal 1 April Dow Jones telah turun sebesar 24,1%, Niikei turun 22,2%, dan FTSE turun sebesar 28,8% (sumber: Bloomberg 1/04/2020), penurunan terburuk setelah krisis tahun 2008.

Tentu Indonesia termasuk Kota Batam tidak luput dari gerusan ekonomi COVID-19 ini. Misalnya, data per Desember 2019, Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan ekspor non-migas terbesar Indonesia (2,351 juta USD), dan impor non-migas terbesar Indonesia pun berasal dari Tiongkok (4,071 juta USD) (BPS 2020). Tentu ini sangat mengganggu rantai pasokan perusahaan-perusahaan di Indonesia,

termasuk Kota Batam, serta mengurangi pendapatan ekspor. Selain itu, sektor yang terkena dampak langsung secara signifikan adalah sektor pariwisata. Sebagai gambaran, wisatawan asal China, BPS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 (Januari-Oktober), jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia mencapai 1.77 juta orang.

Dalam konteks ini Kota Batam sebagai kawasan industri dan kota destinasi wisata penyumbang wisatawan mancanegara peringkat kedua nasional, setelah Bali turut mengalami goncangan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2019 sebesar 5,92 persen, yang merupakan nilai tertinggi dari capaian selama tiga tahun terakhir, dengan adanya pandemi Covid-19 dipastikan akan mengoreksi secara signifikan target pertumbuhan ekonomi periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dengan skenario terburuk mencapai minus 1.35 persen, kemudian untuk tahun 2021 naik menjadi 3.71 persen, dan terus mengalami kenaikan perlahan hingga tahun 2024.

Hingga bulan april tahun 2020 Badan Pusat Statistik Kota Batam telah merilis angka penurunan di sektor pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara atau wisman yang berkunjung ke Kota Batam pada bulan April 2020 mencapai 1.133 kunjungan, mengalami penurunan sebesar 97,40 persen jika dibandingkan jumlah wisman pada bulan sebelumnya, dimana jumlah wisman pada Maret 2020 sebanyak 43.564 kunjungan. Jika dibandingkan dengan April 2019, kunjungan wisman April 2020 mengalami penurunan, yaitu sebesar 99,27 persen.

Sementara itu pada bulan yang sama juga terjadi penurunan ekspor. Nilai ekspor Kota Batam April 2020 mencapai US\$687,13 juta atau turun sebesar 14,12 persen dibanding ekspor Maret 2020. Ekspor migas April 2020 mencapai US\$48,32 juta atau turun 41,96 persen dibanding bulan sebelumnya. Ekspor nonmigas April 2020 mencapai US\$638,81 juta atau turun 10.89 persen dibanding Maret 2020.

Kemudian dari sektor ketenagakerjaan, per April 2020 terdapat sedikitnya 1.939 orang pekerja dirumahkan sementara waktu dan 3.411 orang pekerja lainnya cuti tidak dibayar atau tanpa digaji. Sebagian besar perusahaan yang merumahkan

pekerjanya mayoritas perusahaan yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan, tour and travel atau bidang pariwisata lainnya. Untuk karyawan yang dirumahkan dan tidak dibayar, didominasi perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, seperti Spa, Tour and travel, restoran hingga perhotelan. Namun ada juga sebagian hotel yang tetap memberikan gaji pokok selama karyawannya dirumahkan. Untuk pekerja yang mengalami PHK atau diberhentikan karena tidak lagi beroperasi akibat dampak Covid-19 ini sejumlah 118 orang, angka ini berdasarkan laporan perusahaan, sehingga angka sebenarnya diprediksi dapat lebih tinggi, karena mungkin tidak seluruh perusahaan akan melaporkan jumlah PHK kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Batam. Berdasarkan Data Terpadu Kementerian Sosial RI, jumlah penduduk miskin Kota Batam mencapai 52.551 kepala keluarga. Namun demikian, berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial bersekala besar, diperkirakan terdapat 300.000 kepala keluarga yang perlu mendapatkan *social safety net*, meskipun tidak masuk kategori miskin dalam Data Terpadu Kementerian Sosial RI, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini.

Dari sisi penerimaan pemerintah Kota Batam, pada tahun 2020 penurunan pendapatan daerah diperkirakan minus 7,29 persen, sedangkan penurunan PAD sebesar 10,84 persen, kemudian penurunan pajak daerah 10,65 persen dan penurunan retribusi daerah diperkirakan 6,74 persen. Kondisi pandemi menyebabkan proyeksi penerimaan tahun-tahun selanjutnya semakin sulit diprediksi disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan periode 2021-2024.

Merebaknya wabah Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta

menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat. Perlu adaptasi pada era normal baru ini supaya dapat tetap bersaing terutama dalam berinteraksi dengan pihak luar baik di Indonesia maupun negara lain.

Adaptasi terhadap normal baru menjadi penting bagi daerah, terutama Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi dan mobilitas orang dan barang yang juga sangat tinggi. Era normal baru ini juga perlu diadaptasi oleh industri-industri yang ada di Kota Batam karena akan menimbulkan perubahan permintaan barang dan jasa dimana sebagian industri akan mengalami pertumbuhan karena permintaan dari kebutuhan yang timbul atas normal baru, sedangkan industri yang lain perlu menyesuaikan bisnisnya karena tergantikan oleh kebutuhan baru yang ada di era tersebut.

Faktor yang menjadi kunci dalam menghadapi era normal baru pasca wabah Covid-19 ini adalah kesiapan elemen-elemen di Kota Batam, termasuk pemerintah daerah dalam mengadaptasi protokol dan normal baru dalam mengantisipasi Covid-19 ke dalam kebijakan, aturan maupun pelaksanaan pelayanannya. Kedua, sensitivitas atas perubahan kondisi lingkungan akibat normal baru juga diperlukan untuk dapat memahami dan merespon perubahan yang ada. Ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari berjalannya normal baru di masyarakat mengingat selama wabah Covid-19, banyak teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan berbagai aktivitas mulai dari pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Keempat adalah peningkatan infrastruktur yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap munculnya wabah baru dengan memanfaatkan pengalaman dalam menghadapi Covid-19, mulai dari infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya.

Pemerintah Kota Batam memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan pendekatan *Business as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (*green jobs*), menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Dengan demikian Kota Batam dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4.3.2 Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pengarusutamaan strategi pembangunan bangsa Indonesia ke depan, pilihan strategi tersebut diupayakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global, yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian, langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukung penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja, dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi politik dan budaya.

Oleh karena itu pilihan strategi pembangunan dengan fokus utama pembangunan sumber daya manusia sangat tepat untuk menjawab tantangan bagi Kota Batam, mengingat Indonesia saat ini berada dalam periode Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menuntut sumber daya manusia yang terampil dan unggul agar

memiliki daya saing yang tinggi sehingga memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah.

Kunci dalam menghadapi isu pengembangan kualitas SDM yang berdaya saing terdapat pada pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan serta bagaimana efektivitas dalam memanfaatkan bonus demografi yang dihadapi oleh daerah. Kuantitas SDM merupakan salah satu sumber daya yang dapat mendorong pembangunan daerah terutama dalam penyediaan tenaga kerja dalam mendukung aktivitas perekonomian. Namun, apabila peningkatan kuantitas SDM ini tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas dan daya saing SDM tersebut, bonus demografi akan menjadi permasalahan yang dapat menghambat pembangunan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dari adanya bonus demografi misalnya adalah *middle income trap*, meningkatnya pengangguran, dan permasalahan sosial kependudukan lainnya.

Selain itu, perlu juga memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kedua faktor tersebut merupakan salah satu modal dasar dalam mendukung kualitas SDM terutama dari sisi kesehatan. Dari sisi pendidikan juga perlu meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru Kota Batam. Pemerataan di sini menjadi faktor yang penting juga supaya daya saing SDM dapat merata tidak hanya di pusat pertumbuhan.

4.3.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Secara lebih rinci, kebijakan transformasi birokrasi mengacu pada peta jalan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk periode 2020-2024 adalah menekankan pada *Dynamic Governance*, dimana visi yang diusung adalah “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia”. Pada tahun 2024 pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan semakin baik yang ditandai dengan: (a) tidak ada korupsi; (b) tidak ada pelanggaran; (c) APBD baik; (d) semua program selesai dengan baik; (e) semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; (f) komunikasi dengan publik baik; (g) penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; (h) penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; (i) hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan).

Untuk mencapai kondisi pada paragraf di atas setidaknya perlu ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan diperlukan dalam menguatkan *leadership* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terwujud rasa memiliki (*ownership*) dalam organisasi;
2. Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja, diperlukan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja individu dalam organisasi;
3. Pemilihan program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi bermakna perlu adanya ketelitian dalam menentukan program dan kegiatan yang bersifat *solving problem*, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, mewujudkan organisasi yang kredibel, dan meningkatkan pelayanan prima bukan hanya di level atas, juga sampai di unit kerja terkecil;
4. Selanjutnya mutlak dilakukan peningkatkan kualitas manajemen reformasi birokrasi (*plan, do, check, action*) dimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang sedang dijalankan tetap dijalurnya dan memiliki umpan balik perbaikan secara kolaboratif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Batam antara lain adalah masih perlunya penguatan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

Secara konkret salah satu upaya pemerintah Kota Batam untuk melakukan reformasi birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi dalam Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Pada tahun 2019 DPM-PTSP Kota Batam berhasil menerima Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). DPM-PTSP Kota Batam telah mampu mengintegrasikan perizinan dengan sistem *online single submission* (OSS). Lebih lanjut saat ini melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) DPM-PTSP terdapat 430 layanan perizinan dari 33 instansi. Terakhir Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri turut bergabung di MPP memberikan layanan publik untuk masyarakat.

4.3.4 Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional

Sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, perlu meningkatkan statusnya sebagai kota bandar berstandar internasional untuk dapat meningkatkan daya saingnya di antara kota-kota bandar lain yang ada di dunia.

Dengan posisi berada di tengah jalur perdagangan internasional dan didukung oleh industri-industri berorientasi ekspor, peran bandar berstandar internasional menjadi kunci meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Batam.

Fokus dari perwujudan Kota Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional adalah pada kegiatan yang memanfaatkan keberadaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Posisi Batam yang strategis karena berada pada jalur pelayaran terpadat, dekat dengan salah satu pusat bisnis internasional (Singapura) adalah keuntungan tersendiri bagi Kota Batam. Kebijakankebijakan ekonomi di Kota Batam perlu lebih berorientasi keluar (*outward looking*), terlebih perhatian pemerintah pusat dengan adanya Badan Pengusahaan Kawasan yang dapat menjadi penggerak penting. Tujuannya adalah agar Bandar Internasional Batam sebagai potensi alam dan posisi Kota Batam dapat menjadi andalan (*core*) bagi upayaupaya sinergi pembangunan daerah atau menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

4.3.5 Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kondisi perekonomian di Kota Batam secara fundamental saat ini relatif lebih baik dibandingkan daerah-daerah sekitar maupun rata-rata nasional terutama dari sisi pendapatan masyarakat. Kesenjangan pendapatan pun dapat dijaga pada tingkat yang cukup rendah relatif dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mencapai keberlanjutan peningkatan pendapatan, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Karena tingkat pendapatan penduduk relatif sudah tinggi, maka keberlanjutan pertumbuhan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan wilayah lain dan secara umum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kota Batam sebagai salah satu simpul penting dapat menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia.

Untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, iklim investasi dan usaha yang kondusif dan bagi lembaga lembaga yang didalamnya diharapkan dapat lebih kooperatif dan

sinergis. Proses yang mengiringi perkembangan ini adalah transformasi struktur ekonomi, yang bergerak dari sektor industri ke sektor jasa.

Sebagai penarik kegiatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi, maka perlu dikembangkan kegiatankegiatan besar sebagai jangkar (penarik), misalnya pengembangan pariwisata bertaraf internasional, sarana pendidikan bertaraf internasional, sarana kesehatan bertaraf internasional serta kegiatankegiatan lain memanfaatkan potensi yang ada di Kota Batam.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat harus tercapai sejalan dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pemerataan memiliki dua arti yaitu pemerataan pendapatan antar golongan pendapatan maupun pemerataan antar wilayah di Kota Batam. Kebijakan memberdayakan dan memaksimalkan pulaupulau kecil di Kota Batam merupakan langkah yang sangat tepat dalam menciptakan wilayah atau kawasan perbatasan yang strategis yang sesungguhnya merupakan aplikasi atas ciri maritim (kelautan) dari kehidupan masyarakat bahari.

Tujuan dari misi tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatankegiatan ekonomi dan pendukungnya, baik yang terkait langsung atau tidak langsung dengan keberadaan Bandar Internasional dalam rangka meningkatkan pendapatan umum penduduk.

4.3.6 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas dalam RPJMN periode 2020-2024 yang akan difokuskan pada tiga kerangka utama (Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan) yang ditopang dengan pembangunan energi dan ketenagalistrikan serta pelaksanaan transformasi digital. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Cakupan infrastruktur pelayanan dasar yang akan dibangun antara lain penyediaan hunian layak yang ditopang dengan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan layanan jaringan *on grid* dan *off grid* untuk akses ketenagalistrikan, penyediaan layanan telekomunikasi dan internet untuk fasilitas umum (fasum), pengembangan sistem keselamatan lalu lintas, penyediaan pelayanan transportasi perintis (darat, laut dan udara) serta pembangunan waduk *multi-purpose* dan irigasi.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana transportasi, ketenagalistrikan dan energi, teknologi informatika dengan kapasitas besar dan berkecepatan tinggi untuk pengoperasian *Big Data*, *Internet of Things (IoT)* maupun *artificial intelligence (AI)*. Sementara itu pembangunan infrastruktur untuk perkotaan mencakup peningkatan sarana dan prasarana yang akan menunjang kenyamanan hidup di kota seperti pembangunan angkutan umum massal, pembangunan jaringan pipa gas kota, pipa air minum dan sanitasi serta pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang makmur dan sejahtera diharapkan dapat terwujud.

4.3.7 Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah ini, pendekatan dan strategi pengembangan wilayah tidak hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal (*equity*) untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekadar *equality* atau kesamaan perlakuan. Untuk mendukung Kota Batam sebagai *economic growth center*, pengembangan wilayah di Kota Batam perlu dilakukan secara merata untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat.

Strategi pemerataan disesuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*leave no one behind*). Fokus pembangunan adalah daerah di dekat pusat pertumbuhan yang dapat diberikan *input* untuk mengejar pertumbuhan di koridor pertumbuhan terdekatnya. Strategi pertumbuhan dan pemerataan membutuhkan sarana pendidikan yang terdistribusi secara merata, peningkatan potensi lokal yang secara spesifik dapat mendorong peningkatan pertumbuhan daerah. Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antar wilayah serta perkuatan rantai antara penghasil sumber daya, industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Kedua strategi tersebut dikembangkan untuk mencapai sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia di kedua koridor tersebut, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, penurunan angka kemiskinan di seluruh wilayah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Penguatan tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, termasuk pemerintah desa sangat diperlukan untuk akselerasi pembangunan di kedua koridor tersebut.

Salah satu yang perlu diupayakan untuk mengembangkan wilayah secara merata adalah menjamin ketersediaan infrastruktur layanan dasar bagi masyarakat secara

merata baik di pusat pertumbuhan maupun di wilayah *hinterland*. Upaya pengembangan wilayah berbasis pemerataan tersebut juga perlu didukung melalui pengembangan keterkaitan ekonomi antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterland*, pengembangan kegiatankegiatan ekonomi baru berskala kecil dan menengah di daerah hinterland, dan pengembangan kemitraan usahausaha antara usahausaha di *mainland* dan *hinterland*.

4.3.8 Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD

Kompleksitas permasalahan di Kota Batam menuntut penyediaan anggaran yang tinggi, terutama dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Namun demikian keterbatasan anggaran selalu muncul sebagai persoalan dan berimplikasi adanya *trade off*. Sebagai gambaran, jika penyediaan infrasturkur menjadi prioritas dalam penganggaran, maka pelayanan sosial dan budaya yang masih perlu dikembangkan berpotensi tidak mendapat tempat prioritas.

Dalam konteks ini pemerintah Kota Batam dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Kota Batam. Terdapat beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Batam dan memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan, di antaranya skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah, serta skema pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah atau pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penyedia pinjaman infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan ke daerah. Namun demikian, Pemerintah Kota Batam harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema tersebut.

Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, sehingga jika akan menggunakan skema ini Pemerintah Kota Batam perlu melakukan berbagai Langkah strategis

dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM dan lainnya.

Selain skema pembiayaan di atas, terdapat pola pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sejauh ini sudah ada kontribusi TSLDU terhadap pelayanan publik dan fasilitas kepada masyarakat, namun demikian dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Kota Batam, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat pula potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dari komunitas/masyarakat. Selama ini, pola tersebut telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Untuk mengoptimalkan potensi swapendanaan, Pemerintah Kota Batam perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi sosial untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah Kota Batam Bersama dengan BP Batam perlu bersinergi dalam upaya mengoptimalkan peluang pembiayaan untuk kemajuan pembangunan Kota Batam.

4.3.9 Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia)

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu tingkat global yang menjadi sasaran dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ikut diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mencapai target SDGs 2030 dengan menetapkan prinsip, *no one left behind*. Hal ini menimbulkan konsekuensi negara harus dapat memastikan semua kelompok

masyarakat (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya) dapat terlibat dalam proses dan merasakan hasil pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Upaya percepatannya telah dituangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

Lingkup dari isu kesetaraan gender adalah mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun dan pada tingkat apa pun. Selain itu, juga menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Terakhir adalah Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Untuk dapat menghadapi isu terkait dengan kesetaraan gender, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program

pembangunan gender. Pengawasan dan pengendalian pada program-program pembangunan gender termasuk melakukan pengukuran kinerja pembangunan gender supaya dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pembangunan gender ke depannya. Pada pelaksanaannya, juga perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan gender di berbagai bidang dan tingkatan yang ada di Kota Batam mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat. Kedua, peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam pembangunan juga dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penanganan isu kesetaraan gender. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok tersebut dalam pembangunan daerah dapat meningkatkan rekognisi dari berbagai elemen masyarakat lain sehingga ketanggapan atas isu kesetaraan gender dapat meningkat. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan dan anak juga perlu didorong untuk meningkatkan pembangunan gender di Kota Batam.

Selain itu Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah terhadap penyandang disabilitas di antaranya adalah memenuhi hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Upaya untuk mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dapat dilakukan dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4.3.10 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan daerah perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup di wilayahnya untuk menjamin kelayakan hidup bagi warga masyarakat. Daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk menghasilkan lingkungan yang asri dan layak huni bagi segenap warga Kota Batam. Isu yang tercakup dalam pembangunan lingkungan hidup ini meliputi mulai dari tata ruang, daya dukung air, ruang terbuka hijau, dan permukiman bagi masyarakat termasuk di dalamnya adalah persampahan. Pembangunan lingkungan hidup juga perlu menjadi perhatian karena akan berdampak pada keberlangsungan wilayah pada jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia secara umum relatif stagnan sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan.

Kemudian, pembangunan lingkungan hidup ini juga berkaitan dengan peningkatan ketahanan bencana dan terutama bencana iklim yang diakibatkan oleh perubahan iklim akibat dari peningkatan gas rumah kaca secara global. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan lebih dari 30.000 kejadian bencana selama periode 2011-2020, sekitar 97 persen diantaranya adalah bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, gelombang laut ekstrem dan kenaikan permukaan laut, sementara itu hanya sekitar 3 persen yang berasal dari bencana geologi. Dalam konteks ini Kota Batam memang dapat dikatakan tidak memiliki potensi bencana geologi, namun Kota Batam sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama kekeringan yang diikuti kelangkaan air bersih, potensi curah hujan tinggi

yang diikuti dengan banjir, dan peningkatan gelombang ekstrem yang berdampak pada aktifitas pelayaran terutama bagi kapal 10-30GT, serta potensi peningkatan penyakit yang ditularkan oleh vector seperti DBD.

Dalam rangka pengurangan kerentanan (*vulnerability*), perlu pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas adaptif di daerah-daerah rentan. Peningkatan kapasitas adaptif dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur strategis pada sektor-sektor terdampak perubahan iklim seperti sektor sumber daya air, kelautan dan pesisir, serta sektor kesehatan; peningkatan SDM masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas; serta peningkatan regulasi terkait ketahanan iklim pada sektor terdampak. Peningkatan ketahanan iklim juga perlu didukung dengan penyediaan informasi iklim yang cepat dan akurat melalui program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang juga berperan penting untuk mendukung pengurangan risiko bencana.

Isu lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan iklim sendiri merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN yang perlu didukung pelaksanaannya oleh seluruh daerah yang ada di Indonesia. Sebagai kota yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan atas bencana dan perubahan iklim akan meningkatkan daya saing daerah terutama dalam meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi di daerah.

4.4 Abstraksi Isu-isu Strategis

Secara ringkas disampaikan abstraksi dari isu-isu strategis yang disampaikan sub bab sebelumnya pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 3 Abstraksi Isu-isu Strategis

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> • Respon dalam mengadaptasi protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang muncul; • Sensitivitas atas perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi masyarakat • Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung aktivitas pembangunan • Peningkatan infrastruktur dalam meningkatkan ketahanan terhadap wabah global
	Nasional		
	Daerah		
2.	Daerah	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan • Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Pengentasan kemiskinan • Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan daya saing tenaga kerja • Memanfaatkan bonus demografi
3.	Nasional	Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan komitmen pimpinan dalam menggerakkan <i>ownership</i> pegawai terhadap organisasi; • Implementasi reformasi birokrasi sampai unit kerja; • Pilihlah program dan kegiatan yang bersifat problem solving; • Peningkatan kualitas manajemen reformasi birokrasi (<i>plan, do, act, check</i>)
	Daerah		
4.	Nasional	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wilayah hinterland • Pengembangan sentra industri dan usaha kecil yang terintegrasi dengan rantai pasok industri • Pemerataan infrastruktur dasar
5.	Daerah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • infrastruktur perhubungan dan transportasi • Peningkatan sistem transportasi perkotaan • Energi dan listrik yang berkelanjutan

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi • Akses air bersih
6.	Internasional	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau • Kelembagaan dan infrastruktur Penanggulangan Bencana dan Ketahanan Iklim • Penanganan Limbah dan Persampahan
	Nasional		
	Daerah		
7.	Daerah	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai • Optimalisasi penataan ruang • Pengembangan jaringan kerja sama dengan bandar-bandar lain di negara lain • Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan
8.	Nasional	Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengelola Batam • Pengembangan Teknologi Informasi • Sinergi antara pusat pertumbuhan dengan daerah <i>hinterland</i> • Pengembangan IKM sebagai pendukung rantai pasok industri
	Daerah		
9.	Nasional	Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam program-program pembangunan gender, pemberdayaan difabel dan kelompok rentan • Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marjinal dalam pembangunan • Pembangunan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, kelompok difabel dan rentan; • Pemberian hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi pada kelompok difabel, serta memberi insentif bagi pemberi kerja pada kelompok difabel
	Daerah		
10.	Daerah	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan peluang pembiayaan melalui KPBU, PHLN, skema Obligasi, pinjaman melalui BPD/ PT.SMI dan optimalisasi peran CSR disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Tim

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN

Visi dan Misi Kota Batam periode 2021-2026 merupakan visi dan misi sekaligus janji politik dari Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2020. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah dilantik sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2021-2024 pada tanggal 15 Maret 2021. Kepala Daerah atau Walikota Batam periode 2021 – 2024 adalah H. Muhammad Rudi, sementara Wakil Walikota Batam periode 2021 – 2024 adalah H. Amsakar Achmad. Sejak pelantikan tersebut, maka visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota menjadi Visi dan Misi Kota Batam untuk periode RPJMD Tahun 2021 –2026 sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

5.1 Visi

Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG
MODERN DAN SEJAHTERA”.**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari

ke empat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a. “Bandar Dunia” mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "*center of excellence*".
- b. “Madani” bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep *civil society*.
- c. “Sejahtera” mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- d. “Modern” mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pokok visi “modern” menjadi cara atau strategi bagaimana mencapai tiga pokok visi lainnya. Pengembangan Kota Batam dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk membiasakan dan mendorong *pentahelix* pembangunan, meliputi pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi maupun lembaga di masyarakat, berperilaku “modern” untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dan Sejahtera.

5.2 Misi

Untuk mencapai visi “**TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA**”, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021 – 2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaran pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat

kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society*. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional

dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemeritahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan Kota Batam dalam jangka waktu 5 (lima) mendatang. Tujuan dirumuskan atau diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kota Batam yang telah ditetapkan. Satu atau lebih tujuan ditetapkan untuk mewujudkan suatu misi. Tujuan ini juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kota Batam dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota Batam yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program pembangunan daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran. Sebagai gambaran tercapainya tujuan, maka sasaran harus terukur melalui indikator tertentu yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk dicapai dalam periode pembangunan yang direncanakan, yaitu lima tahun mendatang.

Tujuan pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan Kota Batam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing. Tujuan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan misi pertama, yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang mantap tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, khususnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan.

2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif. Tujuan ini pun mendukung penyelenggaraan misi pertama. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang berkeadilan berarti pembangunan ekonomi yang merata dan inklusif, serta terukur dari indikator pemerataan pendapatan (indeks gini atau rasio gini) yang semakin mengecil.
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi kedua. Cakupan tujuan ini meliputi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan perkotaan serta permukiman, penataan ruang kota dan peningkatan kualitas lingkungan. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan yang relatif tinggi dan meningkat/stabil dari tahun ke tahun. Mengingat cakupan infrastruktur di tujuan ini difokuskan ke wilayah perkotaan (*Mainland*), maka indikator tujuan secara eksplisit menyebutkan wilayah Perkotaan.
4. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi ketiga, yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Cakupan tujuan ini meliputi upaya meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, serta urusan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Upaya lain dalam mencapai tujuan ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan, karena kemiskinan identik dengan kualitas hidup masyarakat yang rendah. Karenanya, ukuran keberhasilan tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia yang semakin meningkat serta Persentase Penduduk Miskin yang menurun dan relatif rendah dari tahun ke tahun.
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland. Tujuan ini ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan misi ke empat. Cakupan tujuan ini meliputi percepatan

penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan serta permukiman di wilayah hinterland. Ukuran ketercapaian tujuan ini adalah nilai Indeks Infrastruktur wilayah *hinterland* yang relatif tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerataan pembangunan antara wilayah Perkotaan (*mainland*) dengan *hinterland* juga dapat tercermin dari kesenjangan antara nilai indeks infrastruktur wilayah kedua wilayah yang semakin menurun setiap tahunnya.

6. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi. Tujuan ini ditetapkan untuk penyelenggaraan misi kelima pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang. Cakupan tujuan ini meliputi berbagai upaya reformasi birokrasi melalui pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kemandirian keuangan daerah, serta pelayanan publik yang prima dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ukuran keberhasilan tujuan ke enam ini adalah indeks reformasi birokrasi yang relatif tinggi dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sub sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran, namun bukan perdagangan mobil dan sepeda motor. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan sub sektor pendukung pariwisata di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari

tahun ke tahun. Sub sektor yang dimaksud meliputi sub sektor akomodasi, makanan dan minuman. Sasaran ini merupakan kondisikedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan realisasi investasi daerah, baik yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan pertama Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset industri kecil dan menengah di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan omset koperasi dan usaha mikro di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
6. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Skor Pola Pangan Harapan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan kawasan atau kluster ekonomi kreatif di Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi

saat Tujuan kedua Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

8. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
9. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase pengelolaan sampah yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
10. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Permukiman Perkotaan dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan perkotaan yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan ketiga Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
11. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat Kota Batam. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Pendidikan serta Indeks Kegemaran Membaca Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
12. Meningkatnya aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks Kesehatan masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke

tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

13. Meningkatnya daya beli masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Tingkat DayaBeli (*Purchasing Power Parity*) masyarakat Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
14. Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan. Terdapat dua ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dan Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan. Nilai kedua ukuran/indikator tersebut diharapkan meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keempat yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
15. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai konflik maupun pelanggaran di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kelima yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
16. Menurunnya angka pengangguran. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam yang menurun dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi keenam yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
17. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Batam dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketujuh yang diharapkan terjadi saat Tujuan keempat Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
18. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland.

Ukuran ketercapaian sasaran adalah Indeks infrastruktur permukiman wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

19. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah *hinterland*. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
20. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah *hinterland*. Ukuran ketercapaian sasaran adalah Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan kelima Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
21. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas. Terdapat tiga ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau laporan keuangan pemerintah Kota Batam, Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam, Tingkat Maturitas Satuan Pengawas Internal Pemerintahan (SPIP), serta tingkat tata Kelola kearsipan Kota Batam. Ketercapaian sasaran tercermin dari status atau nilai yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi pertama yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.
22. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Ukuran ketercapaian sasaran adalah tingkat atau persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang meningkat dan stabil dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi kedua yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam

Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

23. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat dua ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketercapaian sasaran tercermin dari nilai ukuran/indikator yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sasaran ini merupakan kondisi ketiga yang diharapkan terjadi saat Tujuan keenam Pembangunan Kota Batam 2021-2026 tercapai.

Berbagai sasaran yang telah diuraikan di atas telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Saat tujuan-tujuan pembangunan tercapai, maka misi pembangunan dapat terselesaikan dan visi pembangunan Kota Batam dapat tercapai. Kaitan misi, tujuan, sasaran, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan dan sasaran beserta target nilainya disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Misi, Tujuan, Indikator dan Sasaran Kota Batam Tahun 2021 – 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	RPJMD 2021 - 2026							Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
						Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.	1.1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah			-2,55%	2,65%	3,21%	4,01%	5,02%	5,54%	6,02%	6,02%	
				1.1.1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	-14,73%	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%	7,12%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				1.1.2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	-45,49%	0,12%	2,45%	3,70%	4,70%	6,84%	7,41%	7,41%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Utama); Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM (pendukung)
				1.1.3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	5%	10%	10%	15%	20%	20%	25%	25%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		1.2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Indeks Gini			0,323	0,330	0,330	0,325	0,320	0,310	0,300	0,300	
			1.2.1. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	1,00%	1,00%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	RPJMD 2021 - 2026							Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
						Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				1.2.2. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UMKM	1,00%	1,00%	1,99%	2,99%	3,98%	5,17%	0,80%	15,93%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				1.2.3. Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,20	92,50	92,30	92,35	92,40	92,45	92,50	92,50	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian; Dinas Perikanan
				1.2.4. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	72%	74%	76%	78%	80%	82%	84%	84%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Koperasi dan UMKM (Utama); Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pendukung)
2	Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman	2.1. Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan			59,24	59,43	62,50	65,03	68,05	70,63	73,46	73,46	
				2.1.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Misi	RPJMD 2021 - 2026											PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)	
		Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							Kondisi Akhir (2026)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	sesuai Tata Ruang.			2.1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Batam yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batam	69	69	69,5	70	70,5	71	72	72	Dinas Lingkungan Hidup (Utama); Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan (Pendukung)
					Persentase Pengelolaan Sampah	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%	Dinas Lingkungan Hidup
				2.1.3. Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerja Umum	48,40%	48,40%	53,26%	58,14%	63,02%	67,90%	72,78%	72,78%	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air;
					Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan perkotaan	55,00%	55,50%	60,00%	63,50%	68,50%	72,00%	75,50%	75,50%	Dinas Perhubungan
					Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60,00%
				3	Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak	3.1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia		81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82,00
3.1.1. Meningkatnya	Indeks Pendidikan	0,7369	0,7376					0,7404	0,7422	0,7439	0,7457	0,7475	0,7475	Dinas Pendidikan

No	Misi	RPJMD 2021 - 2026											PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)	
		Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							Kondisi Akhir (2026)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Mulia.			aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	7	7	7	8	9	9	10	10	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
				3.1.2. Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	0,8205	0,8112	0,8219	0,8226	0,8233	0,824	0,8247	0,8247	Dinas Kesehatan (OPD Utama); RSUD (OPD Pendukung)
				3.1.3. Meningkatkan daya beli masyarakat	Tingkat Daya Beli (PPP)	18.095.000	18.347.000	19.196.000	19.868.000	20.365.000	20.874.000	21.396.000	21.396.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (OPD Utama); Bagian Perekonomian Setda (OPD Pendukung)
				3.1.4. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,42	94,42	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52	94,52	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
					Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	6,64%	6,64%	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%	11,64%	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	RPJMD 2021 - 2026							Kondisi Akhir (2026)	PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)
						Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				3.1.5. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	25,00%	20,00%	16,70%	14,30%	12,50%	11,10%	10,00%	10,00%	Badan Kesbangpol; Satpol PP
			Persentase penduduk miskin			4,75%	4,79%	4,74%	4,69%	4,68%	4,66%	4,65%	4,65%	
				3.1.6. Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,79%	10,50%	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%	9,55%	Dinas Tenaga Kerja
				3.1.7. Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan PMKS	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4	Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.	4.1. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland			56,25	56,66	59,56	61,01	62,21	63,75	65,34	65,34	
				4.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60,00%	Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan
				4.1.2. Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	80,00%	81,00%	89,00%	92,00%	94,00%	97,00%	100,00%	100,00%	Dinas Perhubungan

No	Misi	RPJMD 2021 - 2026											PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)	
		Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							Kondisi Akhir (2026)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				4.1.3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	27,50%	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%	37,80%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi			52 (CC)	57 (CC)	62 (B)	68 (B)	72 (BB)	77 (BB)	80 (A)	80 (A)	
					Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
				5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Bagian Tata Pemerintahan Setda (OPD Utama); Bappelitbangda (OPD Pendukung)
					Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	53 (Cukup)	55 (Cukup)	58 (Cukup)	60 (Cukup)	62 (Cukup)	64 (Cukup)	65 (Baik)	65 (Baik)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
					Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
				5.1.2. Meningkatnya kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	-8,33%	11,75%	5,19%	5,43%	7,04%	5,29%	6,33%	41,02%	BP2RD

No	Misi	RPJMD 2021 - 2026											PD Penanggung Jawab Sasaran (IKD)	
		Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKD)	Kondisi Tahun 2020 (Baseline)	Target							Kondisi Akhir (2026)
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					Indeks SPBE	1,6	1,69	2,45	3,01	3,23	3,83	4,79	4,79	Dinas Kominfo (OPD Utama); Inspektorat (OPD Pendukung)
				5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,61	82	88,31	89	90	91	92	92	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Seluruh Kecamatan; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; DPMPSTSP; Dinas Pemadam Kebakaran; BKPSDM; Dinas Kominfo; Dinas Pertanahan

Keterangan: N.A. = Not Available / data tidaktersedia

5.4 Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan periode 2021 - 2026 yang ditetapkan haruslah bisa menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan Kota Batam, sebagaimana tertuang dalam Bab IV. Dalam Bab IV telah diuraikan hubungan antara permasalahan (internal) pembangunan Kota Batam dengan isu-isu strategisnya. Selain itu, telah diuraikan pula isu-isu strategis nasional maupun internasional yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kota Batam hingga tahun 2026. Karenanya, untuk menjamin bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam dapat menjawab semua isu strategis, maka Tabel 5.2 memperlihatkan hubungan isu strategis terkait permasalahan pembangunan Kota Batam maupun isu regional/nasional/internasional dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, jika sasaran, tujuan, misi dan visi tercapai, maka isu strategis tersebut telah terjawab.

Tabel 5. 2 Hubungan Isu Strategis terkait Permasalahan Daerah maupun Isu Regional/Nasional/Internasional dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
ISU STRATEGIS TERKAIT PERMASALAHAN DAERAH				
Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	12 s.d. 18
Mengembangkan SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing				
Reformasi Birokrasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 23
Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 2 dan Misi 4 Misi 1	Tujuan 3 dan 5 Tujuan 1 dan 2	9 s.d. 11 dan 19 s.d. 21 1 s.d. 8
Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional				
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	"Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	9 s.d. 11 dan 19 s.d. 21
Membangun lingkungan				

Isu Strategis	Pokok Visi	Misi ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-
hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim				
Mengembangkan Wilayah (Kecamatan) untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				
Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 23
Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas, Lansia)	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	12 s.d. 18
ISU STRATEGIS NASIONAL				
Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	12 s.d. 18
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	9 s.d. 11 dan 19 s.d. 21
Reformasi birokrasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 23
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	"Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	9 s.d. 11 dan 19 s.d. 21
Menciptakan Batam sebagai salah satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 1	Tujuan 1 dan 2	1 s.d. 8
Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Kelompok Difabel dan Kelompok Rentan	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	12 s.d. 18
ISU STRATEGIS INTERNASIONAL				
Adaptasi terhadap Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	"Sejahtera", "Modern"	Misi 3	Tujuan 4	12 s.d. 18
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Bandar Dunia", "Modern" dan "Sejahtera"	Misi 2 dan 4	Tujuan 3 dan 5	9 s.d. 11 dan 19 s.d. 21
Perdagangan Bebas ASEAN, Asia dan Dunia	"Bandar Dunia", "Modern"	Misi 1	Tujuan 1 dan 2	1 s.d. 8
Revolusi 4.0 dan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi	"Madani", "Modern"	Misi 5	Tujuan 6	22 dan 23

BAB VI
STRATEGI, ARAH
KEBIJAKAN DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategis” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berpijak pada komitmen yang tinggi untuk mencapai visi “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”, melalui lima misi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam periode 2021- 2026 yakni:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang.
3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Agar lebih implementatif maka dirumuskan 23 strategi pencapaian sebagai berikut:

- A. Misi pertama: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, dengan strategi:
 1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui penguatan UMKM dan industri serta peningkatan investasi;

2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi usaha besar, UMKM dan IKM;
 3. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha;
 4. Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam;
 5. Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.
- B. Misi kedua: Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang, dengan strategi:
1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas dan pengendalian banjir;
 2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan;
 3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegritas;
 4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman dan nyaman.
- C. Misi ketiga: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia, dengan strategi:
1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan;
 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan;
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis;
 4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi;
 5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
 6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

- D. Misi keempat: Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dengan strategi:
1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland;
 2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi;
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan legalitas lahan.
- E. Misi kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan strategi:
1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas;
 2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas;
 3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
 4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN;
 5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah.

Misi dan Strategi di atas merupakan rumusan misi dan strategi yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Namun demikian, rumusan misi dan strategi tersebut harus diselaraskan dengan konsep penjabaran visi-misi ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan sektor yang ditentukan dan urusan pemerintahan yang terkait sehingga berpengaruh terhadap rumusan strategi. Oleh karena itu, pada tabel 6.1 di bawah disajikan rumusantujuan dan sasaran serta strategi yang disesuaikan berdasarkan sektor dan urusan pemerintahan yang terkait.

**Tabel 6. 1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kota Batam
Tahun 2021-2026**

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
Misi 1: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Strategi 1: Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan Strategi 2: Meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan
	Sasaran 2: Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam.	Strategi 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemasaran destinasi wisata Kota Batam Strategi 2: Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan untuk mendukung pariwisata
	Sasaran 3: Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam	Strategi 1: Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusaha; Strategi 2: Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan kecil berdasarkan RTRW Kota Batam. Strategi 3: Mendorong percepatan dan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam
Tujuan 2: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif	Sasaran 4: Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Strategi 1: Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplentasiannya; Strategi 2: Meningkatkan produktivitas IKM;
	Sasaran 5: Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah	Strategi 1: Meningkatkan produktivitas UMKM Strategi 2: Pengembangan kelembagaan dan produktivitas koperasi

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
	<p>Sasaran 6: Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan keanekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan</p>
	<p>Sasaran 7: Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah</p>	<p>Strategi 1: Menyusun perencanaan kawasan ekonomi kreatif dan fasilitasi pengimplementasiannya</p>
<p>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.</p>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<p>Tujuan 3: Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan.</p>	<p>Sasaran 8: Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten.</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan dan pemanfaatan/data dan informasi bidang keciptakaryaan dan tata ruang.</p> <p>Strategi 2: Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.</p>
	<p>Sasaran 9: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan</p> <p>Strategi 2: Meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau.</p> <p>Strategi 3: Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan.</p>
	<p>Sasaran 10: Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni.</p>	<p>Strategi 1: Meningkatkan kualitas jaringan jalan.</p> <p>Strategi 2: Meningkatkan kualitas jaringan drainase.</p> <p>Strategi 3: Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman.</p> <p>Strategi 4: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.</p> <p>Strategi 5: Memperbaiki kondisi lalu lintas dan meningkatkan tingkat keamanan lalu lintas.</p>

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
		Strategi 6: Pengembangan sistem transportasi umum masal.
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 4: Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Sasaran 11: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan seta literasi masyarakat	Strategi 1: Meningkatkan efektifitas dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, pra sekolah dan dasar (9 tahun) Strategi 2: Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat
	Sasaran 12: Meningkatnya aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Strategi 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan Strategi 2: Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat Strategi 3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat
	Sasaran 13: Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 1: Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi produk dan perlindungan konsumen
	Sasaran 14: Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Strategi 1: Optimalisasi upaya pemberdayaan gender Strategi 2: Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak Strategi 3: Meningkatkan upaya ketahanan keluarga dan optimalisasi pengendalian penduduk Strategi 4: Meningkatkan partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan/atau organisasi kepemudaan/sosial kemasyarakatan
	Sasaran 15: Meningkatnya kerukunan dan	Strategi 1: Optimalisasi upaya penurunan pelanggaran terhadap

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
	ketentraman hidup masyarakat	perda dan K3 (ketentraman, kenyamanan dan keindahan) Strategi 2: Meningkatkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, dan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
	Sasaran 16: Menurunnya angka pengangguran	Strategi 1: Optimalisasi upaya/fasilitas penyerapan dan perlindungan tenaga kerja Strategi 2: Meningkatkan upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan/hubungan industrial
	Sasaran 17: Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	Strategi 1: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan terhadap PMKS Strategi 2: Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan permasalahan sosial
Misi 4: Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 5: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland.	Sasaran 18: Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Strategi 1: Meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan permukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah hinterland
	Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Strategi 1: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi Perhubungan di wilayah hinterland
	Sasaran 20: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah	Strategi 1: Optimalisasi penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland.

VISI : "Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera"		
	hinterland	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 6: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Sasaran 21: Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Strategi 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Strategi 2: Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
	Sasaran 22: Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah	Strategi 1: Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
	Sasaran 23: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Strategi 1: Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan / pelayanan publik Strategi 2: Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan publik

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah. Berikut program prioritas atau unggulan daerah:

Tabel 6. 2 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

No.	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan
1	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan	Penguatan UMKM dan IKM melalui:

No.	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan
	Pembangunan Ekonomi.	<p>a. Memfasilitasi akses bagi UMKM dan IKM ke pusat perdagangan modern dan internasional.</p> <p>b. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, bidang industri dan KEK.</p> <p>c. Pemasaran dan promosi yang optimal.</p> <p>d. Penurunan Suku Bunga Dana Bergulir menjadi 4% (sesuai dengan ketentuan).</p> <p>e. Fasilitasi Ruang dan Tempat Usaha UMKM yang akan disiapkan oleh Pemerintah</p> <p>f. Percepatan Pembangunan Pasar Induk Jodoh</p> <p>g. Relaksasi Pajak Daerah dan Insentif kepada UMKM terdampak Covid-19.</p> <p>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui:</p> <p>a. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani melalui pasar yang menjual produk lokal.</p> <p>b. Meningkatkan jaring pengaman sosial dan kegiatan padat karya.</p> <p>c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Tua melalui kepemilikan aset lahan</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja terdampak Covid-19.</p> <p>e. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan menekan laju inflasi.</p> <p>f. Pemberian insentif penyelenggara jenazah.</p> <p>g. Peningkatan Insentif RT/RW, Guru TPQ, Guru Agama, Mubaligh, Imam Mesjid, Pendeta Menetap, dan Kader Posyandu.</p> <p>h. Bantuan biaya pemakaman orang miskin.</p> <p>i. Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni.</p>

No.	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan
		Dukungan dan fasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Baru di KPBPB, KEK di bidang industri, pariwisata dan kawasan pulau untuk kegiatan pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Sertifikasi Rumah Ibadah Gratis. Mendorong BP Batam untuk Pembebasan UWT seluruh rumah ibadah dan instansi pemerintah
2	Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan	Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Utilitas Perkotaan yang berkualitas, dengan cara: a. Peningkatan Jalan Utama Tuntas. b. Peningkatan Jalan Lingkungan Tuntas. c. Pengendalian/Penanganan Banjir Tuntas. d. Peningkatan PIK menjadi 2,5 M per Kelurahan. Sarana dan Prasarana Pedestrian dan Jalur Sepeda (Gowes) Pengembangan Koridor Transportasi Massal. Pembangunan Utilitas Perkotaan berupa jaringan pipa gas dan sanitasi terpadu. Penyiapan Taman-Taman Kota Bertema sebagai Ruang Terbuka Hijau, tempat berolahraga serta Rekreasi Masyarakat.
3	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat.	Bidang Pendidikan, melalui : a. Sekolah Gratis, Transportasi Pelajar Gratis, Baju Seragam Gratis bagi Siswa Baru (SD dan SMP). b. Beasiswa di 7 universitas di Indonesia. c. Peningkatan Insentif dan Pemberian Beasiswa Guru Berprestasi. d. Fasilitasi Pendidikan Vokasi di Bidang Digital, Dirgantara dan Maritim. e. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana pendidikan yang modern. f. Meningkatkan kembali Kerjasama Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Kerja dengan Pemerintah Singapura. Bidang Kesehatan, melalui:

No.	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan
		<p>a. Jampersal gratis bagi masyarakat tidak mampu.</p> <p>b. Memberikan Jamkesda melalui pembayaran premi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Bagi Masyarakat Miskin.</p> <p>c. Peningkatan puskesmas rawat inap serta fasilitas Kesehatan yang layak.</p> <p>d. Meningkatkan insentif tenaga medis.</p> <p>e. Fasilitasi Penyiapan KEK Jasa Kesehatan (Health Tourism).</p> <p>f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.</p> <p>g. Perawatan pasien Covid-19 gratis.</p> <p>Bidang Tenaga Kerja, melalui:</p> <p>a. Membina kerjasama Lembaga Pendidikan dengan pelaku dunia usaha.</p> <p>b. Fasilitasi Pendirian BLK Kemaritiman sebagai pusat peningkatan Kapasitas/Skill SDM Batam di Kabil, Nongsa.</p> <p>c. Sertifikasi Gratis Tenaga Kerja Batam.</p> <p>d. dPenyerapan Tenaga Kerja Melalui Bursa Kerja Terpadu.</p> <p>e. Fasilitasi pembangunan Rumah Susun untuk pekerja.</p>
4	Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah	<p>Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, Provinsi, BP Batam, dan dunia usaha dalam rangka memberikan kemudahan fasilitas investasi dan Promosi.</p> <p>Meningkatkan dan memperkuat kinerja pelayanan perizinan melalui penguatan SDM dan Teknologi Informasi.</p> <p>Memberikan insentif dan kemudahan berusaha sebagai stimulus ekonomi bagi pelaku usaha.</p> <p>Menciptakan kenyamanan dan kepastian investasi melalui fasilitasi sarana pendukung investasi di bidang lahan, infrastruktur dasar dan utilitas serta dukungan aspek legal.</p> <p>Mendorong percepatan penyelesaian lahan di Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru.</p>
5	Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland	<p>Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, pelantar dan jembatan.</p> <p>Peningkatan keterhubungan antar pulau.</p> <p>Fasilitasi pemenuhan akses listrik, air bersih dan telekomunikasi bagi pulau-pulau strategis.</p>

No.	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan
		Pemberian bantuan penunjang kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Pemberian beasiswa ke Perguruan Tinggi Negeri. Melanjutkan kegiatan verifikasi lahan masyarakat hinterland melalui prona dan proda. Percepatan penyelesaian Sertifikasi Lahan.
6	Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Penerapan e-Government, SPM dan SOP di setiap aspek pelayanan publik. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Pemberian sanksi dan penghargaan terhadap kinerja aparatur. Peningkatan disiplin, kualitas kerja, dan kompetensi aparatur pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan.

Sesuai dengan pendekatan penyusunan perencanaan berdasarkan substansinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pendekatan holistik, tematik integratif dan spasial. Dalam sub bab ini, disajikan deskripsi pendekatan spasial yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam. Dalam konteks mewujudkan keselarasan menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah, antar sektor dan dimensi waktu pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, maka strategi dan arah kebijakan kewilayahan ditujukan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan. Adapun rumusan tujuan penataan ruang Kota Batam yaitu: ***“Untuk Mewujudkan Ruang Kota Batam Menuju Bandar Dunia Madani Berbasis Sektor Pariwisata Dan Industri Yang Bertaraf Internasional”***.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang tersebut, maka kebijakan penataan ruangnya adalah:

- 1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki;
- 2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas kota;
- 3) Peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
- 4) Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan
- 5) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mencapai kebijakan penataan ruang tersebut, maka strategi-strategi pengembangan Kota Batam yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Strategi Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan Kota, dan pusat lingkungan secara merata;
 - b. Mengembangkan pemanfaatan ruang antar pusat-pusat pertumbuhan primer, antara pusat pertumbuhan primer dengan pusat pertumbuhan sekunder, dan antara pusat-pusat pertumbuhan

- dengan wilayah sekitarnya;
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - d. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- 2) Strategi Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas kota, terdiri atas:
- a. Meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 - b. Meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan baik dalam sistem primer maupun dalam sistem sekunder;
 - c. Mengembangkan jalan bebas hambatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan kawasan ekonomi;
 - d. Mengembangkan moda transportasi massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah Kota;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem energi;
 - f. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem telekomunikasi; dan
 - g. Meningkatkan sistem infrastruktur perkotaan.
- 3) Strategi Peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung, terdiri atas:
- a. Menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - c. Mewujudkan RTH Publik dengan luas paling sedikit 20% dari luas kawasan terbangun;

- d. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai; dan
 - e. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahan;
- 4) Strategi Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya, terdiri atas:
- a. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
 - b. Mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana penunjang industri untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah;
 - c. Mengembangkan kegiatan pariwisata dan sarana prasarana penunjang pariwisata untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - d. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
 - e. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dengan pembangunan sarana dan prasarana.
- 5) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
- a. Menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 - c. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagaimana disampaikan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RKPD.

Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Tabel 6. 3 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Arah Kebijakan Tahun-I	Arah Kebijakan Tahun-II	Arah Kebijakan Tahun-III :	Arah Kebijakan Tahun-IV :	Arah Kebijakan Tahun-V:	Arah Kebijakan Tahun-VI:
Memacu Terwujudnya Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Melanjutkan Pembangunan Menuju Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera	Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Hinterland untuk Pemerataan Pembangunan Daerah	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan	Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
Misi 2 dan Misi 3	Misi 1; Misi 2; dan Misi 3	Misi 2 dan Misi 1	Misi 4 dan Misi 3	Misi 5	Misi 3

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD), diperoleh tahapan Arah Kebijakan Umum sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.3

di atas. Arah kebijakan tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui arah pembangunan dengan asumsi yang dibuat saat penyusunan dokumen RPJMD ini. Adapun pada perkembangan selanjutnya terdapat perubahan pada asumsi yang dipergunakan, maka diharapkan arah pembangunan yang dilaksanakan tetap selaras dengan tahun sebelumnya dan mengarah pada pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program pembangunan daerah yang disertai dengan pagu indikatif (Tabel 6.4):

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keumuhan dan keunggulan wilayah					25.118.774.236	37.960.037.702	39.976.801.065	43.249.980.410	44.974.927.766	47.353.108.293	238.633.629.471							
	Tujuan 1.1: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	-2,25%	2,65%	7.836.505.480	2,81%	11.519.474.552	3,23%	11.055.951.792	4,29%	12.180.951.792	4,94%	10.895.951.792	5,41%	11.010.951.792	5,41%	64.499.787.200	
	Sasaran 1.1.1: Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	%	-15%	2%	2.005.000.000	3%	2.405.000.000	5%	1.905.000.000	7%	2.955.000.000	7%	1.655.000.000	7%	1.755.000.000	7%	12.680.000.000	
	30.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3.30.02	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	%	0	0	-	0	100.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	0	400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang berklasifikasi SNI	Unit	0	0	1.700.000.000	0	1.900.000.000	0	1.600.000.000	0	2.700.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	10.300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3.30.05	Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Rp	0	0	305.000.000	0	405.000.000	0	255.000.000	0	155.000.000	0	405.000.000	0	455.000.000	0	1.980.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 1.1.2 : Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam	Pertumbuhan sektor pendukung pariwisata (sektor akomodasi dan makan minum)	%	-45,49%	0%	5.006.841.000	2%	8.140.829.792	4%	8.140.829.792	5%	8.140.829.792	7%	8.140.829.792	7%	8.140.829.792	7%	45.710.989.960	
	22.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	Orang	0	1jt	793.790.000	1,4jt	4.172.662.500	1,5jt	4.172.662.500	1,7jt	4.172.662.500	1,8jt	4.172.662.500	1,9jt	4.172.662.500	9,3 juta	21.657.102.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	Produk	0	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	675.110.000	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	8.015.946.460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan Pekan (Event) Kebudayaan sesuai dengan standar Ditjen Kebudayaan	%	28	0	3.151.680.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	10.651.680.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	0	0	179.536.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	1.679.536.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Pengunjung Museum	Orang	0	5.000 Pengunjung	206.725.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	30.000 Pengunjung	3.706.725.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Sasaran 1.1.3 : Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Batam	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	%	5%	10%	824.664.480	10%	973.644.760	15%	1.010.122.000	20%	1.085.122.000	20%	1.100.122.000	25%	1.115.122.000	25%	6.108.797.240	
	18.01. Dinas Penanaman Modal dan PTSP																		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	%	8.14% (Tahun 2019 : 405 Proyek; Tahun 2020 :438 Proyek)	5%	184.833.840	5%	184.330.000	5%	200.000.000	5%	215.000.000	5%	230.000.000	5%	245.000.000	30%	1.259.163.840	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kepedmintaan investasi	%	NA	90%	225.295.760	90%	381.142.760	90%	400.000.000	95%	460.000.000	95%	460.000.000	95%	460.000.000	95%	2.386.438.520	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%	10% (500 Perusahaan)	10%	326.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	70%	1.926.732.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sstim Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	%	NA	60%	88.412.880	70%	88.050.000	70%	90.000.000	80%	90.000.000	80%	90.000.000	90%	90.000.000	90%	536.462.880	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Tujuan 1.2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	Indeks Gini	Indeks	0,323	0,33	17.282.268,756	0,33	26.440.563,150	0,325	28.920.849,273	0,32	31.069.028,618	0,31	34.078.975,974	0,3	36.342.156,501	0,3	174.133.842,271	
	Sasaran 1.2.1 : Meningkatkan produktivitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	%	1%	1%	3.000.000,000	2%	2.250.000,000	2%	2.000.000,000	2%	1.750.000,000	2%	2.000.000,000	3%	1.500.000,000	3%	12.500.000,000	
	30.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	0	0	3.000.000,000	0	2.250.000,000	0	2.000.000,000	0	1.750.000,000	0	2.000.000,000	0	1.500.000,000	0	12.500.000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran 1.2.2 : Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UMKM	%	1,00%	1,00%	1.392.750,500	1,99%	2.099.288,150	2,99%	2.414.181,373	3,98%	2.776.308,578	5,17%	3.192.754,865	0,80%	3.671.668,095	15,93%	15.546.951,561	
	17.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																		
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan persentase koperasi aktif	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	0	0	151.199,500	0	166.319,450	0	191.267,368	0	219.957,473	0	252.951,094	0	290.893,758	0	1.272.588,641	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan jumlah Koperasi Terlatih	%	172 orang	172 orang	390.304.000	0	515.277.400	0	592.569.010	0	681.454.362	0	783.672.516	0	901.223.393	0	3.864.500.680	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang naik kinerjanya	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	60 umkm	60 umkm	851.247.000	0	1.417.691.300	0	1.630.344.995	0	1.874.896.744	0	2.156.131.256	0	2.479.550.944	0	10.409.862.239	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Sasaran 1.2.3 : Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,20	92,50	9.163.703.056	92,30	14.669.671.000	92,35	16.271.823.300	92,40	17.372.648.750	92,45	18.640.639.125	92,50	19.688.069.125	92,50	95.806.554.356	
	9.01. Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian																		
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)	kkal per kapita per hari	2604	2605	691.341.000	2606	1.070.000.000	2607	1.145.000.000	2608	1.250.000.000	2609	1.307.000.000	2610	1.365.000.000	2610	6.828.341.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	%	NA	belum ada	301.177.000	0,546875	507.000.000	0,59375	560.000.000	0,625	612.500.000	0,65625	665.000.000	0,703125	717.500.000	0,703125	3.363.177.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	100	85	-	86	200.000.000	87	240.000.000	88	280.000.000	89	340.000.000	90	360.000.000	90	1.420.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%	0	9,90%	3.318.630.000	9,90%	2.254.375.000	9,90%	2.459.812.500	9,90%	2.678.293.750	9,90%	2.911.123.125	9,90%	2.986.123.125	60,00%	16.608.357.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
		Jumlah produksi ternak sapi	ekor	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (kg per tahun)	kg per tahun	0	0	780.184.995	0	980.000.000	0	1.285.000.000	0	1.500.000.000	0	1.750.000.000	0	2.000.000.000	0	8.295.184.995	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
3.27.07	Program Penulhan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	%	40,00%	60,00%	101.320.000	70,00%	700.000.000	80,00%	680.000.000	80,00%	700.000.000	90,00%	775.000.000	100%	850.000.000	100%	3.806.320.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	%	0	75%	437.724.511	80%	1.322.000.000	85%	1.286.400.000	90%	1.253.680.000	95%	1.324.416.000	100%	1.374.416.000	100%	6.998.636.511	Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian
25.01. Dinas Perikanan																			
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	23.385,01	23.852,71	3.274.544.300	24.329,76	5.090.000.000	24.816,36	5.344.000.000	25.312,69	5.609.000.000	25.818,94	5.888.000.000	26.335,32	6.184.000.000	150.465,78	31.389.544.300	Dinas Perikanan
		Indeks Harga yang Diterima Nelayan (Rp)	Rp (Juta)	75.637.000,00	77.149.000,00	-	78.692.000,00	-	80.265.000,00	-	81.870.000,00	-	83.507.000,00	-	85.177.000,00	-	486.660.000,00	-	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	Ton	7.234,87	7.379,57	258.781.250	7.527,16	1.566.296.000	7.677,70	2.245.110.800	7.831,26	2.410.375.000	7.987,88	2.545.600.000	8.147,64	2.663.780.000	46.551,20	11.689.943.050	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	2,00%	2,00%	-	2,00%	980.000.000	2,00%	1.026.500.000	2,00%	1.078.800.000	2,00%	1.134.500.000	2,00%	1.187.250.000	12,00%	5.407.050.000	Dinas Perikanan
	Sasaran 1.2.4 : Meningkatkan Ekonomi	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif	%	72%	74%	3.725.815.200	76%	7.421.604.000	78%	8.234.844.600	80%	9.170.071.290	82%	10.245.581.984	84%	11.482.419.281	84%	50.280.336.355	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Kreatif Daerah	Daerah																	
	22.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina2. Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	Sub Sektor	0	2 Sub Sektor155 Orang	2.395.063.200	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	12 Sub Sektor930 Orang	12.395.063.200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	17.01. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																		
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	Usaha	200 umkm	200 umkm	1.330.752.000	0	5.421.604.000	0	6.234.844.600	0	7.170.071.290	0	8.245.581.984	0	9.482.419.281	0	37.885.273.155	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang					526.436.936.534		616.564.950.685		711.837.145.344		790.206.409.831		792.036.771.795		902.559.868.731		4.339.642.082.920	
	Tujuan 2.1 : Mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	59,24092593	59,43092593	526.436.936.534	62,50185185	616.564.950.685	65,02777778	711.837.145.344	68,0537037	790.206.409.831	70,62962963	792.036.771.795	73,45555556	902.559.868.731	73,45555556	4.339.642.082.920	
	Sasaran 2.1.1 : Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Batam yang konsisten	Persentase kesesuaian pertimbanagan teknis tata ruang	%	100%	100%	5.114.095.000	100%	32.015.392.500	100%	6.558.796.750	100%	34.444.615.925	100%	7.621.535.268	100%	35.614.325.269	100%	121.368.760.712	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	3.02. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang																		
1.03.12	Program Penyeenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang Kota Batam	Dokumen	951 dokumen	83 dokumen	5.114.095.000	109 dokumen	32.015.392.500	103 dokumen	6.558.796.750	130 dokumen	34.444.615.925	129 dokumen	7.621.535.268	154 dokumen	35.614.325.269	154 dokumen	121.368.760.712	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Sasaran 2.1.2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan hijau dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	69	69	22.782.359.446	69,5	45.325.413.404	70	54.250.175.655	70,5	58.733.157.631	71	66.290.884.723	72	74.101.059.944	72	321.483.050.803	
	11.01. Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	%	100%	100%	651.862.000	100%	1.450.000.000	100%	1.100.000.000	100%	700.000.000	100%	360.500.000	100%	371.315.000	100%	4.633.677.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	%	100%	100%	1.484.118.625	100%	3.750.000.000	100%	3.725.000.000	100%	2.664.750.000	100%	2.870.587.500	100%	3.093.976.875	100%	17.588.433.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perfundangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase perizinan yang dibina dan diawasi	%	20%	20%	160.466.000	40%	1.100.000.000	50%	1.116.500.000	60%	1.133.495.000	70%	1.150.999.850	80%	1.169.029.846	80%	5.830.490.696	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0%	0%	-	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	100%	135.759.000	100%	150.000.000	100%	154.500.000	100%	159.135.000	100%	163.909.050	100%	168.826.322	100%	932.129.372	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	0%	0%	-	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	10.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	4.01. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan																		
2.11.04	Program Pengelolaan Kenakeragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas Jenis RTH Kota Dalam Kondisi Terpelihara	%	13,18%	13,18%	20.350.153.821	13,79%	36.225.413.404	14,64%	45.504.175.655	14,64%	51.425.777.631	14,64%	59.094.888.323	14,64%	66.647.911.902	14,64%	279.248.320.736	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
		Persentase Pengelolaan Sampah	%	55,30%	55,50%	84.552.325.858	59,25%	118.548.997.833	61,75%	122.217.658.641	64,50%	126.706.162.658	67,25%	131.667.825.486	71,25%	137.186.755.632	71,25%	720.879.726.109	
	11.01. Dinas Lingkungan Hidup																		
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	10,00%	10,00%	71.470.676.550	15,00%	102.400.000.000	18,00%	104.648.000.000	22,00%	107.787.440.000	26,00%	111.021.063.200	30,00%	115.151.695.096	30,00%	612.478.874.846	Dinas Lingkungan Hidup
		% Rumah Tangga yang pengangkutan sampahnya tuntas	%	0,00%	80,00%	13.081.649.308	82,00%	16.148.997.833	87,00%	17.569.658.641	90,00%	18.918.722.658	0,00%	20.646.762.286	95,00%	22.035.060.536	95,00%	108.400.851.263	Seluruh Kecamatan
	Sasaran 2.1.3 : Tersedianya infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman dan terpadu serta kawasan permukiman yang layak huni	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	48,40%	48,40%	177.468.894.779	53,26%	130.425.805.693	58,14%	142.125.027.983	63,02%	149.562.304.588	67,90%	157.796.137.545	72,78%	196.124.983.921	72,78%	953.503.154.509	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja
	3.01. Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air																			
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Drainase yang dinormalisasikan	m	78200	78200	10.991.734.180	78100	10.733.820.889	78100	11.679.325.420	78100	12.712.986.527	78100	13.843.300.173	78100	15.079.595.932	468700	75.040.763.121	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	
		Jumlah peralatan yang dioperasionalkan	m	34	34	-	35	-	36	-	37	-	38	-	40	-	40	-	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	
1:03:06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	m	61200	61200	23.457.053.483	61550	35.400.000.000	61750	41.250.000.000	62450	43.350.000.000	62650	45.450.000.000	63350	77.250.000.000	372950	266.157.053.483	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara di Kota Batam	km	44,72	44,72	142.432.998.556	39	83.956.984.804	39	88.425.952.563	39	93.150.480.561	39	98.146.557.997	39	103.431.294.645	239,72	609.544.269.126	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Terlaksananya sarana dan prasarana pengujian	%	100%	100%	587.108.560	100%	335.000.000	100%	769.750.000	100%	348.837.500	100%	356.279.375	100%	364.093.344	100%	2.761.068.779	Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan perkotaan	%	55,00%	55,50%	22.451.903.970	60,00%	57.991.482.020	63,50%	144.810.746.572	68,50%	156.080.234.140	72,00%	137.524.739.225	75,50%	139.920.808.288	75,50%	658.779.914.216		
	15.01. Dinas Perhubungan																			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang	%	5%	5%	22.451.903.970	24%	57.991.482.020	43%	144.810.746.572	62%	156.080.234.140	82%	137.524.739.225	100%	139.920.808.288	100%	658.779.914.216	Dinas Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Jalan (LLAJ)	terbangun																	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	45%	45%		48%		55%		57%		61%		67%		67%		
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	%	60%	60%	214.067.357.481	60%	232.257.859.234	60%	241.874.739.742	60%	264.679.934.888	60%	291.135.649.550	60%	319.611.935.677	60%	1.563.627.476.571	
	4.01. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan																		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan			0	1	11.872.788.275	1	26.372.788.275	1	13.872.788.275	1	14.872.788.275	1	15.872.788.275	1	16.872.788.275	1	99.736.729.650	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,050245365	0,060423359	11.065.207.500	0,070601354	5.837.842.353	0,08247568	7.950.000.000	0,094350007	7.750.000.000	0,107920666	9.000.000.000	0,123187657	9.850.000.000	0	51.453.049.853	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU di wilayah perkotaan	%	0,8908	94%	191.129.361.706	96%	200.047.228.606	97%	220.051.951.467	98%	242.057.146.613	99%	266.262.861.275	100%	292.889.147.402	100%	1.412.437.697.068	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
	Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan					566.923.863.600		595.806.615.930		654.134.202.602		673.741.927.376		669.625.383.519		721.417.132.337		3.880.699.125.464	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Berakhlak Mulia																		
	Tujuan 3.1: Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	81,11	81,15	456.266.840.620	81,46	553.074.717.022	81,74	607.991.618.258	81,89	623.538.636.868	82	644.976.851.011	82,1	694.353.746.579	82,1	3.579.252.410.458	
	Sasaran 3.1.1: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7369	0,7376	368.074.698.449	0,7404	439.134.498.478	0,7422	445.207.726.958	0,7439	449.779.726.958	0,7457	453.265.726.958	0,7475	459.717.726.958	0,7475	2.615.180.104.759	
	1.01. Dinas Pendidikan																		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUDAPK SD / Paket AAPK SMP / Paket B	Skor	90.50104.53106.04	91.00104.25105.80	368.074.698.449	91.50104.00104.95	436.534.498.478	92.00103.75103.10	442.607.726.958	92.50102.50102.48	447.379.726.958	93.00101.00101.02	451.065.726.958	93.50100100	457.517.726.958	93.50100100	2.603.180.104.759	Dinas Pendidikan
1:01:03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Kurikulum mata pelajaran muatan lokal	%	0	100%	-	100%	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.000.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	5.000.000.000	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PERSENTASE PENDIDIK BERSERTIFI KASI	%	0	100%	-	100%	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	5.000.000.000	Dinas Pendidikan
1:01:05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan	%	0	100%	-	100%	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	7	7	949.999.900	7	1.975.000.000	8	2.145.000.000	9	2.340.000.000	9	2.585.000.000	10	2.780.000.000	10	11.825.000.000	
	23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum/taman bacaan	%	0	0	949.999.900	0	1.925.000.000	0	2.095.000.000	0	2.290.000.000	0	2.535.000.000	0	2.730.000.000	0	11.575.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	%	0	0	-	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 3.1.2: Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8205	0,8112	50.500.000,000	0,8219	71.600.000,000	0,8226	100.800.000,000	0,8233	101.200.000,000	0,824	141.600.000,000	0,8247	182.000.000,000	0,8247	647.700.000,000	
	2.01. Dinas Kesehatan																		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			0,75	0,75	25.000.000,000	0,75	35.500.000,000	0,8	50.000.000,000	0,8	50.000.000,000	0,85	70.000.000,000	0,9	90.000.000,000	0,9	320.500.000,000	Dinas Kesehatan
				0,75	0,75	25.000.000,000	0,75	35.500.000,000	0,8	50.000.000,000	0,8	50.000.000,000	0,85	70.000.000,000	0,9	90.000.000,000	0,9	320.500.000,000	RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			0,75	0,75	250.000.000	0,75	300.000.000	0,8	400.000.000	0,8	600.000.000	0,85	800.000.000	0,9	1.000.000,000	0,9	3.350.000.000	Dinas Kesehatan
				0,75	0,75	250.000.000	0,75	300.000.000	0,8	400.000.000	0,8	600.000.000	0,85	800.000.000	0,9	1.000.000,000	0,9	3.350.000.000	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kesehatan
	Sasaran 3.1.3: Meningkatkan daya beli masyarakat	Tingkat Daya Beli (PPP)	Indeks	18095000	18347000	13.903.909.000	19196000	14.073.268.000	19868000	14.314.026.800	20365000	14.563.861.480	20874000	14.623.679.628	21396000	14.694.479.591	21396000	86.173.224.499	
	30.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	0	0	11.960.680.000	0	12.060.680.000	0	12.110.680.000	0	12.160.680.000	0	12.210.680.000	0	12.160.680.000	0	72.664.080.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Peningkatan UTTP yang tertib ukur	%	0	0	1.200.000.000	0	1.105.000.000	0	1.205.000.000	0	1.305.000.000	0	1.205.000.000	0	1.205.000.000	0	7.225.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	4.01. Sekretariat Daerah																		
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	Indeks	100%		743.229.000		907.588.000		998.346.800		1.098.181.480		1.207.999.628		1.328.799.591		6.284.144.499	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
	Sasaran 3.1.4: Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,42	94,42	8.590.319,956	94,44	8.604.061.000	94,46	5.844.680,000	94,48	5.872.680,000	94,50	5.893.680,000	94,52	5.906.680,000	94,52	40.712.100,956	
	8.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap belanja operasional APBD Kota Batam	%	11%	10%	310.000.000	9%	294.600.000	10%	-	10%	-	11%	-	11%	-	1150%	604.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan	%	100%	100%	510.538.000	100%	510.538.000	100%	195.000.000	100%	197.000.000	100%	199.000.000	100%	199.000.000	100%	1.811.076.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	%	55%	55	1.550.000.000	60%	1.750.000.000	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	80%	3.300.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	%	60%	60%	170.858.956	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%	170.858.956	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	700 Skor	750	620.000.000	770	620.000.000	780	625.000.000	800	625.000.000	820	625.000.000	830	625.000.000	83000%	3.740.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Perlindungan	%	100%	100%	367.381.000	100%	367.381.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	943.482.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	%	0%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	%	84.03/10.13	79.0 / 10.5	4.220.247.000	79.5 / 10.0	4.220.247.000	80 / 9.50	4.272.500.000	80.5 / 9.0	4.295.500.000	81.5 / 8.50	4.310.500.000	81.5 / 8.0	4.320.500.000	81.5 / 8.0	25.639.494.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40%	40%	691.295.000	45%	691.295.000	50%	700.000.000	55%	703.000.000	60%	707.000.000	65%	710.000.000	65%	4.202.590.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	%	6,64%	6,64%	10.224.818.271	7,64%	7.450.000.000	8,64%	11.075.000.000	9,64%	11.250.000.000	10,64%	11.450.000.000	11,64%	11.350.000.000	11,64%	62.799.818.271	
	2.19. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata																		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda aktif dalam organisasi	orang	0,0564	0,0664	1.299.999.771	0,0764	2.000.000.000	0,0864	2.500.000.000	0,0964	2.500.000.000	0,1064	2.500.000.000	0,1164	2.250.000.000	0,1164	13.049.999.771	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda aktif berwirausaha	orang	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	% atlet berprestasi (jumlah atlet berprestasi / total atlet (100%) Kota Batam; Jumlah perolehan medali	%	0	0	8.924.818.500	2,118535032	5.450.000.000	1,872857143	8.575.000.000	2,118535032	8.750.000.000	1,872857143	8.950.000.000	2,118535032	9.100.000.000	10,10131938	49.749.818.500	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Jumlah perolehan medali	medali	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Sasaran 3.1.5: Meningkatkan kerukunan dan ketentraman	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	%	0,25	20%	4.023.095.044	17%	10.237.889.544	14%	28.605.184.500	13%	38.532.368.430	11%	15.558.764.425	10%	17.904.860.030	10%	114.862.161.973	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	hidup masyarakat																		
	8.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan	%	0%	100%	376.136.500	100%	759.271.500	100%	1.270.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.900.000.000	100%	7.175.408.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	%	0%	100%	1.906.846.544	100%	2.224.870.044	100%	17.998.364.200	100%	26.342.351.400	100%	2.143.132.052	100%	2.143.132.052	100%	52.758.696.292	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% rumusan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan	%	0%	100%	391.768.000	100%	2.611.622.500	100%	3.133.947.000	100%	3.760.736.400	100%	4.512.883.680	100%	5.415.460.416	100%	19.826.417.996	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	% rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	%	0%	100%	218.323.000	100%	602.493.000	100%	662.742.300	100%	729.016.530	100%	801.918.183	100%	882.110.001	100%	3.896.603.014	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik yang tertangani	kasus	0	45	200.495.000	50	923.143.500	45	2.178.772.200	60	2.503.749.420	22	2.882.644.362	32	3.325.132.798	254	12.013.937.280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	5.01. Satuan Polisi Pamong Praja																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	95,15%	100,00%	929.526.000	100,00%	3.116.489.000	100%	3.361.358.800	100%	3.626.514.680	100%	3.918.186.148	100%	4.239.024.763	100%	19.191.099.391	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penduduk miskin	%	4,75%	4,79%	110.657.022.960	4,74%	42.731.898.908	4,69%	46.142.584.344	4,68%	50.203.290.508	4,66%	24.648.532.508	4,65%	27.063.385.758	4,65%	301.446.715.006	
	Sasaran 3.1.6: Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11,79%	10,50%	14.263.397.780	10,00%	18.790.557.858	9,75%	20.399.613.644	9,65%	22.389.575.008	9,60%	24.648.532.508	9,55%	27.063.385.758	9,55%	127.555.062.556	
	7.01. Dinas Tenaga Kerja																		
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	0,1422	14.263.397.780	0,1478	15.639.737.558	0,16	17.153.711.314	0,17	18.819.082.445	0,18	20.720.990.689	0,2	22.743.089.758	0,2	109.340.009.544	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	%		0	-	1	2.050.000.000	1	2.035.000.000	1	2.238.500.000	1	2.462.350.000	1	2.708.585.000	1	11.494.435.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	%	0	0	-	1	1.100.820.300	1	1.210.902.330	1	1.331.992.563	1	1.465.191.819	1	1.611.711.000	1	6.720.618.012	Dinas Tenaga Kerja
	Sasaran 3.1.7: Meningkatkan pelayanan sosial masyarakat	Persentase Penurunan PMKS	%	1,65%	1,60%	96.393.625.200	1,55%	23.941.341.050	1,50%	25.742.970.700	1,45%	27.813.715.500	1,40%	-	1,35%	-	1,35%	173.891.652.450	
	6.01. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	%PSKS yang mampu memberdayakan sasaran program	%	0	1	1.530.269.000	1	1.530.269.000	1	1.637.970.700	1	1.737.715.500	0	-	0	-	0	6.436.224.200	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani	%	0	1	1.883.321.200	1	2.221.303.700	1	2.390.000.000	1	2.545.000.000	0	-	0	-	0	9.039.624.900	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% Fakir miskin yang masuk DTKS	%	0	1	2.774.645.000	1	1.098.631.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	0	-	0	-	0	6.373.276.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.06	Program Penanganan Bencana	% kejadian bencana yang terselesaikan kebutuhannya dasarnya	%	0	1	74.507.785.000	1	388.080.000	1	400.000.000	1	488.000.000	0	-	0	-	0	75.783.865.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% kebutuhan pengelolaan TMP yang dipenuhi	%	0	1	-	1	300.000.000	1	410.000.000	1	465.000.000	0	-	0	-	0	1.175.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% kelurahan yang memiliki dokumen administrasi pemerintahan kelurahan yang lengkap	%	0	1	207.877.000	1	228.664.700	1	273.000.000	1	288.000.000	0	-	0	-	0	997.541.700	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%	0	1	15.489.728.000	1	18.174.392.650	1	19.432.000.000	1	20.990.000.000	0	-	0	-	0	74.086.120.650	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Misi 4: Melanjutkan percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam					265.622.043.190		311.655.010.933		334.022.915.791		359.109.353.154		388.308.285.882		419.649.125.791		2.078.366.734.740	
	Tujuan 4.1 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses Hinterland	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	56,25	56,658	265.622.043.190	59,5635	311.655.010.933	61,014	334.022.915.791	62,2095	359.109.353.154	63,753	388.308.285.882	65,34	419.649.125.791	65,34	2.078.366.734.740	
	Sasaran 4.1.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah hinterland	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah hinterland	%	0,6	0,6	202.194.569.206	0,6	205.885.070.959	0,6	228.001.951.467	0,6	249.807.146.613	0,6	275.262.861.275	0,6	302.739.147.402	0,6	1.463.890.746.921	
	4.01. Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan																		
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	%	143,60%	167,35%	11.065.207.500	193,47%	5.837.842.353	219,60%	7.950.000.000	248,10%	7.750.000.000	276,60%	9.000.000.000	305,10%	9.850.000.000	305,10%	51.453.049.853	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	0,00%	0,00%	191.129.361.706	0,00%	200.047.228.606	0,00%	220.051.951.467	0,00%	242.057.146.613	0,00%	266.262.861.275	0,00%	292.889.147.402	0,00%	1.412.437.697.068	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
	Sasaran 4.1.2. Meningkatkan konektivitas antar pulau di wilayah hinterland	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	%	80,00%	81,00%	5.467.185.013	89,00%	9.335.890.318	92,00%	6.939.180.990	94,00%	7.375.660.589	97,00%	8.058.061.648	100,00%	8.624.822.813	100,00%	45.800.801.371	
	15.01. Dinas Perhubungan																		
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49%	49%	5.467.185.013	49%	9.335.890.318	49%	6.939.180.990	49%	7.375.660.589	49%	8.058.061.648	49%	8.624.822.813	49%	45.800.801.371	Dinas Perhubungan
	4.1.3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	%	0,275	27,86%	57.960.288.971	29,55%	96.434.049.656	31,38%	99.081.783.334	33,37%	101.926.545.952	35,51%	104.987.362.959	37,80%	108.285.155.576	37,80%	568.675.186.448	
	3.02. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang																		
1:03:03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	Jiwa	24.504 jiwa	1.100 jiwa	54.708.665.371	1.100 jiwa	91.416.043.056	1.200 jiwa	93.618.204.554	1.300 jiwa	95.972.837.774	1.400 jiwa	98.494.512.443	1.500 jiwa	101.199.248.489	6.500 jiwa	535.409.511.687	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1:03:05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	Jiwa	7.900 jiwa	1.095 jiwa	3.251.623.600	1.100 jiwa	5.018.006.600	1.200 jiwa	5.463.578.780	1.300 jiwa	5.953.708.178	1.400 jiwa	6.492.850.516	1.500 jiwa	7.085.907.087	6.500 jiwa	33.265.674.761	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien					277.331.042.677		352.179.456.519		401.662.175.059		439.776.720.478		482.771.085.923		530.983.393.291		2.484.703.873.948	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat																		
	Tujuan 5.1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52 (CC)	57 (CC)	277.331.042.677	62 (B)	352.179.456.519	68 (B)	401.662.175.059	72 (BB)	439.776.720.478	77 (BB)	482.771.085.923	80 (A)	530.983.393.291	80 (A)	2.484.703.873.948	
	Sasaran 5.1.1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	27.118.805.415	WTP	27.191.404.675	WTP	27.735.232.769	WTP	28.289.937.424	WTP	28.855.736.172	WTP	29.464.588.835	WTP	168.655.705.290	
	5.02. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat/Tidak Tepat	0	Tepat Waktu	26.141.440.415	Tepat Waktu	26.194.492.375	Tepat Waktu	26.718.382.223	Tepat Waktu	27.252.749.867	Tepat Waktu	27.797.804.864	Tepat Waktu	28.353.760.962	Tepat Waktu	162.458.630.705	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	%	0	97%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	%	0	0	977.365.000	0	996.912.300	0	1.016.850.546	0	1.037.187.557	0	1.057.931.308	0	1.110.827.873	0	6.197.074.584	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	8.033.790.000	Sangat Tinggi	7.655.484.000	Sangat Tinggi	8.421.032.400	Sangat Tinggi	9.263.135.640	Sangat Tinggi	10.189.449.204	Sangat Tinggi	11.208.394.124	Sangat Tinggi	54.771.285.368	
	4.01. Sekretariat Daerah																		
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu;	%	100%	100%	8.033.790.000	100%	7.655.484.000	100%	8.421.032.400	100%	9.263.135.640	100%	10.189.449.204	100%	11.208.394.124	100%	54.771.285.368	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	0	90%	800.869.000	91%	880.955.900	92%	969.051.490	93%	1.065.956.639	94%	1.172.552.303	95%	1.289.807.533	95%	6.179.192.865	Bappelitbangda
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	%	0	0%	-	60%	1.305.000.000	65%	1.435.500.000	70%	1.579.050.000	75%	1.736.955.000	80%	1.910.650.500	80%	7.967.155.500	Bappelitbangda
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rencana kelibangan yang diimplementasikan	%	0	100%	208.225.000	100%	458.095.000	100%	503.904.500	100%	554.294.950	100%	609.724.445	100%	670.696.890	100%	3.004.940.785	Bappelitbangda
		Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	53 (Cukup)	55 (Cukup)	-	58 (Cukup)	1.575.000.000	60 (Cukup)	1.925.000.000	62 (Cukup)	1.925.000.000	64 (Cukup)	1.925.000.000	65 (Baik)	1.925.000.000	65 (Baik)	9.275.000.000	
	23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang memiliki nilai pengawasan kearsipan berkategori baik	OPD	0	0	-	0	1.125.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	6.625.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	0	0	-	0	450.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	2.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	727.874.000	Level 3	912.298.920	Level 3	1.026.741.281	Level 3	1.076.590.587	Level 3	1.127.384.370	Level 3	1.183.853.969	Level 3	6.054.743.126	
6.01.01	Inspektorat																		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	0	1	300.907.000	1	317.712.420	1	333.371.321	1	351.485.828	1	372.555.421	1	397.271.862	1	2.073.303.852	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Pasilitasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti		0	1	426.967.000	1	594.586.500	1	693.369.960	1	725.104.758	1	754.828.949	1	786.582.107	1	3.981.439.274	Inspektorat
	Sasaran 5.1.2. Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	%																
	5.02.02. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rp	755.878.193.410	808.820.000.000	9.717.449.560	866.100.569.850	6.945.807.950	926.807.946.343	7.640.388.745	991.638.236.020	8.404.427.620	#####	9.244.870.381	#####	10.169.357.420	#####	52.122.301.676	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Realisasi Retribusi Daerah	Rp	92.616.063.190	107.890.236.500	-	111.531.061.230	-	115.842.667.655	-	124.047.682.588	-	128.478.663.956	-	135.741.088.075	-	723.531.400.003	-	0
	Sasaran 5.1.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks SPBE	Indeks	1,6	1,69	4.612.593.001	2,45	7.081.229.001	3,01	7.656.004.001	3,23	8.144.311.000	3,83	7.747.070.004	4,79	8.547.070.000	4,79	43.788.277.007	
	16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika																		
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal SPBE;		1,1	1,1	4.599.563.000	2	6.791.829.000	3	7.356.004.000	3	7.844.311.000	4	7.447.070.000	5	8.247.070.000	5	42.285.847.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah		1	1	13.030.001	1	289.400.001	1	300.000.001	1	300.000.000	1	300.000.004	1	300.000.000	1	1.502.430.007	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	Indeks	81,61	82	236.837.980.261	88,31	307.764.039.923	89	354.898.164.609	90	391.077.745.828	91	432.926.446.173	92	478.654.486.363	92	2.202.158.863.157	
	4.01. Sekretariat Daerah																		
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Layanan Bagian Protokoler dan Organisasi	Indeks	1	1	4.914.679.000	1	5.812.388.000	1	6.393.626.800	1	7.032.989.480	1	7.736.288.428	1	8.509.917.271	1	40.399.888.979	Bagian Umum dan Organisasi Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan; 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat; 3. Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan; 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti.			1) 100% 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	66.391.327.500	1) 100% 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	82.359.666.500	1) 100% 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	90.595.633.150	1) 100% 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	99.655.196.465	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	109.620.716.112	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	120.582.787.723	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	569.205.327.449	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1. Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian; 2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan; 3. Indeks Kepuasan Layanan PSJ; 4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan			1) 60-70 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	1.510.634.000	1) 60-70 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	3.559.171.000	1) 70-80 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	3.915.088.100	1) 70-80 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	4.306.596.910	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	4.737.256.601	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	5.210.982.261	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	23.239.728.872	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	4.02. Sekretariat DPRD																		
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD dalam Rangka	%	0,8	0,8	59.294.528.620	0,81	77.900.360.639	0,82	101.253.251.710	0,82	116.593.408.776	0,83	134.480.927.533	0,83	155.361.511.108	0,83	644.883.988.385	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja
		Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																		
	7.01. Seluruh Kecamatan																			
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% RT/RW/LPM aktif; % usulan yang terealisasi	%	0	0	18.866.732.400	0	21.562.437.640	0	23.549.796.404	0	25.550.117.544	0	27.750.470.799	0	30.170.859.379	0	147.450.414.166	Seluruh Kecamatan	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; %sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; % warga "berdaya"	%	0	0	59.974.027.821	0	73.216.658.613	0	79.575.744.474	0	86.001.074.922	0	93.044.479.714	0	100.766.543.350	0	492.578.528.895	Seluruh Kecamatan	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%	0	0	6.890.968.000	0	8.018.209.567	0	8.657.956.985	0	9.302.508.719	0	10.005.560.102	0	10.772.663.324	0	53.647.866.697	Seluruh Kecamatan	
	18.01. Dinas Penanaman Modal dan PTSP																			
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	71,10%	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	95,00%	550.100.000	95,00%	550.100.000	95,00%	3.300.600.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																			
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	97%	97,50%	3.122.935.000	98%	3.435.228.500	99%	3.978.751.350	99%	4.376.626.485	99,5%	4.812.289.134	100%	5.284.518.047	100%	25.010.348.515	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	16.01. Dinas Komunikasi																			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
	dan Informatika																			
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik			0,7459	0,7459	6.553.911.440	0,7459	9.525.567.736	0,7459	10.354.174.175	0,7459	11.263.954.820	0,7459	12.262.942.774	0,7459	12.489.921.325	0,7459	62.450.472.269	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	10.01. Dinas Pertanahan																			
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas		Jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil	62,09%	815.849.840	72,39%	897.434.824	79,26%	987.178.306	86,13%	1.085.896.137	92,99%	1.194.485.751	100,00%	1.313.934.326	100,00%	6.294.779.184	Dinas Pertanahan	
	5.02. Dinas Pemadam Kebakaran																			
1:05:04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan Pelayanan Pemadaman Kebakaran	unit	0	10 Hydrant (Unit)	1.961.513.640	0,925	6.976.476.504	0,93	8.924.124.154	0,935	9.816.536.570	0,935	10.798.190.227	0,935	11.878.009.250	0,935	50.354.850.345	Dinas Pemadam Kebakaran	
	5.03.01. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia																			
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	%	97,84%	97,90%	1.819.093.000	98,00%	3.952.420.400	98,30%	5.914.819.000	98,60%	5.544.819.000	98,80%	5.934.819.000	99,00%	5.764.819.000	99,00%	28.930.789.400	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	%	30,01%	30,06%	-	30,11%	-	30,16%	-	30,21%	-	30,26%	-	30,31%	-	30,31%	-	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi	%	21,98%	23,93%	-	25,38%	-	26,83%	-	28,28%	-	29,73%	-	31,18%	-	31,18%	-	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya	%	0,00%	40,23%	4.171.680.000	42,23%	9.997.920.000	44,23%	10.247.920.000	45,23%	9.997.920.000	46,23%	9.997.920.000	46,23%	9.997.920.000	46,23%	54.411.280.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
					1.661.432.660,237		#####	#####	2.141.633.239,860		2.306.084.391,249		2.377.716.454,885		2.621.962.628,443		13.022.045.446,543		

BAB VII
KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan penyajian program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan **Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah** yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka *review* terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kota Batam selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III, tidak lagi mengacu pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan perubahan aturan perundang-undangan dalam penganggaran dan tata cara nomenklatur program-kegiatan-sub kegiatan, maka kapasitas riil seharusnya diperoleh dari proyeksi total penerimaan daerah. Untuk itu, perlu adanya perubahan format penyajian tabel kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2021 -2026

Uraian	Proyeksi					
	APBD 2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.923.352.117.239,00	1.700.545.709.902,82	1.896.237.959.938,37	2.119.946.260.434,12	2.361.231.954.785,81	2.629.414.097.640,44
TOTAL PENERIMAAN DAERAH	2.968.574.058.069,00	2.749.033.704.705,12	2.948.002.214.304,85	3.154.601.336.909,47	3.374.156.146.548,01	3.615.082.186.770,40
BELANJA DAERAH	2.626.801.812.240,38	2.635.783.402.889,12	2.644.795.893.273,94	2.653.839.390.211,66	2.662.914.000.890,04	2.672.019.832.869,06
Belanja Operasi	2.171.301.897.615,98	2.178.645.129.696,39	2.186.013.329.536,52	2.193.406.582.475,38	2.200.824.974.145,16	2.208.268.590.472,23
Belanja Pegawai	1.045.221.940.830,00	1.048.487.994.802,30	1.051.764.254.366,49	1.055.050.751.412,44	1.058.347.517.929,70	1.061.654.586.007,76
Belanja Barang dan Jasa	912.947.232.212,27	916.252.724.372,57	919.570.184.670,83	922.899.656.439,87	926.241.183.169,42	929.594.808.506,67
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	203.003.625.198,84	203.738.636.892,76	204.476.309.830,74	205.216.653.648,28	205.959.678.015,81	206.705.392.638,73
Belanja Bantuan Sosial	10.129.099.374,87	10.165.773.628,75	10.202.580.668,47	10.239.520.974,79	10.276.595.030,24	10.313.803.319,07
Belanja Modal	452.499.914.624,40	454.138.273.192,73	455.782.563.737,42	457.432.807.736,29	459.089.026.744,89	460.751.242.396,83
Belanja Tanah	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	74.922.635.604,04	75.193.906.687,28	75.466.159.957,00	75.739.398.969,41	76.013.627.293,55	76.288.848.511,41
Belanja Gedung dan Bangunan	92.232.315.671,41	92.566.259.612,11	92.901.412.657,83	93.237.779.186,35	93.575.363.591,31	93.914.170.282,25
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.566.957.946,25	269.539.353.658,38	270.515.270.106,75	271.494.720.038,83	272.477.716.248,23	273.464.271.574,91

Uraian	Proyeksi					
	APBD 2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Aset Tetap Lainnya	16.778.005.402,70	16.838.753.234,96	16.899.721.015,84	16.960.909.541,70	17.022.319.611,79	17.083.952.028,26
Belanja Aset Lainnya	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan; maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih untuk periode 2021-2024.

Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Batam juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 di atas dengan juga memanfaatkan peluang pembiayaan pembangunan alternatif (Non APBD). Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7. 2 Indikator Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Batam Tahun 2021-2026

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pungamu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	URUSAN WAJIB																		Dinas Pendidikan
	TERKAIT PELAYANAN DASAR																		Dinas Pendidikan
1	Pendidikan																		Dinas Pendidikan
1.1	Dinas Pendidikan																		Dinas Pendidikan
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah			100%	355.936.957,661	100%	597.020.000,000	100%	600.730.000,000	100%	605.830.000,000	100%	610.930.000,000	100%	616.030.000,000	100%	3.386.476.957,661	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUDAPK SD / Paket AAPK SMP / Paket B		90.50104.53106.04	91.00104.25105.80	368.074.698,449	91.50104.00104.95	436.534.498,478	92.00103.75103.10	442.607.726,958	92.50102.50102.48	447.379.726,958	93.00101.00101.02	451.065.726,958	93.50100100	457.517.726,958	93.50100100	2.603.180.104,759	Dinas Pendidikan
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Kurikulum mata pelajaran muatan lokal	%		100%	-	100%	1.200.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PERSENTASE PENDIDIK BERSERTIFIKASI	%		100%	-	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
1.01.05	Program Pengendalian Pertizan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki izin penyelenggaraan	%		100%	-	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan																		
2.1	Dinas Kesehatan																		

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah yang tersedia	%	75%	75%	78.033.500.00	75%	79.148.000.00	80%	81.698.000.00	80%	87.350.000.00	85%	90.950.000.00	90%	93.400.000.00	90%	510.579.500.00	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	%	75%	75%	25.000.000.00	75%	35.500.000.00	80%	50.000.000.00	80%	50.000.000.00	85%	70.000.000.00	90%	90.000.000.00	90%	320.500.000.00	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan	%	75%	75%	250.000.000	75%	300.000.000	80%	400.000.000	80%	600.000.000	85%	800.000.000	90%	1.000.000.000	90%	3.350.000.000	Dinas Kesehatan
2.2	Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah yang tersedia	%	75%	75%	78.033.500.00	75%	79.148.000.00	80%	81.698.000.00	80%	87.350.000.00	85%	90.950.000.00	90%	93.400.000.00	90%	510.579.500.00	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.	%	75%	75%	25.000.000.00	75%	35.500.000.00	80%	50.000.000.00	80%	50.000.000.00	85%	70.000.000.00	90%	90.000.000.00	90%	320.500.000.00	Rumah Sakit Umum Daerah
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas Sumber daya manusia kesehatan	%	75%	75%	250.000.000	75%	300.000.000	80%	400.000.000	80%	600.000.000	85%	800.000.000	90%	1.000.000.000	90%	3.350.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
																			Rumah Sakit Umum Daerah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3.1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air																		Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	100%	100%	42.680.803.515	100%	46.742.939.833	100%	51.466.743.882	100%	56.618.878.839	100%	62.100.355.319	100%	67.398.458.878	100%	327.008.180.266	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Drainase yang dinormalisasikan	m	78200	78200	10.991.734.180	78100	10.733.820.889	78100	11.679.325.420	78100	12.712.986.527	78100	13.843.300.173	78100	15.079.595.932	468.700	75.040.763.121	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
		Jumlah peralatan yang dioperasikan	unit	34	34		35		36		37		38		40		40		
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara	m	61.200	61.200	23.457.053.483	61.550	35.400.000.000	61.750	41.250.000.000	62.450	43.350.000.000	62.650	45.450.000.000	63.350	77.250.000.000	372.950	266.157.053.483	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, dan dipelihara di Kota Batam	km	44,72	44,72	142.432.998.556	39	83.956.984.804	39	88.425.952.563	39	93.150.480.561	39	98.146.557.997	39	103.431.294.645	240	609.544.269.126	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Tertaksananya sarana dan prasarana penguji	%	100%	100%	587.108.560	100%	335.000.000	100%	769.750.000	100%	348.837.500	100%	356.279.375	100%	364.093.344	100%	2.761.068.779	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
3.2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang																		
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	100%	100%	21.118.158.969	100%	25.475.345.946	100%	22.383.663.460	100%	22.995.686.591	100%	23.622.222.162	100%	24.263.775.346	100%	139.858.852.474	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	Jiwa	24.504 jiwa	1.100 jiwa	54.708.665,371	1.100 jiwa	91.416.043,056	1.200 jiwa	93.618.204,554	1.300 jiwa	95.972.837,774	1.400 jiwa	98.494.512,443	1.500 jiwa	101.199.248,489	6.500 jiwa	535.409.511,687	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	Jiwa	7.900 jiwa	1.095 jiwa	3.251.623,600	1.100 jiwa	5.018.006,600	1.200 jiwa	5.463.578,780	1.300 jiwa	5.953.708,178	1.400 jiwa	6.492.850,516	1.500 jiwa	7.085.907,087	6.500 jiwa	33.265.674,761	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi/dilakukan pengawasan & penataan	Unit	2.577 bangunan	450 bangunan	70.982.294,233	450 bangunan	264.398.865,357	450 bangunan	199.293.582,656	450 bangunan	283.900.764,859	450 bangunan	189.992.867,621	450 bangunan	199.492.511,002	2.700 jiwa	1.208.060.885,728	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Orang	955 orang	225 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	438.902.000	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	555.948.500	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	719.149.695	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	950.026.861	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	1.280.658,424	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	1.758.930,999	200 orang/1 Aplikasi/100 dokumen	5.703.616,479	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen tata ruang Kota Batam	Dokumen	951 dokumen	83 dokumen	5.114.095,000	109 dokumen	32.015.392,500	103 dokumen	6.558.796,750	130 dokumen	34.444.615,925	129 dokumen	7.621.535,268	154 dokumen	35.614.325,269	154 dokumen	121.368.760,712	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
4.1	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan																		Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang urusan Perangkat daerah	%		100%	13.682.925,333	100%	15.663.025,796	100%	17.243.825,376	100%	18.968.207,913	100%	20.865.028,704	100%	22.951.531,575	100%	109.374.544,697	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Relokasi Korban Bencana yang Diangani	%	0	100%	11.872.788,275	100%	26.372.788,275	100%	13.872.788,275	100%	14.872.788,275	100%	15.872.788,275	100%	16.872.788,275	100%	99.736.729,650	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
		Persentase Rumah Susun Layak Huni	%	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh Perkotaan	%	5,02%	6,04%	11.065.207.500	7,06%	5.837.842.353	8,25%	7.950.000.000	9,44%	7.750.000.000	10,79%	9.000.000.000	12,32%	9.850.000.000	12,32%	51.453.049.853	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
		Persentase Penurunan Kawasan Kumuh di Wilayah Hinterland	%	143,60%	167,35%		193,47%		219,60%		248,10%		276,60%		305,10%		305,10%		
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Perkotaan	%	89,08%	94,17%	191.129.361.706	95,60%	200.047.228.606	97,02%	220.051.951.467	98,01%	242.057.146.613	99,01%	266.262.861.275	100,00%	292.889.147.402	100,00%	1.412.437.697.068	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
		Persentase Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman di Wilayah Hinterland	%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
																		-	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
5	Ketertarikan, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		Satuan Polisi Pamong Praja
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja																		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100%	100%	51.113.839.841	100%	57.570.870.593	100%	63.327.957.652	100%	69.660.753.418	100%	76.626.828.759	100%	84.289.511.635	100%	402.589.761.898	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	95,15%	100%	929.526.000	100%	3.116.489.000	100%	3.361.358.800	100%	3.626.514.680	100%	3.918.186.148	100%	4.239.024.763	100%	19.191.099.391	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Persentase Penegakan Perda	%	72,22%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5.2	Dinas Pemadam Kebakaran																		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	0	1 Tahun	8.588.260.377	100%	11.060.000.000	100%	12.166.000.000	100%	13.382.600.000	100%	14.720.860.000	100%	16.192.946.000	100%	76.110.666.377	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan Pelayanan Pemadaman Kebakaran	%	0	10 Hydrant (Unit)	1.961.513.640	93%	6.976.476.504	93%	8.924.124.154	94%	9.816.536.570	94%	10.798.190.227	94%	11.878.009.250	94%	50.354.850.345	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Sosial																		
6.1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	%		100%	10.577.691.194	100%	14.147.119.986	100%	12.997.635.594	100%	13.197.635.594	-	0%	-			50.920.082.368	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	%PSKS yang mampu memberdayakan sasaran program	%		100%	1.530.269.000	100%	1.530.269.000	100%	1.637.970.700	100%	1.737.715.500	-	0	-			6.436.224.200	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani	%		100%	1.883.321.200	100%	2.221.303.700	100%	2.390.000.000	100%	2.545.000.000	0	0	-	0		9.039.624.900	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	% Fakir miskin yang masuk DTKS	%		100%	2.774.645.000	100%	1.098.631.000	100%	1.200.000.000	100%	1.300.000.000	0	0	-	0		6.373.276.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.06	Program Penanganan Bencana	%kejadian bencana yang terselesaikan kebutuhannya dasarnya	%		100%	74.507.785.000	100%	388.080.000	100%	400.000.000	100%	488.000.000	0	0	-	0		75.783.865.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% kebutuhan pengelolaan TMP yang dipenuhi	%		100%	-	100%	300.000.000	100%	410.000.000	100%	465.000.000	0	0	-	0		1.175.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	URUSAN WAJIB																		
	TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																		

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
7	Tenaga Kerja																		
7.1	Dinas Tenaga Kerja																		
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	%	0	100%	11.334.055.931	100%	13.011.253.634	100%	16.243.892.300	100%	21.750.667.103	100%	31.624.081.406	100%	50.574.551.838	100%	144.538.502.212	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	14,22%	14.263.397.780	14,78%	15.639.737.558	16,00%	17.153.711.314	17,00%	18.819.082.445	18,00%	20.720.990.689	20,00%	22.743.089.758	20,00%	109.340.009.544	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	%	Jumlah TK yang terserap/ Jumlah TK yang terdaftar x 100%	0%	0	100%	2.050.000.000	100%	2.035.000.000	100%	2.238.500.000	100%	2.462.350.000	100%	2.708.585.000	100%	11.494.435.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	%	0	0%	-	100%	1.100.820.300	100%	1.210.902.330	100%	1.331.992.563	100%	1.465.191.819	100%	1.611.711.000	100%	6.720.618.012	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan		100%	100%	11.762.250.996	100%	11.958.039.596	100%	7.960.000.000	100%	8.015.000.000	100%	8.068.000.000	100%	8.120.000.000	100%	55.883.290.592	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG terhadap belanja operasional APBD Kota Batam	%	11%	10%	310.000.000	9%	294.600.000	10%	-	10%	-	11%	-	11%	-	11,50	604.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan Perlindungan	%	100%	100%	510.538.000	100%	510.538.000	100%	195.000.000	100%	197.000.000	100%	199.000.000	100%	199.000.000	100%	1.811.076.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kapasitas SDM perempuan di Kota Batam	%	55%	55	1.550.000.000	60%	1.750.000.000	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	80%	3.300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	%	60%	60%	170.858.956	65%	-	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%	170.858.956	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Skor Capaian Indikator Kota Layak Anak	Skor	700 Skor	750	620.000.000	770	620.000.000	780	625.000.000	800	625.000.000	820	625.000.000	830	625.000.000	830	3.740.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Perlindungan	%	100%	100%	367.381.000	100%	367.381.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	52.180.000	100%	943.482.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan																		
9.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%		100%	10.770.315,837	100%	12.010.440,420	100%	13.211.484,462	100%	14.532.632,908	100%	15.985.896,199	100%	17.584.485,819	100%	84.095.255,645	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi (kkal per kapita per hari)	kkal per kapita per hari	2604	2605	691.341.000	2606	1.070.000,000	2607	1.145.000,000	2608	1.250.000,000	2609	1.307.000,000	2610	1.365.000,000	2610	6.828.341.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah aman pangan (jumlah kelurahan aman pangan/jumlah kelurahan x 100%)	%	NA	belum ada	301.177.000	54,69%	507.000.000	59,38%	560.000.000	62,50%	612.500.000	65,63%	665.000.000	70,31%	717.500.000	70,31%	3.363.177.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman yang dikonsumsi (PSAT)	%	100	85	-	86	200.000.000	87	240.000.000	88	280.000.000	89	340.000.000	90	360.000.000	90	1.420.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pertanahan																		
10.1	Dinas Pertanahan																		Dinas Pertanahan
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																		Dinas Pertanahan
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas	%	Jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil	62,09%	815.849.840	72,39%	897.434.824	79,26%	987.178.306	86,13%	1.085.896.137	92,99%	1.194.485.751	100,00%	1.313.934.326	100,00%	6.294.779.184	Dinas Pertanahan
		Persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	%	-	16,67%		33,33%		50,00%		66,67%		83,33%		100,00%		100,00%		Dinas Pertanahan

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase penataan lahan kampung tua	%	Jumlah kampung tua di Kota Batam yang sudah dilakukan penataan (penyelesaian legalitas) adalah 7 kampung dari target 37 kampung tua	45,95%		54,05%		67,57%		81,08%		91,89%		100,00%		100,00%		Dinas Pertanahan
11	Lingkungan Hidup																		
11.1	Dinas Lingkungan Hidup																		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	%	100%	100%	17.253.870.508	100%	19.814.291.309	100%	20.408.720.048	100%	21.020.981.650	100%	21.651.611.099	100%	22.301.159.432	100%	122.450.634.046	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan	%	100%	100%	651.862.000	100%	1.450.000.000	100%	1.100.000.000	100%	700.000.000	100%	360.500.000	100%	371.315.000	100%	4.633.677.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	%	100%	100%	1.484.118.625	100%	3.750.000.000	100%	3.725.000.000	100%	2.664.750.000	100%	2.870.587.500	100%	3.093.976.875	100%	17.588.433.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pertizinan yang dibina dan diawasi	%	20%	20%	160.466.000	40%	1.100.000.000	50%	1.116.500.000	60%	1.133.495.000	70%	1.150.999.850	80%	1.169.029.846	80%	5.830.490.696	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0%	0%	-	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	2.750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.0 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	100%	100%	135.759.000	100%	150.000.000	100%	154.500.000	100%	159.135.000	100%	163.909.050	100%	168.826.322	100%	932.129.372	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa	%	0%	0%	-	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	2.100.000.000	90%	10.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	%	10%	10%	71.470.676.550	15%	102.400.000.000	18%	104.648.000.000	22%	107.787.440.000	26%	111.021.063.200	30%	115.151.695.096	30%	612.478.874.846	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Rumah Tangga yang pengangkutan sampahnya tuntas	%		80%	2.980.777.905	82%	3.278.855.696	87%	3.606.741.265	90%	3.967.415.392	0%	4.364.156.931	95%	4.800.572.624		22.998.519.812	Kecamatan Batu Aji
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Rumah Tangga yang pengangkutan sampahnya tuntas	%		0%	2.814.075.351	0%	3.095.482.886	0%	3.405.031.175	0%	3.745.534.292	92%	4.364.156.931	0%	4.532.096.494	0%	21.956.377.128	Kecamatan Sekupang
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Rumah Tangga yang pengangkutan sampahnya tuntas	%		80%	1.793.461.727	80%	2.654.734.814	80%	2.920.208.295	80%	3.212.229.125	80%	3.533.452.037	80%	3.886.797.241	80%	18.000.883.240	Kecamatan Nongsa
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% Rumah Tangga yang pengangkutan sampahnya tuntas	%		80%	2.779.566.200	80%	3.884.779.500	80%	4.079.018.475	80%	4.079.018.475	80%	4.079.018.475	80%	4.079.018.475	80%	22.980.419.600	Kecamatan Bengkong
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang terangkut	%		80%	1.311.872.205	80%	1.693.059.426	80%	1.862.365.368	80%	2.048.601.905	80%	2.253.462.095	80%	2.478.808.305	80%	11.648.169.304	Kecamatan Lubuk Baja
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	%		80%	1.401.895.920	80%	1.542.085.512	80%	1.696.294.063	80%	1.865.923.470	80%	2.052.515.816	80%	2.257.767.398	80%	10.816.482.179	Kecamatan Batu Ampar
4.1	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan																		
2.11.04	Program Pengelolaan Kenakeralagamaan Hayati (KEHATI)	Persentase Luas Jenis RTH Kota Dalam Kondisi Terpelihara	%	13,18%	13,18%	20.350.153.821	13,79%	36.225.413.404	14,64%	45.504.175.655	14,64%	51.425.777.631	14,64%	59.094.888.323	14,64%	66.647.911.902	14,64%	279.248.320.736	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
12.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%		100%	15.451.516.167	100%	22.041.278.790	100%	23.796.639.146	100%	25.770.426.802	100%	27.999.694.981	100%	30.528.575.937	100%	145.588.131.823	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	97%	98%	3.122.935.000	98%	3.435.228.500	99%	3.978.751.350	99%	4.376.626.485	100%	4.812.289.134	100%	5.284.518.047	100%	25.010.348.515	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	%	88%	90%	-	91%	-	93%	425.000.000	95%	485.000.000	97%	545.000.000	99%	605.000.000	99%	2.060.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses	%	0%	26%	-	26%	-	61%	291.175.000	74%	312.850.000	87%	372.385.000	100%	386.095.000	100%	1.362.505.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
6.1	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% kelurahan yang memiliki dokumen administrasi pemerintahan kelurahan yang lengkap	%		100%	207.877.000	100%	228.664.700	100%	273.000.000	100%	288.000.000	0	-	0	-	997.541.700	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	% lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	%		100%	15.489.728.000	100%	18.174.392.650	100%	19.432.000.000	100%	20.990.000.000	0	-	0	-	74.086.120.650	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
8.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	%	0	100%	150.000.000	100%	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	300.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14.03	Program Pemakaian Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)	%	84.03/10.13	79.0 / 10.5	4.220.247.000	79.5 / 10.0	4.220.247.000	80 / 9.50	4.272.500.000	80.5 / 9.0	4.295.500.000	81.5 / 8.50	4.310.500.000	81.5 / 8.0	4.320.500.000	81.5 / 8.0	25.639.494.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
																				dan Perlindungan Anak
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40%	40%	691.295.000	45%	691.295.000	50%	700.000.000	55%	703.000.000	60%	707.000.000	65%	710.000.000	65%	4.202.590.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
15	Perhubungan																			
15.1	Dinas Perhubungan																			Dinas Perhubungan
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	%	100%	100%	27.891.742.389	100%	30.901.512.624	100%	33.705.235.415	100%	38.902.087.420	100%	44.897.602.753	100%	50.918.891.594	100%	227.217.072.195	Dinas Perhubungan	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	%	5%	5%	22.451.903.970	24%	57.991.482.020	43%	144.810.746.572	62%	156.080.234.140	82%	137.524.739.225	100%	139.920.808.298	100%	658.779.914.216	Dinas Perhubungan	
		Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	%	45%	45%		48%		55%		57%		61%		67%		67%			
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut	%	49%	49,00%	5.467.185.013	49,00%	9.335.890.318	49,00%	6.939.180.990	49,00%	7.375.660.589	49,00%	8.058.061.648	49,00%	8.624.822.813	49,00%	45.800.801.371	Dinas Perhubungan	
3.1	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air																			Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah dan Panjang pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi PJU Kota Batam	Tiang dan m	15680 dan 13500	15680 dan 13500	26.062.585.640	16028 dan 13500	18.768.344.204	16178 dan 13500	20.301.328.624	16328 dan 13500	21.971.888.987	16478 dan 13500	23.792.996.761	16628 dan 13500	25.778.881.255	16628 dan 13500	136.676.025.471	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
16	Komunikasi dan Informatika																		
16.1	Dinas Komunikasi dan Informatika																		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.0 2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	74,59%	74,59%	6.553.911.440	74,59%	9.525.567.736	74,59%	10.354.174.175	74,59%	11.263.954.820	74,59%	12.262.942.774	74,59%	12.489.921.325	74,59%	62.450.472.269	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.0 3	Program Aplikasi Informatika	Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal SPBE;	Skor	1,10	1,10	4.599.563.000	2,00	6.791.829.000	3,00	7.356.004.000	3,00	7.844.311.000	4,00	7.447.070.000	5,00	8.247.070.000	5,00	42.285.847.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE;	Skor	1,25	1,25		2,25		3,00		3,00		4,00		5,00		5,00		
		Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Skor	1,75	1,75		2,00		2,25		3,00		4,00		5,00		5,00		
		Nilai Indeks Aspek Penyelenggara SPBE	Skor	2,00	2,00		3,00		3,00		4,00		4,00		5,00		5,00		
		Nilai Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor	1,90	2,10		2,90		3,70		3,90		4,00		5,00		5,00		
		Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	Skor	2,00	2,17		2,83		3,17		3,17		4,00		5,00		5,00		

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																			
17.1	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	%	0	0	10.064.517.156	0	11.053.215.972	0	12.711.198.368	0	14.617.878.123	0	16.810.559.841	0	19.332.143.818	0	84.589.513.278		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Peningkatan persentase koperasi aktif	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	0	0	151.199.500	0	166.319.450	0	191.267.368	0	219.957.473	0	252.951.094	0	290.893.758	0	1.272.588.641		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan jumlah Koperasi Terlatih	%	172 orang	172 orang	390.304.000	0	515.277.400	0	592.569.010	0	681.454.362	0	783.672.516	0	901.223.393	0	3.864.500.680		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang naik kinerjanya	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	60 umkm	60 umkm	851.247.000	0	1.417.691.300	0	1.630.344.995	0	1.874.896.744	0	2.156.131.256	0	2.479.550.944	0	10.409.862.239		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08	Program Pengembangan Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	Usaha	200 umkm	200 umkm	1.330.752.000	0	5.421.804.000	0	6.234.844.600	0	7.170.071.290	0	8.245.591.984	0	9.482.419.281	0	37.885.273.155		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
18	Penanaman Modal																			
18.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.18.01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan		IKM (Kategori Baik)	IKM (Kategori Baik)	16.696.578.094	IKM (Kategori Baik)	19.829.272.248	IKM (Kategori Baik)	18.801.303.248	IKM (Kategori Baik)	18.801.303.248	IKM (Kategori Baik)	18.801.303.248	IKM (Kategori Baik)	18.990.492.248	IKM (Kategori Baik)	111.920.252.334	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	Program Pengembangan Ikim Penanaman Modal	Persentase Izin Investasi yang ditindaklanjuti	%	8,14% (Tahun 2019 : 405 Proyek; Tahun 2020 :438 Proyek)	5%	184.833.840	5%	184.330.000	5%	200.000.000	5%	215.000.000	5%	230.000.000	5%	245.000.000	30%	1.259.163.840	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi investasi	%	NA	90%	225.295.760	90%	381.142.760	90%	400.000.000	95%	460.000.000	95%	460.000.000	95%	460.000.000	95%	2.386.438.520	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP	%	71,10%	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	90,00%	550.100.000	95,00%	550.100.000	95,00%	550.100.000	95,00%	3.300.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM	%	10% (500 Perusahaan)	10%	326.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	10%	320.122.000	70%	1.926.732.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data investasi secara realtime	%	NA	60%	88.412.880	70%	88.050.000	70%	90.000.000	80%	90.000.000	80%	90.000.000	90%	90.000.000	90%	536.462.880	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Keperguruan dan Olahraga																		
2.19	Dinas Keperguruan, Olah Raga dan Pariwisata																		Dinas Keperguruan , Olah Raga dan Pariwisata
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	%	100%	100%	11.942.409.843	100%	14.869.202.323	100%	15.348.162.439	100%	15.848.190.561	100%	16.370.282.489	100%	16.915.482.662	100%	91.293.730.317	Dinas Keperguruan , Olah Raga dan Pariwisata
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keperguruan	Jumlah pemuda aktif dalam organisasi	orang	5,64%	6,64%	1.299.999.771	7,64%	2.000.000.000	8,64%	2.500.000.000	9,64%	2.500.000.000	10,64%	2.500.000.000	11,64%	2.250.000.000	11,64%	13.049.999.771	Dinas Keperguruan , Olah Raga dan Pariwisata
		Jumlah pemuda aktif berwirausaha	orang																

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	% atlet berprestasi (jumlah atlet berprestasi / total atlet (100%) Kota Batam; Jumlah perolehan medali	%	0	0	8.924.818.500	2	5.450.000.000	2	8.575.000.000	2	8.750.000.000	2	8.950.000.000	2	9.100.000.000	10	49.749.818.500	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Jumlah perolehan medali	medali															-	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
20	Statistik																		Dinas Komunikasi dan Informatika
16.1	Dinas Komunikasi dan Informatika																		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	13.030.001	100%	289.400.001	100%	300.000.001	100%	300.000.000	100%	300.000.004	100%	300.000.000	100,00%	1.502.430.007	Dinas Komunikasi dan Informatika
																			Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian																		Dinas Komunikasi dan Informatika
16.1	Dinas Komunikasi dan Informatika																		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi		N/A	-			500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	0,00%	2.500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan																		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah			100%	11.305.443.956	100%	13.055.006.111	100%	13.055.006.111	100%	13.055.006.111	100%	13.055.006.111	100%	13.055.006.111	100%	76.580.474.511	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan Pekan (Event) Kebudayaan sesuai dengan standar Ditjen Kebudayaan	%	28	0	3.151.680.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	10.651.680.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%		0	179.536.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	1.679.536.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Pengunjung Museum	Pengunjung		5.000 Pengunjung	206.725.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	5.000 Pengunjung	700.000.000	30.000 Pengunjung	3.706.725.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Perpustakaan																		
23.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.23.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora			0	0	7.926.000.000	0	7.957.000.000	0	7.957.000.000	0	7.907.000.000	0	7.907.000.000	0	7.907.000.000	0	47.561.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum/taman bacaan	%	0	0	949.999.900	0	1.925.000.000	0	2.095.000.000	0	2.290.000.000	0	2.535.000.000	0	2.730.000.000	0	11.575.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan koleksi perpustakaan	%	0	0		0		0		0		0		0		0		
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	%	0	0	-	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	250.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan																		
23.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																		
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang memiliki nilai pengawasan kearsipan berkategori baik	OPD	0	0	-	0	1.125.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	1.375.000.000	0	6.625.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase tingkat ketersediaan arsip	%	0	0	-	0	450.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	0	2.650.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PILIHAN																		
25	Kelautan dan Perikanan																		Dinas Perikanan
25.1	Dinas Perikanan																		Dinas Perikanan
2.25.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			100%	10.843.279.795	100%	11.331.504.079	100%	11.895.500.000	100%	12.484.245.000	100%	13.108.014.000	100%	13.745.210.000	100%	73.407.752.874	Dinas Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	Ton	23.385,01	23.852,71	3.274.544.300	24.329,76	5.090.000.000	24.816,36	5.344.000.000	25.312,69	5.609.000.000	25.818,94	5.888.000.000	26.335,32	6.184.000.000	150.465,78	31.389.544.300	Dinas Perikanan
		Indeks Harga yang Diterima Nelayan (Rp)	Rp (Juta)	75.637.000,00	77.149.000,00		78.692.000,00		80.265.000,00		81.870.000,00		83.507.000,00		85.177.000,00		486.660.000,00		
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	Ton	7.234,87	7.379,57	258.781.250	7.527,16	1.566.296.000	7.677,70	2.245.110.800	7.831,26	2.410.375.000	7.987,88	2.545.600.000	8.147,64	2.663.780.000	46.551,20	11.889.943.050	Dinas Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	%	0,02	2,00%	-	2,00%	980.000.000	2,00%	1.026.500.000	2,00%	1.078.800.000	2,00%	1.134.500.000	2,00%	1.187.250.000	12,00%	5.407.050.000	Dinas Perikanan
26	Pariwisata																		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22.1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata																		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (non museum)	wisatawan		1jt	793.790.000	1,4jt	4.172.662.500	1,5jt	4.172.662.500	1,7jt	4.172.662.500	1,8jt	4.172.662.500	1,9jt	4.172.662.500	9,3 juta	21.657.102.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata daerah	produk		3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	675.110.000	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	1.468.167.292	3 Objek yang dipublikasikan 5 Media Promosi	8.015.946.460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dibina2. Jumlah Sumber Daya Pariwisata yang dibina	sub sektor		2 Sub Sektor155 Orang	2.395.063.200	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	2 Sub Sektor155 Orang	2.000.000.000	12 Sub Sektor 930 Orang	12.395.063.200	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pertanian																		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan produksi pertanian (komoditas palawija dan hortikultura)	%		10%	3.318.630.000	10%	2.254.375.000	10%	2.459.812.500	10%	2.678.293.750	10%	2.911.123.125	10%	2.986.123.125	60%	16.608.357.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi temak sapi	ekor																
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah produksi karkas sapi dari RPH (kg per tahun)	kg per tahun		0	780.184.995	0	980.000.000	0	1.285.000.000	0	1.500.000.000	0	1.750.000.000	0	2.000.000.000	0	8.295.184.995	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07	Program Penyiulahan Pertanian	Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	%	40%	60%	101.320.000	70%	700.000.000	80%	680.000.000	80%	700.000.000	90%	775.000.000	100%	850.000.000	100%	3.806.320.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Cakupan lokus atau lokasi surveillance hewan dan produk asal hewan (%)	%		75%	437.724.511	80%	1.322.000.000	85%	1.286.400.000	90%	1.253.680.000	95%	1.324.416.000	100%	1.374.416.000	100%	6.998.636.511	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	Perdagangan																		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
30.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				0	14.745.000.000	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000	0	15.445.000.000	0	15.145.000.000	0	15.845.000.000	0	91.180.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	%		0	-	0	100.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	0	400.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang berklasifikasi SNI	%		0	1.700.000.000	0	1.900.000.000	0	1.600.000.000	0	2.700.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	10.300.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%		0	11.960.680.000	0	12.060.680.000	0	12.110.680.000	0	12.160.680.000	0	12.210.680.000	0	12.160.680.000	0	72.664.080.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Rp		0	305.000.000	0	405.000.000	0	255.000.000	0	155.000.000	0	405.000.000	0	455.000.000	-	1.980.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Peningkatan UTTP yang terbit ukur	%		0	1.200.000.000	0	1.105.000.000	0	1.205.000.000	0	1.305.000.000	0	1.205.000.000	0	1.205.000.000	0	7.225.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
31	Perindustrian																		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
30.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
3.31.0 2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%		0	3.000.000.00	0	2.250.000.00	0	2.000.000.00	0	1.750.000.00	0	2.000.000.00	0	1.500.000.00	0	12.500.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
32	Transmigrasi																		Dinas Tenaga Kerja
0																			Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PENUNJANG																		
4	Pemerintahan																		Sekretariat Daerah
4.1	Sekretariat Daerah																		Sekretariat Daerah
4.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	100%	119.692.201.549	100%	145.969.398.681	100%	160.566.338.549	100%	176.622.972.404	100%	194.285.269.644	100%	213.713.796.609	100%	1.010.849.977.436	Sekretariat Daerah
4.01.0 2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Produk Hukum yang Ditetapkan; 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat; 3. Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan; 4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti.	%	100%	1) 100% 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	74.425.117.500	1) 100% 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	90.015.150.500	1) 100% 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	99.016.665.50	1) 100% 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	108.918.332.105	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	119.810.165.316	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	131.791.181.847	1) 100% 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	623.976.612.818	Sekretariat Daerah
4.01.0 3	Program Perencanaan Dan Pembangunan	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan; 3. Indeks Kepuasan Layanan PBJ; 4. Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	Indeks	100%	1) 60-70 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	1.510.634.00	1) 60-70 2) 60-70 3) 60-70 4) 100%	3.559.171.00	1) 70-80 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	3.915.088.10	1) 70-80 2) 70-80 3) 70-80 4) 100%	4.306.596.91	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	4.737.256.60	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	5.210.982.26	1) 80-90 2) 80-90 3) 80-90 4) 100%	23.239.728.872	Sekretariat Daerah

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja
4.2	Sekretariat DPRD																			
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	%	88%	88%	61.729.201.082	89%	64.396.574.072	90%	70.873.677.150	92%	76.854.060.583	92%	83.389.377.713	93%	90.533.118.492	93%	447.776.009.092	Sekretariat Dewan	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	80%	80%	59.294.528.620	81%	77.900.360.639	82%	101.253.251.710	82%	116.593.408.776	83%	134.480.927.533	83%	155.361.511.108	83%	644.883.988.385	Sekretariat Dewan	
5.01	Perencanaan																			
5.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Pembangunan Daerah
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Nilai Sakip Bapelitbangda	Kategori	B	B	11.895.635.300	B	13.165.198.830	B	14.481.718.713	B	15.929.890.584	B	17.522.879.643	B	19.275.167.607	B	92.270.490.677	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Pembangunan Daerah	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		90%	800.869.000	91%	880.955.900	92%	969.051.490	93%	1.065.956.639	94%	1.172.552.303	95%	1.289.807.533	95%	6.179.192.865	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Pembangunan Daerah	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	%		0	-	60%	1.305.000.000	65%	1.435.500.000	70%	1.579.050.000	75%	1.736.955.000	80%	1.910.650.500	80%	7.967.155.500	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Pembangunan Daerah	

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
5.02	Keuangan																		
5.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah																		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a				27.097.728.700	27.639.683.274	28.192.476.939	28.756.326.478	29.331.453.008	29.918.082.068	170.935.750.468								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat/Tidak Tepat		Tepat Waktu 26.141.440.415	Tepat Waktu 26.194.492.375	Tepat Waktu 26.718.382.223	Tepat Waktu 27.252.749.867	Tepat Waktu 27.797.804.864	Tepat Waktu 28.353.760.962	162.458.630.705								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Presentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	%		97%	100%	100%	100%	100%	100%									
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	%		977.365.000	996.912.300	1.016.850.546	1.037.187.557	1.057.931.308	1.110.827.873	6.197.074.584								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah																		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Terpenuhinya Penunjang Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	278.107.019.818								Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rp	755.878.193.409,76	808.820.000.000,00	9.717.449.560	866.100.569.850,00	6.945.807.950	926.807.946.342,50	7.640.388.745	991.638.236.019,63	8.404.427.620	1.061.004.332.645,81	9.244.870.381	1.135.096.104.816,18	10.169.357.420	5.789.467.189.674	52.122.301.676	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Realisasi Retribusi Daerah	Rp	92.616.063.190,00	107.890.236.500,00	111.531.061.230,00	115.842.667.654,60	124.047.682.587,69	128.478.663.955,85	135.741.088.075,05	723.531.400.003								
5.03	Kepegawaian																		

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
5.03	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia																		Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
5.03.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				91,80%	12.603.500.870	92,00%	14.018.219.527	92,40%	16.669.530.952	93,80%	17.860.597.536	94,20%	19.527.664.579	94,20%	21.006.150.886	94,20%	101.685.664.350	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
5.03.0 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penyelesaian Pelayanan Informasi Kepegawaian	%	97,84%	97,90%	1.819.093.000	98,00%	3.952.420.400	98,30%	5.914.819.000	98,60%	5.544.819.000	98,80%	5.934.819.000	99,00%	5.764.819.000	99,00%	28.930.789.400	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Persentase Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN	%	30,01%	30,06%		30,11%		30,16%		30,21%		30,26%		30,31%		30,31%		
		Persentase ASN yang memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi	%	21,98%	23,93%		25,38%		26,83%		28,28%		29,73%		31,18%		31,18%		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan																		
5.03	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia																		Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
5.04.0 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan yang sesuai dengan kualifikasinya	%	0	40,23%	4.171.680.000	42,23%	9.997.920.000	44,23%	10.247.920.000	45,23%	9.997.920.000	46,23%	9.997.920.000	46,23%	9.997.920.000	46,23%	54.411.280.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
5.05	Penelitian dan Pengembangan																		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
5.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rencana kelibangan yang diimplementasikan	%		100%	208.225.000	100%	458.095.000	100%	503.904.500	100%	554.294.950	100%	609.724.445	100%	670.696.890	100%	3.004.940.785	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
6.01	Pengawasan																		Inspektorat
6.01	Inspektorat																		Inspektorat
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	%	0%	100%	22.728.450.521	100%	24.888.598.162	100%	29.117.318.791	100%	29.348.783.754	100%	32.881.305.608	100%	33.570.286.600	100%	172.534.743.436	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	0%	100%	300.907.000	100%	317.712.420	100%	333.371.321	100%	351.485.828	100%	372.555.421	100%	397.271.862	100%	2.073.303.852	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Dilindaklanjuti	%	0%	100%	426.967.000	100%	594.586.500	100%	693.369.960	100%	725.104.758	100%	754.828.949	100%	786.582.107	100%	3.981.439.274	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7.01	Kecamatan Kota Batam																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					15.934.502.876		17.527.953.164		19.280.748.480		21.208.823.328		23.329.705.661		25.662.676.227		122.944.409.735	Kecamatan Kota Batam
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					3.751.830.000		4.127.013.000		4.539.714.300		4.993.685.730		5.493.054.303		6.042.359.733		28.947.657.066	Kecamatan Kota Batam
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					466.107.200		512.717.920		563.989.712		620.388.683		682.427.552		750.670.307		3.596.301.373	Kecamatan Kota Batam

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					1.011.160.000		1.112.276.000		1.223.503.600		1.345.853.960		1.480.438.356		1.628.483.292		7.801.716.208	Kecamatan Kota Batam
7.01	Kecamatan Galang																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					16.336.631.917		17.331.459.549		19.064.605.504		20.971.066.054		23.068.172.659		25.374.989.925		122.146.925.608	Kecamatan Galang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% RT/RW/LPM aktif; % usulan yang terealisasi	%		0	875.950.000	0	963.545.000	0	1.059.899.500	0	1.165.889.450	0	1.282.478.395	0	1.410.726.235	0	6.758.488.580	Kecamatan Galang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; %sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; % warga "berdaya"	%		0	17.124.591.100	0	18.837.050.210	0	20.720.755.231	0	22.792.830.754	0	25.072.113.830	0	27.579.325.212	0	132.126.666.337	Kecamatan Galang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%		0	855.515.000	0	941.066.500	0	1.035.173.150	0	1.138.690.465	0	1.252.559.512	0	1.377.815.463	0	6.600.820.089	Kecamatan Galang
7.01	Kecamatan Batu Aji																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					11.125.773.143		12.238.350.457		13.462.185.503		14.808.404.053		16.289.244.459		17.918.168.905		85.842.126.520	Kecamatan Batu Aji
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% RT/RW/LPM aktif; % usulan yang terakomodasi	%		100%	3.478.140.000	100%	3.825.954.000	100%	4.208.549.400	100%	4.629.404.340	100%	5.092.344.774	100%	5.601.579.251	100%	26.835.971.765	Kecamatan Batu Aji
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	%		100%	6.357.503.200	100%	6.993.253.520	100%	7.692.578.872	100%	8.461.836.759	100%	9.308.020.435	100%	10.238.822.479	100%	49.052.015.265	Kecamatan Batu Aji
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%		100%	348.536.000	100%	383.389.600	100%	421.728.560	100%	463.901.416	100%	510.291.558	100%	561.320.713	100%	2.689.167.847	Kecamatan Batu Aji

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
7.01	Kecamatan Sekupang																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot					17.858.948.275		19.644.843.103		21.609.327.413		23.770.260.154		26.147.286.169		28.762.014.786		137.792.679.900	Kecamatan Sekupang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% RT/RW/LPM aktif % usulan yang terealisasi	%		0%	3.460.589.900	0%	3.806.648.890	0%	4.187.313.779	0%	4.606.045.157	0%	5.066.649.673	0%	5.573.314.640	0%	26.700.562.038	Kecamatan Sekupang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan % sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan % warga berdaya	%		0%	12.080.715.600	0%	13.288.787.160	0%	14.617.665.876	0%	16.079.432.464	0%	17.687.375.710	0%	19.456.113.281	0%	93.210.090.091	Kecamatan Sekupang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		%		0%	847.520.000	0%	932.272.000	0%	1.025.499.200	0%	1.128.049.120	0%	1.240.854.032	0%	1.364.939.435	0%	6.539.133.787	Kecamatan Sekupang
7.01	Kecamatan Nongsa																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot				100%	12.393.466.582	100%	13.799.786.371	100%	15.179.765.008	100%	16.697.741.509	100%	18.367.515.660	100%	20.204.267.226	100%	96.642.542.356	Kecamatan Nongsa
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	% RT/RW/LPM aktif % usulan yang terealisasi	%		100%	1.819.180.000	100%	1.950.000.000	100%	2.145.000.000	100%	2.359.500.000	100%	2.595.450.000	100%	2.854.995.000	100%	13.724.125.000	Kecamatan Nongsa
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	% usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan % sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan % warga "berdaya"	%		100%	6.125.385.500	100%	9.847.900.000	100%	10.366.810.000	100%	10.914.317.000	100%	11.492.116.000	100%	12.102.013.265	100%	60.848.541.765	Kecamatan Nongsa
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	%		100%	972.250.000	100%	1.604.889.767	100%	1.695.217.505	100%	1.791.069.956	100%	1.892.824.186	100%	2.000.886.201	100%	9.957.137.615	Kecamatan Nongsa
7.01	Kecamatan Bengkong																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot				100%	10.860.527.024	100%	14.574.960.708	100%	15.309.698.989	100%	15.309.698.989	100%	15.309.698.989	100%	15.309.698.989	100%	86.674.283.688	Kecamatan Bengkong

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase RT/RW/LPM aktif; Persentas usulan yang terealisasi	%		100%	2.288.700.00	100%	3.377.700.00	100%	3.546.585.00	100%	3.546.585.00	100%	3.546.585.00	100%	3.546.585.00	100%	19.852.740.000	Kecamatan Bengkang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase Warga yang berdaya	%		10%	5.934.107.00	10%	9.934.000.00	10%	10.430.700.00	10%	10.430.700.00	10%	10.430.700.00	10%	10.430.700.00	60%	57.590.907.000	Kecamatan Bengkang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PERSENTASE PENYEDIAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DIFASILITASI SESUAI KEBUTUHAN	%		100%	972.700.000	100%	972.700.000	100%	1.021.335.00	100%	1.021.335.00	100%	1.021.335.00	100%	1.021.335.00	100%	6.030.740.000	Kecamatan Bengkang
7.01	Kecamatan Lubuk Baja																		
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	%		100%	13.748.206.862	100%	15.122.727.548	100%	16.635.000.303	100%	18.298.500.333	100%	20.128.350.367	100%	22.141.185.403	100%	106.073.970.817	Kecamatan Lubuk Baja
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rencana kegiatan pembangunan; isentif RT,RW,LPM	%		1 Tahun	1.696.387.50	1 Tahun	1.866.026.25	1 Tahun	2.052.628.875	1 Tahun	2.257.891.763	1 Tahun	2.483.680.939	1 Tahun	2.732.049.033	1 Tahun	13.088.664.359	Kecamatan Lubuk Baja
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan sarana dan persarana dasar, Jumlah RT, RW, LPM dan masyarakat yang aktif	%		10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	7.264.153.90	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	8.719.339.05	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	9.591.272.95	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	10.550.400.251	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	11.605.440.276	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	12.765.984.303	10%, RT=.... RW=.... LPM=....Masyarakat 100 Orang	60.496.590.734	Kecamatan Lubuk Baja
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Event / kegiatan keagamaan, seni dan budaya	Event		MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.103.370.00	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.213.707.00	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.291.800.40	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.375.539.275	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.465.379.979	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.561.819.093	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	8.011.615.747	Kecamatan Lubuk Baja

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		Kinerja
7.01	Kecamatan Batu Ampar																			
7.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	%		100%	11.843.582.047	100%	13.027.940.252	100%	14.330.734.277	100%	15.763.807.705	100%	17.340.188.475	100%	19.074.207.323	100%	91.380.460.078	Kecamatan Batu Ampar	
7.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rencana kegiatan pembangunan, identifikasi RT, RW, LPM	%		1 Tahun	1.495.955.000	1 Tahun	1.645.550.500	1 Tahun	1.810.105.550	1 Tahun	1.991.116.105	1 Tahun	2.190.227.716	1 Tahun	2.409.250.487	1 Tahun	11.542.205.358	Kecamatan Batu Ampar	
7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pembangunan sarana dan prasarana dasar, Jumlah RT, RW, LPM dan masyarakat yang aktif	%		10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	4.621.464.321	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	5.083.610.753	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	5.591.971.828	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	6.151.169.011	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	6.766.285.912	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	7.442.914.504	10%, RT=... RW=... LPM=...Masyarakat 100 Orang	35.657.416.330	Kecamatan Batu Ampar	
7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Event/ kegiatan keagamaan, seni dan budaya	Event		MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	779.917.000	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	857.908.700	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	943.699.570	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.038.069.527	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.141.876.480	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	1.256.064.128	MTQ/STQ, Safari Ramadhan, HUT RI, Jambore PKK, 1 Muharram, Silaturahmi	6.017.535.404	Kecamatan Batu Ampar	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik																			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	%	0	100%	7.387.345.864	100%	8.395.617.022	100%	8.888.160.258	100%	11.002.858.819	100%	11.487.738.455	100%	12.036.149.074	100%	59.197.869.492	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.0 2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan	%	0	100%	376.136.500	100%	759.271.500	100%	1.270.000.000	100%	1.570.000.000	100%	1.300.000.000	100%	1.900.000.000	100%	7.175.408.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Kode / Bidang Urusan Pemerintahan / PD Pengampu / dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Tahun 2021		Target Tahun 2022		Target Tahun 2023		Target Tahun 2024		Target Tahun 2025		Target Tahun 2026		Kondisi Akhir Tahun Rencana (2026)		PD Penanggung Jawab
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
		Persentase peningkatan pengetahuan peserta di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	0	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	% rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	%	0%	100%	1.906.846.544	100%	2.224.870.044	100%	17.998.364.200	100%	26.342.351.400	100%	2.143.132.052	100%	2.143.132.052	100%	52.758.696.292	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% rumusan kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan	%	0	100%	391.768.000	100%	2.611.622.500	100%	3.133.947.000	100%	3.760.736.400	100%	4.512.883.680	100%	5.415.460.416	100%	19.826.417.996	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	% rumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	%	0	100%	218.323.000	100%	602.493.000	100%	662.742.300	100%	729.016.530	100%	801.918.183	100%	882.110.001	100%	3.896.603.014	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik yang tertangani	kasus	0	45	200.495.000	50	923.143.500	45	2.178.772.200	60	2.503.749.420	22	2.882.644.362	32	3.325.132.798	254	12.013.937.280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kinerja diukur melalui indikator kinerja pembangunan daerah. Dalam pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara berjenjang, jenjang indikator yang tertinggi adalah Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berada di bawahnya, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan hingga Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan merupakan indikator capaian akhir atau tujuan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJMD ini, IKU sebagai indikator tujuan pembangunan Kota Batam, tertuang dalam Bab V dokumen ini. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator ketercapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Batam, sebagaimana telah tertuang dalam bab-bab sebelumnya. Sementara itu, Indikator Program dan Kegiatan (serta sub kegiatan) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kota Batam. Mengingat dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan keseluruhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka cakupan indikator kinerja yang dituangkan dalam Bab VIII RPJMD ini meliputi IKU dan IKD saja. Indikator Program yang tertuang di Bab VII serta indikator kinerja kegiatan (dan sub kegiatan) akan tertuang secara terperinci dalam dokumen Rencana Strategis setiap perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah.

Penetapan IKU dan IKD serta target pencapaiannya menjadi sangat penting dalam rangka pengendalian dan evaluasi proses pembangunan apakah sudah berada di arah yang sesuai dan tepat seperti yang telah direncanakan. Evaluasi terhadap IKU dan IKD juga akan mengarahkan penyelenggara pemerintahan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pembangunan di masa mendatang.

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Pencapaian IKU dan IKD juga menjadi jaminan aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 8.1 dan Tabel 8.2 memperlihatkan IKU dan IKD serta nilai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam periode 2021-2026. Mengingat dokumen ini adalah Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 yang disusun tahun 2021, maka catatan tentang indikator kinerja Pemerintahan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama maupun indikator kinerja daerah yang disusun berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam terpilih untuk periode tahun 2021-2026.
2. Pada IKU (Tabel 8.1), Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan dan Indeks Infrastruktur Wilayah *Hinterland* ditetapkan sebagai Indikator baru yang diturunkan dari rumusan indikator indeks infrastruktur wilayah. Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan digunakan sebagai indikator untuk tujuan mewujudkan infrastruktur kota yang berkualitas dan serasi dengan tata ruang Kota Batam serta berwawasan lingkungan. Indikator Indeks Infrastruktur Wilayah *Hinterland* untuk tujuan Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Memperluas Akses *Hinterland* pada wilayah Kota Batam.
3. Dalam upaya mewujudkan misi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, maka terdapat dua aspek yang dijadikan tujuan dalam RPJMD yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pemerataan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks gini digunakan sebagai indikator tujuan dalam upaya pencapaian misi tersebut. Indeks gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang mana menunjukkan bahwa walikota Batam *concern* dalam pemerataan pembangunan, selain terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, beberapa sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD adalah Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah, Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah, Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah, dan Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah. Peningkatan ekonomi kreatif daerah akan menjadi sasaran Kota Batam di masa mendatang dengan perencanaan awal yaitu pembentukan dan pertumbuhan Kawasan/klaster ekonomi kreatif, sehingga masih belum ada data terkait jumlah Kawasan/klaster ekonomi kreatif tahun 2020. Namun, mulai tahun 2021 jumlah Kawasan/klaster ekonomi kreatif akan terus menjadi perhatian. Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan Kota Batam dapat merencanakan perhitungan PDRB Ekonomi Kreatif sebagai upaya pemerataan pembangunan dengan penurunan tingkat ketimpangan masyarakat.
5. Dalam tujuan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah digunakan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai IKU, sedangkan indikator sasaran pembangunan daerah (IKD) menggunakan Opini BPK, Nilai LPPD, Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD, dan Tingkat Maturitas SPIP.
6. Dalam Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase penduduk miskin sebagai IKU. Sasaran yang diagendakan dalam perwujudan tujuan tersebut adalah Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta literasi masyarakat, aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, peran gender dan pemuda dalam pembangunan, dan Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Maka, IKD yang digunakan dalam merealisasikan sasaran tersebut dicantumkan pada Tabel 8.1.
7. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan sebagai IKD dalam upaya penurunan jumlah pengangguran yang dapat berpengaruh terhadap

tingkat kemiskinan. Penurunan jumlah pengangguran merupakan representasi dari terbentuknya SDM yang produktif dan berdaya saing.

8. Data IKU dan IKD tahun 2020 merupakan realisasi/capaian indikator kinerja tahun yang sudah berlalu, yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam menetapkan target kinerja 2021-2026.
9. Nilai indikator kinerja tahun 2021 hingga 2026 adalah target capaian kinerja di periode RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026.

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Batam Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persen	-2,55	2,65	3,21	4,01	5,02	5,54	6,02	6,02
2	Indeks Gini	Indeks	0,32	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
3	Indeks Infrastruktur Wilayah Perkotaan	Indeks	59,24	59,43	62,50	65,03	68,05	70,63	73,46	73,46
4	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	Indeks	81,11	81,15	81,46	81,74	81,89	82,00	82,10	82,10
5	Persentase penduduk miskin	Persen	4,75	4,79	4,74	4,69	4,68	4,66	4,65	4,65
6	Indeks Infrastruktur Wilayah Hinterland	Indeks	56,25	56,66	59,56	61,01	62,21	63,75	65,34	65,34
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	52 (CC)	57 (CC)	62 (B)	68 (B)	72 (BB)	77 (BB)	80 (A)	80 (A)

Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Indikator Sasaran Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Persen	-14,73%	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%	7,12%
1.2	Pertumbuhan sektor pendukung Pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum)	Persen	-45,49%	0,12%	2,45%	3,70%	4,70%	6,84%	7,41%	7,41%
1.3	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah	Persen	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%
2	Pemerataan Ekonomi									
2.1	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Persen	1,00%	1,00%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%	2,50%	2,50%
2.2	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan UMKM	Persen	1,00%	1,00%	1,99%	2,99%	3,98%	5,17%	0,80%	15,93%
2.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,20	92,50	92,30	92,35	92,40	92,45	92,50	92,50
2.4	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	Persen	72,07%	74,07%	76,07%	78,07%	80,07%	82,07%	84,07%	84,07%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pembangunan Manusia									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,7369	0,7376	0,7404	0,7422	0,7439	0,7457	0,7475	0,7475
1.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Skor	7	7	7	8	9	9	10	10
1.3	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8205	0,8112	0,8219	0,8226	0,8233	0,824	0,8247	0,8247
1.4	Tingkat Daya Beli (Purchasing Power Parity)	Nilai (Rp.)	18095000	18347000	19196000	19868000	20365000	20874000	21396000	21396000
1.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,42	94,42	94,44	94,46	94,48	94,50	94,52	94,52
1.6	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Persen	6,64%	6,64%	7,64%	8,64%	9,64%	10,64%	11,64%	11,64%
1.7	Persentase Penurunan Konflik dan Pelanggaran	Persen	0,25	20,00%	16,70%	14,30%	12,50%	11,10%	10,00%	10,00%
2	Pengendalian Kemiskinan									
2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,79%	10,50%	10,00%	9,75%	9,65%	9,60%	9,55%	9,55%
2.2	Persentase Penurunan PMKS	Persen	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,45%	1,40%	1,35%	1,35%
	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Infrastruktur Wilayah Perkotaan									

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	Persentase kesesuaian pertimbangan teknis tata ruang	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2	Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Batam	Indeks	69	69	69,5	70	70,5	71	72	72
1.3	Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	55,30%	55,50%	59,25%	61,75%	64,50%	67,25%	71,25%	71,25%
1.4	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persen	48,40%	48,40%	53,26%	58,14%	63,02%	67,90%	72,78%	72,78%
1.5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan perkotaan	Persen	55,00%	55,50%	60,00%	63,50%	68,50%	72,00%	75,50%	75,50%
1.6	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Permukiman Perkotaan	Persen	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
2	Infrastruktur Wilayah Hinterland									
2.1	Persentase Pemenuhan infrastruktur permukiman wilayah	Persen	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%

No	Indikator Kinerja Sasaran (IKD)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	hinterland									
2.2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah hinterland	Persen	80,00%	81,00%	89,00%	92,00%	94,00%	97,00%	100,00%	100,00%
2.3	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	Persen	27,50%	27,86%	29,55%	31,38%	33,37%	35,51%	37,80%	37,80%
	ASPEK TATA KELOLA PEMERINTAHAN									
1	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Nilai Tata Kelola Kearsipan OPD	Skor	53 (Cukup)	55 (Cukup)	58 (Cukup)	60 (Cukup)	62 (Cukup)	64 (Cukup)	65 (Baik)	65 (Baik)
4	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	-8,33%	11,75%	5,19%	5,43%	7,04%	5,29%	6,33%	41,02%
6	Indeks SPBE	Indeks	1,6	1,69	2,45	3,01	3,23	3,83	4,79	4,79
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,61	82	88,31	89	90	91	92	92

BAB IX

PENUTUP

Sebagai upaya untuk menjembatani kekosongan hukum pada masa periode Kepala Daerah dengan periode akhir RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada sisa periode tahun 2024-2026, khususnya bagi Perangkat Daerah, maka diatur dalam pedoman Transisi dan Kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

9.1 Pedoman Transisi

Guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dimasa transisi, maka dirumuskan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru menetapkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Kepala Daerah (serentak) bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maka diperlukan kepastian hukum dan acuan terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi tersebut sampai dengan adanya ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa setelah tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD yang baru.
2. Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2024, penyusunan RKPD dan APBD tetap mengacu/melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan mendasarkan pada RPJPD Kota Batam serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan secara teknis, tata cara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Batam serta pemangku kepentingan lainnya dalam

melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Walikota Batam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2022 akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini karena bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Baru kemudian, untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu sepenuhnya pada RPJMD ini;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Batam agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) yang mengampu fungsi perencanaan daerah dibawah kepemimpinan Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kota Batam dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021 – 2026 sesuai tahapan dan berkelanjutan (*sustainable*).

7. Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPJMD maka tetap dilaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.